LKPJ TAHUN 2024

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)

AKHIR TAHUN ANGGARAN 2024



PEMERINTAH
KABUPATEN KEDIRI
TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum waroh matullohi wabarokatuh.

Alhamdulillahi rabbil 'alamin, puji syukur kehadirat Allah Swt., Tuhan Yang Maha Kuasa yang senantiasa memberikan hidayah, taufiq dan kekuatan serta kesehatan kepada kita semua dalam menjalankan tugas dinas kita sehari-hari, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Kediri Akhir Tahun Anggaran 2024.

Penyusunan LKPJ oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah danPeraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), mengamanatkan bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Melalui LKPJ diharapkan DPRD Kabupaten Kediri memiliki informasi secara lengkap sebagai bahan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang dapat mencerminkan kinerja Kepala Daerah Tahun 2024, sekaligus dapat menjadi bahan informasi bagi berbagai pihak untuk melihat dan mengukur pelaksanaan kinerja Pemerintah Kabupaten Kediri Tahun 2024.

Perlu diketahui bahwa ruang lingkup LKPJ ini ada dua. *Pertama,* hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

dilaksanakan oleh pemerintah daerah. *Kedua,* hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa masih terdapat kendala dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, oleh karena itu kami selaku Kepala Daerah bersama jajaran Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Kediri menyadari segala keterbatasan kemampuan dalam melaksanakan urusan pemerintahan pada tahun 2024 yang perlu terus disempurnakan dan tentunya membutuhkan kerja sama, sinergi, kalaborasi dengan seluruh stakeholders dan peran aktif masyarakat, sehingga urusan-urusan pemerintahan dapat berjalan dengan baik guna terwujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kediri.

Demikian LKPJ ini disusun untuk kami sampaikan kepada DPRD Kabupaten Kediri. Semoga data yang kami sajikan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk menerima LKPJ Bupati Kediri Tahun 2024. Kritik dan saran yang membangun kami terima dengan sangat terbuka, dalam rangka peningkatan kinerja pemerintahan daerah guna mewujudkan Kabupaten Kediri berbudaya, maju dan sejahtera.

Wassalamu’alaikum warah matullahi wabarakatuh,

Kediri, 17 Maret 2025

Ditandatangani secara elektronik oleh:

BUPATI KEDIRI

Hanindhito Himawan Pramana

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

DAFTAR ISI

JUDUL I
KATA PENGANTAR I
DAFTAR ISI III
DAFTAR TABEL V
DAFTAR GAMBAR VII
BAB I 1
PENDAHULUAN 1
1.1. Dasar Hukum 1
1.2. Visi Misi Kepala Daerah 2
1.3. Data Umum Daerah 3
a. Data Geografis Wilayah 3
b. `Jumlah Penduduk 5
c. Laju Pertumbuhan Penduduk 6
d. Jumlah PNS 6
e. Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan 9
f. Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja 9
g. Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan 10
1.4. Prestasi Pemerintah Kabupaten Kediri 11
BAB II 16
PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 16
2.1. Kondisi Umum dan Kebijakan Perubahan Pendapatan Daerah 16
2.1.1. Permasalahan Utama Perubahan Pendapatan Daerah 16
2.1.2. Permasalahan Utama Perubahan Pendapatan Daerah 16
2.1.3. Kebijakan Umum Perubahan Pendapatan Daerah 17
2.2.1. Kondisi Umum Perubahan Belanja Daerah 19
2.2.2. Permasalahan Utama Perubahan Belanja Daerah 29
2.2.3. Kebijakan Umum Perubahan Belanja Daerah 30
2.2.4. Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Belanja Daerah 30
2.2. Kondisi Dan Kebijakan Perubahan Anggaran Pembiayaan 31
2.3.1. Kondisi Umum Perubahan Pembiayaan 31
2.3.2. Permasalahan Utama Perubahan Pembiayaan 32
2.3.3. Kebijakan Umum Perubahan Pembiayaan 32

BAB III 33
HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH 33
3.1. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan 33
3.1.1. Capaian Kinerja Program sesuai dengan Target Kinerja yang Ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja 33
3.1.2. Perbandingan Target Dan Realisasi Indikator Kinerja 36
3.2. Analisa Efisiensi Sumber Daya 58
3.3. Akuntabilitas Kinerja 78
3.3.1 Analisa Akuntabilitas Kinerja 79
3.3.2 Capaian Kinerja Keluaran Kegiatan dan Masalah yang Dihadapi serta Solusi Pemecahannya 98
3.4. Kebijakan Strategis yang Ditetapkan 264
3.5. Prioritas Pembangunan Kabupaten Kediri 274
3.6. Tindak lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya 299
BAB IV 433
CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN 433
4.1. Urusan Pemerintahan yang Ditugas-Pembantuan 433
4.1.1. Identifikasi Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan yang diterima dari pemerintah tingkat atasnya dan Hambatan/Permasalahan dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Upaya Penyelesaian sebagai berikut: 433
BAB V 485
P E N U T U P 485

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Data Jumlah Penduduk Kabupaten Kediri Menurut Jenis Kelamin Tahun 2022 s.d 2024 6
Tabel 2 Laju Pertumbuhan Tahun 2022 s.d 2024 6
Tabel 3 Jumlah Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Kediri Munurut 7
Tabel 4 Rincian Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Realisasi 9
Tabel 5 Rincian Belanja Menurut Jenis Belanja Tahun Anggaran 2024 dan 10
Tabel 6 Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan Tahun Anggaran 2024 11
Tabel 7 Prestasi Pemerintah Kabupaten Kediri selama Tahun 2024 11
Tabel 8 Uraian Perubahan Pendapatan Daerah Sebelum dan Sesudah Perubahan Tahun Anggaran 2024 17
Tabel 9 Belanja Daerah Sesuai Pembagian Urusan Pemerintahan Tahun 2024 22
Tabel 10 Ringkasan Belanja Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 30
Tabel 11 Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 31
Tabel 12 Skala Kategori Capaian Kinerja 35
Tabel 13 Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Indikator Kinerja Utama 36
Tabel 14 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024 Dengan 44
Tabel 15 Perbandingan Realisasi Tahun 2024 Dengan Target Akhir Rpjmd Tahun 2021 – 2026 53
Tabel 16 Rentang Kategori Efisiensi 59
Tabel 17 Perbandingan Kinerja Dan Anggaran Pemerintah Kabupaten Kediri Tahun 2024 60
Tabel 18 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama Dengan Capaian Provinsi Dan Nasional Pemerintah Kabupaten Kediri Tahun 2024 66
Tabel 19 Matrikulasi Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Dan Kegagalan Kinerja 79
Tabel 20 Perjanjian Kinerja Perubahan Bupati Kediri Tahun 2024 99
Tabel 21 Perbandingan Pertumbuhan Investasi Daerah 183
Tabel 22 Perhitungan Metode 1 atas Perkembangan data PDRB Sektor Pertanian 195
Tabel 23 Pengukuran Hasil Nilai Tukar Petani Kabupaten Kediri Tahun 2024 199
Tabel 24 Pengukuran Hasil Nilai Tukar Petani Kabupaten Kediri Tahun 2024 209
Tabel 25 Pengukuran Hasil 219
Tabel 26 Strategi dan Arah Kebijakan Kabupaten Kediri Tahun 2021-2026 266

Tabel 27 Tujuan Dan Sasaran Masing-Masing Misi 275
Tabel 28 Penjelasan Program Prioritas Pembangunan Daerah 281
Tabel 29 Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya 299

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Peta Administrasi Kabupaten Kediri 5
Gambar 2 Rilis Grafis BPS pada Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Kediri Tahun 2024 102
Gambar 3 Rilis Grafis BPS pada Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Kediri Tahun 2024 103
Gambar 4 IPM Jawa Timur menurut Kab/Kota dan Status Pembangunan Manusia.....104
Gambar 5 Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Jawa Timur 104
Gambar 6 Rilis BPS pada Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Kediri Tahun 2024 108
Gambar 7 Rilis BPS pada Umur Harapan Hidup di Kabupaten Kediri Tahun 2024 118
Gambar 8 Rilis BPS pada Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Kediri Tahun 2024 124
Gambar 9 Perbandingan Angka Kemiskinan Kabupaten Kediri Tahun 2003-2024.....130
Gambar 10 Penjelasan Pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia.....140
Gambar 11 Hasil Evaluasi Sementara Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kediri Tahun 2024 147
Gambar 12 Surat Laporan Hasil Evaluasi dari Kementerian PANRB 150
Gambar 13 Perkembangan Nilai SAKIP Pemerintah Kabupaten Kediri Tahun 2018-2024 151
Gambar 14 Penjelasan Mengenai Indeks Kepuasan Masyarakat per Unsur 154
Gambar 15 Perkembangan Nilai IKM Pemerintah Kabupaten Kediri Tahun 2021-2024 ...154
Gambar 16 Perkembangan Indeks Professionalitas ASN Kabupaten Kediri Tahun 2021-2024 167
Gambar 17 Indeks SPBE Kabupaten Kediri.....174
Gambar 18 Rekapitulasi Pengukuran Pertumbuhan Investasi Tahun 2024.....181
Gambar 19 Pengeluaran Per Kapta Riil.....187
Gambar 20 Foto Pembangunan Bandara dan Masterplan Bandara Dhoho Kabupaten Kediri 195
Gambar 221 Data PDRB Pertanian Kehutanan dan Perikanan Kabupaten Kediri.....195
Gambar 22 Peraga Penjelasan Permasalahan Hasil Analisa dari Tim Penyusun NTP Kabupaten Kediri.....207
Gambar 23 Tangkapan Layar e-Sukma Jatim Nilai IKM Unit Layanan Perhubungan.....233

Gambar 24 Tingkat Penghunian Kamar (TPK) dan Rata-rata Lama Menginap Tamu (RLMT) dalam Hotel Berbintang di Kabupaten Kediri.....236
Gambar 25 Profil Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Kediri Tahun 2024.....243
Gambar 26 Surat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur tentang Nilai IRB Tahun 2024.....250
Gambar 27 Bupati Kediri Launcing Potensi Seni dan Budaya Kabupaten Kediri.....255
Gambar 28 Perbandingan Jumlah Desa Mandiri dan Desa Maju Tahun 2024 262

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Dasar Hukum

Kabupaten Kediri adalah daerah otonom sebagaimana di maksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi DjawaTimur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang NR 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45).

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diatur tentang kewajiban Kepala Daerah untuk menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Dengan demikian Bupati Kediri diwajibkan menyampaikan LKPJ Tahun 2024 kepada DPRD Kabupaten Kediri paling lambat pada tanggal 31 Maret 2025.

1.2. Visi Misi Kepala Daerah

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, diperlukan adanya visi dan misi yang merupakan arahan bagi penyusunan program dan kegiatan selama lima tahun. Visi menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (desired future) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun. Visi dilaksanakan melalui sejumlah misi yang merupakan serangkaian upaya yang dilakukan untuk mencapai visi yang telah ditetapkan. Dalam konteks pelaksanaan pembangunan, suatu pemerintahan membutuhkan adanya visi dan misi sebagai panduan bagi penyusunan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih hasil Pilkada 9 Desember 2020. Visi menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (desired future) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun.

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Kediri, maka Visi yang hendak dicapai dalam periode 2021-2026 adalah :

"Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Kediri yang Maju, Berkarakter Nasionalis-Religius, serta Sejahtera Berdasarkan Ekonomi Kerakyatan yang Didukung Birokrasi yang Melayani"

Memperhatikan visi serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, maka dalam upaya mewujudkan Visi pembangunan Kabupaten Kediri Tahun 2021-2026, Misi pembangunan sebagai berikut :

1. Pengembangan Sumber Daya Manusia yang Berkarakter Nasionalis-Religius;
2. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik;

3. Pengembangan Ekonomi Kerakyatan dan Peningkatan Investasi Daerah;
4. Revitalisasi Pertanian untuk Ketahanan dan Swasembada Pangan;
5. Peningkatan Infrastruktur dan Konektivitas antar Wilayah;
6. Optimalisasi Kepariwisataan berbasis Kearifan Lokal;
7. Optimalisasi Tata Kelola Lingkungan Hidup, Sumber Daya Alam dan Mitigasi Bencana;
8. Pengembangan Seni Budaya, Olahraga dan Kreativitas Pemuda; dan
9. Perwujudan Kemandirian Desa untuk Kesejahteraan Masyarakat.

1.3. Data Umum Daerah

a. Data Geografis Wilayah

Sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor: 100.1-1-6117 Tahun 2022 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, wilayah Kabupaten Kediri secara geografis terletak pada koordinat antara 111o 47′ 05″ s.d. 112o 18′ 20″ Bujur Timur dan 7o 36′ 12″ s.d. 8o 0′ 32″ Lintang Selatan, dengan luas wilayah kurang lebih 1.523,563 km2.

Berdasarkan topografinya Kabupaten Kediri terdiri dari dataran rendah dan pegunungan yang dilalui aliran sungai Brantas yang membelah dari selatan ke utara dengan ketinggian rata-rata 81 meter di atas permukaan laut. Berdasarkan jenis tanahnya, Kabupaten Kediri dibagi menjadi 5 (lima) golongan, yaitu :

- Regosol coklat kekelabuan seluas 77.397 Ha, merupakan jenis tanah yang Sebagian besar ada di wilayah Kecamatan Kepung, Puncu, Ngancar, Plosoklaten, Wates, Gurah, Pare, Kandangan, Kandat, Ringinrejo, Kras, Papar, Purwoasri, Pagu, Plemahan, Kunjang, dan Gampengrejo.
- Aluvial kelabu coklat seluas 28,178 Ha, merupakan jenis tanah yang

dijumpai di Kecamatan Ngadiluwih, Kras, Semen, Mojo, Grogol, Banyakan, Papar, Tarokan, dan Kandangan.

- Andosol coklat kuning, regosol coklat kuning, litosol seluas 4.408 Ha, dijumpai di daerah ketinggian di atas 1.000 dpl seperti di Kecamatan Kandangan, Grogol, Semen, dan Mojo.
- Mediteran coklat merah, grumusol kelabu seluas 13.556 Ha terdapat di Kecamatan Mojo, Semen, Grogol, Banyakan, Tarokan, Plemahan, Pare, dan Kunjang.
- Litosol coklat kemerahan seluas 15.066 Ha terdapat di Kecamatan Semen, Mojo, Grogol, Banyakan, Tarokan, dan Kandangan.

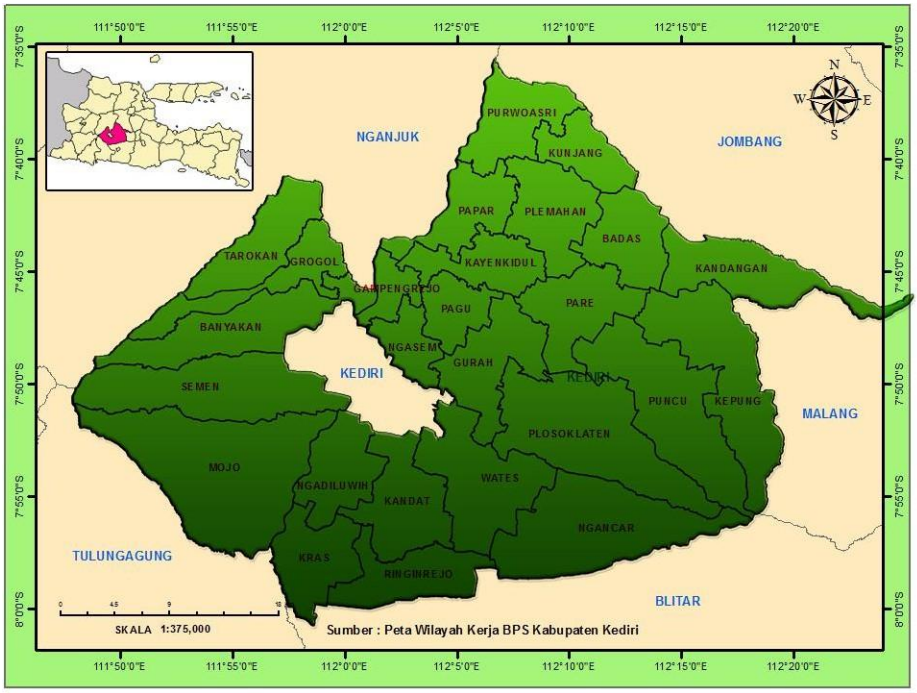
Pola penggunaan lahan di Kabupaten Kediri didominasi untuk lahan pertanian seluas 98.208 Ha atau sekitar 70,85% dari total luas wilayah dimana luas lahan pertanian tersebut terdiri dari lahan sawah seluas 51.968 Ha dan lahan bukan sawah seluas 86.637 Ha. Penggunaan lahan lainnya adalah guna lahan bukan pertanian seluas 40.397 Ha atau sebesar 29,15% dari total luas wilayah.

Batas-batas administratif wilayah Kabupaten Kediri adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kabupaten Jombang dan Kabupaten Nganjuk;
- Sebelah Timur : Kabupaten Malang dan Kabupaten Jombang;
- Sebelah Selatan : Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Blitar;
- Sebelah Barat : Kabupaten Nganjuk dan Kabupaten Tulungagung.

Peta administrasi Kabupaten Kediri, seperti pada gambar di bawah ini :

Gambar 1 Peta Administrasi Kabupaten Kediri



Sumber : BPS Kabupaten Kediri

b. `Jumlah Penduduk

Berdasarkan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang digunakan Kementerian Dalam Negeri dalam melayani administrasi kependudukan masyarakat didapatkan pada tahun 2024 jumlah penduduk Kabupaten Kediri sebanyak 1.691.976 jiwa terdiri dari laki-laki 853.689 (50,46%) dan perempuan 838.287 (49,54%). Hal tersebut berarti sex ratio Kabupaten Kediri tahun 2024 adalah 101,84, hal ini menunjukkan jumlah penduduk laki-laki lebih besar dibandingkan perempuan. Perkembangan jumlah penduduk selama tiga tahun terakhir sebagaimana tabel berikut :

Tabel 1 Data Jumlah Penduduk Kabupaten Kediri Menurut Jenis Kelamin Tahun 2022 s.d 2024

NO	JENIS KELAMIN	TAHUN		
		2022	2023	2024
1	Laki-laki	845,526	849,958	853,689
2	Perempuan	829,292	834,496	838,287
J u m l a h		1,674,818	1,684,454	1,691,976
Sex Ratio		102.0	101.9	101.8

Sumber : Data Agregat Kependudukan Semester 2 Tahun 2024 Kabupaten Kediri
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri

c. Laju Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan penduduk merupakan angka yang menunjukkan tingkat pertambahan penduduk per tahun dalam jangka waktu tertentu. Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Kediri dalam tiga tahun terakhir dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 2 Laju Pertumbuhan Tahun 2022 s.d 2024

No	Uraian	Tahun		
		2022	2023	2024
1.	Jumlah penduduk	1.656.020	1.684.454	1.691.976
2.	Laju Pertumbuhan Penduduk	0,71	0,79	0,88

Sumber : Jumlah Penduduk dari SIAK Kementerian Dalam Negeri

d. Jumlah PNS

Jumlah ASN Kabupaten Kediri menurut sumber data dari Badan Kepegawaian Daerah pada akhir tahun 2024 adalah 9.233. Berikut adalah gambaran ASN Kabupaten Kediri Menurut Perangkat Daerah :

Tabel 3 Jumlah Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Kediri Munurut Perangkat Daerah Tahun 2024

No	Satker	Eselon	Non Eselon & PPPK				Jumlah
			JF	Staf	Sekdes	PPPK	
1	Sekretariat Daerah	17	22	105		1	145
2	Sekretariat Dewan	6	8	15			29
3	Inspektorat	6	36	6			48
4	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	8	9	14			31
5	Badan Pendapatan Daerah	10	4	48			62
6	Badan Kepegawaian Daerah	6	19	13		3	41
7	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	10	2	32			44
8	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	4	8	8			20
9	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	7	4	7			18
10	Dinas Pendidikan	13	3382	174		2104	5673
11	Dinas Kesehatan	19	1013	100		340	1472
12	Dinas PUPR	15	15	64			94
13	Dinas PERKIM	6	5	20			31
14	Satpol PP	12	8	30		18	68
15	B P B D	3		7		3	13
16	Dinas Sosial	5	8	9			22
17	Dinas Tenaga Kerja	8	5	5			18
18	Dinas P2KBP3A	7	2	10			19
19	Dinas KPP	7	25	26		6	64
20	Dinas Lingkungan Hidup	7	6	60			73
21	Dinas Dukcapil	7	5	13			25
22	Dinas PMPD	8	3	16			27
23	Dinas Perhubungan	16	11	11			38
24	Dinas Kominfo	7	4	16		2	29
25	Dinas Kopusmik	6	6	11			23

26	Dinas PMPTSP	3	10	6			19
27	Dinas Parbud	7	7	24			38
28	Dinas Kearsipan & Perpust.	4	4	8			16
29	Dinas Perikanan	6	3	11			20
30	Dinas Peratabun	5	95	21		76	197
31	Dinas Perdagangan	8	11	36		3	58
32	Kecamatan Semen	5		5	1		11
33	Kecamatan Mojo	5		2	4		11
34	Kecamatan Kras	6		6	4		16
35	Kecamatan Ngadiluwih	8		4	2		14
36	Kecamatan Kandat	7		4			11
37	Kecamatan Wates	6		7	5		18
38	Kecamatan Ngancar	7		5	1		13
39	Kecamatan Puncu	7		2	6		15
40	Kecamatan Plosoklaten	5		4	3		12
41	Kecamatan Gurah	7		4	2		13
42	Kecamatan Pagu	5		4	4		13
43	Kecamatan Gampengrejo	7		4			11
44	Kecamatan Grogol	5		6			11
45	Kecamatan Papar	8		4	3		15
46	Kecamatan Purwoasri	7		3	7		17
47	Kecamatan Plemahan	6		7			13
48	Kecamatan Pare	11		6	1		18
49	Kecamatan Kepung	7		3	4		14
50	Kecamatan Kandangan	7		7	5		19
51	Kecamatan Tarokan	7		4			11
52	Kecamatan Kunjang	8		6	2		16
53	Kecamatan Banyakan	7		9	1		17
54	Kecamatan Ringinrejo	6		4			10

55	Kecamatan Kayenkidul	4		4	1		9
56	Kecamatan Ngasem	8		4			12
57	Kecamatan Badas	6		3	3		12
58	R S U D	7	291	72		36	406
TOTAL		**432**	**5031**	**1119**	**59**	**2592**	**9233**
sumber : Data Kepegawaian BKD Kabupaten Kediri, 2024							

e. Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan

Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp 3.309.915.518.337,00 dan terealisasi sebesar Rp 3.322.211.833.313,16 atau 100,37% (*Unaudited*). Rincian Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

Tabel 4 Rincian Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023

No	Uraian	TA 2024		%	Realisasi TA 2023 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1.	Pendapatan Asli Daerah	692.872.682.301,00	712.442.688.975,16	102,82	636.075.970.326,88
2.	Pendapatan Transfer	2.617.042.836.036,00	2.609.769.144.338,00	99,72	2.526.670.467.437,00
3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0,00	0,00	0,00	721.452.668,00
Jumlah		**3.309.915.518.337,00**	**3.322.211.833.313,16**	**100,37**	**3.163.467.890.431,88**

Sumber: BPKAD (Konsolidasi LRA s.d tanggal 28 Februari 2025 – Unaudited)

f. Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja

Sebagai penerapan dari kebijakan belanja daerah, maka pada TA 2024 Belanja Daerah Kabupaten Kediri dialokasikan sebesar Rp 3.720.453.434.912,00

dan direalisasikan sebesar Rp 3.496.881.425.582,82 atau 93,99 % dari anggaran.

Rincian Belanja menurut jenis belanja adalah sebagai berikut:

Tabel 5 Rincian Belanja Menurut Jenis Belanja Tahun Anggaran 2024 dan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2023

No.	Uraian	TA 2024			TA 2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
a	Belanja Operasi	2.632.294.162.368,00	2.473.605.563.654,91	93,97%	2.196.425.893.300,31
b	Belanja Modal	387.450.535.130,00	330.855.699.613,91	85,39%	483.080.137.961,09
c	Belanja Tak Terduga	8.880.514.664,00	1.547.212.797,00	17,42%	709.476.100,00
d	Belanja Transfer	691.828.222.750,00	690.872.949.517,00	99,86%	608.709.404.295,00
Jumlah		**3.720.453.434.912,00**	**3.496.881.425.582,82**	**93,99%**	**3.288.924.911.656,40**

Sumber: BPKAD (Konsolidasi LRA s.d tanggal 28 Februari 2025 – Unaudited)

g. Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan

Pembiayaan merupakan seluruh transaksi keuangan Pemerintah Kabupaten Kediri, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali. Dalam penganggarannya terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Penerimaan Pembiayaan adalah seluruh transaksi penerimaan yang dimaksudkan untuk menutup defisit anggaran, antara lain berasal dari penggunaan SILPA tahun lalu dan penerimaan piutang daerah.

Pengeluaran pembiayaan adalah seluruh transaksi pengeluaran yang dimaksudkan untuk memanfaatkan surplus anggaran, antara lain untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, penyertaan modal pemerintah, dan pembayaran kewajiban lainnya. Realisasi Pembiayaan Tahun 2024 sebagaimana berikut :

Tabel 6 Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023

NO.	PEMBIAYAAN	TA 2024 (Rp)	TA 2023 (Rp)
1)	Penerimaan Pembiayaan	410.613.961.575,42	520.994.937.799,94
2)	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	60.000.000.000,00

Sumber: BPKAD (Konsolidasi LRA s.d tanggal 28 Februari 2025 – Unaudited)

1.4. Prestasi Pemerintah Kabupaten Kediri

Prestasi yang diterima Pemerintah Kabupaten Kediri selama Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 7 Prestasi Pemerintah Kabupaten Kediri selama Tahun 2024

No	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Skala (Internasional/ Nasional/Provinsi)	Ket.
1.	Penganugrahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023	Badan Pemeriksan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI)	Nasional	Opini: Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2.	Penghargaan Pelayanan Publik (Pelayanan Prima)- Kabupaten Kediri memperoleh Indeks Pelayanan Publik 4,55 (Pelayanan Prima)	Kemenpan RB	Nasional	
3.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)- Hasil Evaluasi atas akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Kediri sebesar 67,11 dengan predikat “B”	Kemenpan RB	Nasional	
4.	Penilaian Indeks	Kemenpan RB	Nasional	

	BerAkhlak-Indeks BerAkhlak yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Kediri 78,7% dengan kategori "Sehat"			
5.	Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik- Memperoleh nilai 95,97 (Zona Hijau) Dengan kategori: A (Kualitas Tertinggi)	OMBUDSMAN RI	Nasional	
6.	Penganugerahan Predikat Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik)- Pendidikan dengan nilai 94,33 (zona Hijau) – Kualitas Tinggi	OMBUDSMAN RI	Nasional	
7.	Penghargaan Manggala Kencana Nasional	BKKBN Pusat	Nasional	
8.	Penganugerahan Predikat Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik) - Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan nilai 96,61 (Zona Hijau) – Kualitas Tertinggi	OMBUDSMAN RI	Nasional	
9.	Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2024 dengan nilai IPP 4,64 (Kategori A) - Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kemenpan RB	Nasional	
10.	Dukungan Pemerintah Daerah Terhadap Pencapaian SDGs Desa	Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Nasional	
11.	Dukungan Pemerintah Daerah Terhadap Pencapaian SDGs Desa	Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Nasional	
12.	Juara 1 SDGs Desa Region I Jawa	Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Nasional	

13.	Penghargaan Universal Health Converage	BPJS Kesehatan	Nasional	
14.	Juara 2 Posyandu berinovasi Tingkat Nasional	Menteri Kesehatan Republik Indonesia	Nasional	
15.	Pilot Project Gerakan Keluarga Sehat Tangguh Tanggap Bencana	Tim penggerak PKK Pusat	Nasional	
16.	Penganugerahan Predikat Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik)- Bidang Sosial	OMBUDSMAN RI	Nasional	
17.	Unit Pelayanan Publik Kategori Sangat Baik- Bidang Sosial	Kementerian PAN RB	Nasional	
18.	Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Daerah Tahun 2024, Kategori Sangat Baik	Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal	Nasional	
19.	Pasar Tertib Ukur Tahun 2024 untuk Pasar Kandangan, Pasar Gringging, Pasar Kras,Pasar Pare Lama	Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan Republik Indonesia	Nasional	
20.	Juara 1 stand terbaik Pameran Kriya Indonesia di Jogyakarta	PT Alliyah Cipta Pradana dan Dekranasda Provinsi Yogyakarta	Nasional	
21.	Wahana Tata Nugraha	Kementerian Perhubungan	Nasional	
22.	Sertifikat Sistem Manajemen Pengawasan Keamanan Pangan Segar dengan Kategori A (Sangat Baik)	Badan Pangan Nasional	Nasional	
23.	Pemantauan Keberlanjutan dan Replikasi Inovasi Pelayanan Publik-Top 5 untuk Inovasi Metharizium (Mengamankan Pangan Untuk Negeri Tahun 2024)	Menpan RB	Nasional	
24.	Juara 3 Lomba Teknologi Tepat Guna (TTG)	Pemerintah Provinsi Jawa Timur	Provinsi	
25.	Aksi Nyata Kolaborasi Dalam Peningkatan Keselamatan di	Dirjen		

	Perlintasan Sebidang Kereta Api di Jawa Timur Tahun 2024	Perkeretaapian Kementerian Perhubungan	Provinsi	
26.	Posyandu berinovasi Tingkat Nasional	Dinas Keshatan Propinsi Jawa Timur	Provinsi	
27.	Aksi Peningkatan Keselamatan di Perlintasan Sebidang Kereta Api Tahun 2024	Dinas Perhubungan Prov Jawa Timur	Provinsi	
28.	Penilaian Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Kabupaten / Kota Se Jawa Timur Tahun 2024	Gubernur Jawa Timur	Provinsi	
29.	Desa Berseri Madya	DLH Provinsi Jawa Timut	Provinsi	
30.	Desa Berseri Madya	DLH Provinsi Jawa Timut	Provinsi	
31.	Desa Berseri Pratama	DLH Provinsi Jawa Timut	Provinsi	
32.	Desa Berseri Pratama	DLH Provinsi Jawa Timut	Provinsi	
33.	Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) Terbaik Provinsi Jawa Timur Tahun 2024	Gubernur Jawa Timur	Provinsi	
34.	Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) Tingkat Kabupaten/Kota dengan Penerbitan Registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK) Terbanyak	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Propinsi Jawa Timur	Provinsi	
35.	Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) Tingkat Kabupaten/Kota yang Berhasil Menerbitkan Registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK) LABEL HIJAU	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Propinsi Jawa Timur	Provinsi	
36.	Juara Harapan I Lomba Petugas IB Berprestasi Tingkat Provinsi Jatim Tahun 2024	Dinas Peternakan Propinsi Jawa Timur	Provinsi	
37.	Instansi Terbaik II Realisasi SK Kenaikan Pangkat Wilayah Kanreg II BKN Sarabaya	Kanreg II BKN Surabaya	Provinsi	

38.	Instansi Terbaik I Realisasi SK Pensiun Wilayah Kanreg II BKN Sarabaya	Kanreg II BKN Surabaya	Provinsi	
39.	Sertifikasi sebagai Mitra Penilaian Kompetensi dan Potensi yang diselenggarakan oleh BKD Provinsi Jawa Timur Tahun 2024	BKD Provinsi Jawa Timur	Provinsi	
40.	Juara 3 Lomba Pendirian Tenda Dalam Rangka Kegiatan Gelar Peralatan Penanggulangan bencana Jawa Timur Tahun 2024	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur	Provinsi	

Sumber : OPD Kabupaten Kediri

BAB II
PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

2.1. Kondisi Umum dan Kebijakan Perubahan Pendapatan Daerah

Sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, bahwa Daerah diberikan hak otonomi sehingga Pemerintah Daerah mendapatkan pelimpahan kekuasaan dan kewenangan dalam rangka pengelolaan keuangan daerah. Namun dalam kenyataannya Pemerintah Daerah sangat tergantung pada Pendapatan Transfer yang diberikan oleh Pemerintah. Hal tersebut terlihat dari nominal komponen Pendapatan Transfer yang paling besar dibanding dengan komponen lainnya yaitu Pendapatan Asli Daerah dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

2.1.1. Permasalahan Utama Perubahan Pendapatan Daerah

Dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, permasalahan utama perubahan pendapatan daerah adalah sebagai berikut :

1. Estimasi Kenaikan Pendapatan Asli Daerah terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
2. Perubahan Pendapatan Transfer yang terdiri dari: Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah.
3. Perubahan target Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

2.1.2. Permasalahan Utama Perubahan Pendapatan Daerah

Perangkaan dalam Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, pendapatan daerah diestimasikan sebesar Rp.

3.249.386.009.817,00 naik sebesar Rp. 189.641.067.037,00 atau 6,20% dari APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 3.059.744.942.780,00. Pendapatan Daerah rancangan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 terdiri dari:

Tabel 8 Uraian Perubahan Pendapatan Daerah Sebelum dan Sesudah Perubahan Tahun Anggaran 2024

NO	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**650.580.171.218,00**	**692.872.682.301,00**	**42.292.511.083,00**	**6,50**
4.1.01	PAJAK DAERAH	311.550.000.000,00	304.720.000.000,00	**(6.830.000.000,00)**	**(2,19)**
4.1.02	RETRIBUSI DAERAH	36.281.660.650,00	29.753.090.650,00	**(6.528.570.000,00)**	**(17,99)**
4.1.03	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	13.299.010.672,00	13.227.527.771,00	**(71.482.901,00)**	**(0,54)**
4.1.04	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	289.449.499.896,00	345.172.063.880,00	55.722.563.984,00	**19,25**
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**2.409.164.771.562,00**	**2.556.513.327.516,00**	**147.348.555.954,00**	**6,12**
4.2.01	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	2.248.135.343.624,00	2.277.378.367.616,00	29.243.023.992,00	1,30
4.2.02	TRANSFER ANTAR DAERAH	161.029.427.938,00	279.134.959.900,00	118.105.531.962,00	73,34
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	**3.059.744.942.780,00**	**3.249.386.009.817,00**	**189.641.067.037,00**	**6,20**

Sumber: BPKAD (Nota Keuangan RAPBD 2024)

2.1.3. Kebijakan Umum Perubahan Pendapatan Daerah

1. Kebijakan Perubahan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

   Kebijakan Perubahan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dilaksanakan dengan melaksanakan perhitungan ulang target PAD APBD TA 2024 dengan mempertimbangkan realisasi penerimaan PAD semester I TA 2024 untuk digunakan sebagai acuan target PAD semester II TA 2024;

2. Kebijakan Perubahan Pendapatan Transfer

Kebijakan pendapatan transfer daerah dengan melaksanakan penyesuaian Alokasi Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat tahun 2024 dan Pendapatan Transfer dari Pemerintah Propinsi tahun 2024 sesuai dengan peraturan yang telah diterbitkan yaitu :Adanya alokasi Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada Pemerintah Kabupaten Kediri sebagai berikut:

a) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024 Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya.
b) Adanya alokasi Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada Pemerintah Kabupaten Kediri sebagai berikut :
    1) Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/88/KPTS/013/2024 tentang Penetapan Pagu Definitif Bantuan Keuangan Khusus Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Yang Diverifikasi Oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024.
    2) Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1./69/KPTS/013/2024 tentang Penetapan Pagu Definitif Bantuan Keuangan Khusus Bidang Kesehatan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Yang Diverifikasi Oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024 untuk Santri Jatim Sehat dan Berkah (SAJADAH).
    3) Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/129/KPTS/013/2024 tentang Penetapan Pagu Definitif Bantuan Keuangan Khusus Bidang Perhubungan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Yang diverifikasi oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024.
    4) Surat Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tanggal 27 Pebruari 2024 Nomor

900/1241.6/101.1/2024 perihal Pemberitahuan Pagu Anggaran Definitif Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kabupaten/Kota Pada APBD Provinsi Jawa Timur Tahun 2024.

5) Surat dari Gubernur Jawa Timur tanggal 16 April 2024 nomor 400.10.2/3169/112.2/2024 perihal Penyampaian pagu Definitif Belanja Bantuan Keuangan ke Kabupaten dan Kota Batu untuk Honorararium Aparatur Pemerintah Desa pada APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024.

c) Perubahan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2023 yang disesuaikan dengan Surat Gubernur Jawa Timur tanggal 22 November 2023 Nomor 976/44625/021.3/2023 perihal Pagu Indikatif DBHCHT Kabupaten/Kota TA 2024.

d) Perubahan alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Tahun Anggaran 2024 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/690/KPTS/013/2023 tentang Alokasi Sementara Bagi Hasil Pajak Rokok untuk Kabupaten/Kota se Jawa Timur berdasarkan Estimasi Penerimaan Pajak Rokok Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024.

2.2.1. Kondisi Umum Perubahan Belanja Daerah

Belanja Daerah merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan disusun berdasarkan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan alokasi anggaran. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektifitas, efisiensi dan tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas

dan fungsi masing-masing satuan kerja perangkat daerah untuk melaksanakan kewajiban daerah yang menjadi kewenangannya.

Kondisi umum Belanja Daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, terdapat beberapa perubahan baik perubahan karena adanya penambahan kegiatan baru ataupun pergeseran kegiatan yang disesuaikan dengan perkembangan pelaksanaan APBD. Perubahan-perubahan tersebut antara lain disebabkan:

1. Adanya penyempurnaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
2. Adanya perubahan perencanaan belanja yang disebabkan:
    a) Perhitungan dengan pergeseran anggaran untuk ketersediaan anggaran gaji dan Tunjangan serta tambahan penghasilan bagi PNSD.
    b) Penyesuaian penggunaan anggaran dana transfer dari pemerintah pusat yaitu Dana Alokasi Khusus sesuai petunjuk teknis dari Kementerian Teknis
    c) Penyesuaian kegiatan yang bersumber dana DAU spesifik bidang Kesehatan, DAU spesifik Bidang Kesehatan, DAU spesifik Bidang Pekerjaan Umum dan DAU spesifik penggajian P3K.
    d) Penyesuaian anggaran dana transfer yaitu:
        1) Transfer Pemerintah Pusat yaitu DBHCHT dan Insentif Fiskal.
        2) Transfer Antar Daerah yaitu: Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Pajak Rokok dan Bantuan Keuangan Khusus.
    e) Penyesuaian anggaran dengan pergeseran untuk mendukung program-program prioritas.

f) Penyesuaian pergeseran belanja BLUD.

3. Adanya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2023 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 yang harus digunakan dan dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Disamping itu, sesuai prinsip efisiensi dan efektifitas, maka dalam mengalokasikan anggaran, Pemerintah Kabupaten Kediri lebih mengutamakan pada aspek sinkronisasi program dan kegiatan antara pemerintah pusat dan daerah serta capaian kinerja dari program dan kegiatan. Dengan memperhatikan kondisi sosial dan perekonomian daerah, maka pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Kabupaten Kediri mengalokasikan anggaran belanja sebesar Rp.3.659.923.926.392,00 mengalami penambahan sebesar Rp.173.004.151.335,00 atau 4,96% dari APBD Tahun Anggaran 2024.

Belanja Daerah disusun sesuai dengan pembagian Urusan Pemerintahan yang diformulasikan ke dalam:

1. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar;
2. Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar;
3. Urusan pemerintahan pilihan;
4. Unsur pendukung urusan pemerintahan;
5. Unsur penunjang urusan pemerintahan;
6. Unsur pengawasan urusan pemerintahan;
7. Unsur kewilayahan;
8. Unsur pemerintahan umum;
9. Non urusan.

Disusun sesuai dengan pembagian Urusan Pemerintahan yang dirinci sebagai berikut:

Tabel 9 Belanja Daerah Sesuai Pembagian Urusan Pemerintahan Tahun 2024

Kode			Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Belanja		
				Sebelum	Setelah	Bertambah/Berkurang
1			**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**2.096.405.825.003,00**	**2.200.361.327.025,00**	**103.955.502.022,00**
1	01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	972.455.567.234,00	996.602.061.688,00	24.146.494.454,00
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan	972.455.567.234,00	996.602.061.688,00	24.146.494.454,00
1	02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	811.127.732.503,00	907.707.498.308,00	96.579.765.805,00
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	Dinas Kesehatan	264.896.978.701,00	338.611.254.834,00	73.714.276.133,00
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0001	RSUD Kabupaten Kediri	300.440.115.300,00	322.361.105.200,00	21.920.989.900,00
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0002	RSUD SLG	134.646.979.850,00	125.297.441.237,00	(9.349.538.613,00)
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0003	UPTD PUSKESMAS SEMEN	4.055.114.700,00	3.932.494.099,00	(122.620.601,00)
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0004	UPTD PUSKESMAS MOJO	4.176.089.200,00	4.552.601.972,00	376.512.772,00
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0005	UPTD PUSKESMAS NGADI	3.206.619.450,00	3.303.806.225,00	97.186.775,00
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0006	UPTD PUSKESMAS KRAS	2.112.322.220,00	2.597.518.711,00	485.196.491,00
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0007	UPTD PUSKESMAS PELAS	1.822.443.700,00	2.151.468.858,00	329.025.158,00
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0008	UPTD PUSKESMAS NGADILUWIH	4.546.363.900,00	4.907.484.590,00	361.120.690,00
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0009	UPTD PUSKESMAS WONOREJO	2.455.318.860,00	2.565.508.255,00	110.189.395,00
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0010	UPTD PUSKESMAS BLABAK	3.222.117.500,00	3.678.115.441,00	455.997.941,00
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0011	UPTD PUSKESMAS WATES	3.396.702.250,00	4.111.665.473,00	714.963.223,00
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0012	UPTD PUSKESMAS SILIR	2.406.558.700,00	2.694.780.198,00	288.221.498,00
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0013	UPTD PUSKESMAS NGANCAR	3.452.733.132,00	4.712.624.472,00	1.259.891.340,00
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0014	UPTD PUSKESMAS PUNCU	4.475.223.500,00	4.536.348.558,00	61.125.058,00
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0015	UPTD PUSKESMAS PLOSOKLATEN	2.718.184.700,00	2.365.127.574,00	(353.057.126,00)
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0016	UPTD PUSKESMAS PRANGGANG	3.149.137.350,00	3.203.134.727,00	53.997.377,00
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0017	UPTD PUSKESMAS GURAH	2.925.001.221,00	2.705.000.904,00	(220.000.317,00)

1	02	1.02.0.00.0.00.02.0018	UPTD PUSKESMAS ADAN-ADAN	2.134.518.500,00	2.589.007.278,00	454.488.778,00
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0019	UPTD PUSKESMAS PAGU	2.678.339.814,00	2.730.706.381,00	52.366.567,00
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0020	UPTD PUSKESMAS GAMPENG	2.316.251.556,00	2.054.677.316,00	(261.574.240,00)
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0021	UPTD PUSKESMAS GROGOL	2.861.538.861,00	3.105.086.127,00	243.547.266,00
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0022	UPTD PUSKESMAS TANON	4.200.215.900,00	4.394.557.051,00	194.341.151,00
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0023	UPTD PUSKESMAS PURWOASRI	2.624.197.631,00	2.876.350.558,00	252.152.927,00
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0024	UPTD PUSKESMAS SUMBERJO	2.411.952.600,00	2.519.719.225,00	107.766.625,00
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0025	UPTD PUSKESMAS PUHJARAK	4.021.000.600,00	4.216.604.784,00	195.604.184,00
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0026	UPTD PUSKESMAS PARE	1.538.803.628,00	2.515.995.021,00	977.191.393,00
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0027	UPTD PUSKESMAS BENDO	2.362.276.007,00	2.336.187.262,00	(26.088.745,00)
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0028	UPTD PUSKESMAS SIDOREJO	2.426.867.000,00	2.646.040.358,00	219.173.358,00
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0029	UPTD PUSKESMAS KEPUNG	2.158.042.120,00	3.660.017.246,00	1.501.975.126,00
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0030	UPTD PUSKESMAS KELING	3.157.476.500,00	3.446.038.805,00	288.562.305,00
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0031	UPTD PUSKESMAS KANDANGAN	3.692.204.000,00	4.236.394.277,00	544.190.277,00
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0032	UPTD PUSKESMAS TAROKAN	3.982.467.582,00	4.021.172.662,00	38.705.080,00
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0033	UPTD PUSKESMAS KUNJANG	3.101.993.094,00	3.304.973.255,00	202.980.161,00
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0034	UPTD PUSKESMAS TIRON	2.403.128.824,00	2.933.490.250,00	530.361.426,00
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0035	UPTD PUSKESMAS SAMBI	4.130.237.500,00	4.114.032.230,00	(16.205.270,00)
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0036	UPTD PUSKESMAS BANGSONGAN	1.790.346.400,00	1.876.191.573,00	85.845.173,00
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0037	UPTD PUSKESMAS KAYEN KIDUL	1.773.522.712,00	1.863.312.413,00	89.789.701,00
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0038	UPTD PUSKESMAS NGASEM	2.793.886.790,00	3.152.592.120,00	358.705.330,00
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0039	UPTD PUSKESMAS BADAS	4.464.460.650,00	4.826.870.788,00	362.410.138,00
1	03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	217.687.241.958,00	175.175.244.910,00	(42.511.997.048,00)
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	130.578.510.997,00	146.871.363.594,00	16.292.852.597,00

1	03	1.04.1.03.2.10.04.0000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	87.108.730.961,00	28.303.881.316,00	(58.804.849.645,00)
1	04		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	43.358.303.584,00	59.464.653.584,00	16.106.350.000,00
1	04	1.04.1.03.2.10.04.0000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	43.358.303.584,00	59.464.653.584,00	16.106.350.000,00
1	05		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	29.130.894.542,00	24.352.026.015,00	(4.778.868.527,00)
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	Satuan Polisi Pamong Praja	22.545.995.400,00	19.113.994.688,00	(3.432.000.712,00)
1	05	1.05.0.00.0.00.29.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6.584.899.142,00	5.238.031.327,00	(1.346.867.815,00)
1	06		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	22.646.085.182,00	37.059.842.520,00	14.413.757.338,00
1	06	1.06.0.00.0.00.06.0000	Dinas Sosial	22.646.085.182,00	37.059.842.520,00	14.413.757.338,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	188.920.347.286,00	224.361.657.078,00	35.441.309.792,00
2	07		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	5.295.294.355,00	16.402.950.234,00	11.107.655.879,00
2	07	2.07.3.32.0.00.07.0000	Dinas Tenaga Kerja	5.295.294.355,00	16.402.950.234,00	11.107.655.879,00
2	08		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAA N PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	6.600.069.124,00	6.413.350.335,00	(186.718.789,00)
2	08	2.14.2.08.0.00.12.0000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	6.600.069.124,00	6.413.350.335,00	(186.718.789,00)
2	09		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	10.865.919.149,00	12.153.827.619,00	1.287.908.470,00
2	09	2.09.3.27.0.00.08.0000	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	10.865.919.149,00	12.153.827.619,00	1.287.908.470,00
2	10		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	158.000.000,00	296.500.000,00	138.500.000,00
2	10	1.04.1.03.2.10.04.0000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	158.000.000,00	296.500.000,00	138.500.000,00
2	11		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG	50.086.625.848,00	50.040.481.500,00	(46.144.348,00)

			LINGKUNGAN HIDUP			
2	11	2.11.0.00.0.00.09.0000	Dinas Lingkungan Hidup	50.086.625.848,00	50.040.481.500,00	(46.144.348,00)
2	12		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIL	10.368.685.445,00	11.333.337.779,00	964.652.334,00
2	12	2.12.0.00.0.00.10.0000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	10.368.685.445,00	11.333.337.779,00	964.652.334,00
2	13		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DAN DESA	11.785.516.570,00	16.842.033.080,00	5.056.516.510,00
2	13	2.13.0.00.0.00.11.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	11.785.516.570,00	16.842.033.080,00	5.056.516.510,00
2	14		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	25.470.967.400,00	26.034.941.400,00	563.974.000,00
2	14	2.14.2.08.0.00.12.0000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan	25.470.967.400,00	26.034.941.400,00	563.974.000,00
2	15		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	18.121.217.674,00	19.286.051.964,00	1.164.834.290,00
2	15	2.15.0.00.0.00.13.0000	Dinas Perhubungan	18.121.217.674,00	19.286.051.964,00	1.164.834.290,00
2	16		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	21.027.717.689,00	32.466.573.100,00	11.438.855.411,00
2	16	2.16.2.21.2.20.14.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	14.077.717.689,00	20.406.573.100,00	6.328.855.411,00
2	16	4.01.5.06.2.16.25.0000	Sekretariat Daerah	6.950.000.000,00	12.060.000.000,00	5.110.000.000,00
2	17		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	8.227.813.087,00	11.275.759.088,00	3.047.946.001,00
2	17	2.17.0.00.0.00.15.0000	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	8.227.813.087,00	11.275.759.088,00	3.047.946.001,00
2	18		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	7.535.262.179,00	7.869.748.279,00	334.486.100,00
2	18	2.18.0.00.0.00.16.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu	7.535.262.179,00	7.869.748.279,00	334.486.100,00

			Pintu			
2	19		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	1.057.247.000,00	1.491.924.200,00	434.677.200,00
2	19	1.01.2.19.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan	1.057.247.000,00	1.491.924.200,00	434.677.200,00
2	20		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	179.139.700,00	494.139.700,00	315.000.000,00
2	20	2.16.2.21.2.20.14.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	179.139.700,00	494.139.700,00	315.000.000,00
2	21		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	725.000.000,00	719.000.000,00	(6.000.000,00)
2	21	2.16.2.21.2.20.14.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	725.000.000,00	719.000.000,00	(6.000.000,00)
2	22		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	7.275.567.833,00	6.943.567.833,00	(332.000.000,00)
2	22	3.26.2.22.0.00.19.0000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	7.275.567.833,00	6.943.567.833,00	(332.000.000,00)
2	23		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	448.533.600,00	498.533.600,00	50.000.000,00
2	23	2.24.2.23.0.00.17.0000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	448.533.600,00	498.533.600,00	50.000.000,00
2	24		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	3.691.770.633,00	3.798.937.367,00	107.166.734,00
2	24	2.24.2.23.0.00.17.0000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	3.691.770.633,00	3.798.937.367,00	107.166.734,00
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	102.436.790.390,00	112.582.417.911,00	10.145.627.521,00
3	25		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	7.316.342.817,00	8.139.057.100,00	822.714.283,00
3	25	3.25.0.00.0.00.18.0000	Dinas Perikanan	7.316.342.817,00	8.139.057.100,00	822.714.283,00
3	26		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	12.969.862.131,00	15.411.215.399,00	2.441.353.268,00
3	26	3.26.2.22.0.00.19.0000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	12.969.862.131,00	15.411.215.399,00	2.441.353.268,00
3	27		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	66.272.762.062,00	71.491.155.202,00	5.218.393.140,00
3	27	2.09.3.27.0.00.08.0000	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	11.108.652.000,00	14.504.481.410,00	3.395.829.410,00
3	27	3.27.0.00.0.00.20.0000	Dinas Pertanian dan Perkebunan	55.164.110.062,00	56.986.673.792,00	1.822.563.730,00
3	30		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	15.122.684.380,00	16.090.646.362,00	967.961.982,00
3	30	3.30.3.31.0.00.21.0000	Dinas Perdagangan	15.122.684.380,00	16.090.646.362,00	967.961.982,00
3	31		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG	705.600.000,00	1.395.147.848,00	689.547.848,00

			PERINDUSTRIAN			
3	31	3.30.3.31.0.00.21.0000	Dinas Perdagangan	705.600.000,00	1.395.147.848,00	689.547.848,00
3	32		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	49.539.000,00	55.196.000,00	5.657.000,00
3	32	2.07.3.32.0.00.07.0000	Dinas Tenaga Kerja	49.539.000,00	55.196.000,00	5.657.000,00
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	166.768.097.242,00	185.448.598.012,00	18.680.500.770,00
4	01		SEKRETARIAT DAERAH	97.773.858.461,00	108.794.684.032,00	11.020.825.571,00
4	01	4.01.5.06.2.16.25.0000	Sekretariat Daerah	97.773.858.461,00	108.794.684.032,00	11.020.825.571,00
4	02		SEKRETARIAT DPRD	68.994.238.781,00	76.653.913.980,00	7.659.675.199,00
4	02	4.02.0.00.0.00.26.0000	Sekretariat DPRD	68.994.238.781,00	76.653.913.980,00	7.659.675.199,00
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	771.269.837.297,00	774.290.106.495,00	3.020.269.198,00
5	01		PERENCANAAN	9.201.620.887,00	10.451.867.187,00	1.250.246.300,00
5	01	5.01.0.00.0.00.22.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	9.201.620.887,00	10.451.867.187,00	1.250.246.300,00
5	02		KEUANGAN	745.226.880.634,00	745.961.548.455,00	734.667.821,00
5	02	5.02.0.00.0.00.23.0000	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	720.931.214.806,00	719.885.358.553,00	(1.045.856.253,00)
5	02	5.02.0.00.0.00.24.0000	Badan Pendapatan Daerah	24.295.665.828,00	26.076.189.902,00	1.780.524.074,00
5	03		KEPEGAWAIAN	9.469.451.084,00	10.115.485.911,00	646.034.827,00
5	03	5.03.5.04.0.00.25.0000	Badan Kepegawaian Daerah	9.469.451.084,00	10.115.485.911,00	646.034.827,00
5	04		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	1.956.292.500,00	2.222.671.650,00	266.379.150,00
5	04	5.03.5.04.0.00.25.0000	Badan Kepegawaian Daerah	1.956.292.500,00	2.222.671.650,00	266.379.150,00
5	05		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	5.384.016.192,00	5.506.957.292,00	122.941.100,00
5	05	5.05.0.00.0.00.26.0000	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	5.384.016.192,00	5.506.957.292,00	122.941.100,00
5	06		PENGELOLAAN PERBATASAN	31.576.000,00	31.576.000,00	0,00
5	06	4.01.5.06.2.16.25.0000	Sekretariat Daerah	31.576.000,00	31.576.000,00	0,00
6			UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	14.666.266.199,00	12.013.890.400,00	(2.652.375.799,00)
6	01		INSPEKTORAT DAERAH	14.666.266.199,00	12.013.890.400,00	(2.652.375.799,00)
6	01	6.01.0.00.0.00.27.0000	Inspektorat	12.333.010.415,00	12.013.890.400,00	(319.120.015,00)

6	01	7.01.0.00.0.00.42.0000	Kecamatan Papar	2.332.443.284,00	0,00	(2.332.443.284,00)
6	01	7.01.0.00.0.00.51.0000	Kecamatan Ringinrejo	812.500,00	0,00	(812.500,00)
7			UNSUR KEWILAYAHAN	64.190.036.790,00	66.585.370.271,00	2.395.333.481,00
7	01		KECAMATAN	64.187.222.790,00	66.582.556.271,00	2.395.333.481,00
7	01	7.01.0.00.0.00.30.0000	Kecamatan Mojo	2.570.168.904,00	2.597.599.600,00	27.430.696,00
7	01	7.01.0.00.0.00.31.0000	Kecamatan Kras	2.773.510.447,00	2.886.796.340,00	113.285.893,00
7	01	7.01.0.00.0.00.32.0000	Kecamatan Ngadiluwih	2.829.545.889,00	2.747.742.055,00	(81.803.834,00)
7	01	7.01.0.00.0.00.33.0000	Kecamatan Kandat	2.156.848.849,00	2.059.639.479,00	(97.209.370,00)
7	01	7.01.0.00.0.00.34.0000	Kecamatan Wates	2.479.170.650,00	2.737.884.680,00	258.714.030,00
7	01	7.01.0.00.0.00.35.0000	Kecamatan Ngancar	2.091.145.132,00	2.385.369.779,00	294.224.647,00
7	01	7.01.0.00.0.00.36.0000	Kecamatan Puncu	2.727.159.982,00	2.719.868.004,00	(7.291.978,00)
7	01	7.01.0.00.0.00.37.0000	Kecamatan Plosoklaten	2.479.298.568,00	2.061.309.964,00	(417.988.604,00)
7	01	7.01.0.00.0.00.38.0000	Kecamatan Gurah	2.227.290.895,00	2.397.025.004,00	169.734.109,00
7	01	7.01.0.00.0.00.39.0000	Kecamatan Pagu	2.269.166.306,00	2.385.590.300,00	116.423.994,00
7	01	7.01.0.00.0.00.40.0000	Kecamatan Gampengrejo	2.187.596.679,00	2.021.914.850,00	(165.681.829,00)
7	01	7.01.0.00.0.00.41.0000	Kecamatan Grogol	2.527.216.490,00	2.276.473.300,00	(250.743.190,00)
7	01	7.01.0.00.0.00.42.0000	Kecamatan Papar	96.481.000,00	2.581.837.800,00	2.485.356.800,00
7	01	7.01.0.00.0.00.43.0000	Kecamatan Purwoasri	3.183.581.556,00	3.054.451.980,00	(129.129.576,00)
7	01	7.01.0.00.0.00.44.0000	Kecamatan Plemahan	2.627.382.550,00	2.660.359.652,00	32.977.102,00
7	01	7.01.0.00.0.00.45.0000	Kecamatan Pare	4.915.019.134,00	4.569.906.716,00	(345.112.418,00)
7	01	7.01.0.00.0.00.46.0000	Kecamatan Kepung	2.543.135.556,00	2.492.105.815,00	(51.029.741,00)
7	01	7.01.0.00.0.00.47.0000	Kecamatan Kandangan	2.718.203.640,00	2.804.186.701,00	85.983.061,00
7	01	7.01.0.00.0.00.48.0000	Kecamatan Tarokan	2.590.017.780,00	2.403.163.260,00	(186.854.520,00)
7	01	7.01.0.00.0.00.49.0000	Kecamatan Kunjang	2.384.611.071,00	2.764.967.207,00	380.356.136,00
7	01	7.01.0.00.0.00.50.0000	Kecamatan Banyakan	2.876.947.193,00	3.157.484.104,00	280.536.911,00
7	01	7.01.0.00.0.00.51.0000	Kecamatan Ringinrejo	2.110.142.663,00	1.935.894.180,00	(174.248.483,00)
7	01	7.01.0.00.0.00.52.0000	Kecamatan Kayen Kidul	2.122.031.464,00	2.139.291.894,00	17.260.430,00
7	01	7.01.0.00.0.00.53.0000	Kecamatan Ngasem	2.037.573.351,00	2.253.106.900,00	215.533.549,00
7	01	7.01.0.00.0.00.54.0000	Kecamatan Badas	2.525.898.693,00	2.365.950.109,00	(159.948.584,00)
7	01	7.01.0.00.0.00.55.0000	Kecamatan Semen	2.138.078.348,00	2.122.636.598,00	(15.441.750,00)

7	01		KECAMATAN	2.814.000,00	2.814.000,00	0,00
7	01	7.01.0.00.0.00.33.0000	Kecamatan Kandat	2.814.000,00	2.814.000,00	0,00
8			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	81.275.833.350,00	84.280.559.200,00	3.004.725.850,00
8	01		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	81.275.833.350,00	84.280.559.200,00	3.004.725.850,00
8	01	8.01.0.00.0.00.28.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	81.275.833.350,00	84.280.559.200,00	3.004.725.850,00
X			NON URUSAN	986.741.500,00	0,00	(986.741.500,00)
X	X X		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX	986.741.500,00	0,00	(986.741.500,00)
X	X X	4.01.5.06.2.16.25.0000	Sekretariat Daerah	829.606.600,00	0,00	(829.606.600,00)
X	X X	5.05.0.00.0.00.26.0000	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	2.941.100,00	0,00	(2.941.100,00)
X	X X	7.01.0.00.0.00.37.0000	Kecamatan Plosoklaten	612.100,00	0,00	(612.100,00)
X	X X	7.01.0.00.0.00.42.0000	Kecamatan Papar	152.981.700,00	0,00	(152.981.700,00)
X	X X	7.01.0.00.0.00.44.0000	Kecamatan Plemahan	600.000,00	0,00	(600.000,00)
TOTAL				**3.486.919.775.057,00**	**3.659.923.926.392,00**	**173.004.151.335,00**

Sumber Data : BPKAD Kabupaten Kediri

Sehingga pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, total Belanja Daerah sebesar Rp.3.659.923.926.392,00 apabila dibandingkan dengan Pendapatan Daerah sebesar Rp.3.249.386.009.817,00 terdapat Defisit Anggaran sebesar (Rp. 410.537.916.575,00).

2.2.2. Permasalahan Utama Perubahan Belanja Daerah

Permasalahan utama yang dihadapi dalam menyusun Belanja Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

1) Perubahan Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa, penyesuaian Pendapatan Asli Daerah dan perubahan alokasi Pendapatan Transfer Antar Daerah.
2) Penyesuaian belanja pada Program dan Kegiatan yang telah ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sesuai

dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan.

3) Adanya kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi terkait dengan program dan kegiatan yang harus dilaksanakan Pemerintah Daerah.

2.2.3. Kebijakan Umum Perubahan Belanja Daerah

Kebijakan Umum Belanja Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 adalah untuk membiayai kegiatan sesuai tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangannya berdasarkan skala prioritas sesuai dengan ketentuan berlaku dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan belanja daerah dalam penggunaan dana diwujudkan dengan mengevaluasi program/kegiatan yang telah direalisasikan hingga semester pertama selanjutnya melakukan pergeseran rekening belanja untuk disesuaikan dengan kebutuhan belanja daerah dalam semester kedua.

2.2.4. Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Belanja Daerah

Ringkasan Belanja Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut :

Tabel 10 Ringkasan Belanja Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024

KODE	URAIAN	SEBELUM	SETELAH	BERTAMBAH/ BERKURANG
5.1	**BELANJA OPERASI**	**2.383.907.798.180,00**	**2.557.789.145.560,00**	**173.881.347.380,00**
5.1.01	Belanja Pegawai	1.160.226.903.410,00	1.159.102.998.373,00	(1.123.905.037,00)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	965.668.742.738,00	1.129.659.793.213,00	163.991.050.475,00
5.1.05	Belanja Hibah	218.810.903.197,00	229.046.336.249,00	10.235.433.052,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	39.201.248.835,00	39.980.017.725,00	778.768.890,00
5.2	**BELANJA MODAL**	**403.720.857.127,00**	**404.935.154.394,00**	**1.214.297.267,00**
5.2.01	Belanja Modal Tanah	16.130.000.000,00	15.500.000.000,00	(630.000.000,00)
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	45.903.795.537,00	74.248.712.044,00	28.344.916.507,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	268.160.294.882,00	228.138.168.041,00	(40.022.126.841,00)
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	71.501.766.708,00	84.985.215.295,00	13.483.448.587,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.387.000.000,00	1.425.059.014,00	38.059.014,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	638.000.000,00	638.000.000,00	0,00
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**24.000.000.000,00**	**15.109.459.688,00**	**(8.890.540.312,00)**

5.3.01	Belanja Tidak Terduga	24.000.000.000,00	15.109.459.688,00	(8.890.540.312,00)
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**675.291.119.750,00**	**682.090.166.750,00**	**6.799.047.000,00**
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	34.850.304.000,00	34.850.304.000,00	0,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	640.440.815.750,00	647.239.862.750,00	6.799.047.000,00
	TOTAL BELANJA	**3.486.919.775.057,00**	**3.659.923.926.392,00**	**173.004.151.335,00**

Sumber: BPKAD Kabupaten Kediri

2.2. Kondisi Dan Kebijakan Perubahan Anggaran Pembiayaan

2.3.1. Kondisi Umum Perubahan Pembiayaan

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Berdasarkan Pasal 70 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, ketentuan dalam pembiayaan daerah adalah sebagai berikut:

a. Pembiayaan daerah terdiri atas:
   1) penerimaan pembiayaan; dan
   2) pengeluaran pembiayaan.
b. Pembiayaan daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, jenis, objek, dan rincian objek pembiayaan daerah.

Adapun pembiayaan pada rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 11 Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024

Kode	Jenis Pembiayaan Daerah	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / (berkurang)
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**			
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**427.174.832.277,00**	**410.537.916.575,00**	**(16.636.915.702,00)**
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	352.174.832.277,00	335.537.916.575,00	(16.636.915.702,00)
6.1.01	Penerimaan Pinjaman Daerah	75.000.000.000,00	75.000.000.000,00	0,00
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Sumber Data : BPKAD Kabupaten Kediri

2.3.2. Permasalahan Utama Perubahan Pembiayaan

Permasalahan utama pembiayaan pada Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 adalah adanya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2023 yang harus digunakan dan dianggarkan kembali pada tahun berjalan.

2.3.3. Kebijakan Umum Perubahan Pembiayaan

Kebijakan Umum Pembiayaan pada Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

1. Penggunaan sisa lebih penerimaan anggaran tahun sebelumnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Sisa dana yang berasal dari sumber dana spesifik, dianggarkan kembali atau dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Sisa dana yang berasal dari sumber dana non spesifik digunakan untuk pembangunan daerah yang menjadi prioritas dalam perubahan kebijakan umum APBD
4. Sisa Lebih Anggaran Tahun 2023 dana BLUD.

BAB III
HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

3.1. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

3.1.1. Capaian Kinerja Program sesuai dengan Target Kinerja yang Ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja

Akuntabilitas kinerja sendiri merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun secara periodik. Hal ini mengandung makna bahwa capaian kinerja pemerintahan diukur dengan indikator dan target yang sudah ditetapkan sebelumnya dan disetujui bersama antara pemerintah dan DPRD, yaitu target kinerja yang ada di dalam RPJMD melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kediri nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2021-2026.

Dalam konteks perencanaan pembangunan dan penganggaran tahunan, maka manajemen kinerja yang dimaksud adalah membandingkan antara capaian kinerja dengan perencanaan kinerja yang sudah dilaksanakan dalam rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Kediri tahun 2022. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dinyatakan bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah membandingkan antara sasaran strategis, indikator kinerja dan target yang sudah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) dengan realisasi kinerja yang

dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Prinsip-prinsip dan sistematika yang diinformasikan memuat hal-hal sebagai berikut:

a. Perbandingan antara target dan realiasi tahun ini berdasarkan kinerja kepala daerah.
b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir.
c. Perbandingan realisasi kinerja sampai tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan jangka menengah/RPJMD.
d. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada).
e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.
g. Analisis atas efektifitas dan efisiensi penggunaan sumber daya.

Dalam mengukur persentase capaian, rumus yang digunakan adalah sebagai berikut;

a. Persentase capaian positif

   Rumus persentase capaian positif digunakan untuk mengukur target yang meningkat adalah sebagai berikut:

$$\frac{Realisasi}{Target} \; x\,100$$

b. Persentase capaian negatif

   Rumus persentase capaian negatif digunakan untuk mengukur target yang menurun adalah sebagai berikut:

$$\frac{Target - (Realisasi - Target)}{Target} \; x\,100$$

Dalam menentukan keberhasilan capaian kinerja dalam Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Kediri, skala kategori capaian yang digunakan sebagai berikut:

Tabel 12 Skala Kategori Capaian Kinerja

No	Rentang Capaian (%)	Kategori
1	$\geq$ 100	Sangat Baik
2	80 $\leq$ x < 100	Baik
3	60 $\leq$ x $\leq$ 80	Cukup Baik
4	60 <	Kurang Baik

Sumber : Bag. Organisasi SETDA Kab. Kediri

3.1.2. Perbandingan Target Dan Realisasi Indikator Kinerja

Tabel 13 PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI INDIKATOR KINERJA UTAMA

PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

No	Tujuan/Sasaran		Indikator	Target 2024	Realisasi 2024	Persentase Capaian	Kategori
	Misi 1 **Pengembangan Sumberdaya Manusia yang Berkarakter Nasionalis-Religius**						
1	Tujuan:	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia	74,68	75,18	100,67%	Sangat Baik
			Tingkat Pengangguran Terbuka (Menurun)	45	5,1	98%	Baik
	Sasaran :	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan	Harapan Lama Sekolah	13,62	13,63	100,07%	Sangat Baik
			Rata-rata lama sekolah	8,24	8,26	100,24%	Sangat Baik
		Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan (Umur Harapan Hidup)	74,85	75,07	100,29%	Sangat Baik

No	Tujuan/Sasaran		Indikator	Target 2024	Realisasi 2024	Persentase Capaian	Kategori
		Meningkatnya kualitas tenaga kerja dan kesempatan kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	71,1	71,31	100,3%	Sangat Baik
2	Tujuan:	Menurunkan angka kemiskinan	Persentase Angka Kemiskinan (Menurun)	9,8	9,95	98,47%	Baik
	Sasaran :	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Berbasis Keluarga	Persentase Keluarga Sejahtera	84,78%	90,05%	106,22%	Sangat Baik
3	Tujuan:	Meningkatkan harmonisasi dan kondusifitas daerah	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	77,86	79	101,46%	Sangat Baik
	Sasaran :	Meningkatnya penerapan nilai nasionalisme, agama, dan semangat demokrasi di masyarakat	Tingkat kondusifitas daerah	100%	100%	100%	Sangat Baik
	Misi 2 **Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik**						

No	Tujuan/Sasaran		Indikator	Target 2024	Realisasi 2024	Persentase Capaian	Kategori
4	Tujuan:	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Reformasi Birokrasi	77	85,99*	111,68%	Sangat Baik
	Sasaran :	Membangun Institusional Pemerintahan yang Efektif dan Bersih	Nilai SAKIP	75	67,11	89,48%	Baik
			Indeks Kepuasan Masyarakat	86,35	88,74	102,77%	Sangat Baik
			Opini BPK	WTP	WTP*	100%	Sangat Baik
			Indeks Persepsi Anti Korupsi	3,74	3,85	102,94%	Sangat Baik
		Meningkatnya Profesionalitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN	70,1	81,62	116,43%	Sangat Baik
		Transformasi digital penyelenggaraan pelayanan public	Indeks SPBE	4,3	4,62	107,44%	Sangat Baik
	Misi 3 **Pengembangan Ekonomi Kerakyatan dan Peningkatan Investasi Daerah**						

No	Tujuan/Sasaran		Indikator	Target 2024	Realisasi 2024	Persentase Capaian	Kategori
5	Tujuan:	Meningkatkan Daya Saing Sektor Ekonomi Daerah	Pertumbuhan Ekonomi	4,8	4,95	103,13%	Sangat Baik
	Sasaran :	Meningkatnya investasi di daerah	Pertumbuhan Investasi Daerah	7%	29,99%	428,43%	Sangat Baik (diatas ekspektasi)
		Meningkatnya daya beli masyarakat	Indeks Pengeluaran (hitungan perbulan)	1.145.155	1.032.333	90,15%	Baik
	Misi 4 **Revitalisasi Pertanian untuk Ketahanan dan Swasembada Pangan**						
6	Tujuan:	Meningkatkan Daya Dukung dan Kemandirian Sektor Pertanian	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian	3,03	-1,73	-57,1%	Kurang Baik
	Sasaran :	Meningkatnya Ketersediaan Pangan dan Akses Pangan Masyarakat	Ketersediaan Pangan Utama	146,1	146,44	100,23%	Sangat Baik
		Meningkatnya Kesejahteraan Petani	Nilai Tukar Petani	104,44	104,69	100,24%	Sangat Baik
	Misi 5 **Peningkatan Infrastruktur dan Konektivitas antar Wilayah**						

No	Tujuan/Sasaran		Indikator	Target 2024	Realisasi 2024	Persentase Capaian	Kategori
7	Tujuan:	Menurunkan Kesenjangan antar Wilayah	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	68,1	69,84	102,56%	Sangat Baik
	Sasaran :	Meningkatnya Sarana Infrastruktur Daerah	Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik	80,5%	87%	108,07%	Sangat Baik
			Persentase Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik	70,5%	80,79%	114,6%	Sangat Baik
			Cakupan Penyelesaian Peraturan Tata Ruang	75%	100%	133,33%	Sangat Baik (diatas ekspektasi)
			Cakupan desa/kelurahan yang mendapat air minum	86%	86,08%	100,09%	Sangat Baik
			Persentase Rumah Layak Huni	49,67%	53,55%	107,81%	Sangat Baik
		Meningkatnya Pelayanan Transportasi Daerah	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Unit Layanan Perhubungan	86,59	87,44	100,98%	Sangat Baik
	Misi 6 **Optimalisasi Kepariwisataan berbasis Kearifan Lokal**						
8	Tujuan:	Meningkatkan Daya Saing Pariwisata Daerah	Pertumbuhan PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makanan Minum	9,79	9,7	99,08%	Baik

No	Tujuan/Sasaran		Indikator	Target 2024	Realisasi 2024	Persentase Capaian	Kategori
	Sasaran :	Meningkatnya Pendapatan Daerah dari Sektor Pariwisata	Pertumbuhan PAD Pariwisata	5%	10,95%	219%	Sangat Baik (diatas ekspektasi)
	Misi 7 **Optimalisasi Tata Kelola Lingkungan Hidup, Sumber Daya Alam dan Mitigasi Bencana**						
9	Tujuan:	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kelestarian Sumber Daya Alam	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	64,42	70,49	109,42%	Sangat Baik
	Sasaran :	Meningkatkan Kualitas Lingkungan	IKA	62,97	62,97	100%	Sangat Baik
			IKU	86,12	94,31	109,51%	Sangat Baik
			IKL	40,49	39,34	97,16%	Baik
		Meningkatnya Sinergitas antar Pemerintah, Masyarakat dan Swasta dalam Penanggulangan Bencana	Indeks Resiko Bencana	97,59	97,89	99,69%	Sangat Baik
	Misi 8						

No	Tujuan/Sasaran		Indikator	Target 2024	Realisasi 2024	Persentase Capaian	Kategori
	Pengembangan Seni Budaya, Olahraga dan Kreativitas Pemuda						
10	Tujuan:	Meningkatkan Potensi dan Budaya Generasi Muda Untuk Membangun Daerah	Indeks Kapasitas Lembaga Kepemudaan dan Olahraga	89	60	67,42%	Cukup Baik
			Tingkat Pelestarian Potensi Seni Budaya Daerah	98,11%	98,21%	100,1%	Sangat Baik
	Sasaran :	Meningkatnya Daya Dukung Generasi Muda Bagi Daerah	Persentase Prestasi Bidang Kepemudaan dan Olahraga yang dicapai	90%	65,28%	72,53%	Cukup Baik
		Meningkatnya pelestarian Seni Budaya Daerah	Cakupan Event Budaya Skala Kabupaten	35,68%	56,65%	158,77%	Sangat Baik (diatas ekspektasi)
	Misi 9 **Perwujudan Kemandirian Desa untuk Kesejahteraan Masyarakat**						

No	Tujuan/Sasaran		Indikator	Target 2024	Realisasi 2024	Persentase Capaian	Kategori
11	Tujuan:	Mendorong Daya Saing Ekonomi Masyarakat dan Desa	Rata-rata Indeks Desa Membangun Tingkat Kabupaten	0,75	0,78	104%	Sangat Baik
	Sasaran	Meningkatnya Kemandirian Masyarakat Desa	Persentase Desa Maju dan Desa Mandiri didasarkan IDM	84,55	94,46	111,72%	Sangat Baik

Sumber data : Bag. Organisasi SETDA Kab. Kediri

Capaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Kediri pada tahun 2024 ini terdapat 43 indikator, dengan mayoritas indikator kinerja utama Pemerintah Kabupaten Kediri dicapai dengan kategori sangat baik.

Tabel 14 PERBANDINGAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2024 DENGAN CAPAIAN DUA TAHUN TERAKHIR

No	Keterangan		Indikator	Capaian 2022			Capaian 2023			Capaian 2024		
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
	Misi 1 **Pengembangan Sumberdaya Manusia yang Berkarakter Nasionalis-Religius**											
1	Tujuan:	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia	73,358	74,20	100,14%	74,20	74,68	101,66%	74,68	75,18	100,67%
			Tingkat Pengangguran Terbuka	5	6,83	136,6 %	4,95	5,79	83,03%	5	5,1	98%
	Sasaran:	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan	Harapan Lama Sekolah	13,25	13,61	102,72%	13,61	13,62	100,07%	13,62	13,63	100,07%
			Rata-rata lama sekolah	8,10	8,23	101,60%	8,23	8,24	100,12%	8,24	8,26	100,24%
		Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas layanan Kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan (Umur Harapan Hidup)	72,61	74,58	102.7%	72,97	74,85	102,58%	74,85	75,07	100,29%

No	Keterangan		Indikator	Capaian 2022			Capaian 2023			Capaian 2024		
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
		Meningkatnya kualitas tenaga kerja dan kesempatan kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	70,9%	68,73%	96,93%	71	68,74	96,82%	71,1	71,31	100,3%
2	Tujuan:	Menurunkan angka kemiskinan	Persentase Angka Kemiskinan	9,832	10,65	91,68%	9,385	10,72	85,78%	9,8	9,95	98,47%
	Sasaran:	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Berbasis Keluarga	Persentase Keluarga Sejahtera	71,11%	70,8%	99,56%	71,61	84,78	118,39%	84,78%	90,05%	106,22%
3	Tujuan:	Meningkatkan harmonisasi dan kondusifitas daerah	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	60%	76,71	127,68%	76,61	77,86	101,63%	77,86	79	101,46%
	Sasaran:	Meningkatnya penerapan nilai nasionalisme, agama, dan semangat demokrasi di masyarakat	Tingkat kondusifitas daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Misi 2 **Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik**											

No	Keterangan		Indikator	Capaian 2022			Capaian 2023			Capaian 2024		
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Tujuan:	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Reformasi Birokrasi	68	65,66	96,55%	72	77	106,94%	77	85,99*	111,68%
	Sasaran:	Membangun Institusional Pemerintahan yang Efektif dan Bersih	Nilai SAKIP	69,5	68,33	98,3%	70,5	68,21	96,75%	75	67,11	89,48%
			Indeks Kepuasan Masyarakat	84	85,77	102,10%	85,77	86,35	100,68%	86,35	88,74	102,77%
			Opini BPK terhadap LKPD	WTP	WTP*	100%	WTP	WTP*	100%	WTP	WTP*	100%
			Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)	3,7	3,49	94,32%	3,72	3,49	93,82%	3,74	3,85	102,94%
		Meningkatnya Profesionalitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN	60	54,91	91,5%	63	70,1	111.27%	70,1	81,62	116,43%
		Transformasi digital penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks SPBE	4,04	2,61	64,60%	4,28	4,27	99,77%	4,3	4,62	107,44%

No	Keterangan		Indikator	Capaian 2022			Capaian 2023			Capaian 2024		
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
	Misi 3 **Pengembangan Ekonomi Kerakyatan dan Peningkatan Investasi Daerah**											
1	Tujuan:	Meningkatkan Daya Saing Sektor Ekonomi Daerah	Pertumbuhan Ekonomi	2,34	4,90	209,40%	4,90	4,53	92,45%	4,8	4,95	103,13%
	Sasaran:	Meningkatnya investasi di daerah	Pertumbuhan Investasi Daerah	5%	28,48%	569,6%	28%	26,16%	93,43%	7%	29,99%	428,43%
		Meningkatnya daya beli masyarakat	Indeks Pengeluaran (hitungan perbulan)	1.062.451	963.750	90,71%	1.145.155	996.000	86,98%	1.145.155	1.032.333	90,15%
	Misi 4 **Revitalisasi Pertanian untuk Ketahanan dan Swasembada Pangan**											
1	Tujuan:	Meningkatkan Daya Dukung dan Kemandirian Sektor Pertanian	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian	0,43	0,02	4,65%	0,43	3,03	704,65%	3,03	-1,73	-57,1%
	Sasaran:	Meningkatnya Ketersediaan Pangan dan Akses Pangan Masyarakat	Ketersediaan Pangan Utama	143,22	117,48	82,03%	144,65	128,08	88,54%	146,1	146,44	100,23%

No	Keterangan		Indikator	Capaian 2022			Capaian 2023			Capaian 2024		
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
		Meningkatnya Kesejahteraan Petani	Nilai Tukar Petani	103	103,5	100,4%	103,5	104,44	100,91%	104,44	104,69	100,24%
	Misi 5 **Peningkatan Infrastruktur dan Konektivitas antar Wilayah**											
1	Tujuan:	Menurunkan Kesenjangan antar Wilayah	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	66,90	66,82	99%	67,5	66,9	99,11%	68,1	69,84	102,56%
	Sasaran:	Meningkatnya Sarana Infrastruktur Daerah	Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik	88,17	87,99	99,79%	88,91%	79,08%	88,94%	80,5%	87%	108,07%
			Persentase Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik	77,12	74,68	96,83%	81,10%	69,18%	85,30%	70,5%	80,79%	114,6%
			Cakupan Penyelesaian Peraturan Tata Ruang	62,50	50	80%	62,5%	62,5%	100%	75%	100%	133,33%
			Cakupan desa atau kelurahan yang telah mendapatkan	78,28%	85,23%	108,87%	82%	86%	104,88%	86%	86,08%	100,09%

No	Keterangan		Indikator	Capaian 2022			Capaian 2023			Capaian 2024		
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
			layanan air minum									
			Persentase Rumah Layak Huni	16,48%	29,95%	181,72%	29,95%	41,14%	137,36%	49,67%	53,55%	107,81%
		Meningkatnya Pelayanan Transportasi Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap unit pelayanan perhubungan	65	86	132,30%	86	86,59	100,69%	86,59	87,44	100,98%
	Misi 6 **Optimalisasi Kepariwisataan berbasis Kearifan Lokal**											
1	Tujuan:	Meningkatkan Daya Saing Pariwisata Daerah	Pertumbuhan PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makanan Minum	1,41	12,40	1029,78%	12,40	9,79	78,95%	9,79	9,7	99,08%
	Sasaran:	Meningkatnya Pendapatan Daerah dari Sektor Pariwisata	Pertumbuhan PAD Pariwisata	1%	94,59%	9459%	95%	70,74%	74,5%	5%	10,95%	219%
	Misi 7											

No	Keterangan		Indikator	Capaian 2022			Capaian 2023			Capaian 2024		
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
	Optimalisasi Tata Kelola Lingkungan Hidup, Sumber Daya Alam dan Mitigasi Bencana											
1	Tujuan:	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kelestarian Sumber Daya Alam	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	53	64,79	122,2%	64,79	67,42	104,06%	64,42	70,49	109,42%
	Sasaran:	Meningkatkan Kualitas Lingkungan	IKA	62,77	62,22	99,12%	62,82	62,97	100,24%	62,97	62,97	100%
			IKU	77,5	80,94	104,43%	80,94	86,12	106,4%	86,12	94,31	109,51%
			IKL	37,42	39,34	105,13%	39,34	40,49	102,92%	40,49	39,34	97,16%
		Meningkatnya Sinergitas antar Pemerintah, Masyarakat dan Swasta dalam Penanggulangan Bencana	Indeks Resiko Bencana	123,59	112,47	109%	112,47	104,53	107,06%	97,59	97,89	99,69%
	Misi 8 **Pengembangan Seni Budaya, Olahraga dan Kreativitas Pemuda**											
1	Tujuan:	Meningkatkan Potensi dan Budaya Generasi Muda Untuk Membangun Daerah	Indeks Kapasitas Lembaga Kepemudaan dan Olahraga	82%	37,65%	45,91%	83	57,3	69,04%	89	60	67,42%

No	Keterangan		Indikator	Capaian 2022			Capaian 2023			Capaian 2024		
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
			Tingkat Pelestarian Potensi Seni Budaya Daerah	79,00	73,96	93,62	84	30,35	36,13%	98,11%	98,21%	100,1%
	Sasaran:	Meningkatnya Daya Dukung Generasi Muda Bagi Daerah	Persentase prestasi bidang kepemudaan dan olahraga yang dicapai	6%	25,57%	426,16%	85%	59,5%	70%	90%	65,28%	72,53%
		Meningkatnya pelestarian Seni Budaya Daerah	Cakupan Event Budaya Skala Kabupaten	80,00%	58,26%	72,83%	25.57%	35.86%	140.24%	35.68%	56.65%	158.77%
	Misi 9 **Perwujudan Kemandirian Desa untuk Kesejahteraan Masyarakat**											
1	Tujuan:	Mendorong Daya Saing Ekonomi Masyarakat dan Desa	Rata-rata Indeks Desa Membangun Tingkat Kabupaten	0,71	0,73	102,81%	0,73	0,75	103%	0,75	0,78	104%

No	Keterangan		Indikator	Capaian 2022			Capaian 2023			Capaian 2024		
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
	Sasaran	Meningkatnya Kemandirian Masyarakat Desa	Persentase desa mandiri dan desa maju didasarkan dari IDM	40,82	63,56	155,70%	63,56	84,55	133%	84,55%	94,46%	111,72%

Tabel 15 PERBANDINGAN REALISASI TAHUN 2024 DENGAN TARGET AKHIR RPJMD TAHUN 2021 – 2026

PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

No		Keterangan	Indikator	Realisasi 2024	Target Akhir RPJMD	Persentase Capaian
	Misi 1 **Pengembangan Sumberdaya Manusia yang Berkarakter Nasionalis-Religius**					
1	**Tujuan:**	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia	75,18	75,65	99,38%
			Tingkat Pengangguran Terbuka	5,1	4,6	89,13%
	Sasaran:	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas Pendidikan	Harapan Lama Sekolah	13,63	13,65	99,85%
			Rata-rata lama Sekolah	8,26	8,3	99,52%
		Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan (Umur Harapan Hidup)	75,07	72,87	103,02%
		Meningkatnya kualitas tenaga kerja dan kesempatan kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	71,31	71,5	99,73%
2	**Tujuan:**	Menurunkan angka kemiskinan	Persentase Angka Kemiskinan	9,95	8,04	76,24%
	Sasaran:	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Berbasis Keluarga	Persentase Keluarga	90.05%	73,11%	123,17%

No		Keterangan	Indikator	Realisasi 2024	Target Akhir RPJMD	Persentase Capaian
			Sejahtera			
3	**Tujuan:**	Meningkatkan harmonisasi dan kondusifitas daerah	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	79	70	112,86%
	Sasaran:	Meningkatnya penerapan nilai nasionalisme, agama, dan semangat demokrasi di masyarakat	Tingkat kondusifitas daerah	100%	100%	100%
	Misi 2 **Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik**					
1	**Tujuan:**	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Reformasi Birokrasi	85.99*	80	107.49%
	Sasaran:	Membangun Institusional Pemerintahan yang Efektif dan Bersih	Nilai SAKIP	67.11	82	81.84%
			Indeks Kepuasan Masyarakat	88.74	86	103.19%
			Opini BPK	WTP*	WTP	100%
			Indeks Persepsi Anti Korupsi	3,85	3,8	101,32%
		Meningkatnya Profesionalitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN	81,62	71	114,96%
		Transformasi digital penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks SPBE	4,62	5	92,4%
	Misi 3 **Pengembangan Ekonomi Kerakyatan dan Peningkatan Investasi Daerah**					

No		Keterangan	Indikator	Realisasi 2024	Target Akhir RPJMD	Persentase Capaian
1	**Tujuan:**	Meningkatkan Daya Saing Sektor Ekonomi Daerah	Pertumbuhan Ekonomi	4,95	6,22	79,58%
	Sasaran:	Meningkatnya investasi di daerah	Pertumbuhan Investasi Daerah	29,99%	9%	333,22%
		Meningkatnya daya beli masyarakat	Indeks Pengeluaran (hitungan perbulan)	1.032.333	1.393.267	74,09%
	Misi 4 **Revitalisasi Pertanian untuk Ketahanan dan Swasembada Pangan**					
1	**Tujuan:**	Meningkatkan Daya Dukung dan Kemandirian Sektor Pertanian	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian	-1,73	0,44	-393,18%
	Sasaran:	Meningkatnya Ketersediaan Pangan dan Akses Pangan Masyarakat	Ketersediaan Pangan Utama	146,44	149,04	98,26%
		Meningkatnya Kesejahteraan Petani	Nilai Tukar Petani	104,69	105	99,7%
	Misi 5 **Peningkatan Infrastruktur dan Konektivitas antar Wilayah**					
1	**Tujuan:**	Menurunkan Kesenjangan antar Wilayah	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	69,84	69,3	100,78%
	Sasaran:	Meningkatnya Sarana Infrastruktur Daerah	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik	87,00%	89,69%	97%
			Persentase Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik	80,79%	100%	80,79%
			Cakupan Penyelesaian Peraturan Tata Ruang	71,42%	71,42%	140,02%
			Cakupan desa/kelurahan yang mendapat air minum	93,15%	93,15%	92,41%

No		Keterangan	Indikator	Realisasi 2024	Target Akhir RPJMD	Persentase Capaian
			Persentase Rumah Layak Huni	82,51%	82,51%	64,9%
		Meningkatnya Pelayanan Transportasi Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Unit Layanan Perhubungan	86,25	86,25	101,38%
	Misi 6 **Optimalisasi Kepariwisataan berbasis Kearifan Lokal**					
1	**Tujuan:**	Meningkatkan Daya Saing Pariwisata Daerah	Pertumbuhan PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makanan Minum	9,7	5,04	192,46%
	Sasaran:	Meningkatnya Pendapatan Daerah dari Sektor Pariwisata	Pertumbuhan PAD Pariwisata	10,95%	9%	121,67%
	Misi 7 **Optimalisasi Tata Kelola Lingkungan Hidup, Sumber Daya Alam dan Mitigasi Bencana**					
1	**Tujuan:**	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kelestarian Sumber Daya Alam	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	70,49	65	108,45%
	Sasaran:	Meningkatkan Kualitas Lingkungan	IKA	62,97	62,97	100%
			IKU	94,31	77,68	121,41%
			IKL	39,34	37,42	105,13%
		Meningkatnya Sinergitas antar Pemerintah, Masyarakat dan Swasta dalam Penanggulangan Bencana	Indeks Resiko Bencana	97,89	116,32	115,84%
	Misi 8 **Pengembangan Seni Budaya, Olahraga dan Kreativitas Pemuda**					

No		Keterangan	Indikator	Realisasi 2024	Target Akhir RPJMD	Persentase Capaian
1	**Tujuan:**	Meningkatkan Potensi dan Budaya Generasi Muda Untuk Membangun Daerah	Indeks Kapasitas Lembaga Kepemudaan dan Olahraga	60	99	60,61%
			Tingkat Pelestarian Potensi Seni Budaya Daerah	98,21%	90%	109,12%
	Sasaran:	Meningkatnya Daya Dukung Generasi Muda Bagi Daerah	Persentase Prestasi Bidang Kepemudaan dan Olahraga yang dicapai	65,28%	100%	65,28%
		Meningkatnya pelestarian Seni Budaya Daerah	Cakupan Event Budaya Skala Kabupaten	56,65%	10%	566,5%
	Misi 9 Perwujudan Kemandirian Desa untuk Kesejahteraan Masyarakat					
1	**Tujuan:**	Mendorong Daya Saing Ekonomi Masyarakat dan Desa	Rata-rata Indeks Desa Membangun Tingkat Kabupaten	0,78	0,75	104%
	Sasaran	Meningkatnya Kemandirian Masyarakat Desa	Persentase Desa Maju dan Desa Mandiri didasarkan IDM	94,46%	68,8%	137,30%

3.2. Analisa Efisiensi Sumber Daya

Analisa efisiensi digunakan untuk mengukur ketepatan cara dalam mencapai target dalam menjalankan sesuatu dengan memerhatikan waktu, tenaga, biaya. Analisa dalam hal ini menggunakan pendekatan perbandingan hasil realisasi kinerja dan realisasi anggaran. Hasil perbandingan tersebut dikategorisasikan menggunakan pendekatan jika perhitungan efisiensi menghasilkan angka lebih dari 0 maka proses yang dihasilkan dalam mencapai indikator tersebut efisien. Namun jika perhitungan yang dihasilkan kurang dari 0 maka proses yang dihasilkan dalam mencapai indikator tersebut tidak efisien.

Efisiensi merupakan hal penting untuk meninjau proses yang telah dilaksanakan. Dari analisa efisiensi tersebut menggambarkan ketepatan dalam sisi manajemen waktu, tenaga yang terfokus, dan penggunaan biaya yang sesuai. Apabila hasil analisa masuk kedalam kategori efisien, maka dapat disimpulkan bahwa proses pelaksanaan kinerja tersebut memiliki tingkat ketepatan waktu yang tinggi, ketepatan tenaga, dan ketepatan alokasi biaya yang tinggi. Namun, apabila hasil analisa masuk kedalam kategori tidak efisien maka didapati adanya proses pelaksanaan kinerja yang memiliki tingkat ketepatan waktu yang rendah, ketepatan tenaga yang rendah, serta ketepatan alokasi biaya yang rendah.

Kendati demikian, tidak mengesampingkan pula terdapatnya faktor-faktor eksternal yang berdampak besar terhadap pencapaian kinerja. Baik itu berdampak positif ataupun berdampak negatif, diluar proses internal yang telah dilaksanakan. Oleh karena demikian, faktor-faktor eksternal tersebut turut dijadikan variabel pencapaian kinerja disamping faktor- faktor proses pelaksanaan kinerja secara internal. Faktor penunjang dan penghambat tersebut dijelaskan dalam penjelasan pelaksanaan sasaran strategis.

Analisa efisiensi Sumber Daya dianalisa dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\frac{Realisasi\ Kinerja}{Target\ Kinerja} \times 100 - \frac{Realisasi\ Anggaran}{Alokasi\ Anggaran} \times 100 = Hasil\ Efisiensi$$

Rentang kategorisasi yang digunakan adalah sebagai berikut:

Tabel 16 Rentang Kategori Efisiensi

No	Hasil Analisa Efisiensi	Kategori
1	≥ 0	Efisien
2	0 <	Tidak Efisien

Sumber data : Bag. Organisasi SETDA Kab. Kediri

Analisa efisiensi dari Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Kediri tahun 2024 terdapat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 17 PERBANDINGAN KINERJA DAN ANGGARAN PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator	Kinerja			Anggaran			Efisiensi	Ket
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)		
	Misi 1 **Pengembangan Sumberdaya Manusia yang Berkarakter Nasionalis-Religius**									
1	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan	Harapan Lama Sekolah	13,62	13,63	100,07%	312.211.153.200	301.318.175.007	96,51%	3,56%	Efisien
		Rata-rata lama Sekolah	8,24	8,26	100,24%					
2	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan (Umur Harapan Hidup)	74,85	75,07	100,29%	186.687.674.880	175.148128.063	93,82%	6,48%	Efisien
3	Meningkatnya kualitas tenaga kerja dan kesempatan kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	71,1	71,31	100,3%	1 6.458.146.234	16.193.289.855	98,39%	1,90%	Efisien
4	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Berbasis Keluarga	Persentase Keluarga Sejahtera	84,78%	90,05%	106,22%	30.604.155.552,00	28.166.617.946,00	92,04%	14,18%	Efisien

5	Meningkatnya penerapan nilai nasionalisme, agama, dan semangat demokrasi di Masyarakat	Tingkat kondusivitas daerah	100%	100%	100,00%	10.101.980.000	10.092.850.434	99,91%	0,09%	Efisien
	Misi 2 **Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik**									
6	Membangun Institusional Pemerintahan yang Efektif dan Bersih	Nilai SAKIP	75	67,11	89,48%	740.395.029.749	729.180.657.640	98,49%	0,31%	Belum efektif
		Indeks Kepuasan Masyarakat	86,35	88,74	102,77%					
		Opini BPK terhadap LKPD	WTP	WTP*	100,00%					
		Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)	3,74	3,85	102,94%					
7	Meningkatnya Profesionalitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN	70,1	81,62	116,43%	12.338.157.561,00	11.288.326.422,00	91,49%	24,94%	Efisien

8	Transformasi digital penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks SPBE	4,52	4,62	102,21%	5.187.306.000,00	5.079.466.720,00	98%	4,29%	Efisien
	Misi 3 **Ekonomi Kerakyatan dan Peningkatan Investasi Daerah**									
9	Meningkatnya investasi di daerah	Pertumbuhan investasi daerah	7%	29,78%	425,45%	7.869.748.279,00	7.417.337.605,00	94,25%	331,20%	Efisien (Diatas Ekspektasi)
10	Meningkatnya daya beli masyarakat	Indeks Pengeluaran (hitungan perbulan)	1.145.155	1.032.333	90,15%	26.221.565.498,00	25.440.326.428,00	97,02%	-12,94%	Tidak Efisien
	Misi 4 **Revitalisasi Pertanian untuk Ketahanan dan Swasembada Pangan**									
11	Meningkatnya Ketersediaan Pangan dan Akses Pangan Masyarakat	Ketersediaan Pangan Utama	146,1	146,44	100,23%	4.090.217.400,00	4.071.769.350,00	99,55%	0,68%	Efisien
12	Meningkatnya Kesejahteraan Petani	Nilai Tukar Petani	104	104,65	100,62%	66.375.730.892,00	64.616.329.418,00	97,35%	3,27%	Efisien
	Misi 5 **Infrastruktur dan Konektivitas antar Wilayah**									

13	Meningkatnya Sarana Infrastruktur Daerah	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik	80.50% (PK) / 89.16%	87,00%	97,58%	97901983165	94277649241	96,3%	4,9%	Efisien
		Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	70.50% (PK) / 86.01%	80,79%	93,93%					
		Cakupan Penyelesaian Peraturan Tata Ruang	75% (PK) / 100%	100,00%	100,00%					
		Cakupan desa atau kelurahan yang telah mendapatkan layanan air minum	86%	86%	100,10%					
		Persentase Rumah Layak Huni	49,67%	53,55%	114,74%					
14	Meningkatnya Pelayanan Transportasi Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap unit pelayanan perhubungan	86.59 (PK)/86.70	87,44	100,85%	855.134.124,00	841.095.680,00	98,36%	2,49%	Efisien
	Misi 6 **Optimalisasi Kepariwisataan berbasis Kearifan Lokal**									
15	Meningkatnya Pendapatan	Pertumbuhan PAD Pariwisata	5%	10,95%	219,00%	15.789.352.019,00	15.362.048.485,00	97,29%	121,71%	Efisien (Diatas

	Daerah dari Sektor Pariwisata									Ekspektasi)
	Misi 7 **Optimalisasi Tata Kelola Lingkungan Hidup, Sumber Daya Alam dan Mitigasi Bencana**									
16	Meningkatkan Kualitas Lingkungan	IKA	62,87	62,97	100,16%	16.797.351.695,00	15.845.775.463,00	94,33%	5,83%	Efisien
		IKU	86,12	94,31	109,51%	21.180.128.383,00	17.640.362.188,00	83,29%	26,22%	Efisien
		IKL	40,49	39,34	97,16%	1.265.200.200,00	1.200.639.050,00	94,90%	2,26%	Belum Efektif
17	Meningkatnya Sinergitas antar Pemerintah, Masyarakat dan Swasta dalam Penanggulangan Bencana	Indeks Resiko Bencana	97,59	97,89	100,31%	5.338.031.327,00	4.119.363.699,00	77,17%	23,14%	Efisien
	Misi 8 **Pengembangan Seni Budaya, Olahraga dan Kreativitas Pemuda**									
18	Meningkatnya Daya Dukung Generasi Muda Bagi Daerah	Persentase prestasi bidang kepemudaan dan olahraga yang dicapai	90%	65,28%	72,53%	1.491.924.200,00	1.336.260.550,00	89,57%	-17,03%	Tidak Efektif
19	Meningkatnya pelestarian Seni Budaya Daerah	Cakupan Event Budaya Skala Kabupaten	35,68%	56,65%	158,77%	6.943.567.833,00	6.877.835.399,00	99,05%	59,72%	Efisien (Diatas Ekspektasi)
	Misi 9									

	Perwujudan Kemandirian Desa untuk Kesejahteraan Masyarakat									
20	Meningkatnya Kemandirian Masyarakat Desa	Persentase desa mandiri dan desa maju didasarkan dari IDM	84,55%	94,46%	111,72%	17.012.033.080,00	16.137.059.528,00	94,86%	17%	Efisien

Dari perhitungan diatas, mayoritas capaian efisiensi sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Kediri masuk dalam kategori efisien.

Tabel 18 PERBANDINGAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DENGAN CAPAIAN PROVINSI DAN NASIONAL PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2024

No		Tujuan/Sasaran	Indikator	Kabupaten Kediri	Provinsi Jawa Timur	Nasional	Sumber Data	Keterangan
	Misi 1 **Pengembangan Sumberdaya Manusia yang Berkarakter Nasionalis-Religius**							
1	**Tujuan:**	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia	75,18	75,35	75,02	BPS	Provinsi (-) Nasional (+)
			Tingkat Pengangguran Terbuka	5.1	4.19	5.91	BPS	Provinsi (+) Nasional (-)
	Sasaran :	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas Pendidikan	Harapan Lama Sekolah	13,63	13,43	13,2	BPS dalam Penyamapaian Dinas Pendidikan	Provinsi (+) Nasional (+)
			Rata-rata lama sekolah	8,26	8,28	8,85	BPS dalam Penyampaian Dinas Pendidikan	Provinsi (-) Nasional (-)
		Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan (Umur Harapan Hidup)	75,07	72,35	72,39	BPS dalam Penyamapaian Dinas Kesehatan	Provinsi (+) Nasional (+)
		Meningkatnya kualitas tenaga kerja dan kesempatan kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	71,31	73,45	71,1	BPS dalam Penyampaian Disnaker	Provinsi (-) Nasional (+)
2	**Tujuan:**	Menurunkan angka kemiskinan	Persentase Angka	9,95	9,79	8,75	BPS	Provinsi (-) Nasional (-)

No		Tujuan/Sasaran	Indikator	Kabupaten Kediri	Provinsi Jawa Timur	Nasional	Sumber Data	Keterangan
			Kemiskinan					
	Sasaran :	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Berbasis Keluarga	Persentase Keluarga Sejahtera	90,05	90,21	90,97	Data diolah DP2KBP 3A	Provinsi (-) Nasional (-)
3	**Tujuan:**	Meningkatkan harmonisasi dan kondusifitas daerah	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	79	82.01*	79.51*	BPS	Provinsi (-) Nasional (-)
	Sasaran :	Meningkatnya penerapan nilai nasionalisme, agama, dan semangat demokrasi di Masyarakat	Tingkat kondusifitas daerah	100%	No Data	No Data	-	Provinsi (=)
	Misi 2 **Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik**							
4	**Tujuan:**	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Reformasi Birokrasi	85,99	No Data	No Data	Kementerian PAN & RB	Provinsi (-)
	Sasaran :	Membangun Institusional Pemerintahan yang Efektif dan Bersih	Nilai SAKIP	67,81	A	No Data	Kementerian PAN & RB dalam Penyampaian Bag. Organisasi	Provinsi (-)
			Indeks Kepuasan Masyarakat	88,74	88,42	No Data	Biro Organisasi Prov.	Provinsi (+) Nasional (-)

No		Tujuan/Sasaran	Indikator	Kabupaten Kediri	Provinsi Jawa Timur	Nasional	Sumber Data	Keterangan
							Jatim dalam Penyampaian Bag. Organisasi	
			Opini BPK terhadap LKPD	WTP	WTP	No Data	Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam Penyampaian BPKAD	Provinsi (=)
			Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)	3,85	No Data	3,85	BPS dalam Penyampaian Inspektorat	Nasional (=)
		Meningkatnya Profesionalitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN	81,62	89,59	No Data	BKN dalam Penyampaian BKD	Provinsi (-)
		Transformasi digital penyelenggaraan pelayanan public	Indeks SPBE	4,62	4,43	4,75	Kementerian PAN & RB dalam Penyampaian Dinas Kominfo	Provinsi (+) Nasional (-)

No		Tujuan/Sasaran	Indikator	Kabupaten Kediri	Provinsi Jawa Timur	Nasional	Sumber Data	Keterangan
	Misi 3 **Pengembangan Ekonomi Kerakyatan dan Peningkatan Investasi Daerah**							
5	**Tujuan:**	Meningkatkan Daya Saing Sektor Ekonomi Daerah	Pertumbuhan Ekonomi	4,95	4,93	5,03	BPS dalam Kabupaten Kediri dalam Angka, Berita Resmi Statistik Provinsi Jawa Timur No. 12/02/35/ Th. XXIII, 5 Februari 2025, Berita Resmi Statistik Nasional No. 17/02/Th. XXVIII, 5 Februari 2025	Provinsi (-) Nasional (-)
	Sasaran :	Meningkatnya investasi di daerah	Pertumbuhan Investasi Daerah	29,78%	1,52%	20,81%	Kementerian Investasi/ BKPM dalam Penyamp	Provinsi (+) Nasional (+)

No		Tujuan/Sasaran	Indikator	Kabupaten Kediri	Provinsi Jawa Timur	Nasional	Sumber Data	Keterangan
							aian DPMPTSP	
		Meningkatnya daya beli masyarakat	Indeks Pengeluaran (hitungan perbulan)	1.032.333,00	1.071.000,00	1.028.417,00	BPS dalam Penyampaian Dinas Perdagangan	Provinsi (-) Nasional (+)
	Misi 4 **Revitalisasi Pertanian untuk Ketahanan dan Swasembada Pangan**							
6	**Tujuan:**	Meningkatkan Daya Dukung dan Kemandirian Sektor Pertanian	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian	-1,73	0,07	0,67	BPS dalam Kabupaten Kediri dalam Angka, Berita Resmi Statistik Provinsi Jawa Timur No. 12/02/35/ Th. XXIII, 5 Februari 2025, Berita Resmi Statistik Nasional	Provinsi (-) Nasional (-)

No		Tujuan/Sasaran	Indikator	Kabupaten Kediri	Provinsi Jawa Timur	Nasional	Sumber Data	Keterangan
							No. 17/02/Th. XXVIII, 5 Februari 2025	
	Sasaran :	Meningkatnya Ketersediaan Pangan dan Akses Pangan Masyarakat	Ketersediaan Pangan Utama	146,44	129,14	108,33	Data Pengolahan DKPP Kabupaten Kediri dengan Asumsi Data Produksi Pangan Utama dibagi Jumlah Penduduk	Provinsi (+) Nasional (+)
		Meningkatnya Kesejahteraan Petani	Nilai Tukar Petani	104,65	111,96	116,79	BPS dalam Penyampaian Dipertabun	Provinsi (-) Nasional (-)
	Misi 5 **Peningkatan Infrastruktur dan Konektivitas antar Wilayah**							
7	**Tujuan:**	Menurunkan Kesenjangan antar Wilayah	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	69,84	No Data	No Data		

No		Tujuan/Sasaran	Indikator	Kabupaten Kediri	Provinsi Jawa Timur	Nasional	Sumber Data	Keterangan
	Sasaran :	Meningkatnya Sarana Infrastruktur Daerah	Proporsi Panjang jaringan jalan Kabupaten dalam kondisi baik	87,00%	56.68*	39.38*	https://indonesiabaik.id/infografis/seberapa-panjang-jalan-nasional-kita https://radarsurabaya.jawapos.com/jatim/775470452/bps-kondisi-kemantapan-jalan-nasional-di-provinsi-jatim-sangat-baik	Provinsi (+) Nasional (+)
			Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	80,79%	68.95%*	-	LKJIP 2023 DPUSDA Prov Jatim dalam https://dpuair.jatimprov.go.id/asset/dokumen/w	Provinsi (+)

No		Tujuan/Sasaran	Indikator	Kabupaten Kediri	Provinsi Jawa Timur	Nasional	Sumber Data	Keterangan
							ny9D-LKjIP%202023%20Dinas%20PUSDA.pdf - Hal 26	
			Cakupan Penyelesaian Peraturan Tata Ruang	100,00%	No Data	No Data	-	
			Cakupan desa atau kelurahan yang telah mendapatkan layanan air minum	86,08%	96,93%	91,72%	Dinas PRKPCK Jatim dan Kementerian PUPR dalam Penyampaian Dinas Perkim	Provinsi (-) Nasional (-)
			Persentase Rumah Layak Huni	65,25%	73,40%	65,25%	Dinas PRKPCK Jatim dan Kementerian PUPR dalam Penyampaian Dinas Perkim	Provinsi (-) Nasional (-)
		Meningkatnya Pelayanan Transportasi Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap unit pelayanan perhubungan	87,44	91,46	No Data	Biro Organisasi Prov. Jatim	Provinsi (-)

No		Tujuan/Sasaran	Indikator	Kabupaten Kediri	Provinsi Jawa Timur	Nasional	Sumber Data	Keterangan
							dalam Ekspose Nilai IKM melalui https://sukma.jatimprov.go.id/fe/pd?tahun=2024	
	Misi 6 **Optimalisasi Kepariwisataan berbasis Kearifan Lokal**							
8	**Tujuan:**	Meningkatkan Daya Saing Pariwisata Daerah	Pertumbuhan PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9,7	6,98	8,56	BPS dalam Kab. Kediri dalam Angka, Berita Resmi Statistik Prov. Jatim No. 12/02/35/Th. XXIII, 5 Feb 2025, Berita Resmi Statistik Nasional No. 17/02/Th. XXVIII, 5	Provinsi (+) Nasional (+)

No		Tujuan/Sasaran	Indikator	Kabupaten Kediri	Provinsi Jawa Timur	Nasional	Sumber Data	Keterangan
							Februari 2025	
	Sasaran :	Meningkatnya Pendapatan Daerah dari Sektor Pariwisata	Pertumbuhan PAD Pariwisata	10,95%	No Data	No Data	-	
	Misi 7 **Optimalisasi Tata Kelola Lingkungan Hidup, Sumber Daya Alam dan Mitigasi Bencana**							
9	**Tujuan:**	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kelestarian Sumber Daya Alam	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten	70,49	71,14	73,55	Kementerian LHK dalam Penyampaian DLH	Provinsi (-) Nasional (-)
	Sasaran :	Meningkatkan Kualitas Lingkungan	IKA	62,97	54,75	54,75	Kementerian LHK dalam Penyampaian DLH	Provinsi (+) Nasional (+)
			IKU	94,31	88,09	90,18	Kementerian LHK dalam Penyampaian DLH	Provinsi (+) Nasional (+)
			IKL	39,34	49,3	62,01	Kementerian LHK dalam Penyampaian DLH	Provinsi (-) Nasional (-)

No		Tujuan/Sasaran	Indikator	Kabupaten Kediri	Provinsi Jawa Timur	Nasional	Sumber Data	Keterangan
		Meningkatnya Sinergitas antar Pemerintah, Masyarakat dan Swasta dalam Penanggulangan Bencana	Indeks Resiko Bencana	97,89	95,75	No Data	BNPB dan BPBD Prov. Jatim dalam Penyampaian BPBD	Provinsi (+)
	Misi 8 **Pengembangan Seni Budaya, Olahraga dan Kreativitas Pemuda**							
10	**Tujuan:**	Meningkatkan Potensi dan Budaya Generasi Muda Untuk Membangun Daerah	Indeks Kapasitas Lembaga Kepemudaan dan Olahraga	60	No Data	No Data	-	
			Tingkat Pelestarian Potensi Seni Budaya Daerah	98,21%	No Data	No Data	-	
	Sasaran :	Meningkatnya Daya Dukung Generasi Muda Bagi Daerah	Persentase prestasi bidang kepemudaan dan olahraga yang dicapai	65,28%	No Data	No Data	-	
		Meningkatnya pelestarian Seni Budaya Daerah	Cakupan Event Budaya Skala Kabupaten	56,65%	No Data	No Data	-	
	Misi 9 **Perwujudan Kemandirian Desa untuk Kesejahteraan Masyarakat**							
11	**Tujuan:**	Mendorong Daya Saing Ekonomi Masyarakat dan Desa	Rata-rata Indeks Desa Membangun Tingkat Kabupaten	0,78	No Data	No Data	Kementerian Desa & PTT dalam	

No		Tujuan/Sasaran	Indikator	Kabupaten Kediri	Provinsi Jawa Timur	Nasional	Sumber Data	Keterangan
							Penyampaian DPMPD Kab. Kediri	
	Sasaran	Meningkatnya Kemandirian Masyarakat Desa	Persentase desa mandiri dan desa maju didasarkan dari IDM	94,46%	89,92%	53,50%	Kementerian Desa & PTT dalam Penyampaian DPMPD Kab. Kediri	Provinsi (+) Nasional (+)

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kab. Kediri

Keterangan:

1. (+) Lebih tinggi
2. (-) Lebih rendah

3.3. Akuntabilitas Kinerja

Kinerja Pemerintah Kabupaten Kediri pada tahun 2024 ini akan ditinjau dari berbagai perspektif. Terutama dalam upaya pencapaian Indikator Kinerja Utama, pelaksanaan agenda kinerja, capaian kinerja organisasi, realisasi agenda kinerja dan benchmarking, realisasi anggaran dan analisa efisiensi sumber daya, analisa faktor penunjang dan penghambat, gap analysis, kinerja lain-lain, dan evaluasi dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Merujuk pada konsep akuntabilitas, penjelasan tentang akuntabilitas kinerja dalam penjelasan berikutnya didasarkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), prosedur dan alur manajemen, menakisme komunikasi dan koordinasi, pelaksanaan operasional, dan manajemen kinerja yang bermutu. Konsep-konsep secara operasional akan dijelaskan menggunakan pendekatan-pendekatan lain yang relevan dengan sistem akuntabilitas.

3.3.1 Analisa Akuntabilitas Kinerja

Analisa Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Kediri Tahun 2024 dengan hasil sebagai berikut :

Tabel 19 MATRIKULASI PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN KINERJA

No		Tujuan/Sasaran	Program	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
	Misi 1 **Pengembangan Sumberdaya Manusia yang Berkarakter Nasionalis-Religius**							
1	Sasaran:	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan SD yang terakreditasi A	40,00%	16,31%	40,78%	Kurang Baik
				Persentase Satuan Pendidikan SMP yang terakreditasi A	55,00%	58,59%	106,53%	Sangat Baik
				Persentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum	57,00%	84,34%	147,96%	Sangat Baik
				Persentase siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum	35,00%	78,68%	224,80%	Sangat Baik
				Persentase Satuan PAUD yang terakreditasi	20,00%	83,02%	415,10%	Sangat Baik
				Cakupan pelayanan pendidikan Nonformal/kesetaraan	55,00%	97,37%	177,04%	Sangat Baik

No		Tujuan/Sasaran	Program	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
			Program Pengembangan Kurikulum	Persentase LKP/PKBM yang terakreditasi	40%	61,29%	153,23%	Sangat Baik
			Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase penerapan kurikulum muatan lokal pada satuan pendidikan	100%	100%	100,00%	Sangat Baik
			Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Rasio guru satuan SD, SMP, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan terhadap peserta didik SD, SMP, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	01,16	01,17	98,70%	Baik
		Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan Masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan	Cakupan Fasilitasi Pelayanan UKP dan UKM	100%	100%	100,00%	Sangat Mendukung
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase kecukupan rasio dan kompetensi tenaga kesehatan	100%	35%	35,00%	Kurang Mendukung
			Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Prosentase Pemberian Rekomendasi Apotek, To, Tk. Alkes Dan Optikal, Umot	75%	100%	133.33%	Sangat Mendukung
				Prosentase Produk Makanan Minuman Tertentu Yang Bersertifikat P-IRT	75%	100%	133.00%	Sangat Mendukung
			Program Pemberdayaan	Persentase UKBM Purnama Mandiri	68%	41%	60,29%	Cukup Mendukung

No		Tujuan/Sasaran	Program	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
			Masyarakat Bidang Kesehatan	(Posyandu balita, poskestren, poskesdes, SBH, desa siaga)				
			Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase OPD yang responsif gender	100%	100%	100,00%	Sangat Mendukung
			Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase Kegiatan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak yang dilaksanakan di tingkat desa	100%	100%	100,00%	Sangat Mendukung
			Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase kasus kekerasan terhadap anak yang diselesaikan oleh P2TP2A	87%	87%	100,00%	Sangat Mendukung
		Meningkatnya kualitas tenaga kerja dan kesempatan kerja	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	59%	83,23%	141,07%	Sangat Mendukung
			Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	14%	15,53%	110,93%	Sangat Mendukung
			Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme Layanan Antar Kerja	95%	91,43%	96,24%	Mendukung

No		Tujuan/Sasaran	Program	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
				dalam wilayah kabupaten/kota				
			Program Hubungan Industrial	Persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial	9%	5,29%	58,78%	Kurang Mendukung
			Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan melalui mekanisme transmigrasi	10%	14,29%	142,90%	Sangat Mendukung
	Sasaran:	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Berbasis Keluarga	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Potensi masyarakat yang diberdayakan	100%	100%	100,00%	Sangat Mendukung
			Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Persentase Warga Migran korban kekerasan yang ditangani	100%	9%	9%	Kurang Mendukung
			Program Rehabilitasi Sosial	Persentasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang direhabilitasi	100%	96%	96%	Mendukung
			Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Masyarakat Pemerlu Pelayanan Sosial yang mendapat Perlindungan dan Jaminan Sosial	100%	98%	98%	Mendukung
			Program Penanganan Bencana	Persentase Bencana yang ditangani	100%	87%	87%	Mendukung

No		Tujuan/Sasaran	Program	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
			Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase Taman Makam Pahlawan yang dikelola	100%	98%	98%	Mendukung
			Program Pengendalian Penduduk	Persentase desa/kelurahan yang memiliki data mikro	100%	100%	100%	Sangat Mendukung
			Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)		10,29	7,9	76,77%	Cukup Mendukung
			Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Cakupan keluarga sasaran menjadi anggota kelompok kegiatan (BKB, BKR, BKL)	BKB 32.98% BKR 28.26% BKL 36.32%	BKB 35.87% BKR 30.15% BKL 37.09%	105,85%	Sangat Mendukung
	Sasaran:	Meningkatnya penerapan nilai nasionalisme, agama, dan semangat demokrasi di masyarakat	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Cakupan kelompok yang dibina tentang ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	85%	100%	118%	Sangat Mendukung
			Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase partai politik yang difasilitasi	90%	100%	111%	Sangat Mendukung
			Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Pembinaan Ormas	80%	98%	123%	Sangat Mendukung

No		Tujuan/Sasaran	Program	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
			Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya	Persentase kelompok masyarakat yang dibina terkait narkoba, kerukunan beragama dan kepercayaan	80%	87%	109%	Sangat Mendukung
			Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik SOsial	Persentase konflik sosial yang ditindak lanjuti	90%	100%	111%	Sangat Mendukung
	Misi 2 **Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik**							
	Sasaran:	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota					
			Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah bahan kebijakan perencanaan tahunan daerah	100	100	100.00%	Sangat Mendukung
			Analisis Data dan Informasi Pemerintah Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah bahan kebijakan analissi data dan informasi daerah	100	100	100.00%	Sangat Mendukung
			Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang	Jumlah bahan kebijakan pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang	100	100	100.00%	Sangat Mendukung

No		Tujuan/Sasaran	Program	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
			perencanaan Pembangunan Daerah	perencanaan pembangunan				
			Koordinasi Perencanaaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah bahan kebijakan perencanaan bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100	100	100.00%	Sangat Mendukung
			Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA	Jumlah bahan kebijakan perencanaan bidang Perekonomian dan SDA	100	100	100.00%	Sangat Mendukung
			Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah bahan kebijakan perencanaan bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100	100	100.00%	Sangat Mendukung
			Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase dokumen Rencana Anggaran Daerah yang tersusun	100%	113.09%	113.09%	Sangat Mendukung
			Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase dokumen perbendaharaan yang diterbitkan	100%	237.65%	237.65%	Sangat Mendukung
			Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase dokumen perbendaharaan yang diterbitkan	100%	242.22%	242.22%	Sangat Mendukung
			Penunjang Urusan Kewenangan	Persentase dokumen Penunjang Urusan Kewenangan	100%	300.00%	300.00%	Sangat Mendukung

No		Tujuan/Sasaran	Program	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
			Pengelolaan Keuangan Daerah	Pengelolaan Keuangan Daerah				
			Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Persentase Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	100%	4.17%	4.17%	Mendukung
			Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase dokumen pengelolaan BMD yang tersusun	100%	94.59%	94.59%	Mendukung
			Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Cakupan Pengelolaan Pendapatan Daerah				
			Program Penyelenggaraan Pengawasan	Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	Sangat Mendukung
			Penyelenggaraan Pengawasan Internal		100%	53%	53.00%	
			Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu		100%	71%	71.00%	
		Meningkatnya Profesionalitas ASN	Program Kepegawaian Daerah	Indeks Profesionalisme dimensi Kinerja dan Disiplin	29,82	30,47	102,18%	Sangat Mendukung
			Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Indeks Profesionalisme dimensi Kompetensi dan Kualifikasi	36,18	51,65	142,76%	Sangat Mendukung
		Transformasi digital	Program Aplikasi Informatika	Indeks SPBE	4.5	4.62	102.67%	Sangat Mendukung

No		Tujuan/Sasaran	Program	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
		penyelenggaraan pelayanan public	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral	2	2.5	125.00%	Sangat Mendukung
			Program Penyeenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	3	3.1	103.33%	Sangat Mendukung
			Program Informasi dan Komunikasi Publik	Cakupan layanan informasi dan komunikasi publik	4	4.2	105.00%	Sangat Mendukung
	Misi 3 **Pengembangan Ekonomi Kerakyatan dan Peningkatan Investasi Daerah**							
	Sasaran:	Meningkatnya investasi di daerah	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase investor yang diberikan insentif	25%	25%	100%	Sangat Mendukung
			Program Promosi Penanaman Modal	Prosentase pelaksanaan strategi dan kegiatan promosi yang dilaksanakan	100%	100%	100%	Sangat Mendukung
			Program Pelayanan Penanaman Modal	Prosentase pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu	100%	100%	100%	Sangat Mendukung
			Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Prosentase kegiatan pengendalian pelaksanaan penanaman	82%	122,15%	149%	Sangat Mendukung
			Program Pengelolaan Data dan Sistem	Prosentase pengelolaan data dan sistem	100%	100%	100%	Sangat Mendukung

No		Tujuan/Sasaran	Program	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
			Informasi Penanaman Modal	informasi penanaman modal				
		Meningkatnya daya beli masyarakat	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Tingkat pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi	17,36%	13,37%	77%	Cukup Mendukung
			program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam yang cukup sehat	1,71%	1,15%	67%	Cukup Mendukung
			Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	Persentase SDM Koperasi terlatih	0,20%	0,16%	80%	Mendukung
			Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase Partisipasi Koperasi Aktif	33,67%	34,49%	102%	Sangat Mendukung
			Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Partisipasi Usaha Mikro	26,02%	24,41%	94%	Mendukung
			Program Pengembangan UMKM	Persentase Usaha Mikro yang meningkat omsetnya	9,87%	8,42%	85,31%	Mendukung
			Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Pasar yang memenuhi standar	50%	50%	100,00%	Sangat Mendukung
			Program Stabilisasi Harga Barang	Persentase Stabilisasi Harga Barang	90%	90%	100,00%	Sangat Mendukung

No		Tujuan/Sasaran	Program	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
			Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Kebutuhan Pokok dan Barang Penting				
			Program Pengembangan Ekspor	Persentase Produk Ekspor Unggulan	70%	70%	100,00%	Sangat Mendukung
			Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Persentase Pelaku Usaha yang memenuhi Uji Metrologi Legal	90%	90%	100,00%	Sangat Mendukung
			Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase Kegiatan Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	1,93%	1,93%	100,00%	Sangat Mendukung
			Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Pertumbuhan industri yang terstandarisasi	15%	15%	100,00%	Sangat Mendukung
			Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Cakupan layanan sistem informasi industri nasional	15%	15%	100,00%	Sangat Mendukung
	Misi 4 **Revitalisasi Pertanian untuk Ketahanan dan Swasembada Pangan**							
	Sasaran:	Meningkatnya Ketersediaan Pangan dan Akses Pangan Masyarakat	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Jumlah rumusan kebijakan infrastruktur kemandirian pangan yang tersusun	100%	100%	100,00%	Sangat Mendukung
			Program Peningkatan Diversifikasi dan	Koefisien variasi harga pangan utama	10%	10%	100.00%	Sangat Mendukung

No		Tujuan/Sasaran	Program	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
			Ketahanan Pangan Masyarakat					
				Skor Pola Pangan Harapan	95	91.2	96.00%	Mendukung
			Program Penanganan Kerawanan Pangan	Jumlah penanganan desa rentan pangan	1 Peta	1 Peta	100,00%	Sangat Mendukung
			Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase keamanan pangan segar	79%	100%	126,58%	Sangat Mendukung
		Meningkatnya Kesejahteraan Petani	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Kelompok tani yang dilakukan monitoring dan evaluasi dalam pemanfaatan sarana pertanian	100%	100%	100%	Sangat Mendukung
				Persentase pemanfaatan benih/bibit unggul pertanian	82.21%	82.21%	100%	Sangat Mendukung
				Jumlah desa yang melaksanakan inovasi tani organik	60	60	100.00%	Sangat Mendukung
			Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase jaringan Irigasi tingkat usaha tani dalam kondisi baik	74%	74%	100%	Sangat Mendukung
			Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Cakupan pencegahan dan penanggulagngan bencana pertanian (Serangan OPT)	100%	98%	98%	Sangat Mendukung
			Program Penyuluhan Pertanian	Cakupan Bina Kelompok Tani	100%	100%	100%	Sangat Mendukung

No		Tujuan/Sasaran	Program	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
			Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pembesaran (ton)	24565	24687	100.50%	Sangat Mendukung
				Ikan Hias (ribu ekor)	387636	388412	100.20%	Sangat Mendukung
				Benih (juta ekor)	21437	21544	100.50%	Sangat Mendukung
			Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan		100%	100%	100,00%	Sangat Mendukung
			Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan		47	47	100,00%	Sangat Mendukung
	Misi 5 **Peningkatan Infrastruktur dan Konektivitas antar Wilayah**							
	Sasaran:	Meningkatnya Sarana Infrastruktur Daerah	Program Penyelenggaraan Jalan	Panjang jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik	1.091,50	1.065,01	97,57%	Mendukung
			Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Panjang jaringan Irigasi Sekunder dalam Kondisi Baik	150.370,42	141.246,12	93,93%	Mendukung
			Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah Peraturan Tata Ruang yang diselesaikan	3	3	100,00%	Sangat Mendukung
			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Rumah Tangga / KK mendapatkan akses air melalui SPAM	86%	86,06%	100,07%	Sangat Mendukung

No		Tujuan/Sasaran	Program	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
			Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase Pengelolaan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	72,22%	72,22%	100,00%	Sangat Mendukung
			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Cakupan pelayanan SPALD yang aman	18,67	41,11	220,19%	Sangat Mendukung
			Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase Bangunan Gedung yang Memiliki IMB	100%	100%	100,00%	Sangat Mendukung
			Program Kawasan Permukiman	Persentase Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman yang memiliki izin	49,67%	53,55%	107,81%	Sangat Mendukung
			Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan	100%	100%	100,00%	Sangat Mendukung
			Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Prosentase Penyelesaian ganti kerugian tanah	100%	100%	100,00%	Sangat Mendukung
			Program Redistribusi Tanah, Dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	Persentase Penyelesaian Redistribusi tanah yang telah ditetapkan	100%	100%	100,00%	Sangat Mendukung

No		Tujuan/Sasaran	Program	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
		Meningkatnya Pelayanan Transportasi Daerah	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Pemenuhan Kebutuhan PKB	21	21	100.00%	Sangat Mendukung
	Misi 6 **Optimalisasi Kepariwisataan berbasis Kearifan Lokal**							
	Sasaran:	Meningkatnya Pendapatan Daerah dari Sektor Pariwisata	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Prosentase peningkatan obyek dan daya tarik wisata	10%	10,46%	104,60%	Sangat Mendukung
			Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Persentase SDM pariwisata dan ekonomi kreatif yang berkompetensi dasar	0,08	2,752	3440,00%	Sangat Mendukung
			Program Pemasaran Pariwisata	Lama Tinggal (Length of Stay) wisatawan di Kabupaten Kediri	1	1	100,00%	Sangat Mendukung
	Misi 7 **Optimalisasi Tata Kelola Lingkungan Hidup, Sumber Daya Alam dan Mitigasi Bencana**							
	Sasaran:	Meningkatkan Kualitas Lingkungan	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Tingkat ketersediaan kajian pengelolaan lingkungan hidup	83%	83,33%	100,00%	Sangat Mendukung
			Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Prosentase hasil pemantauan kualitas lingkungan yang memenuhi baku mutu	78,57%	66,67%	84,85%	Mendukung

No		Tujuan/Sasaran	Program	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
			Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Persentase Ruang Terbuka Hijau kawasan perkotaan	0,045	0,0364	80,89%	Sangat Mendukung
			Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Jumlah kegiatan/usaha yang dibina terkait Pengelolaan Limbah B3	274	274	100,00%	Sangat Mendukung
			Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase Usaha dan/atau Kegiatan berizin Lingkungan dan PPLH yang dibina	72%	88,89%	123,46%	Sangat Mendukung
			Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Persentase MHA dan kearifan lokal terkait PPLH yang dibina	50%	0	0	Kurang Mendukung
			Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase lembaga kemasyarakatan yang mendapat penyuluhan LH	24,02%	71,13%	296,13%	Sangat Mendukung
			Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Jumlah event penghargaan Lingkungan Hidup yang	4	1	25,00%	Kurang Mendukung

No		Tujuan/Sasaran	Program	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
				diadakan atau diikuti dalam 1 tahun				
			Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase Aduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) yang terselesaikan	87,50%	100%	296,13%	Sangat Mendukung
			Program Pengelolaan Persampahan	Prosentase sampah yang dikelola	75,67%	31,67%	25,00%	Kurang Mendukung
		Meningkatnya Sinergitas antar Pemerintah, Masyarakat dan Swasta dalam Penanggulangan Bencana	Program Penanggulangan Bencana	Tingkat Ketersediaan Kajian Risiko Bencana Kabupaten	100%	97,22%	97,22%	Mendukung
	Misi 8 **Pengembangan Seni Budaya, Olahraga dan Kreativitas Pemuda**							
	Sasaran:	Meningkatnya Daya Dukung Generasi Muda Bagi Daerah	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase pemuda yang dibina/dilatih	53,00%	60,00%	113,21%	Sangat Mendukung
			Program Pengembangan	Persentase atlet pelajar yang dibina/dilatih	70,00%	68,00%	97,14%	Mendukung

No		Tujuan/Sasaran	Program	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
			Kapasitas Daya Saing Keolahragaan					
		Meningkatnya pelestarian Seni Budaya Daerah	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Prosentase peningkatan grup kesenian yang diberdayakan	20%	82,82%	414,10%	Sangat Mendukung
			Program Pengembangan Kebudayaan	Prosentase peningkatan budaya lokal yang dilestarikan	36%	21.73%	60.36%	Cukup Mendukung
				Prosentase peningkatan kesenian lokal yang dilestarikan	20%	50%	250.00%	Sangat Mendukung
			Program Pembinaan Sejarah	Prosentase sejarah lokal yang dilestarikan	100%	100%	100,00%	Sangat Mendukung
			Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Prosentase CB yang dilestarikan	100%	100%	100,00%	Sangat Mendukung
			Program Pengelolaan Permuseuman	Persentase sarpras museum yang dipelihara	100%	100%	100,00%	Sangat Mendukung
	Misi 9 **Perwujudan Kemandirian Desa untuk Kesejahteraan Masyarakat**							
	Sasaran	Meningkatnya Kemandirian Masyarakat Desa	Program Penataan Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi dalam penataan desa	343	343	100,00%	Sangat Mendukung
			Program Peningkatan Kerjasama Desa	Jumlah kerjasama desa yang dilakukan anar desa dan pihak ketiga	343	343	100,00%	Sangat Mendukung

No		Tujuan/Sasaran	Program	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
			Program Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang dibina dalam menjalankan manajermen pemerintahan	343	343	100,00%	Sangat Mendukung
			Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa yang difasilitasi	343	343	100,00%	Sangat Mendukung

Dari Tabel Analisa tersebut dijelaskan bahwa Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Kediri Tahun 2024 diperoleh hasil Kinerja rata-rata dengan katagori Sangat Baik, program kegiatan rata-rata sangat mendukung tercapainya kinerja yang ditetapkan.

3.3.2 **Capaian Kinerja Keluaran Kegiatan dan Masalah yang Dihadapi serta Solusi Pemecahannya**

Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024

Berdasarkan Dokumen Perjanjian Kinerja Bupati Kediri tanggal 6 September 2024 (sebagaimana terlampir dalam lampiran) disampaikan target-target Perjanjian Kinerja sebagai berikut;

PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : H. Hanindhito Himawan Pramana, S.H.

Jabatan : Bupati Kediri

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Kediri, 6 September 2024

Ditandatangani secara elektronik oleh

Bupati Kediri,

H. Hanindhito Himawan Pramana, S.H.

Perjanjian Kinerja Perubahan Pemerintah Kabupaten Kediri *0*

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Tabel 20 Perjanjian Kinerja Perubahan Bupati Kediri Tahun 2024

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target 2024
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing	Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang unggul dan berdaya saing		Indeks Pembangunan Manusia	74,68
			Tingkat Pengangguran Terbuka	5,0
		Meningkatnya Aksesbilitas dan Kualitas Pendidikan	Harapan Lama Sekolah	13,62
			Harapan Lama Sekolah	8,24
		Meningkatnya aksesbilitas dan kualitas layanan kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan (umur Harapan Hidup)	74,85
		Meningkatnya kualitas tenaga kerja dan kesempatan kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	71,1
	Menurunkan angka kemiskinan		Persentase Angka Kemiskinan	9,8
		Meningkatnya kesejahteraan masyarakat berbasis keluarga	Persentase Keluarga Sejahtera	84.78
			Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	77.86
		Meningkatkan penerapan nilai nasionalisme, agama, dan semangat demokrasi di masyarakat	Tingkat konduktivitas daerah	100%
Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik		Indeks Reformasi Birokrasi	77
		Membangun institusional penyelenggaraan pemerintah yang efektif dan bersih	Nilai SAKIP	75
			IKM	86.35
			Opini BPK terhadap LKPD	WTP
			Indeks Presepsi Anti Korupsi (IPAK)	3.74
		Meningkatkan Profesionalitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN	70.1
		Transformasi digital penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks SPBE	4.30
Pengembangan Ekonomi Kerakyatan dan Peningkatan	Meningkatkan daya saing sektor ekonomi daerah		Pertumbuhan Ekonomi	4,80

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target 2024
Investasi Daerah		Meningkatnya investasi di daerah	Pertumbuhan Investasi Daerah	7
		Meningkatnya daya beli masyarakat	Indeks Pengeluaran (hitungan perbulan)	1145155
Revitalisasi Pertanian untuk Ketahanan dan Swasembada Pangan	Meningkatkan daya dukung dan kemandirian sektor pertanian dan pangan daerah		Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian	3,03
		Meningkatnya ketersediaan pangan dan akses pangan masyarakat	Ketersediaan pangan utama	146,10
		Meningkatnya ketersediaan pangan dan akses pangan masyarakat	Nilai Tukar Petani	104,44
Peningkatan Infrastruktur dan Konektivitas antar Wilayah	Menurunkan kesenjangan pembangunan antar wilayah		Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	80,23 (68.10)
		Meningkatnya sarana infrastruktur daerah	Proporsi Panjang jaringan jalan Kabupaten dalam kondisi baik	80,53
			Persentase Jaringan irigasi dalam kondisi baik	70,50%
			Cakupan penyelesaian Peraturan Tata Ruang	75%
			Cakupan desa atau kelurahan yang telah mendapatkan layanan air minum	86%
			Persentase Rumah Layak Huni	49,67%
		Meningkatnya pelayanan transportasi daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap unit pelayanan perhubungan	86,59
Optimalisasi Kepariwisataan berbasis Kearifan Lokal	Meningkatkan daya saing pariwisata daerah		Pertumbuhan PDRB sektor penyediaan akomodasi dan makan minum	9,79
		Meningkatnya pendapatan daerah dari sektor pariwisata	Pertumbuhan PAD Pariwisata	5%
Optimalisasi Tata Kelola Lingkungan Hidup, Sumber Daya Alam dan Mitigasi Bencana	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kelestarian sumberdaya alam		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten	64,42
		Meningkatnya kualitas lingkungan	Indeks Kualitas Air (IKA)	62.97
			Indeks Kualitas Udara (IKU)	86,12
			Indeks Kualitas Lingkungan (IKL)	40,49

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target 2024
		Meningkatnya sinergitas antar pemerintah, masyarakat dan swasta dalam penanggulangan bencana	Indeks Resiko Bencana	83
Pengembangan Seni Budaya, Olahraga dan Kreativitas Pemuda	Meningkatkan potensi seni dan budaya generasi muda untuk pembangunan daerah		Tingkat Pelestarian Potensi Seni Budaya Daerah	98,11
			Indeks Kapasitas Lembaga Kepemudaan dan Olahraga	89
		Meningkatnya pelestarian seni budaya daerah	Cakupan event budaya skala kabupaten	35,86%
		Meningkatnya daya dukung generasi muda bagi daerah	Persentase prestasi bidang kepemudaan dan olahraga yang dicapai	90%
Perwujudan Kemandirian Desa untuk Kesejahteraan Masyarakat	Mendorong daya saing ekonomi masyarakat dan desa		Rata-Rata Indeks Desa Membangun Tingkat Kabupaten	0,75
		Meningkatnya kemandirian masyarakat dan desa	Persentase desa mandiri dan desa maju didasarkan dari IDM	84,55%

Tujuan 1

Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing

Pada tahun 2020-2024 status pembangunan manusia Kabupaten Kediri sudah berada di level “tinggi”. Selama tahun 2020–2024, IPM Kabupaten Kediri rata-rata meningkat sebesar 0,81 persen per tahun, dari 72,80 pada tahun 2020 menjadi 75,18 pada tahun 2024. Perkembangan IPM Kabupaten Kediri selama tahun 2020–2024.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah ukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.

IPM diperkenalkan oleh Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PPPBB) pada tahun 1990 dan diterbitkan secara berkala dalam Laporan Pembangunan Manusia (LPM) setiap tahunnya. IPM digunakan untuk klasifikasi apakah sebuah negara adalah negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup.

Pencapaian Kinerja Tahun 2024

Tujuan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing	Indeks Pembangunan Manusia	74.68	75.18	100.67%	Sangat Baik
	Tingkat Pengangguran Terbuka	5	5.1	98.00%	Baik

Keandalan Data Kinerja

Formula	Perhitungan	Hasil Perhitungan	Dasar Perhitungan
Indeks Pembangunan Manusia	Diukur oleh BPS	75.18	Berita Resmi Statistik Kabupaten Kediri
Tingkat Pengangguran Terbuka	Diukur oleh BPS	5.1	Berita Resmi Statistik Kabupaten Kediri

Dalam Berita Resmi Statistik Kabupaten Kediri dijelaskan Pembangunan manusia di Kabupaten Kediri terus mengalami kemajuan. Pada tahun 2020-2024 status pembangunan manusia Kabupaten Kediri sudah berada di level “tinggi”. Selama tahun 2020–2024, IPM Kabupaten Kediri rata-rata meningkat sebesar 0,81 persen per tahun, dari 72,80 pada tahun 2020 menjadi 75,18 pada tahun 2024. Perkembangan IPM Kabupaten Kediri selama tahun 2020–2024.

Gambar 2 Rilis Grafis BPS pada Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Kediri Tahun 2024



Sumber: Berita Resmi Statistik Kabupaten Kediri No. 03/12/3506/Th.VI, 03 Desember 2024

Pada Agustus 2024, TPT di Kabupaten Kediri mengalami penurunan 0,69 persen poin dibandingkan dengan TPT kondisi Agustus 2023 yang sebesar 5,79 persen. Penurunan ini merupakan salah satu manfaat dari program-program yang sudah diluncurkan oleh pemerintah daerah, yaitu sebagai contoh penyelesaian pembangunan Bandara Dhoho yang

mulai aktif beroperasi 5 April 2024, Program Pelatihan Berbasis Kompetensi, Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM Usaha Mikro dalam Manajemen Keuangan dan Pemasaran Online, Job Fair, Bursa Kerja Khusus (BKK), Beasiswa Pendidikan Pemerintah Kabupaten Kediri, Bantuan untuk pengembangan usaha PKL, Garasi UMKM, Pendampingan UMKM, Bazar UMKM, Festival Budaya Kuno Kini, Jambore Durian, Kediri Fashion Batik Festival, Investasi yang semakin bermunculan dengan adanya Bandara Dhoho, dan lain sebagainya.

Gambar 3 Rilis Grafis BPS pada Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Kediri Tahun 2024

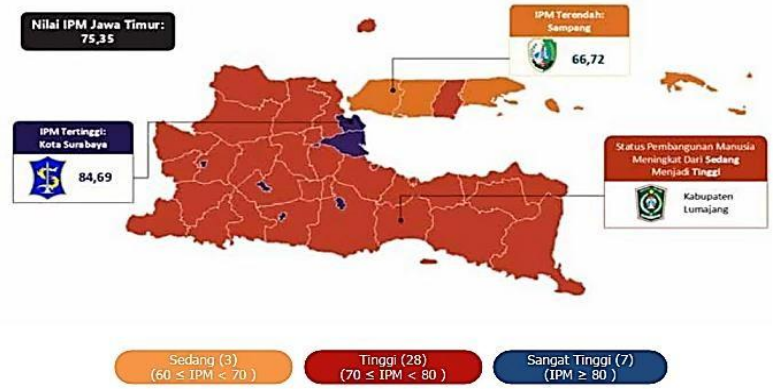


Sumber: Berita Resmi Statistik Kabupaten Kediri No. 03/12/3506/Th.II, 12 Desember 2024

Benchmarking

Pada tahun 2024, status pembangunan manusia Jawa Timur masih berkategori “tinggi”, dengan capaian IPM 75,35. Pada tahun 2024 Status pembangunan manusia Kabupaten Lumajang meningkat dari “sedang” menjadi “tinggi”, dengan capaian IPM sebesar 70,31. Wilayah dengan status pembangunan manusia “tinggi” (70 ≤ IPM < 80) menjadi sebanyak 28, berstatus “sedang” (60 ≤ IPM < 70) sebanyak 3, dan tidak ada wilayah berstatus “rendah” (IPM < 60). Sementara itu, Kota Surabaya, Kota Malang, Kota Madiun, Sidoarjo, Kota Kediri, Kota Mojokerto, dan Kota Blitar menjadi wilayah dengan status capaian pembangunan manusia yang “sangat tinggi” (IPM ≥ 80).

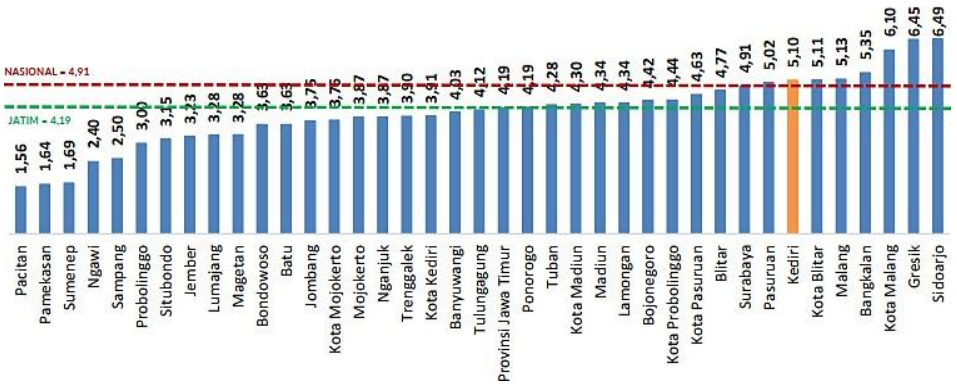
Gambar 4 IPM Jawa Timur menurut Kab/Kota dan Status Pembangunan Manusia



Sumber: Berita Resmi Statistik Kabupaten Kediri No. 03/12/3506/Th.VI, 03 Desember 2024

Sesuai dengan penjelasan dari BPS, pada Agustus 2024 ini, TPT di 38 kabupaten/kota di Jawa Timur mengalami penurunan dibandingkan dengan Agustus 2023. TPT tertinggi tercatat pada Kabupaten Sidoarjo yaitu sebesar 6,49 persen sedangkan TPT terendah tercatat di Kabupaten Pacitan yaitu sebesar 1,56 peren. Sementara itu, TPT Kabupaten Kediri masih lebih tinggi dibandingkan dengan TPT Jawa Timur dan TPT Nasional.

Gambar 5 Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Jawa Timur



Sumber: Berita Resmi Statistik Kabupaten Kediri No. 03/12/3506/Th.II, 12 Desember 2024

Sasaran 1

Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan

Pada Tahun 2024, Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk usia 7 tahun ke atas dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) penduduk usia 25 tahun ke atas. Kedua indikator ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode tahun 2020 hingga tahun 2024, HLS Kabupaten Kediri rata-rata meningkat 0,90 persen per tahun, sementara RLS meningkat 0,74 persen per tahun. HLS tahun 2024 meningkat 0,01 tahun atau 0,07 persen, lebih rendah dibandingkan rata-rata pertumbuhan tahun 2020-2023 yang sebesar 1,18 persen. Sementara itu,RLS tahun 2024 meningkat 0,02 tahun atau 0,24

persen, lebih rendah dibandingkan rata-rata pertumbuhan tahun 2020-2023 yang sebesar 0,91 persen per tahun.

Sasaran kinerja dalam bidang pendidikan sering kali diukur melalui indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS). Di Kabupaten Kediri, kedua indikator ini menjadi perhatian utama dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mencapai target pembangunan daerah, khususnya dalam sektor pendidikan.

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) mencerminkan jumlah tahun pendidikan formal yang telah ditempuh oleh penduduk usia 25 tahun ke atas. Sementara itu, Harapan Lama Sekolah (HLS) menunjukkan perkiraan jumlah tahun yang akan ditempuh oleh anak-anak usia sekolah dalam sistem pendidikan formal. Kedua indikator ini mencerminkan akses dan kualitas pendidikan di suatu wilayah.

Meskipun Kabupaten Kediri telah mengalami peningkatan dalam bidang pendidikan, tantangan masih ada, seperti kesenjangan akses pendidikan di daerah pedesaan, angka putus sekolah, dan keterbatasan sarana prasarana. Oleh karena itu, program dan kebijakan yang berfokus pada peningkatan akses, kualitas, serta pemerataan pendidikan sangat diperlukan untuk mencapai sasaran kinerja yang lebih baik di masa depan.

Dalam mempersiapkan masyarakat Kabupaten Kediri yang baik dan berdaya saing di masa depan, pendidikan memiliki peran dan fungsi utama dalam pembangunan. Dalam upayanya mencapai Indonesia emas tahun 2045, anak-anak di masa sekarang harus mendapatkan pendidikan yang layak dengan keilmuan yang baik. Urgensi untuk aksesibilitas dan kualitas pendidikan yang meningkat terlihat dari prediksi perekonomian dari banyak lembaga penelitian internasional seperti WEF (*World Economics Forum*) dan World Bank, yang menyatakan bahwa Indonesia akan menjadi negara maju nomor 4 di dunia pada tahun 2045 dengan syarat mayoritas masyarakatnya mengenyam pendidikan lebih dari 12 tahun.

Meninjau teori Human Capital (Sumber Daya Manusia) Menurut Todaro (2015) menyatakan bahwa konsep dari sebuah Human Capital dapat dilihat melalui yang investasi dengan tujuan untuk memperoleh tingkat konsumsi yang lebih tinggi di masa yang akan datang. Investasi dalam Human Capital berupa investasi dalam bidang pendidikan dan kesehatan.

Permasalahan

Merujuk penjelasan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri permasalahan dalam menghadapi kondisi yang cukup unik dalam indikator pendidikan, di mana Harapan Lama

Sekolah (HLS) telah melampaui rata-rata nasional dan Provinsi Jawa Timur, tetapi Rata-rata Lama Sekolah (RLS) masih tertinggal di bawah angka nasional dan provinsi.

1. **Kesenjangan Antara Harapan dan Realisasi Pendidikan**
   Tingginya HLS menunjukkan bahwa anak-anak di Kabupaten Kediri memiliki peluang lebih besar untuk menempuh pendidikan dalam jangka waktu yang lebih panjang. Namun, rendahnya RLS mengindikasikan bahwa penduduk usia 25 tahun ke atas masih memiliki tingkat pendidikan yang relatif rendah, kemungkinan karena faktor historis di mana akses dan kesadaran terhadap pendidikan sebelumnya masih terbatas.

2. **Angka Putus Sekolah yang Masih Tinggi**
   Salah satu penyebab RLS yang rendah adalah tingginya angka putus sekolah, terutama di jenjang pendidikan menengah. Faktor ekonomi, keterbatasan akses di daerah pedesaan, serta kebutuhan untuk bekerja sejak usia muda menjadi hambatan utama bagi keberlanjutan pendidikan.

3. **Disparitas Akses Pendidikan di Wilayah Pedesaan dan Perkotaan**
   Kabupaten Kediri memiliki wilayah dengan karakteristik geografis yang beragam, termasuk daerah pedesaan dengan akses terbatas terhadap fasilitas pendidikan. Kesenjangan ini menyebabkan banyak anak yang tidak dapat menyelesaikan pendidikan mereka hingga jenjang yang lebih tinggi.

4. **Keterbatasan Sarana dan Prasarana Pendidikan**
   Meskipun program pemerintah telah berupaya meningkatkan kualitas pendidikan, masih ada tantangan dalam hal ketersediaan sekolah, tenaga pendidik berkualitas, dan fasilitas pendidikan yang memadai, terutama di daerah terpencil. Hal ini turut berdampak pada rendahnya angka RLS karena anak-anak di daerah tertentu sulit melanjutkan pendidikan mereka.

Perencanaan

Pada tahun 2024 ini target Harapan Lama Sekolah mengalami penajaman dari 13.40 sesuai dengan Perjanjian Kinerja Perubahan ditingkatkan menjadi 13.62. Sedangkan target Rata-rata Lama Sekolah tidak mengalami penajaman yakni 8.24.

Upaya-upaya Perencanaan Kinerja

Pemerintah Kabupaten Kediri telah melakukan berbagai strategi untuk meningkatkan capaian Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) agar melampaui

target nasional maupun Provinsi Jawa Timur. Beberapa upaya utama yang dilakukan meliputi:

1. Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) dan Rehabilitasi Sekolah;
2. Penyediaan Bajes bagi siswa yang bersekolah di kawasan Bandara;
3. Program Pendidikan Nonformal (Kejar Paket A,B dan C) berbasis Vokasi serta Wisuda Kesetaraan;
4. Program Beasiswa Kediri Berbudaya (Beasiswa Becak Kari, Beasiswa Sambut Bandara, Beasiswa Berani (atlet berprestasi), Beasiswa S-1 bagi Guru PAUD dan SMA Dharma Wanita Boarding School);
5. Program Bareng Masbup Ayo Sekolah sebagai upaya dalam mengajak anak usia sekolah untuk kembali ke bangku sekolah dan bagi warga belajar untuk ikut PKBM (Pendidikan Nonformal).

Hasil Kinerja

Pencapaian Kinerja Tahun 2024

Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	Harapan Lama Sekolah	13.62	13.63	100.07%	Sangat Baik
	Rata-rata Lama Sekolah	8.24	8.26	100.24%	Sangat Baik

Keandalan Data Kinerja

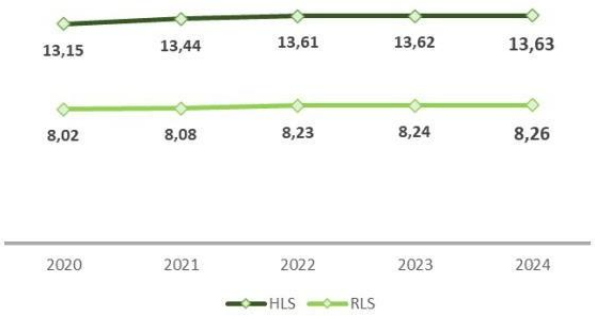
Formula	Perhitungan	Hasil Perhitungan	Dasar Perhitungan
Diukur oleh BPS	Diukur oleh BPS	13.63	Berita Resmi Statistik Kabupaten Kediri No. 03/12/3506/Th.II, 12 Desember 2024
Diukur oleh BPS	Diukur oleh BPS	8.26	Berita Resmi Statistik Kabupaten Kediri No. 03/12/3506/Th.II, 12 Desember 2024

Dalam Berita Resmi Statistik Kabupaten Kediri dijelaskan sebagai berikut Dimensi pengetahuan pada IPM dibentuk oleh dua indikator, yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk usia 7 tahun ke atas dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) penduduk usia 25 tahun ke atas. Kedua indikator ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode tahun 2020 hingga tahun 2024, HLS Kabupaten Kediri rata-rata meningkat 0,90 persen per tahun, sementara RLS meningkat 0,74 persen per tahun. HLS tahun 2024 meningkat 0,01 tahun

atau 0,07 persen, lebih rendah dibandingkan rata-rata pertumbuhan tahun 2020-2023 yang sebesar 1,18 persen. Sementara itu,RLS tahun 2024 meningkat 0,02 tahun atau 0,24 persen, lebih rendah dibandingkan rata-rata pertumbuhan tahun 2020-2023 yang sebesar 0,91 persen per tahun.

Gambar 6 Rilis BPS pada Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Kediri Tahun 2024





Sumber: Berita Resmi Statistik Kabupaten Kediri No. 03/12/3506/Th.II, 12 Desember 2024

Pencapaian Target Jangka Menengah

Sasaran	Indikator	Target Akhir RPJMD	Realisasi	Capaian	Keterangan
Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas Pendidikan	Harapan Lama Sekolah	13.65	13.63	99.85%	Target Akhir RPJMD Belum Tercapai
	Rata-rata lama sekolah	8.3	8.26	99.52%	Target Akhir RPJMD Belum Tercapai

Realisasi Anggaran

Sasaran	Indikator	Pagu	Realisasi	Capaian	Keterangan
Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas Pendidikan	Harapan Lama Sekolah	312,211,153,200.00	301,318,175,007.00	96.51%	Zona Hijau
	Rata-rata lama sekolah				

Analisa Efisiensi

Sasaran	Indikator	Capaian Kinerja	Capaian Anggaran	Efisiensi	Keterangan
Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas Pendidikan	Harapan Lama Sekolah	100.07%	96.51%	3.56%	Efisien
	Rata-rata lama sekolah	100.24%			

Benchmarking

Wilayah	HLS	RLS	Keterangan	Rujukan Data
Nasional	13.2	8.85	HLS Kabupaten Kediri lebih baik, RLS Lebih Baik dari Kabupaten Kediri	BPS via Disdik
Provinsi Jawa Timur	13.43	8.28	HLS Kabupaten Kediri lebih baik, RLS Lebih baik dari Kabupaten Kediri	BPS via Disdik
Kabupaten Kediri	13.63	8.26	-	-
Kabupaten Nganjuk	13,18	8,25	HLS Kabupaten Kediri lebih baik, RLS Kabupaten Kediri lebih baik	BPS via Disdik

Pihak-pihak yang Terkait

Merujuk data yang disampaikan oleh Dinas Pendidikan adalah sebagai berikut:

1. Dinas Pendidikan
   Menyusun kebijakan dan program pendidikan di Kabupaten Kediri
2. Bappeda
   Mengalokasikan anggaran pendidikan agar sesuai dengan kebutuhan daerah
3. PKBM
   Menydiakan program Kejar Paket A, B, dan C untuk meningkatkan RLS bagi penduduk yang belum menyeelsaikan pendidikan formal.
4. Komite Sekolah dan Orang tua murid
   Mendukung pendidikan anak melalui partisipasi dalam kegiatan sekolah dan mendorong kesadaran akan pentingnya pendidikan
5. Sektor Swasta dan Badan Usaha
   Bantuan CSR berupa peralatan TIK bagi sekolah.

Kolaborasi antara pemerintah, sekolah, masyarakat, dunia usaha, dan organisasi sosial sangat penting dalam meningkatkan HLS dan RLS di Kabupaten Kediri. Keberlanjutan upaya ini membutuhkan sinergi yang erat agar pendidikan semakin inklusif, merata, dan berkualitas, sehingga generasi muda di Kabupaten Kediri dapat memperoleh pendidikan yang lebih baik dan berkontribusi dalam pembangunan daerah.

Program/Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Kinerja

Analisa Dukungan Program/Kegiatan

Program/Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan SD yang terakreditasi A	40,00%	16,31%	40,78%	Kurang Baik
	Persentase Satuan Pendidikan SMP yang terakreditasi A	55,00%	58,59%	106,53%	Sangat Baik
	Persentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum	57,00%	84,34%	147,96%	Sangat Baik
	Persentase siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum	35,00%	78,68%	224,80%	Sangat Baik
	Persentase Satuan PAUD yang terakreditasi	20,00%	83,02%	415,10%	Sangat Baik
	Cakupan pelayanan pendidikan Nonformal/ kesetaraan	55,00%	97,37%	177,04%	Sangat Baik
Program Pengembangan Kurikulum	Persentase LKP/PKBM yang terakreditasi	40,00%	61,29%	153,23%	Sangat Baik
Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase penerapan kurikulum muatan lokal pada satuan pendidikan	100,00%	100,00%	100,00%	Sangat Baik
Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Rasio guru satuan SD, SMP, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan terhadap peserta didik SD, SMP, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	1:16	1:17	98,70%	Baik

Faktor-faktor Pendukung

Merujuk data yang disampaikan oleh Dinas Pendidikan adalah sebagai berikut;

1. Bantuan Beasiswa Pendiidkan Kediri Berbudaya bagi masyarakat tidak mampu
2. Program pendidikan kesetaraan (Kejar Paket A, B dan C) serta Wisuda Kesetaraan

3. Pembangunan dan Rehabilitasi Fasilitas Pendidikan di Kabupaten Kediri
4. Program CSR dari Badan Usaha berupa Alat TIK untuk sekolah.

Faktor-faktor Penghambat

Merujuk data yang disampaikan oleh Dinas Pendidikan adalah sebagai berikut:

1. Masih banyak anak putus sekolah karena faktor ekonomi
2. Beberapa siswa lebih memilih untuk bekerja dibanding melanjutkan pendidikan
3. Belum meratanya guru dan tenaga pendidikan yang kompeten di Kabupaten Kediri

Rencana Tindak Lanjut

Merujuk data yang disampaikan oleh Dinas Pendidikan adalah sebagai berikut:

1. Memperluas program beasiswa pendidikan bagi masyarakat tidak mampu
2. Melaksanakan program Bareng Masbup Ayo Sekolah secara masif dengan melakukan kunjungan rumah (home visit) untuk mengajak anak-anak ptuus sekolah kembali ke sekolah (untuk anak usia sekolah) dan ke PKBM / Pendidikan Nonformal bagi warga belajar
3. Memberikan pelatihan dan pengembangan kompetensi bagi guru sehingga di masing-masing wilayah di Kabupaten Kediri memiliki guru dan tenaga pendidik yang berkompeten

Sasaran 2

Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat

Pada Tahun 2024 Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode tahun 2020 hingga tahun 2024, UHH telah meningkat sebesar 0,80 tahun atau rata-rata tumbuh sebesar 0,27 persen per tahun. Pada tahun 2020, UHH Kabupaten Kediri adalah 74,27 tahun dan pada tahun 2024 mencapai 75,07 tahun. UHH tahun 2024 meningkat 0,22 tahun (0,29 persen) dibanding tahun sebelumnya, lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan tahun 2020-2023 yang sebesar 0,26 persen per tahun.

Merujuk pada penjelasan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Salah satu upaya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan adalah dengan mengadakan penilaian teknologi kesehatan. Upaya ini diadakan bersama oleh tenaga kesehatan di bidang

kedokteran dan bidang kesehatan. Peningkatan kualitas meliputi aspek promosi, preverensi, penegakan diagnosis, pengobatan, rehabilitasi serta perawatan jangka panjang. Penerapan penilaian teknologi kesehatan semakin dianjurkan seiring dengan peningkatan program jaminan kesehatan.

Aksesibilitas pelayanan kesehatan pada suatu wilayah dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu faktor ketersediaan dan faktor penghalang. Faktor ketersediaan berkaitan dengan ketersediaan pelayanan kesehatan. Aspek yang mempengaruhi ketersediaan meliputi fasilitas pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan. Sedangkan faktor penghalang merupakan faktor yang dapat menghalangi proses pelayanan kesehatan. Faktor ini meliputi permasalahan geografi seperti luasnya wilayah pelayanan, persebaran dan kepadatan penduduk serta ketersediaan alat transportasi. Faktor penghalang juga meliputi ketersediaan pembiayaan kesehatan dan kepemilikan asuransi jaminan kesehatan oleh masyarakat.

Beberapa permasalahan kesehatan menurut Kementerian Kesehatan masih perlu untuk ditindaklanjuti seperti Gizi Buruk dengan prevalensi Stunting dan Wasting yang cukup tinggi, upaya eradikasi TBC, Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi, Prevalensi penyakit menular, dan penyakit tidak menular, serta kesehatan mental. Perkembangan tersebut menjadi perlu untuk ditindaklanjuti dengan intervensi-intervensi spesifik yang bersifat medis maupun non-medis dengan peningkatan kualitas layanan masyarakat.

Namun demikian, merujuk pada dokumen dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Faktor yang menentukan derajat kesehatan masyarakat selama ini lebih kepada pelayanan kesehatan. Padahal, Menteri Kesehatan Nila Moeloek mengatakan dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan bukan pelayanan kesehatan. Upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat perlu ditindaklanjuti dengan promosi dan advokasi kesehatan.

Program atau gerakan kesehatan yang dicanangkan oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan merupakan sebuah upaya untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Beberapa gerakan seperti Gerakan Masyarakat Hidup Sehat atau Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dapat menjadi sebuah sebuah gerakan yang sukses dengan dukungan promosi kesehatan. Tujuan promosi kesehatan yang utama adalah memberikan informasi yang pada tingkatan lebih lanjut dapat memicu kesadaran masyarakat mengenai program atau gerakan yang tengah dicanangkan oleh pemerintah.

Permasalahan

Merujuk data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri disampaikan sebagai berikut;

1. Rujukan pasien dari wilayah barat sungai masih banyak yang masuk ke rumah sakit di luar wilayah Kabupaten Kediri, hal ini karena aksesnya yang lebih dekat dan lebih mudah dijangkau
2. Semakin banyaknya sektor swasta yang berminat untuk mengembangkan bisnis di bidang pelayanan kesehatan rujukan (pendirian klinik utama dan rumah sakit baru)
3. Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu masih belum terintegrasi dengan Sistem Penanggulangan Bencana di Daerah
4. Masih ada pelayanan kesehatan yang tidak dijamin oleh JKN yang memerlukan perhatian dari Pemerintah Daerah
5. Kegiatan pengembangan kompetensi SDM masih sangat diperlukan
6. Pengeluaran atau pembiayaan kesehatan yang masih berfokus pada upaya kuratif
7. Belum optimalnya cakupan upaya pelayanan promotif dan preventif yang komprehensif
8. Perlu ada jaminan pembiayaan kesehatan yang selalu tersedia, efektif dan efisien, serta berkeadilan bagi seluruh masyarakat (Universal Health Coverage)
9. Terbatasnya pelatihan bersertifikat terutama untuk program HIV
10. Capaian pemeriksaan triple eliminasi pada bumil yang belum maksimal
11. Masih banyak pasien HIV yang lolos follow up dalam menjalani pengobatan
12. Belum semua fasilitas pelayanan kesehatan terutama Puskesmas memberi layanan HIV (Layanan PDP)
13. Masih adanya stigma tentang Tuberkulosis atau TB sehingga pasien enggan memeriksakan sakitnya
14. Capaian SPM dan indikator PTM prioritas belum maksimal
15. Kemauan dan pengetahuan masyarakat untuk menscreening kesehatanya masih rendah, Selain itu ada masyarakat yg sekolah di luar kabupaten atau yg bekerja di kab / kota lain atau propinsi lain sehingga belum bisa discreening
16. Sebagian masyarakat belum paham bahaya dari penyakit tidak menular (PTM) sehingga enggan untuk melalukan skrining PTM di posbindu /posyandu ILP / Puskesmas, Selain itu bagi yang sudah menderita mereka tidak datang ketempat pelayanan Kesehatan untuk penanganan lebih lanjut .karena merasa baik baik saja dan tidak ada keluhan.

Upaya Pencapaian Kinerja

Merujuk pada data yang disampaikan oleh Dinas Kesehatan, upaya-upaya yang telah dilaksanakan guna meningkatkan capaian sasaran strategis adalah sebagai berikut:

1. Belanja jasa kalibrasi untuk peralatan di Puskesmas dan UPT Labkesda
2. Mengikuti pemantapan mutu eksternal (PME) untuk pemeriksaan laboratorium di UPT Labkesda yang diselenggarakan oleh BBLABKESMAS Surabaya
3. Rehabilitasi dan pembangunan Puskesmas Adan-Adan, Pare, Sumberjo. Kepung
4. Pembangunan IGD Puskesmas Ngadiluwih
5. Pembangunan Pagar dan Gedung Relokasi Puskesmas Pranggang dan Ngadi
6. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas Wates
7. Kanopi dan Paving Puskemas Kandangan, Gurah, Purwoasri, Bendo, paving Puskesmas Ngancar, Gudang dan Tempat limbah B3 Puskesmas Bangsongan, Pagar Pustu Ngreco Kandat.
8. Pengadaan genset untuk Puskesmas Puhjarak, Badas, Kunjang, Ngadiluwih, Puwoasri, Silir dan Keling
9. Pengadaan IPAL puskesmas Gampeng, Wonorejo dan Bendo
10. Pemenuhan BMHP TB berupa mesin TCM sebanyak 2 buah untuk puskesmas Ngadiluwih dan Tiron, Bio safety Cabinet sebanyak 3 buah untuk puskesmas Keling, Ngadiluwih, Tiron , modul TCM sebanyak 1 buah untuk RSUD SLG, cartridge TCM TB sebanyak 11.250 buah untuk 8 faskes yaitu Puskesmas Keling, Wates, RSUD SLG, RSKK, Puskesmas Mojo, Ngadiluwih, Tiron, Papar, cartridge XDR TB sebanyak 150 buah untuk RSKK dan Xpert check kit sebanyak 2 kit untuk Puskesmas Wates dan RSUD SLG.
11. Pemenuhan alat sebagai penunjang penanggulangan Dengue berupa mesin fogging sebanyak 4 buah untuk Puskesmas Kandangan, Tanon, Mojo, Bendo
12. Pengadaan RDT HIV-Sifilis untuk ibu hamil sebanyak 24.875 tes
13. Pengadaan BMHP sebagai penunjang pemeriksaan laboratorium P2PM seperti RDT HIV 1, RDT HIV2, RDT HIV 3, RDT sifilis, RDT Dengue, RDT Malaria, bahan pemeriksaan malaria, RPR, Tabung K3 EDTA, alcohol
14. Swab, vacuneedle, plesterin, handgloves, , tuberkulin, alcohol swab, dan pot sputum
15. Pengadaan alat fotometer sejumlah 8 (delapan) unit sebagai alat penunjang indikator deteksi dini stroke, yang dialokasikan untuk Puskesmas Ngasem, Tiron, Gampeng, Pagu, Sambi, Bangsongan, Mojo, Wates.

16. Pengadaan BMHP Reagen Strip Gula Darah (Strip Gula Darah, Alkohol Swab, Blood Lancet) sebagai penunjang tercapainya indikator SPM usia produktif 15 – 59 tahun, yang dialokasikan pada 37 Puskesmas.
17. Pengadaan BMHP reagen profil Lipid dan penunjangnya (Reagen HDL, Reagen Cholesterol Total, Reagen Trygliserida, Alkohol swab, Jarum Vacutainer, Tabung Vacutainer, Plester, Yellow Tip, Blue Tip) sebagai BMHP penunjang tercapainya indikator deteksi dini Penyakit stroke yang dialokasikan pada 31 Puskesmas yang memiliki alat Fotometer.
18. Pengadaan BMHP Kertas EKG dan Gel EKG (Kertas EKG dan Gel EKG) sebagai BMHP penu jang tercapainya indikator deteksi dini penyakit Jantung, yang dialokasikan pada 23 puskesmas yang memiliki alat EKG.
19. Pengadaan BMHP pemeriksaan IVA/ Inspeksi Vuisual asam Asetat (Kapas lidi, sarung tangan, desinfektan, asam asetat) sebagai penun jang tercapainya deteksi dini kanker servik (mulut rahim) yang dialokasikan pada 37 puskesmas .
20. Peningkatan mutu pelayanan di fasyankes secara internal melalui pengukuran dan pelaporan indikator mutu (INM).
21. Peningkatan mutu pelayanan di fasyankes secara eksternal melalui akreditasi yang diselenggarakan oleh Menteri atau lembaga penyelenggara akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri.
22. *Universal Health Coverage* (UHC) untuk menjamin pembiayaan kesehatan masyarakat
23. Segera mengusulkan penetapan Perbup Pengangkatan tenaga Non ASN BLUD Puskesmas
24. Memfasiliatasi SDM Kesehatan di Lingkungan Dinas Kesehatan Kab. Kediri untuk mengikuti pelatihan
25. Peningkatan mutu sumber daya manusia dengan pelatihan pengendalian PPOK dan Asthma dengan memberangkatkan 5 orang tenaga kesehatan dari puskesmas Wates, Pagu, Sambi, Tanon dan Wonorejo di UPT Latkesmas Murnajati- Lawang-Malang.
26. Peningkatan mutu sumber daya manusia dengan pelatihan petugas kesehatan dalam upaya implementasi dan layanan UBM di fasilitas pelayanan kesehatan primer dengan memberangkatkan 18 orang tenaga kesehatan dari puskesmas dan 2 orang tenaga kesehatan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri di UPT Latkesmas Munajati – Lawang – Malang.
27. Peningkatan mutu sumber daya manusia dengan pelatihan pelatihan penanggulangan gangguan indera bagi tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan

kesehatan tingkat pertama dengan memberangkatkan 3 orang tenaga kesehatan dari puskesmas Silir, Puhjarak dan Pranggang di UPT latkesmas Murnajati- Madiun.

28. Peningkatan mutu sumber daya manusia dengan pelatihan Pelatihan tenaga kesehatan terpadu kesehatan jiwa dengan memberangkatkan tenaga kesehatan dari 16 orang puskesmas dan 1 orang tenaga kesehatan dari dinas kesehatan kabupaten Kediri.
29. Peningkatan mutu sumber daya manusia dengan pelatihan deteksi dini kanker payudara dan kanker servik (mulut rahim) di fasilitas kesehatan tingkat pertama bagi bidan dan dokter dengan memberangkatkan 10 dokter dari puskesmas Semen, Ngadiluwih, Wates, Grogol, Pare, Tarokan, Ngasem, Kandangan, Badas dan Gurah, serta 1 orang tenaga kesehatan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri di UPT Latkesmas Murnajati- Lawang- Malang.
30. Peningkatan kapasitas petugas Sanitasi Lingkungan untuk 25 puskesmas di Bapelkes Murnajati
31. Peningkatan Mutu SDM dengan mengikuti Workshop Penjaminan Mutu Labkesmas oleh ASLABKESDA Jawa Timur dengan memberangkatkan 2 orang tenaga kesehatan dari UPT Labkesda ;
32. Peningkatan Mutu SDM dengan mengikuti Pelatihan Surveilans Berbasis Laboratorium Penyakit Dan Faktor Risiko Bagi Tenaga Laboratorium oleh BBPK Ciloto dengan memberangkatkan 2 orang tenaga kesehatan dari UPT Labkesda; dan
33. Peningkatan Mutu SDM dengan mengikuti Pelatihan Refreshing Malaria oleh BBLABKESMAS Surabaya dengan memberangkatkan 1 orang tenaga kesehatan dari UPT Labkesda.
34. Peningkatan mutu sumber daya manusia dengan On the Job training kasus kegawatdaruratan Ibu dan anak bagi dokter, bidan, dan perawat FKTP ke RS dengan memberangkatkan dokter, bidan dan perawat dilaksankan di RSUD Kabupaten Kediri peserta dari Puskesmas Adan-Adan, Pare, Puhjarak, Keling, Kayen Kidul, Puncu, Kepung, Wates, Pranggang, Bendo, Badas dan RSUD SLG dari Puskesmas Ngadiluwih, Kras, Mojo, Gurah, Tiron, Blabak, Ngadi, Semen, Silir, Ngasem, Gampeng, Wonorejo
35. Peningkatan mutu sumber daya manusia dengan Pelatihan Pelayanan ANC, Persalinan, Nifas dan SHK bagi Bidan dengan memberangkatkan bidan puskesmas dari Puskesmas Pagu, Pelas, Tarokan, Silir, Wates, Tanon, Kunjang, Ngadiluwih, Tiron, Mojo, Wonorejo, Pranggang, Semen, Sidorejo, Sumberjo, Kras, Bendo, Badas, Kandangan, Ngancar, Pare, Sambi dan Bangsongan

36. Peningkatan mutu sumber daya manusia dengan Pelatihan edukasi gizi pada 1000 hpk (hari pertama kehidupan) dengan metode emo demo bagi petugas kesehatan dengan memberangkatkan petugas gizi puskesmas dari Puskesmas Semen, Ngadi, Ngadiluwih, Wonorejo, Blabak, Silir, Ngancar, Gampeng, Tanon, Puhjarak, Pare, Kepung, Kandangan, Tarokan, Tiron, Sambi, Ngasem, Badas dan Dinkes
37. Pelatihan bagi Pelatih Ketrampilan Dasar Kader Posyandu, memberangkatkan 54 tenaga kesehatan dari 37 puskesmas ke Latkesmas Murnajati Kampus Malang
38. Melaksanakan kredensial tenaga kesehatan di Puskesmas
39. Pengelolaan data tenaga kesehatan di wilayah kabupaten kediri melalui SISDMK
40. Monitoring dan evaluasi tenaga kesehatan di wilayah kabupaten kediri
41. Penerbitan SIP/SIK

Hasil Kinerja

Pencapaian Kinerja Tahun 2024

Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan (Umur Harapan Hidup)	74.85	75.07	100.29%	Sangat Baik

Keandalan Data Kinerja

Formula	Perhitungan	Hasil Perhitungan	Dasar Perhitungan
Indeks Kesehatan (Umur Harapan Hidup)	Diukur oleh BPS	75.07	Berita Resmi Statistik Kabupaten Kediri No. 03/12/3506/Th.II, 12 Desember 2024

Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode tahun 2020 hingga tahun 2024, UHH telah meningkat sebesar 0,80 tahun atau rata-rata tumbuh sebesar 0,27 persen per tahun. Pada tahun 2020, UHH Kabupaten Kediri adalah 74,27 tahun dan pada tahun 2024 mencapai 75,07 tahun. UHH tahun 2024 meningkat 0,22 tahun (0,29 persen) dibanding tahun sebelumnya, lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan tahun 2020-2023 yang sebesar 0,26 persen per tahun.

Gambar 7 Rilis BPS pada Umur Harapan Hidup di Kabupaten Kediri Tahun 2024



Sumber: Berita Resmi Statistik Kabupaten Kediri No. 03/12/3506/Th.II, 12 Desember 2024

Pencapaian Target Jangka Menengah

Sasaran	Indikator	Target Akhir RPJMD	Realisasi	Capaian	Keterangan
Meningkatnya Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan (Umur Harapan Hidup)	72.87	75.07	103.02%	Melampaui Target RPJMD

Realisasi Anggaran

Sasaran	Indikator	Pagu	Realisasi	Capaian	Keterangan
Meningkatnya Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan (Umur Harapan Hidup)	186,687,674,880.00	175,148,128,063.00	93.82%	Zona Hijau

Analisa Efisiensi

Sasaran	Indikator	Capaian Kinerja	Capaian Anggaran	Analisa Efisiensi	Keterangan
Meningkatnya Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan (Umur Harapan Hidup)	100.29%	93.82%	6.48%	Efisien

Benchmarking

Wilayah Lain	UHH	Keterangan	Rujukan Data
Nasional	74,15	Kabupaten Kediri Lebih baik	https://malangkota.bps.go.id/id/statistics-Tabel/2/NTg0IzI=/usia-harapan-hidup-uhh-kota-malang-jawa-timur-dan-indonesia-uhh-dari-hasil-sp2020-long-form-.html
Provinsi Jawa Timur	75,07	Sama dengan Kabupaten Kediri	
Kota Malang	75,54	Lebih baik dari Kabupaten Kediri	
Kota Kediri	75,74	Lebih Baik dari Kabupaten Kediri	https://lenteratoday.com/usia-harapan-hidup-kota-kediri-2024-ungguli-nasional-dan-jawa-timur/

Program Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Kinerja

Analisa Program/Kegiatan yang Mendukung

Program/Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan	Cakupan Fasilitasi Pelayanan UKP dan UKM	100%	100%	100.00%	Sangat Mendukung
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase kecukupan rasio dan kompetensi tenaga kesehatan	100%	35%	35.00%	Kurang Mendukung
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Prosentase Pemberian Rekomendasi Apotek, To, Tk. Alkes Dan Optikal, Umot	75%	100%	133.33%	Sangat Mendukung
	Prosentase Produk Makanan Minuman Tertentu Yang Bersertifikat P-Irt	75%	100%	133.00%	Sangat Mendukung
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase UKBM Purnama Mandiri (Posyandu balita, poskestren, poskesdes, SBH, desa siaga)	68%	41%	60.29%	Cukup Mendukung
Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase OPD yang responsif gender	100%	100%	100.00%	Sangat Mendukung
Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase Kegiatan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak yang dilaksanakan di tingkat desa	100%	100%	100.00%	Sangat Mendukung

Program/Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase kasus kekerasan terhadap anak yang diselesaikan oleh P2TP2A	87%	87%	100.00%	Sangat Mendukung

Faktor-faktor Pendukung

Komitmen pimpinan yang besar terhadap berjalannya pelayanan kesehatan di Kabupaten Kediri menjadi faktor pendukung yang utama. Dengan komitmen dari pimpinan tersebut, proses perjalanan program dan kegiatan yang telah ditargetkan menjadi lebih solid dan kolaboratif terutama dari dinas-dinas terkait.

Selain itu, kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan pasca Covid-19 menjadi hal yang juga mendukung kinerja di Kabupaten Kediri. Dengan hal tersebut, banyak masyarakat yang mulai aktif merawat kesehatannya, seperti berolahraga, bersepeda, menjalani work-life balance, yang memiliki dampak besar dalam perkembangan kesehatan di Kabupaten Kediri.

Faktor-faktor Penghambat

1. Pemenuhan Sarana prasarana serta Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai kompetensi baik tenaga kesehatan maupun tenaga administrasi umum masih sangat diperlukan guna menunjang keberhasilan program.
2. Dasar hukum, peraturan dan kebijakan yang seringkali berubah
3. Komposisi kepesertaan JKN saat ini yaitu 67,59% adalah peserta PBI atau Penerima Bantuan Iuran (baik PBIN maupun PBID). Kesadaran masyarakat dan pihak swasta sebagai pemberi kerja masih kurang untuk mendaftarkan anggota keluarganya ataupun karyawannya dalam kepesertaan JKN non PBI (Penerima Bantuan Iuran).
4. Pentingnya updating (pemutakhiran) data kependudukan secara berkala belum menjadi perhatian masyarakat. sehingga setiap perubahan data kependudukan (kelahiran, kematian, pernikahan, pindah domisili dll) tidak terekam dengan baik. Hal tersebut menjadi salah satu penyebab tingkat keaktifan peserta Jaminan Kesehatan Nasional masih rendah.
5. Keberlanjutan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga kurang didukung dengan seringnya terjadi kendala pada aplikasi Keluarga Sehat sehingga menghambat tersedianya data yang mutakhir yang berdampak juga pada proses perencanaan dan pengambilan kebijakan digitalisasi sektor kesehatan

Rencana Tindak Lanjut

1. Komitmen semua pihak untuk mempertahankan pencapaian Universal Health Coverage (UHC) di Kabupaten Kediri perlu dijaga agar semua warga Kabupaten Kediri memiliki akses untuk mendapatkan pelayanan Kesehatan yang komprehensif dan bermutu tanpa hambatan finansial.
2. Perlu juga meluruskan kesalahpahaman dalam mengartikan UHC yang selama ini bahwa bila seluruh penduduk telah menjadi peserta JKN maka cakupan Kesehatan semesta dianggap tercapai. Padahal terdapat hal yang lebih kompleks dari sekedar kepesertaan jaminan pembiayaan Kesehatan, namun juga berkaitan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs).
3. Rencana tindak lanjut dalam upaya mewujudkan dan mempertahankan UHC yaitu melalui pemenuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan, ketersediaan obat, pemerataan distribusi SDM Kesehatan di FKTP dan FKRTL, jaminan ketersediaan anggaran untuk pembayaran iuran peserta serta regulasi yang mendorong perbaikan penyelenggaraan Program JKN di Kabupaten Kediri.
4. Pemerintah Kabupaten Kediri berupaya untuk tetap menjaga dan meningkatkan kualitas layanan di bidang kesehatan. Upaya peningkatan kualitas kesehatan akan tetap mengacu pada RPJMD tahun 2021-2026 yang targetnya meningkat setiap tahunnya dengan pelaksanaan prinsip-prinsip Sistem Kesehatan Nasional.

Sasaran 3

Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja dan Kesempatan Kerja

Pada tahun 2024, realisasi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang diambilkan dari Berita Resmi Statistik Kabupaten Kediri No. 03/12/3506/Th.II, 12 Desember 2024 disebutkan bahwa TPAK Kabupaten Kediri yakni 71,31. Berdasarkan data hasil realisasi kinerja Tahun 2024 ditargetkan TPAK sebesar 71,1 dan realisasi yang didapatkan sebesar 71,31 diperoleh capaian kinerja sebesar 100,30 %.

Tenaga kerja berarti penduduk dalam usia kerja yang siap melakukan pekerjaan, antara lain mereka yang sudah bekerja, yang sedang mencari pekerjaan, yang bersekolah, dan mereka yang mengurus rumah tangga. Definisi lain tenaga kerja adalah semua orang yang bersedia dan sanggup bekerja, termasuk orang-orang yang menganggur meskipun bersedia dan sanggup bekerja dan mereka yang menganggur terpaksa akibat tidak ada kesempatan kerja. Tenaga kerja dan lapangan pekerjaan masih menjadi bahasan yang

menarik di Indonesia. Terlebih jika dikaitkan dengan bonus demografi yang seharusnya punya potensi dan peran besar dalam pembangunan ekonomi nasional.

Perkembangan ketenagakerjaan di Indonesia menurut Kementerian Tenaga Kerja merupakan hal yang penting untuk diperhatikan, terutama dalam aspek kesejahteraan masyarakat. Aspek tersebut berkaitan dengan masalah produktivitas dan pendapatan masyarakat. Dalam kondisi disrupsi teknologi seperti ini, perkembangan ketenagakerjaan di Indonesia harus mendapatkan perhatian penuh terutama dalam upaya optimalisasi tenaga kerja di Indonesia.

Upaya untuk mencapai masyarakat yang optimal tersebut diukur dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang dapat mengukur partisipasi masyarakat yang masuk dalam angkatan kerja untuk dapat berproduktif dalam perekonomian. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja mengukur sampling dengan pendekatan masyarakat yang bekerja penuh dan masyarakat yang bekerja paruh waktu (dengan klasifikasi setengah penganggur dan pekerja paruh waktu).

Permasalahan

Permasalahan utama dalam dunia ketenagakerjaan adalah tingkat pengangguran yang tinggi. Pada dasarnya permasalahan tenaga kerja terkait dengan rendahnya kompetensi pencari kerja, minimnya kesempatan kerja, dan tingginya jumlah kasus hubungan industrial yang berpotensi menyebabkan PHK sehingga berdampak pada meningkatnya pengangguran. Adapun beberapa permasalahan yang umum merujuk pada data Dinas Tenaga Kerja antara lain:

1. Tingkat pendidikan dan keterampilan yang rendah berdampak pada kualifikasi pekerjaan yang didapat. Kualitas SDM relatif masih rendah sehingga kurang memiliki daya saing untuk mendapat peluang kerja (penyerapan di pasar kerja tidak optimal);
2. Jumlah Angkatan Kerja yang tidak seimbang dengan kesempatan kerja. Jumlah penduduk yang besar akan menghasilkan angkatan kerja yang besar pula. Di Indonesia, kesempatan kerja di sektor formal relatif terbatas dibandingkan pertambahan angkatan kerja;
3. Persebaran tenaga kerja yang tidak merata. Masih minimnya penyebarluasan serta kurangnya akses informasi pasar kerja, masyarakat masih belum terbiasa dengan informasi berbasis IT;
4. Faktor sosial budaya dan mindset masyarakat, dimana ada anggapan bahwa bekerja di sektor formal lebih menjanjikan. Masih relatif sedikit angkatan kerja yang berorientasi ke arah wirausaha (entrepreneurship) untuk menciptakan lapangan kerja.

Merujuk Data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Kediri, Isu Ketenagakerjaan di Kabupaten Kediri adalah Tingginya angka menganggur lulusan SMA Umum/Sederajat kemungkinan terjadi karena masalah *link and match* antara keterampilan dengan ketersediaan lapangan pekerjaan yang cenderung belum cukup terampil untuk terjun di pasar kerja, diperlukan pelatihan kompetensi untuk lulusan SMA yang belum cukup terampil untuk terjun di pasar kerja. Selain itu, perlunya peningkatan jangkauan beasiswa pendidikan tinggi terhadap lulusan SMA Umum/Sederajat yang memiliki masalah finansial.

Perencanaan

Pada tahun 2024 ini, target Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dalam RPJMD adalah 71,1. Target sesuai pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2024 dan Perjanjian Kinerja Perubahan Bupati Kediri tahun 2024.

Upaya-upaya Pencapaian Kinerja

Upaya-upaya yang telah dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja bersama dengan dinas-dinas lain adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas dan kompetensi tenaga kerja dengan pelatihan berbasis kompetensi dan pelatihan berbasis industri;
2. Membuka lebih banyak lapangan kerja melalui kemitraan dengan industri maupun Lembaga Penempatan Kerja dan program padat karya serta meningkatkan jenis pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja;
3. Meningkatkan layanan informasi pasar kerja, Job Fair Online maupun Offline, dan memanfaatkan teknologi informasi;
4. Meningkatkan pembinaan hubungan industrial (perusahaan dan pekerja yang memahami dan menerapkan aturan hubungan industrial).

Hasil Kinerja

Pada tahun 2024, realisasi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang diambilkan dari Berita Resmi Statistik Kabupaten Kediri No. 03/12/3506/Th.II, 12 Desember 2024 disebutkan bahwa TPAK Kabupaten Kediri yakni 71,31.

Merujuk pada data yang disampaikan oleh Dinas Tenaga Kerja, Berdasarkan data hasil realisasi kinerja Tahun 2024 ditargetkan TPAK sebesar 71,1 dan realisasi yang didapatkan sebesar 71,31 diperoleh capaian kinerja sebesar 100,30 %.

Pencapaian Kinerja Tahun 2024

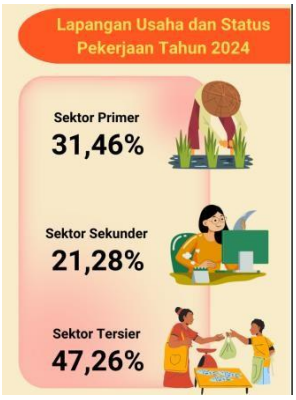
Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja dan Kesempatan Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	71.1	71.31	100.30%	Sangat Baik

Keandalan Data Kinerja

Formula	Perhitungan	Hasil Perhitungan	Dasar Perhitungan
Jumlah Angka Angkatan kerja 15 tahun keatas/ Jumlah Penduduk usia kerja x 100%	Diukur oleh Badan Pusat Statistik	71.31	Berita Resmi Statistik Kabupaten Kediri No. 03/12/3506/Th.II, 12 Desember 2024

Gambar 8 Rilis BPS pada Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Kediri Tahun 2024

Status Keadaan Ketenagakerjaan	Agustus 2022	Agustus 2023	Agustus 2024	Perubahan Agustus 2023 – Agustus 2024	
	orang	orang	orang	orang	persen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Penduduk Usia Kerja	1.258.779	1.324.474	1.336.346	11.872	0,90
Angkatan Kerja	865.206	910.477	952.912	42.435	4,66
Bekerja	806.121	857.724	904.344	46.620	5,44
Penganggur	59.085	52.753	48.568	-4.185	-7,93
Bukan Angkatan Kerja	393.573	413.997	383.433	-30.564	-7,38
	persen	persen	persen	persen poin	
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	6,83	5,79	5,10	-0,69	
Laki-Laki	6,69	5,82	5,66	-0,16	
Perempuan	7,06	5,75	4,21	-1,54	
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	68,73	68,74	71,31	2,57	
Laki-Laki	85,05	85,22	86,69	1,47	
Perempuan	52,41	52,08	55,76	3,68	



Sumber: Berita Resmi Statistik Kabupaten Kediri No. 03/12/3506/Th.II, 12 Desember 2024

Pencapaian Target Jangka Menengah

Sasaran	Indikator	Target Akhir RPJMD	Realisasi	Capaian	Keterangan
Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas Pendidikan	Harapan Lama Sekolah	13.65	13.63	99.85%	Target Akhir RPJMD Belum Tercapai
	Rata-rata lama sekolah	8.3	8.26	99.52%	Target Akhir RPJMD Belum Tercapai

Realisasi Anggaran

Sasaran	Indikator	Pagu	Realisasi	Capaian	Keterangan
Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas Pendidikan	Harapan Lama Sekolah	312,211,153,200.00	301,318,175,007.00	96.51%	Zona Hijau
	Rata-rata lama sekolah				

Analisa Efisiensi

Sasaran	Indikator	Capaian Kinerja	Capaian Anggaran	Efisiensi	Keterangan
Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas Pendidikan	Harapan Lama Sekolah	100.07%	96.51%	3.56%	Efisien
	Rata-rata lama sekolah	100.24%			

Benchmarking

Wilayah	TPAK	Keterangan	Rujukan Data
Nasional	70.63	Kabupaten Kediri lebih baik	https://jatim.bps.go.id/id/statistics-Tabel/2/Mjc3IzI=/tingkat-partisipasi-angkatan-kerja--tpak--menurut-kabupaten-kota.html
Provinsi Jawa Timur	73,45	Lebih Baik dari Kabupaten Kediri	
Kabupaten Kediri	71.31		
Kabupaten Nganjuk	69,79	Kabupaten Kediri lebih baik	
Kabupaten Tulungagung	75,57	Lebih Baik dari Kabupaten Kediri	

Pihak-pihak yang Terkait

Pihak-pihak yeng terlibat dari Internal Pemkab beserta perannya:

1. DPMPTSP, mengidentifikasi kebutuhan tenaga kerja (penyiapan informasi bursa kerja);
2. Dinas Sosial, pemberdayaan dan penyiapan angkatan kerja PMKS Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
3. Disparbud dan Dinas Pendidikan, peningkatan kapasitas angkatan kerja muda dan lulusan SMK (penyiapan angkatan kerja muda dan penyerapan tenaga kerja lulusan SMK)

4. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, pemberdayaan pada sektor usaha (penguatan dan peningkatan kewirausahaan)
5. Dinas Perdagangan, pemberdayaan pada sektor industri
6. Dinas Tenaga Kerja (pelaksana pelatihan kompetensi dan keterampilan)

Pihak-pihak yang terlibat dari eksternal Pemkab beserta perannya:

1. Perusahaan, penyedia informasi lowongan kerja dan lapangan kerja
2. Lembaga pelatihan / penempatan kerja, mitra kerja dengan Pemkab dalam membantu masyarakat mengembangkan keahlian khusus untuk bersaing di era global

Program Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Kinerja

Program	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	59%	83.23%	141.07%	Sangat Mendukung
Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	14%	15.53%	110.93%	Sangat Mendukung
Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme Layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	95%	91.43%	96.24%	Mendukung
Program Hubungan Industrial	Persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial	9%	5.29%	58.78%	Kurang Mendukung
Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan melalui mekanisme transmigrasi	10%	14.29%	142.90%	Sangat Mendukung

Faktor-faktor Pendukung

Merujuk data dari Dinas Tenaga Kerja adalah sebagai berikut;

1. Meningkatkan kompetensi para pencari kerja dengan melakukan pelatihan berbasis kompetensi secara komprehensif dan berkelanjutan;
2. Melakukan pelayanan antar kerja yang tepat sasaran untuk meningkatkan penempatan tenaga kerja;
3. Melakukan pembinaan dan kemitraan yang baik terhadap Lembaga Pelatihan Kerja Swasta guna meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja;

4. Melakukan pembinaan hubungan industrial guna menekan angka pemutusan hubungan kerja;
5. Menjalin kerjasama dengan baik dengan stakeholder melalui kolaborasi yang win-win solution;
6. Penggunaan anggaran untuk mendorong pencapaian target indikator kinerja utama perangkat daerah yaitu meningkatnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang pada akhirnya bertujuan menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sudah dilakukan secara optimal.

Faktor-faktor Penghambat

Merujuk data dari Dinas Tenaga Kerja adalah sebagai berikut;

1. Minimnya jumlah perusahaan yang membentuk LKS Bipartit;
2. Belum maksimalnya pembinaan hubungan industrial, sehingga jumlah perusahaan dan pekerja yang memahami dan menerapkan aturan hubungan industrial masih minim;
3. Belum optimalnya komunikasi dan diskusi terkait hubungan industrial di perusahaan karena masih sering berjalan satu pihak.

Rencana Tindak Lanjut

Merujuk penjelasan dari Dinas Tenaga Kerja adalah sebagai berikut:

1. Mendorong peningkatan jumlah LKS Bipartit yang dibentuk;
2. Meningkatkan kerjasama dan kemitraan yang baik dan bersifat mutualisme dengan berbagai pihak yang terlibat dalam dunia ketenagakerjaan;
3. Melakukan evaluasi terhadap kinerja, melakukan efisiensi dan efektivitas anggaran pada Tahun Anggaran berikutnya.

Tujuan 2

Menurunkan Angka Kemiskinan

Pada tahun 2024, Persentase Angka Kemiksinan mengalami penurunan menjadi 9,95 dibandingkan tahun 2023 sebesar 10,72. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) tercatat sebesar 1,22 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023 yang sebesar 1,52. Hal ini berbanding lurus dengan penurunan persentase penduduk miskin pada tahun 2024.

Penurunan Indeks Kedalaman Kemiskinan ini menunjukkan derajat kesejahteraan penduduk miskin semakin membaik karena rata-rata pengeluaran perkapitanya semakin mendekati garis kemiskinan.

Merujuk pada Wikipedia, Kemiskinan, kemelaratan, kefakiran, kepapaan, kekedanaan, kerudinan, kegembelan, kebansatan, atau prasejahtera adalah keadaan saat ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan, dan lain-lain.

Kemiskinan dipahami dalam berbagai cara. Pemahaman utamanya mencakup:

1. Gambaran kekurangan materi, yang biasanya mencakup kebutuhan pangan sehari-hari, sandang, perumahan, dan pelayanan kesehatan. Kemiskinan dalam arti ini dipahami sebagai situasi kelangkaan barang-barang dan pelayanan dasar.
2. Gambaran tentang kebutuhan sosial, termasuk keterkucilan sosial, ketergantungan, dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Hal ini termasuk pendidikan dan informasi. Keterkucilan sosial biasanya dibedakan dari kemiskinan, karena hal ini mencakup masalah-masalah politik dan moral, dan tidak dibatasi pada bidang ekonomi. Gambaran kemiskinan jenis ini lebih mudah diatasi daripada dua gambaran yang lainnya.
3. Gambaran tentang kurangnya penghasilan dan kekayaan yang memadai. Makna "memadai" di sini sangat berbeda-beda melintasi bagian-bagian politik dan ekonomi di seluruh dunia. Gambaran tentang ini dapat diatasi dengan mencari objek penghasilan di luar profesi secara halal. Perkecualian apabila institusi tempatnya bekerja melarang. Gambaran Kemiskinan di Kabupaten Kediri secara umum Perhitungan kemiskinan di Kabupaten Kediri pada Tahun 2024 ini ditetapkan oleh BPS garis kemiskinan sebesar Rp. 403.621,-

Permasalahan

Merujuk Laporan Akhir RPKD Kabupaten Kediri yang mengutip Rancangan Teknokratik RPJMD Pemerintah Kabupaten Kediri disebutkan beberapa permasalahan kemiskinan sebagai berikut;

1. Daya beli masyarakat yang menurun;

2. Ketidakmerataan sarana dan prasarana layanan dasar;
3. Keterbatasan akses terhadap pekerjaan;
4. Kualitas pendidikan dan keterampilan tenaga kerja yang belum optimal;
5. Penyandang masalah kesejahteraan sosial yang belum ditanggulangi secara optimal;
6. Angka putus sekolah dapat berdampak pada tingkat pengangguran terbuka; serta
7. Ketidakcocokan antara kebutuhan pasar kerja dan kompetensi atau kualifikasi SDM.

Perencanaan

Pada tahun 2024 ini target Persentase Angka Kemiskinan sesuai dengan target yang ditetapkan dalam RPJMD sebagaimana dibubuhkan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024 yakni 9.8%.

Hasil Kinerja

Pencapaian Kinerja Tahun 2024

Tujuan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
Menurunkan Angka Kemiskinan	Persentase Angka Kemiskinan	9.8	9.95	98.47	Baik

Keandalan Data Kinerja

Formula	Perhitungan	Hasil Perhitungan	Dasar Perhitungan
Persentase Angka Kemiskinan	Diukur oleh BPS	9.95	Indikator Kesejahteraan Kabupaten Kediri 2024

Penjelasan Pengukuran Kinerja dari BPS

Tabel 7.1
Perkembangan Penduduk Miskin Kabupaten Kediri, 2020 – 2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Jumlah Penduduk Miskin (ribu)	179,93	184,49	169,46	171,18	159,27
Persentase Penduduk Miskin (P0)	11,40	11,64	10,65	10,72	9,95
Garis Kemiskinan (GK) Rp	324.215	335.990	353.990	385.874	403.621
Kedalaman Kemiskinan (P1)	1,55	1,35	1,67	1,52	1,22
Keparahan Kemiskinan (P2)	0,33	0,25	0,41	0,34	0,24

Sumber: BRS Kemisikinan Kabupaten Kediri 2024



Sumber: Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Kediri Tahun 2024

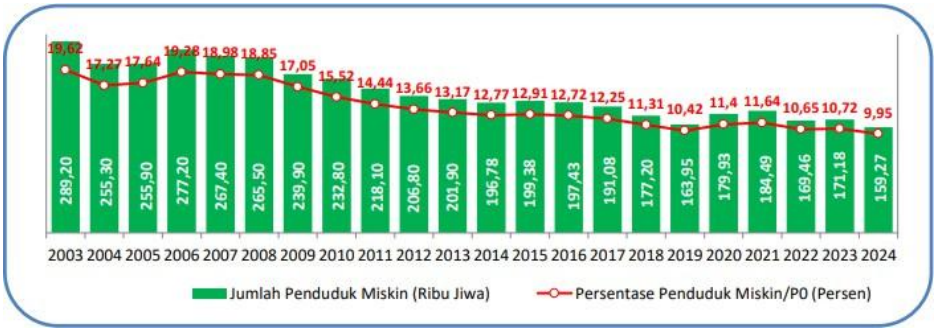
Merujuk penjelasan dari BPS, Ditinjau dari Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Kediri pada tahun 2020-2024 cenderung berfluktuatif. Semakin tinggi nilai indeksnya, maka semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin per kapita dari garis kemiskinan. Artinya semakin tinggi nilai P1, semakin miskin penduduk miskin akibat semakin jauhnya pengeluaran per kapita dengan garis kemiskinan.

Pada tahun 2024, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) tercatat sebesar 1,22 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023 yang sebesar 1,52. Hal ini berbanding lurus dengan penurunan persentase penduduk miskin pada tahun 2024. Penurunan Indeks Kedalaman Kemiskinan ini menunjukkan derajat kesejahteraan penduduk miskin semakin membaik karena rata-rata pengeluaran perkapitanya semakin mendekati garis kemiskinan. Untuk dapat menekan angka kemiskinan Kabupaten Kediri, Pemerintah perlu memastikan program bantuan sosial dapat tersalurkan secara tepat sasaran. Ketepatan sasaran dan waktu penyaluran bantuan menjadi kunci efektivitas program dalam menanggulangi penurunan kesejahteraan rumah tangga.

Penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Kediri mengindikasikan berbagai program pemerintah daerah dalam rangka pengentasan kemiskinan telah tepat sasaran. Dalam beberapa tahun terakhir, Pemerintah Kabupaten Kediri menjadikan pengentasan kemiskinan sebagai program prioritas. Program-program pengentasan kemiskinan diantaranya dengan membentuk Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni, pemberdayaan sanitasi total Berbasis Kemiskinan, Jaminan Kesehatan Daerah, Beasiswa Pendidikan Kepada Masyarakat Tidak Mampu, Pemberdayaan Penyandang Disabilitas, Pelayanan Sosial Lanjut Usia Terlantar, dan lain-lain. Dinas Sosial setiap tahunnya juga melakukan pemutakhiran database penduduk miskin agar program-program pengentasan kemiskinan tepat tujuan dan sasaran.

Benchmarking

Gambar 9 Perbandingan Angka Kemiskinan Kabupaten Kediri Tahun 2003-2024



Sumber: Berita Resmi Statistik Kabupaten Kediri No.1/7/3506/Th.V 29 Juli 2024

Perbandingan dengan Daerah Lain

Wilayah Lain	TPAK	Keterangan	Rujukan Data
Provinsi Jawa Timur	9,79	Lebih Baik dari Kabupaten Kediri	https://jatim.bps.go.id/id/statistics-Tabel/2/NDk3IzI=/persentase-penduduk-miskin-menurutkabupaten-kota-di-jawa-timur.html
Kota Kediri	6,51	Lebih Baik dari Kabupaten Kediri	
Kabupaten Pacitan	13,08	Kabupaten Kediri Lebih Baik	
Kabupaten Tulungagung	6,28	Lebih Baik dari Kabupaten Kediri	
Kabupaten Trenggalek	10,50	Kabupaten Kediri Lebih Baik	
Nasional	9,03	Lebih Baik dari Kabupaten Kediri	https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2024/07/01/2370/persentase-penduduk-miskin-maret-2024-turun-menjadi-9-03-persen-.html

Faktor-faktor Penunjang

Merujuk pada penjelasan BPS, disebutkan beberapa faktor sebagai berikut;

1. Terkendalinya rata-rata kenaikan harga di Kabupaten Kediri pada periode pelaksanaan pendataan yaitu secara year on year sebesar 2,59 persen pada Februari 2024 serta secara year on year 2,67 persen pada Maret 2024.
2. Efektifitas berbagai program peningkatan kesejahteraan yang diluncurkan oleh Pemerintah Kabupaten Kediri cukup efektif dalam intervensi kelompok sasaran pengentasan kesejahteraan dikombinasikan dengan ketepatan pilihan paket komoditas harga bergejolak untuk program peningkatan kesejahteraan

Faktor-faktor Penghambat

Merujuk pada penjelasan BPS, disebutkan beberapa faktor sebagai berikut;

1. Peningkatan rata-rata harga beras dari kisaran Rp.12.000,00 per kilogram di tahun 2023 menjadi kisaran Rp.13.000,00 per kilogram di tahun 2023;
2. Rata-rata tingkat pengeluaran per kapita per bulan penduduk yang berada di bawah Garis Kemiskinan di Kabupaten Kediri, semakin tidak bervariasi;

Rencana Tindak Lanjut

Dalam Laporan Akhir RPKD Kabupaten Kediri tahun 2024-2029 terdapat Nawa Pratishtha atau Sembilan Jalan Kebangkitan sebagai berikut;

1. Pembangunan Rumah Data Terpadu;
2. Optimalisasi jaring pengaman sosial;
3. Pengendalian harga dan peningkatan akses kebutuhan pokok masyarakat miskin;
4. Pengembangan lapangan kerja sektor ekonomi berkelanjutan;
5. Peningkatan kualitas tenaga kerja;
6. Peningkatan partisipasi dan pelayanan pendidikan bagi masyarakat miskin;
7. Peningkatan pemerataan akses infrastruktur dasar;
8. Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat miskin;
9. Optimalisasi kawasan hijau untuk kemandirian pangan dan Penguatan Kapasitas Daerah.

Sasaran 4

Meningkatnya Kesejahteraan Berbasis Keluarga

Pada tahun 2024, realisasi Persentase Keluarga Sejahtera yang diambilkan dari Data Hasil Survei Keluarga Sejahtera dalam Aplikasi INkelud terdapat 454.395 Keluarga yang masuk dalam Kategori Kategori Keluarga Sejahtera Tahap II, III, dan III Plus/Jumlah Keluarga. Data keluarga yang berjumlah 454.395 tersebut dibagi dengan jumlah keluarga yang ada di Kabupaten Kediri yakni 504.603 dan dikalikan 100%.

Kesejahteraan berbasis keluarga adalah hal yang penting, menurut PBB keluarga adalah sebuah sistem yang memiliki fungsi signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan. Dalam sistem keluarga, terdiri atas bapak, ibu, dan anak-anak serta anggota keluarga lainnya seperti kakek, nenek, dsb. Dengan hal tersebut, didapati bahwa keluarga memiliki efek yang panjang terutama dalam bidang kesejahteraan manusia.

Menurut PBB keluarga adalah institusi pertama pembangunan manusia. Pembangunan manusia dalam keluarga berdampak pada banyak aspek mulai dari aspek rata-rata sekolah, harapan lama sekolah, usia harapan hidup, indeks konsumsi, kecukupan gizi, serta hal-hal lain yang menunjang pembangunan manusia. Anak-anak yang tumbuh dari keluarga sejahtera akan memiliki kesempatan pembangunan manusia yang lebih baik daripada anak-anak yang tumbuh dari keluarga pra-sejahtera. Menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) keluarga memiliki delapan

fungsi sebagai berikut: Keagamaan, Sosial Budaya, Cinta kasih, Melindungi, Reproduksi, Sosialisasi dan pendidikan, Ekonomi, dan Pembinaan lingkungan.

Upaya Pemerintah Kabupaten Kediri dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat menggunakan basis keluarga. Upaya peningkatan berbasis keluarga ini dilaksanakan sebagai upaya peningkatan kesejahteraan. Keluarga sejahtera telah melingkupi status sosial, status budaya, status gender, dan status perekonomian. Selain hal tersebut, Peningkatan Kesejahteraan Berbasis Keluarga merupakan salah satu faktor pendukung utama misi Bupati Kediri adalah terwujudnya masyarakat sejahtera. Diperlukan data dan pendekatan berbasis keluarga untuk mencapai tujuan tersebut.

Permasalahan

Merujuk data dari DP2KBP3A disebutkan permasalahan-permasalahan sebagai berikut;

1. Belum ada data mikro keluarga pra sejahtera untuk memberikan intervensi lebih tepat dalam mewujudkan keluarga sejahtera;
2. Masih ada perkawinan anak yang bisa menjadi keluarga pra sejahtera;
3. Belum optimalnya pemberdayaan perempuan kepala keluarga usia produktif;
4. Bonus demografi diperkirakan selesai tahun 2030.

Perencanaan

Pada tahun 2024 ini, target Persentase Keluarga Sejahtera dalam RPJMD adalah 72,11. Target tersebut dirubah pada Perjanjian Kinerja Perubahan Bupati Kediri tahun 2024 dikarenakan target tersebut sudah terlampaui pada tahun 2023 dengan realisasi 84,78. Penetapan target ulang pada Perjanjian Kinerja tahun 2024 ditetapkan dengan asumsi mempertahankan realisasi yakni dengan target 84,78.

Upaya-upaya Pencapaian Kinerja

Upaya-upaya yang telah dilaksanakan oleh DP2KBP3A bersama dengan dinas-dinas lain adalah sebagai berikut;

1. Tersedianya data mikro keluarga dalam aplikasi InKelud yang berisi data keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera
2. Kolaborasi dan koordinasi bersama lintas sektor terkait dalam memberikan solusi intervensi terhadap keluarga pra sejahtera termasuk kegiatan di Kampung KB

3. Memperbaiki sistem pelayanan pengajuan Dispen Nikah untuk menurunkan perkawinan anak
4. Optimalisasi peran Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) dan DRPPA (Desa Ramah Perempuan Peduli Anak)

Hasil Kinerja

Pada tahun 2024, realisasi Persentase Keluarga Sejahtera yang diambilkan dari Data Hasil Survei Keluarga Sejahtera dalam Aplikasi INkelud terdapat 454.395 Keluarga yang masuk dalam Kategori Kategori Keluarga Sejahtera Tahap II, III, dan III Plus/Jumlah Keluarga. Data keluarga yang berjumlah 454.395 tersebut dibagi dengan jumlah keluarga yang ada di Kabupaten Kediri yakni 504.603 dan dikalikan 100% dengan teknis perhitungan sebagai berikut;

Pencapaian Kinerja Tahun 2024

Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Berbasis Keluarga	Persentase Keluarga Sejahtera	84.78%	90.05%	106.22%	Sangat Baik

Keandalan Data Kinerja

Formula	Perhitungan	Hasil Perhitungan	Dasar Perhitungan
Persentase Keluarga Sejahtera	= Jumlah Keluarga Sejahtera Tahap II, III, dan III Plus / Jumlah Keluarga x 100%	454.395/504.603x100%= 90.05%	Data Hasil Survei Keluarga Sejahtera dalam Aplikasi INKelud

Perbandingan dengan Target Akhir RPJMD

Sasaran	Indikator	Target Akhir RPJMD	Realisasi	Capaian	Keterangan
Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Berbasis Keluarga	Persentase Keluarga Sejahtera	84.78%	90.05%	106.22%	Sangat Baik

Realisasi Anggaran

Sasaran	Indikator	Pagu	Realisasi	Capaian	Keterangan
Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Berbasis Keluarga	Persentase Keluarga Sejahtera	30.604.155.552	28.166.617.946	92,03%	Sangat Baik

Analisa Efisiensi

Sasaran	Indikator	Capaian Kinerja	Capaian Anggaran	Analisa Efisiensi	Keterangan
Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Berbasis Keluarga	Persentase Keluarga Sejahtera	106.22%	92,03%		Efisien

Pembandingan/Benchmarking

Perbandingan Realisasi dengan Tahun Sebelumnya

Realisasi Persentase Keluarga Sejahtera di Kabupaten Kediri dengan tahun-tahun sebelumnya adalah sebagai berikut;

2021	2022	2023	2024
70.51	70.8	84.74	90.05

Dari data diatas didapati adanya peningkatan yang signifikan pada tahun 2023 dan tahun 2024. Peningkatan signifikan tersebut akan dijadikan bahan dalam melakukan perencanaan tahun berikutnya.

Perbandingan Kinerja

Dari data yang dihimpun oleh DP2KBP3A didapati data Realisasi Persentase Keluarga Sejahtera Tahun 2024 dengan hasil sebagai berikut;

Wilayah Lain	TPAK	Keterangan	Rujukan Data
Nasional	90,97	Lebih Baik dari Kabupaten Kediri	Data Kompilasi dari DP2KBP3A Kabupaten Kediri
Provinsi Jawa Timur	90,21	Lebih Baik dari Kabupaten Kediri	

Kota Kediri	93,49	Kabupaten Kediri Lebih Baik	
Kabupaten Kediri	90,05	Lebih Baik dari Kabupaten Kediri	

Pihak-pihak yang Terkait

Dari data yang dihimpun oleh DP2KBP3A, pihak-pihak yang terkait adalah sebagai berikut;

1. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)
2. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlingudan Anak (PPPA)
3. Badan Pusat Statistik (BPS)
4. Lintas Sektor dalam TKPK (Tim Koordinasi Pengentasan Kemiskinan)
5. Organisasi Wanita
6. Forum Anak
7. Insan GenRe

Program Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Kinerja

Analisa Program Kegiatan yang Mendukung

Program	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Potensi masyarakat yang diberdayakan	100%	100%	100.00%	Sangat Mendukung
Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Persentase Warga Migran korban kekerasan yang ditangani	100%	9%	9%	Kurang Mendukung
Program Rehabilitasi Sosial	Persentasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang direhabilitasi	100%	96%	96%	Mendukung
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Masyarakat Pemerlu Pelayanan Sosial yang mendapat Perlindungan dan Jaminan Sosial	100%	98%	98%	Mendukung
Program Penanganan Bencana	Persentase Bencana yang ditangani	100%	87%	87%	Mendukung
Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase Taman Makam Pahlawan yang dikelola	100%	98%	98%	Mendukung
Program Pengendalian Penduduk	Persentase desa/kelurahan yang memiliki data mikro	100%	100%	100%	Sangat Mendukung
Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Unmet need	10.29	7.9	76.77%	Cukup Mendukung
Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Cakupan keluarga sasaran menjadi anggota kelompok	BKB 32.98%	BKB 35.87%	105.85%	Sangat Mendukung

Program	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
	kegiatan (BKB, BKR, BKL)	BKR 28.26% BKL 36.32%	BKR 30.15% BKL 37.09%		

Faktor-faktor Pendukung

Merujuk data dari DP2KBP3A faktor-faktor pendukung adalah sebagai berikut:

1. Adanya komitmen dan dukungan dari Kepala Daerah
2. Kolaborasi anggaran dan kegiatan dengan OPD terkait dan Desa

Merujuk data dari LKjIP DP2KBP3A disebutkan sebagai berikut;

1. Adanya peran kader PPKBD dan Sub PPKBD serta PKB/PLKB di Kecamatan;
2. Adanya anggaran yang mendukung semua kegiatan;
3. Antusias yang tinggi dari masyarakat untuk menggunakan KB MKJP;
4. Adanya Komitmen Kepala Daerah untuk meningkatkan Pemberdayaan Perempuan;
5. Dukungan anggaran dengan kolaborasi antar OPD;
6. Adanya kesadaran dari masyarakat untuk hidup lebih baik.

Faktor-faktor Penghambat

Merujuk data dari DP2KBP3A faktor-faktor penghambat adalah sebagai berikut:

1. Ketahanan keluarga dan pola pengasuhan kurang kuat karena faktor kesibukan ekonomi sehingga muncul masalah kerawanan sosial
2. Informasi melalui media sosial yang tanpa filter
3. Perempuan kepala keluarga lebih senang jenis pekerjaan yang langsung dapat uang pada hari yang sama.
4. Kepedulian terhadap isu kependudukan masih rendah

Merujuk data dari LKjIP DP2KBP3A disebutkan sebagai berikut;

1. Pemahaman Masyarakat tentang program Bangga Kencana masih kurang;
2. Tingginya kasus perkawinan anak;
3. Belum optimalnya peran kader perempuan di desa untuk mendukung program dari bawah;
4. SDM pengampu masih kurang.

Merujuk penjelasan dari Dinas Sosial disebutkan sebagai berikut:

1. Updating data tidak dapat dilaksanakan oleh Dinas Sosial sendiri, namun dilakukan oleh Kementerian Sosial sehingga masih adanya data yang belum terupdate.

Rencana Tindak Lanjut

Merujuk data dari DP2KBP3A rencana tindak lanjut adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat ketahanan keluarga dan pola asuh melalui kelompok kegiatan di Kampung KB
2. Peningkatan pemberdayaan remaja dan perempuan kepala keluarga agar siap kerja dengan penghasilan yang lebih baik bersama OPD terkait
3. Penguatan data InKelud sebagai data base di desa
4. Mencegah dampak negatif dari medsos dengan penguatan parenting

Merujuk data dari LKjIP DP2KBP3A disebutkan sebagai berikut;

1. Penyebarluasan program Bangga Kencana;
2. Sosialisasi Pencegahan Perkawinan Anak;
3. Road Map Penyebaran Peran Kader Perempuan;
4. Optimalisasi Peran Penyuluh KB dan Kader.

Merujuk penjelasan dari Dinas Sosial disebutkan bahwa:

1. Berkoordinasi dengan Pemerintah Desa dan Kementerian Sosial untuk *updating* data.

Penghargaan dan Apresiasi Kinerja

Pada Tahun 2024 ini, Apresiasi dan Penghargaan Kinerja yang didapatkan merujuk data dari DP2KBP3A rencana tindak lanjut adalah sebagai berikut:

1. Penghargaan Manggala Karya Kencana Tingkat Nasional Tahun 2024
2. KLA (Kabupaten Layak Anak) dari Kementerian PPPA
3. Anugerah Parahita Ekapraya (APE) dari Kementerian PPPA
4. Terbaik II PIK-R Percontohan Segmentasi Usia 15-19 Tahun oleh SMAN 1 Grogol

Tujuan 3

Meningkatnya Harmonisasi dan Kondusivitas Daerah

Pada Tahun 2024, Indeks Demokrasi Indonesia Kabupaten Kediri mengalami peningkatan menjadi 79 dari 77.86 pada Tahun 2023. Peningkatan terjadi pada ketiga aspek yakni Kebebasan, Kesetaraan, dan Kapasitas Lembaga Demokrasi.

Merujuk pada Penjelasan Umum KBBI,, Demokrasi atau kerakyatan adalah bentuk pemerintahan yang keputusan-keputusan penting, baik secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari masyarakat dewasa.

Merujuk pada Victor Silaen yang dirujuk dari Balitbang Kementerian Dalam Negeri Institusionalisasi demokrasi di Indonesia menjadi salah satu agenda penting Reformasi yang gencar dilaksanakan pasca-tumbangnya Orde Baru pada 1998. Namun demikian, institusionalisasi ini nampaknya belum menghasilkan kestabilan dalam sistem perpolitikan hingga saat ini. Dalam mengevaluasi jalannya proses institusionalisasi yang telah dilakukan sejauh ini, beberapa persoalan mendasar mesti kita cermati, antara lain persoalan terkait desentralisasi dan otonomi daerah.

Terkait hal ini, penting juga untuk menelaah berbagai perubahan dalam proses pemilihan kepala daerah. Dengan menerapkan perspektif neo-institusionalisme dalam mendekati persoalan-persoalan tersebut, tulisan ini ditujukan untuk melakukan refleksi atas UUD, UU Pemda, dan UU Pilkada. Melalui refleksi ini akan dapat kita lihat bagaimana sebenarnya proses institusionalisasi demokrasi berlangsung di Indonesia hingga hari ini.

Permasalahan

Merujuk data dari Bakesbangpol Kabupaten Kediri terdapat beberapa permasalahan sebagai berikut;

1. Beberapa data indikator sulit didapat bahkan tidak ada di wilayah, misalnya indeks persaingan usaha;
2. Kesulitan minta data di BPS Kabupaten karena harus ijin BPS Provinsi;
3. Dari 38 Kab/Kota Se Jawa Timur hanya Kab. Kediri yang menyusun IDI Tingkat Kabupaten.

Hasil Kinerja

Pencapaian Kinerja Tahun 2024

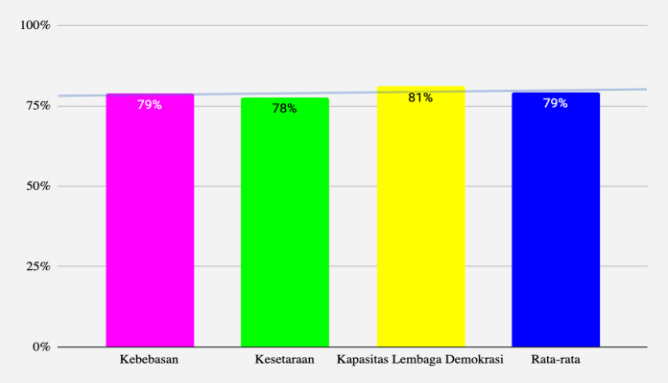
Tujuan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
Meningkatkan harmonisasi dan kondusifitas daerah	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	77.86	79	101.46%	Sangat Baik

Keandalan Data Kinerja

Formula	Perhitungan	Hasil Perhitungan	Dasar Perhitungan
Menggunakan metode Analytical Hierarchy Process (AHP) dalam menentukan prioritas survei, FGD, dan Data Sekunder dari OPD dan Instansi Vertikal di Kabupaten Kediri	Sebagaimana terlampir dalam gambar dibawah	79	Laporan Akhir Penyusunan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Kabupaten Kediri 2024

Gambar 10 Penjelasan Pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia

Variabel	Aspek (Indikator)
1. Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, dan berpendapat oleh aparat negara	Kebebasan (Dimensi Politik)
2. Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, dan berpendapat antar masyarakat	Kebebasan (Dimensi Politik)
3. Terjaminnya kebebasan berkeyakinan	Kebebasan (Dimensi Sosial)
4. Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, berpendapat, dan berkeyakinan dalam setiap kebijakan	Kebebasan (Dimensi Politik)
5. Terjaminnya hak memilih dan dipilih dalam pemilu untuk seluruh kelompok masyarakat	Kebebasan (Dimensi Politik)
6. Pemenuhan hak-hak pekerja	Kebebasan (Dimensi Ekonomi)
7. Pers yang bebas dalam menjalankan tugas dan fungsinya	Kebebasan (Dimensi Politik, Ekonomi, Sosial)
8. Kesetaraan Gender	Kesetaraan (Dimensi Politik Ekonomi, Sosial)
9. Partisipasi masyarakat dalam mempengaruhi kebijakan public melalui lembaga perwakilan	Kesetaraan (Dimensi Politik)
10. Anti monopoli sumber daya ekonomi.	Kesetaraan (Dimensi Ekonomi)
11. Akses warga miskin pada perlindungan dan jaminan sosial.	Kesetaraan (Dimensi Ekonomi)
12. Kesetaraan Kesempatan kerja antar wilayah	Kesetaraan (Dimensi Ekonomi)
13. Akses masyarakat terhadap informasi publik	Kesetaraan (Dimensi Politik)
14. Kesetaraan dalam pelayanan dasar	Kesetaraan (Dimensi Sosial)
15. Kinerja Lembaga Legislatif	Kapasitas Lembaga Demokrasi (Dimensi Politik)
16. Kinerja Lembaga Yudikatif	Kapasitas Lembaga Demokrasi (Dimensi Politik)
17. Netralitas penyelenggara pemilu	Kapasitas Lembaga Demokrasi (Dimensi Politik)
18. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait kebijakan pejabat pemerintah	Kapasitas Lembaga Demokrasi (Dimensi Politik)
19. Jaminan pemerintah/pemerintah daerah terhadap pelestarian lingkungan dan ruang hidup masyarakat	Kapasitas Lembaga Demokrasi (Dimensi Sosial)
20. Transparansi Anggaran dalam Bentuk Penyediaan Informasi APBN/D oleh Pemerintah	Kapasitas Lembaga Demokrasi (Dimensi Politik)
21. Kinerja birokrasi dalam pelayanan public	Kapasitas Lembaga Demokrasi (Dimensi Politik)
22. Pendidikan Politik pada kader partai politik	Kapasitas Lembaga Demokrasi (Dimensi Politik)



Sumber: Laporan Akhir Penyusunan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Kabupaten Kediri 2024

Benchmarking

Wilayah Lain	IDI	Keterangan	Rujukan Data
Provinsi Jawa Timur	82.01	Lebih baik dari Kabupaten Kediri	https://www.bps.go.id/id/statistics-Tabel/2/MjE1OSMy/-metode-baru--indeks-demokrasi-indonesia-menurut-provinsi.html
Nasional	79.51	Lebih baik dari Kabupaten Kediri	https://www.bps.go.id/id/statistics-Tabel/2/MjE2MSMy/-metode-baru--

Wilayah Lain	IDI	Keterangan	Rujukan Data
			indeks-demokrasi-indonesia--idi--tingkat-nasional--pusat--dan-provinsi.html

Faktor-faktor Penunjang

Merujuk pada penjelasan Bakesbangpol, disebutkan beberapa faktor sebagai berikut;

1. Mengutamakan kinerja tim dalam pencapaian indikator kinerja;
2. Melakukan rapat koordinasi sebelum kegiatan dan melakukan evaluasi pasca kegiatan;

Faktor-faktor Penghambat

Merujuk pada penjelasan Bakesbangpol, disebutkan Kewajiban Menyusun IDI hanya di Tingkat Pusat dan Provinsi, sedang tingkat Kabupaten/Kota tidak ada kewajiban, sehingga dalam penggalian datanya ada kendala. Upaya untuk menindaklanjuti yang didasarkan pada data-data tersebut menjadi tidak optimal.

Rencana Tindak Lanjut

Merujuk penjelasan Bakesbangpol, Tindak Lanjut yang akan dilakukan adalah mengkaji ulang penyusunan Indeks Demokrasi Indonesia di Kabupaten Kediri.

Sasaran 5

Meningkatnya Penerapan Nilai Nasionalisme, Agama, dan Semangat Demokrasi di Masyarakat

Pada tahun 2024, realisasi Tingkat Kondusivitas Daerah tercapai sesuai target yaitu 100%. Tingkat Kondusivitas Daerah diukur dengan metode bahwa problem-problem yang ada di dalam masyarakat yang menjadi kewenangan Kabupaten berhasil diselesaikan dalam skala Kabupaten atau tidak mengalami eskalasi pada level provinsi ataupun nasional.

Penerapan nilai nasionalisme, agama, dan semangat demokrasi ditinjau dari tingkat pemahaman elemen masyarakat mulai menurun baik dari wawasan kebangsaan, nilai-nilai kebangsaan, serta karakter bangsa. Disamping itu, diwarnai dengan mulai memudarnya tingkat partisipasi masyarakat dalam ikut serta menjaga dan memelihara kondusifitas lingkungan dan kondusifitas wilayah/daerah. Sedangkan dari aspek tingkat partisipasi demokrasi, masyarakat pun mulai ada sedikit pergeseran pemahaman dan pengetahuan terkait demokrasi di Kabupaten Kediri. Karena ketiga hal tersebut adalah faktor-faktor kunci daerah yang kondusif.

Selain meningkatkan karakter nasionalis dan agama masyarakat Kabupaten Kediri yang akan diwujudkan dengan meningkatnya kerukunan antar umat beragama, terpeliharanya semangat kepahlawanan, nilai-nilai dan karakter kebangsaan, serta partisipasi demokrasi dengan dimensi sebagai berikut;

1. Meningkatnya toleransi umat beragama dengan menerima dan saling menghormati perbedaan keyakinan, baik dalam kehidupan sosial ataupun dalam peribadatan.
2. Penerapan nilai-nilai dan karakter kebangsaan dan Menumbuhkan semangat kepahlawan dalam sadar bela negara
3. Meningkatnya partisipasi demokrasi masyarakat khususnya bagi pemilih pemula di Kabupaten Kediri.

Dengan semangat demokrasi, Pemerintah Kabupaten Kediri tengah berupaya untuk mengembalikan marwah demokrasi di Kabupaten Kediri. Demokrasi yang bertanggung-jawab dan saling mengawasi. Dengan semangat tersebut, diupayakan akan adanya rasa persatuan dan kesatuan dari masyarakat di Kabupaten Kediri.

Permasalahan

1. Aksi Demo Menuntut Dugaan Adanya pungutan liar program PTSL di Kab. Kediri
2. Aksi Demo Menuntut Tidak adanya transparan dalam ujian perangkat desa
3. Adanya Pertambangan ilegal

4. Aksi Spontanitas Warga Desa Tiron Kecamatan Banyakan terkait Permasalahan Dokumen Kependudukan
5. Aksi Demo Menuntut mengusulkan penolakan dan pembatalan Revisi undang - undang TNI, Polri dan Penyiaran dikarenakan tidak mengindahkan aspirasi masyarakat dalam memutuskan produk hukum
6. Audiensi PSHT Pusat Madiun Bersama Bupati Kediri di Ruang Pamenang Pemkab Kediri terkait permasalahan yaitu, adanya SK Pengangkatan baru yang diterbitkan oleh IPSI, SK tersebut atas nama PSHT yang berbeda dan Penerbitan SK tersebut disinyalir tidak melalui mekanisme persetujuan dari anggota IPSI Lainnya.
7. Audiensi terkait Banyaknya Kendaraan yang melebihi tonase (ODOL)
8. Aksi Demo dan Audiensi Gerakan Pemuda Nusantara Bersama Warga Satak Kec. Puncu di KPH Kediri (Sekar Perhutani)

Perencanaan

Target tahun ini sesuai dalam Perjanjian Kinerja Perubahan adalah 100% dan target akhir RPJMD 100% dengan Indikator Tingkat Kondusivitas Daerah (TKD). Tingkat Kondusivitas Daerah diukur dengan metode bahwa problem-problem yang ada di dalam masyarakat yang menjadi kewenangan daerah berhasil diselesaikan dalam skala daerah atau tidak mengalami eskalasi pada level provinsi ataupun nasional.

Upaya-upaya Pencapaian Kinerja

Mengoptimalkan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah (TKPD), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Hasil Kinerja

Pada tahun 2024, realisasi Tingkat Kondusivitas Daerah tercapai sesuai target yaitu 100% dengan teknis perhitungan sebagai berikut;

Pencapaian Kinerja Tahun 2024

Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
Meningkatkan Harmonisasi dan Kondusifitas Daerah	Tingkat kondusifitas daerah	100%	100%	100%	Sangat Baik

Keandalan Data Kinerja

Formula	Perhitungan	Hasil Perhitungan	Dasar Perhitungan
Konflik Sosial/Konflik yang ditindaklanjuti x 100%	21 : 21 x 100%	100%	Data Rekapitulasi Penyelesaian Konflik Daerah

Perbandingan dengan Target Akhir RPJMD

Sasaran	Indikator	Target Akhir RPJMD	Realisasi	Capaian	Keterangan
Meningkatkan Harmonisasi dan Kondusivitas Daerah	Tingkat konduktivitas daerah	100%	100%	100%	Sasaran RPJMD tercapai

Realisasi Anggaran

Sasaran	Indikator	Pagu	Realisasi	Capaian	Keterangan
Meningkatkan Harmonisasi dan Kondusivitas Daerah	Tingkat konduktifitas daerah	10.101.980.000	10.092.850.434	99,91	Zona Hijau

Analisa Efisiensi

Sasaran	Indikator	Capaian Kinerja	Capaian Anggaran	Analisa Efisiensi	Keterangan
Meningkatkan Harmonisasi dan Kondusivitas Daerah	Tingkat konduktifitas daerah	100%	99,91	0,09	Efisien

Pembandingan/Benchmarking

Perbandingan Realisasi dengan Tahun Sebelumnya

Realisasi Tingkat Kondusivitas Daerah di Kabupaten Kediri dengan tahun-tahun sebelumnya adalah sebagai berikut;

2021	2022	2023	2024
100%	100%	100%	100%

Dari data diatas didapati adanya peningkatan yang signifikan pada tahun 2023 dan tahun 2024. Peningkatan signifikan tersebut akan dijadikan bahan dalam melakukan perencanaan tahun berikutnya.

Pihak-pihak yang Terkait

Dari data yang dihimpun oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, pihak-pihak yang terkait adalah Forkopimda, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Tokoh Wanita, Tokoh adat, pendidik, Organisasi Kemsyarakatan, SKPD terkait.

Program Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Sasaran

Program	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Cakupan kelompok yang dibina tentang ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	85%	100%	118%	Sangat Mendukung
Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidik melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Persentase partai politik yang difasilitasi	100%	90%	90%	Mendukung
Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Pembinaan Ormas	80%	98%	123%	Sangat Mendukung
Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase kelompok masyarakat yang dibina terkait narkoba, kerukunan beragama dan kepercayaan	80%	87%	109%	Sangat Mendukung
Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase konflik sosial yang ditindak lanjuti	90%	100%	111%	Sangat Mendukung

Faktor-faktor Pendukung

Merujuk penjelasan Bakesbangpol disebutkan sebagai berikut; Pelaporan informasi yang di masing-masing wilayah sebagai bahan pertimbangan dalam kebijakan pimpinan

Faktor-faktor Penghambat

Merujuk penjelasan Bakesbangpol disebutkan sebagai berikut; Keterbatasan anggaran untuk peningkatan kapasitas SDM pada TKPD dan FKDM

Rencana Tindak Lanjut

Merujuk penjelasan Bakesbangpol disebutkan sebagai berikut; Diadakan diklat bagi anggota TKPD dan FKDM serta peningkatan koordinasi dengan stakeholder.

Tujuan 4

Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Merujuk Kementerian PANRB, Reformasi birokrasi adalah upaya untuk mengubah sistem penyelenggaraan pemerintahan secara mendasar. Tujuannya adalah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Reformasi birokrasi dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan. Reformasi birokrasi juga harus dilakukan secara mendasar, komprehensif, dan sistematik.

Merujuk Kementerian PANRB, dijelaskan bahwa Reformasi Birokrasi adalah sebagai berikut:

1. Perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan Indonesia.
2. Pertaruhan besar bangsa Indonesia dalam menghadapi tantangan abad ke-21.
3. Berkaitan dengan ribuan proses tumpang tindih antar fungsi-fungsi pemerintahan, melibatkan jutaan pegawai, dan memerlukan anggaran yang tidak sedikit.
4. Menata ulang proses birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru dengan langkah-langkah bertahap, konkret, realistis, sungguh-sungguh, berpikir di luar kebiasaan yang ada, perubahan paradigma, dan dengan upaya luar biasa.
5. Merevisi dan membangun berbagai regulasi, memodernkan berbagai kebijakan dan praktik manajemen pemerintah pusat dan daerah, dan menyesuaikan tugas fungsi instansi pemerintah dengan paradigma dan peran baru.

Permasalahan

Merujuk penjelasan dari Tim Reformasi Birokrasi pada Tahun 2023, permasalahan tentang Reformasi Birokrasi permasalahan terutama belum optimalnya koordinasi dengan OPD-OPD pengampu dan OPD strategis. Terutama koordinasi dengan Evaluator Meso sebagai komposit pengukur Indeks Reformasi Birokrasi.

Hasil Kinerja

Pencapaian Kinerja Tahun 2024

Tujuan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Reformasi Birokrasi	77	85.99*	111.68%	Sangat Baik

Keandalan Data Kinerja

Formula	Perhitungan	Hasil Perhitungan	Dasar Perhitungan
Diukur oleh Kementerian PANRB sesuai dengan PermenPANRB Nomor 9 Tahun 2023	Diukur oleh Kementerian PANRB sesuai dengan PermenPANRB Nomor 9 Tahun 2023	85.99*	Penyampaian Hasil Evaluasi Sementara Reformasi Birokrasi Tahun 2024

Gambar 11 Hasil Evaluasi Sementara Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kediri Tahun 2024



Sumber: portalrb.menpan.go.id dengan akun Pemerintah Kabupaten Kediri

Faktor-faktor Penunjang

Merujuk pada penjelasan Tim Reformasi Birokrasi dan Hasil Evaluasi Ex-Ante dan On-Going dari Inspektorat terdapat beberapa hal yang menghambat implementasi Reformasi Birokrasi sebagai berikut;

1. Tata Kelola (Manajemen) Implementasi Reformasi Birokrasi berjalan dengan baik antara pihak Sekretariat STU (Strategic Transformational Unit) dari Sekretariat Daerah Bagian Organisasi dengan Quality Assessor dari Inspektorat.

2. Kesadaran untuk meningkatkan kualitas Implementasi Reformasi Birokrasi dari masing-masing Pengampu berjalan dengan baik.

Faktor-faktor Penghambat

Merujuk pada penjelasan Tim Reformasi Birokrasi dan Hasil Evaluasi Ex-Ante dan On-Going dari Inspektorat terdapat beberapa hal yang menghambat implementasi Reformasi Birokrasi sebagai berikut;

Kausalitas dan Logis Pohon Kinerja Rencana Aksi belum optimal;

Rencana Tindak Lanjut

Merujuk pada penjelasan Tim Reformasi Birokrasi, mengupayakan optimalisasi tindak lanjut rekomendasi atas LHE RB Pemerintah Kabupaten Kediri Tahun 2024.

Sasaran 6

Membangun Institutional Penyelenggaraan Pemerintah yang Efektif dan Bersih

Pada tahun 2024 ini realisasi Nilai SAKIP Pemerintah Kabupaten Kediri adalah 67.11 mengalami penurunan dari 68.21 pada tahun 2023, realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat adalah 88.74 mengalami peningkatan dari 86.38 pada tahun 2023, realisasi Indeks Persepsi Anti Korupsi adalah 3.85 mengalami peningkatan dari 3.66 pada tahun 2026, realisasi Opini BPK bertahan pada predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian).

Sasaran ini terbagi atas lima indikator yakni Nilai SAKIP, Nilai IKM, Opini BPK, Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK). Dari keempat indikator tersebut diupayakan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan bersih dapat dilaksanakan dengan baik. Karena dari ke-empat indikator tersebut dapat menggambarkan telah efektif dan bersihnya penyelenggaraan pemerintah.

Dalam mengukur sasaran ini, digunakan empat indikator utama dalam pelaksanaannya, yakni Nilai SAKIP untuk mengukur tingkat akuntabilitas kinerja, IKM untuk mengukur kepuasan masyarakat, Opini BPK untuk mengukur kesehatan keuangan, dan Indeks Persepsi Anti Korupsi untuk mengukur tingkat persepsi anti korupsi pada tingkat masyarakat. Dalam laporan ini akan dimuat penjabaran kinerja atas masing-masing pencapaian indikator.

Dari penjabaran data diatas, terdapat stagnasi bahkan penurunan yang signifikan antara lain dalam bidang SAKIP yang tetap berada dalam predikat B selama 2018 - 2023 (dalam kurun waktu 6 tahun). Selain itu, nilai IKM juga mengalami fluktuasi penurunan pada tahun 2018 dan perlahan-lahan meningkat pada tahun-tahun berikutnya. Predikat Opini BPK tetap mendapatkan predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian).

Penjelasan Kinerja **Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**

Akuntabilitas secara umum diartikan sebagai pertanggungjawaban atau keadaan yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Dalam menjalankan pemerintahan, pemerintah harus berjalan dengan pertanggungjawaban atas apa yang dilaksanakannya. Akuntabilitas adalah prinsip yang selalu diterapkan oleh seluruh individu dalam satu organisasi, mulai dari pimpinan tertinggi sampai pegawai terendah dalam menjalankan tugasnya. Pelaksanaan akuntabilitas dengan prinsip transparancy, effectiveness, efficiency, dan strategic vision, karena terkait dengan aktivitas pemerintahan dan kehidupan sosial masyarakat.

Permasalahan

Merujuk penjelasan dari Tim SAKIP Pemerintah Kabupaten Kediri disebutkan sebagai berikut;

1. Kesadaran akan pentingnya akuntabilitas belum optimal;
2. Implementasi akuntabilitas bersifat *document based*;
3. Mekanisme monitoring dan evaluasi kinerja yang belum dapat dilaksanakan oleh OPD;
4. Belum adanya satu pakem/panduan mekanisme monitoring dan evaluasi kinerja.

Hasil Kinerja

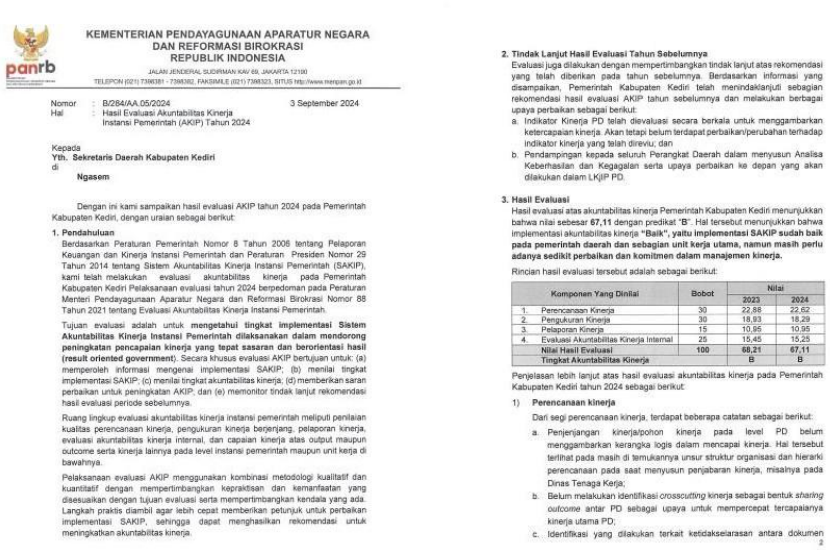
Pencapaian Kinerja Tahun 2024

Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
Membangun Institutional Penyelenggaraan Pemerintah yang Efektif dan Bersih	Nilai SAKIP	75	67.11		Baik

Keandalan Data Kinerja

Formula	Perhitungan	Hasil Perhitungan	Dasar Perhitungan
Diukur oleh Evaluator Kementerian PANRB sesuai dengan PermenPANRB 88/2021	Perencanaan Kinerja: 22,62 Pengukuran Kinerja: 18,29 Pelaporan Kinerja: 10,95 Evaluasi AKIP: 15,25	67,11	Surat KemenPANRB nomor B/284/AA.05/2024

Gambar 12 Surat Laporan Hasil Evaluasi dari Kementerian PANRB



KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : B/284/AA.05/2024 — 3 September 2024
Hal : Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024

Kepada
Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Kediri
di
Ngasem

Dengan ini kami sampaikan hasil evaluasi AKIP tahun 2024 pada Pemerintah Kabupaten Kediri, dengan uraian sebagai berikut:

1. Pendahuluan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kabupaten Kediri Pelaksanaan evaluasi tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan evaluasi adalah untuk **mengetahui tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (result oriented government)**. Secara khusus evaluasi AKIP bertujuan untuk: (a) memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP; (b) menilai tingkat implementasi SAKIP; (c) menilai tingkat akuntabilitas kinerja; (d) memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan (e) memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja berjenjang, pelaporan kinerja, evaluasi akuntabilitas kinerja internal, dan capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya pada level instansi pemerintah maupun unit kerja di bawahnya.

Pelaksanaan evaluasi AKIP menggunakan kombinasi metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan kepraktisan dan kemanfaatan yang disesuaikan dengan tujuan evaluasi serta mempertimbangkan kendala yang ada. Langkah praktis diambil agar lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi SAKIP, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja.

2. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Evaluasi juga dilakukan dengan mempertimbangkan tindak lanjut atas rekomendasi yang telah diberikan pada tahun sebelumnya. Berdasarkan informasi yang disampaikan, Pemerintah Kabupaten Kediri telah menindaklanjuti sebagian rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya dan melakukan berbagai upaya perbaikan sebagai berikut:

a. Indikator Kinerja PD telah dievaluasi secara berkala untuk menggambarkan ketercapaian kinerja. Akan tetapi belum terdapat perbaikan/perubahan terhadap indikator kinerja yang telah direviu; dan
b. Pendampingan kepada seluruh Perangkat Daerah dalam menyusun Analisa Keberhasilan dan Kegagalan serta upaya perbaikan ke depan yang akan dilakukan dalam LKjIP PD.

3. Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Kediri menunjukkan bahwa nilai sebesar **67,11** dengan predikat "**B**". Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja **"Baik", yaitu implementasi SAKIP sudah baik pada pemerintah daerah dan sebagian unit kerja utama, namun masih perlu adanya sedikit perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja.**

Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai	
		2023	2024
1. Perencanaan Kinerja	30	22,88	22,62
2. Pengukuran Kinerja	30	18,93	18,29
3. Pelaporan Kinerja	15	10,95	10,95
4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	15,45	15,25
Nilai Hasil Evaluasi	**100**	**68,21**	**67,11**
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		**B**	**B**

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kabupaten Kediri tahun 2024 sebagai berikut:

1) **Perencanaan kinerja**

Dari segi perencanaan kinerja, terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

a. Penjenjangan kinerja/pohon kinerja pada level PD belum menggambarkan kerangka logis dalam mencapai kinerja. Hal tersebut terlihat pada masih di temukannya unsur struktur organisasi dan hierarki perencanaan pada saat menyusun penjabaran kinerja, misalnya pada Dinas Tenaga Kerja;
b. Belum melakukan identifikasi *crosscutting* kinerja sebagai bentuk *sharing outcome* antar PD sebagai upaya untuk mempercepat tercapainya kinerja utama PD;
c. Identifikasi yang dilakukan terkait ketidakselarasan antara dokumen

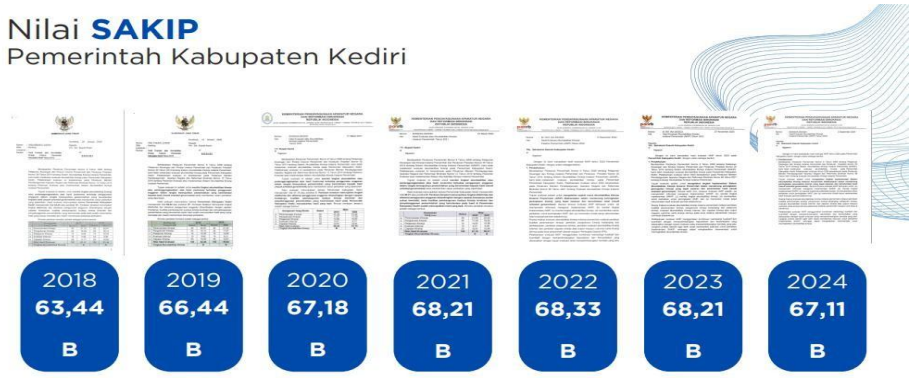
Sumber: Bagian Organisasi Sekretariat Daerah diambil melalui esr.menpan.go.id

Perbandingan dengan Target Akhir RPJMD

Sasaran	Indikator	Target Akhir RPJMD	Realisasi	Capaian	Keterangan
Membangun Institutional Penyelenggaraan Pemerintah yang Efektif dan Bersih	Nilai SAKIP	82	67.11	81.84	Capaian masih berada di bawah target akhir RPJMD

Perbandingan dengan Nilai SAKIP Tahun sebelumnya

Gambar 13 Perkembangan Nilai SAKIP Pemerintah Kabupaten Kediri Tahun 2018-2024



Sumber: Bagian Organisasi Sekretariat Daerah (dimodifikasi)

Dari penjabaran data diatas, Nilai SAKIP Pemerintah Kabupaten Kediri mengalami fluktuasi dan mengalami tren cenderung menurun pada dua tahun terakhir.

Benchmarking

Instansi Pemerintah	Nilai	Rujukan Data	Keterangan
Pemerintah Kabupaten Kediri	67.11 (B)	Surat KemenPANRB nomor B/284/AA.05/2024	
Pemerintah Kota Blitar	80.06 (A)	https://lenteratoday.com/kota-blitar-satu-satunya-di-jawa-timur-dan-indonesia-raih-kenaikan-predikat-sakip-2024-dari-bb-menjadi-a/	Lebih Tinggi dari Kabupaten Kediri
Pemerintah Kabupaten Blitar	B	https://www.youtube.com/watch?v=_wmM35DEOPY menit 1:56:11	Sama dengan Kabupaten Kediri
Pemerintah Kabupaten Pacitan	B	https://www.youtube.com/watch?v=_wmM35DEOPY menit 1:56:26	Sama dengan Kabupaten Kediri
Pemerintah Kota Batu	B	https://www.youtube.com/watch?v=_wmM35DEOPY menit 1:56:26	Sama dengan Kabupaten Kediri
Pemerintah Kabupaten Jombang	BB	https://www.youtube.com/watch?v=_wmM35DEOPY menit 1:56:20	Lebih Tinggi dari Kabupaten Kediri
Pemerintah Kabupaten Nganjuk	BB	https://www.youtube.com/watch?v=_wmM35DEOPY menit 1:56:20	Lebih Tinggi dari Kabupaten Kediri
Pemerintah Kota Kediri	BB	https://www.youtube.com/watch?v=_wmM35DEOPY menit 1:56:20	Lebih Tinggi dari Kabupaten Kediri

Faktor-faktor Penunjang

Merujuk penjelasan dari Tim SAKIP adalah sebagai berikut;

1. Adanya kesadaran dari masing-masing OPD untuk meningkatkan nilai Akuntabilitas Kinerja;
2. Terselenggarakannya Diklat Akuntabilitas Kinerja kepada evaluator Inspektorat;

Faktor-faktor Penghambat

Merujuk penjelasan dari Tim SAKIP adalah sebagai berikut;

1. Tindak Lanjut atas Rekomendasi LHE AKIP dari Kementerian PANRB belum optimal;
2. Komunikasi proses-proses perbaikan Akuntabilitas Kinerja dengan Evaluator Kementerian PANRB belum dapat berjalan optimal;
3. Adanya perubahan dan transisi periode pemerintahan;

Rencana Tindak Lanjut

Merujuk penjelasan dari Tim SAKIP adalah sebagai berikut;

1. Mengoptimalisasi Tindak Lanjut atas Rekomendasi LHE AKIP Kementerian PANRB;
2. Meningkatkan intensitas komunikasi dengan Evaluator Kementerian PANRB dalam optimalisasi perbaikan-perbaikan Akuntabilitas Kinerja;
3. Menyusun Arsitektur Kinerja/Penjenjangan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri menyusul perubahan dan transisi periode pemerintahan;

Penjelasan Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat

Survei Kepuasan Masyarakat merupakan kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik dengan tujuan untuk mengetahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur penyelenggara pelayanan public. Selain itu pula, Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) digunakan untuk mengetahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, setiap penyelenggara pelayanan publik, baik yang memberikan pelayanan kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan standar pelayanan untuk setiap jenis pelayanan sebagai tolak ukur dalam penyelenggaraan pelayanan di lingkungan masing- masing.

Salah satu upaya guna meningkatkan kualitas pelayanan publik, sebagaimana diamanatkan dalam Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS), perlu disusun Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai tolak ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan. Serta merujuk pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menegaskan bahwa penyelenggara pelayanan publik berkewajiban melakukan penilaian kinerja penyelenggaraan pelayanan publik secara berkala. Selain itu ,data IKM akan dapat menjadi bahan penilaian terhadap unsur pelayanan yang masih perlu perbaikan dan menjadi pendorong setiap unit penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanannya.

Permasalahan

Merujuk penjelasan dari Tim SKM Kabupaten Kediri disebutkan sebagai berikut:

1. Tindaklanjut atas Rencana Tindak Lanjut Laporan IKM tidak dapat optimal karena bersifat lintas sektor;
2. Penggunaan Aplikasi Sukma e-Jatim (Survei Kepuasan Masyarakat) dari Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur memerlukan adaptasi bagi penerima layanan sebagai responden.

Hasil Kinerja

Pencapaian Kinerja Tahun 2024

Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
Membangun Institutional Penyelenggaraan Pemerintah yang Efektif dan Bersih	Indeks Kepuasan Masyarakat	86.35	88.74	102.77%	Sangat Baik

Keandalan Data Kinerja

Formula	Perhitungan	Hasil Perhitungan	Dasar Perhitungan
Diukur berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap	Diukur dengan lokus Seluruh OPD Layanan dengan Sampel 66 UPP (Unit Pelayanan Publik) dengan metode Survei kepada masyarakat (penerima layanan) berdasarkan 9 unsur	88.74	Laporan Penyelenggaraan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2024

Penyelenggaraan Pelayanan Publik;			

Gambar 14 Penjelasan Mengenai Indeks Kepuasan Masyarakat per Unsur

	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
IKM per unsur	3,47	3,46	3,40	3,84	3,45	3,49	3,54	3,77	3,50
Kategori	**B**	**B**	**B**	**A**	**B**	**B**	**A**	**A**	**B**
IKM Unit Layanan	**88,74 / A (Sangat Baik)**								

Keterangan :			
Unsur 1	: Persyaratan	Unsur 6	: Kompetensi Pelaksana
Unsur 2	: Prosedur	Unsur 7	: Perilaku Pelaksana
Unsur 3	: Waktu Penyelesaian	Unsur 8	: Pengelolaan Pengaduan
Unsur 4	: Biaya/tarif	Unsur 9	: Sarana dan Prasarana
Unsur 5	: Kesesuaian Produk Layanan		

Sumber: Laporan Penyelenggaraan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2024

.

Perbandingan dengan Target Akhir RPJMD

Sasaran	Indikator	Target Akhir RPJMD	Realisasi	Capaian	Keterangan
Membangun Institutional Penyelenggaraan Pemerintah yang Efektif dan Bersih	Indeks Kepuasan Masyarakat	86	88.74	103.19%	Sangat Baik

Benchmarking

Perbandingan dengan IKM Tahun sebelumnya

Gambar 15 Perkembangan Nilai IKM Pemerintah Kabupaten Kediri Tahun 2021-2024



Sumber: Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Kabupaten Kediri Tahun 2024

Perbandingan dengan Instansi Pemerintah lainnya

Instansi Pemerintah	Nilai	Rujukan Data	Keterangan
Pemerintah Kabupaten Jombang	89.90	https://sukma.jatimprov.go.id/fe/kabkot?tahun=2024	Lebih baik dari Kabupaten Kediri
Pemerintah Kabupaten Kediri	88.74	Laporan SKM Kabupaten Kediri Tahun 2024	-
Pemerintah Kabupaten Nganjuk	87.51	https://sukma.jatimprov.go.id/fe/kabkot?tahun=2024	Kabupaten Kediri Lebih baik
Pemerintah Kabupaten Batu	84.09	https://sukma.jatimprov.go.id/fe/kabkot?tahun=2024	Kabupaten Kediri Lebih baik
Pemerintah Kabupaten Blitar	85.16	https://sukma.jatimprov.go.id/fe/kabkot?tahun=2024	Kabupaten Kediri Lebih baik

Faktor-faktor Penunjang

Merujuk penjelasan dari Tim SKM dalam hal ini Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut:

1. Dukungan Pimpinan (Bupati Kediri) dalam meningkatkan pelayanan di Kabupaten Kediri;
2. Monitoring dan Evaluasi Pelayanan yang berjalan dengan baik di beberapa Unit Pelayanan Publik (UPP);
3. Penyederhanaan SOP dan Digitalisasi layanan dengan Scan Barcode dan banyak hal.

Faktor-faktor Penghambat

Merujuk penjelasan dari Tim SKM dalam hal ini Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut;

1. Terdapat 6 Unit Pelayanan Publik (UPP) yang tidak membuat Laporan SKM;
2. Terdapatnya Lintas Kewenangan yang bersifat usulan dalam implementasi tindak lanjut seperti penambahan SDM yang memerlukan koordinasi dengan BKD, penambahan dan renovasi tempat kerja yang memerlukan koordinasi dengan Dinas Perkim, dan hal-hal lainnya yang mana belum tentu dilaksanakan, bergantung pada kesiapan OPD yang berwenang;

Rencana Tindak Lanjut

Merujuk penjelasan dari Tim SKM dalam hal ini Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut;

1. Mendorong penyusunan SKM pada seluruh UPP secara komperhensif;
2. Meningkatnya koordinasi lintas kewenangan atas perbaikan kinerja pelayanan publik.

Penjelasan Kinerja Opini BPK Terhadap LKPD

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) adalah istilah atau opini yang diberikan oleh Auditor kepada suatu entitas keuangan, khusus untuk pengelolaan keuangan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dengan auditornya adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Setiap tahunnya BPK melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban penggunaan anggaran baik kepada Pemerintah Pusat berupa pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun kepada Pemerintah Daerah dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Sedangkan Opini audit merupakan pernyataan dari auditor terhadap kewajaran laporan keuangan dari entitas yang sudah diaudit, kewajaran ini menyangkut hal-hal berkaitan materialitas, posisi keuangan, serta arus kas.

Permasalahan

Merujuk penjelasan yang disampaikan oleh BPKAD, potensi permasalahan general dalam proses pengelolaan keuangan daerah seringkali berasal dari beberapa aspek yang saling terkait, sebagai berikut :

1. Potensi perencanaan anggaran yang kurang relevan, di mana anggaran yang disusun tidak sesuai dengan kapasitas sumber daya yang tersedia, menyebabkan ketidaksesuaian antara rencana dan pelaksanaan;
2. Potensi keterlambatan proses penyusunan dan pengesahan anggaran, yang menghambat kelancaran operasional dan pelaksanaan program;
3. Potensi pengelolaan anggaran yang tidak efektif dan efisien, dengan adanya pemborosan anggaran atau alokasi yang tidak tepat sasaran serta pencatatan aset daerah, di mana banyak aset yang tidak tercatat dengan baik atau tidak dikelola secara optimal;;
4. Potensi ketidaksesuaian terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), yang menyebabkan laporan keuangan daerah tidak memenuhi standar yang berlaku;
5. Potensi kurangnya pengawasan yang efektif, baik dari internal maupun eksternal, yang membuka peluang untuk penyimpangan dan penyalahgunaan anggaran;

6. Potensi keterbatasan sistem informasi dan teknologi, seperti kurangnya penggunaan sistem yang terintegrasi, membuat pengelolaan keuangan daerah menjadi kurang efektif dan transparan, dan;
7. Potensi keterbatasan SDM yang kompeten, di mana masih terdapat pengelola keuangan yang kurang terlatih dalam menyusun laporan keuangan yang akurat dan sesuai dengan standar.

Hasil Kinerja

Pencapaian Kinerja Tahun 2024

Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
Membangun Institusional Pemerintahan yang Efektif dan Bersih	Opini BPK	WTP	WTP*	100.00%	Sangat Baik

Keandalan Data Kinerja

Formula	Perhitungan	Hasil Perhitungan	Dasar Perhitungan
Diukur oleh BPK	Diukur oleh BPK	WTP	Opini atas LKPD

Perbandingan dengan Target Akhir RPJMD

Sasaran	Indikator	Target Akhir RPJMD	Realisasi	Capaian	Keterangan
Membangun Institusional Pemerintahan yang Efektif dan Bersih	Opini BPK	WTP	WTP*	100.00%	Target Akhir RPJMD telah tercapai

Benchmarking

Instansi Pemerintah	Nilai	Rujukan Data	Keterangan
Pemerintah Kabupaten Kediri	WTP	Diolah oleh BPKAD	Sama dengan Kabupaten Kediri
Pemerintah Provinsi Jawa Timur	WTP	Diolah oleh BPKAD	Sama dengan Kabupaten Kediri
Pemerintah Kota Kediri	WTP	Diolah oleh BPKAD	Sama dengan Kabupaten Kediri

Faktor-faktor Penunjang

Merujuk data dari BPKAD disampaikan sebagai berikut:

1. Proses koordinasi dan komunikasi yang efektif antar bidang, pengelolaan dokumen yang rapi dan terstruktur, proses administratif yang efektif dan efisien;
2. Proses perencanaan anggaran telah dilakukan secara realistis dan berbasis kebutuhan nyata melalui proses checking secara berlapis untuk meminimalisir kenaikan nilai SiLPA dikomparasikan dengan tahun sebelumnya sehingga gap antara anggaran dengan realisasi tidak terlalu tinggi;
3. Dukungan secara utuh melalui alokasi anggaran yang memadai untuk setiap program dan kegiatan;
4. Pengawasan pengelolaan kas dan arus kas yang efisien dan efektif;
5. Proses penerapan regulasi SAP secara konsisten dan kontinyu dalam setiap penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
6. Proses pengadaan, penggunaan, pemanfataan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, hingga penghapusan telah terekam secara rinci melalui e-SIMBADA sehingga proses pencatatan aset menjadi terpadu, terintegrasi, dan real time;

Faktor-faktor Penghambat

Merujuk penjelasan BPKAD adalah sebagai berikut:

1. Potensi keterlambatan penyusunan Rencana Anggaran Daerah;
2. Potensi keterlambatan proses pencairan dana, ketidaksinkronan dokumen pencairan dengan anggaran kas, dan keterlambatan pelaporan diakhir tahun;
3. Potensi keterlambatan laporan Barang Milik Daerah;
4. Belum sempurnanya proses integrasi data dengan sistem pada Aplikasi SIPD Kemendagri yang berimplikasi terhadap ketidaksesuaian antara informasi yang tercatat pada sistem dengan data rill yang terjadi;
5. Rendahnya tingkat pastisipatif Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam proses rekonsiliasi ICSA (Internal Control Self Assesment) yang sehingga berimplikasi terhadap keterlambatan proses penyusunan
6. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) karena tidak ada deteksi dini jika terjadi kekeliruan/data bias;
7. Keterbatasan tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai terkait Informasi Teknologi (IT) dan pengelolaan keuangan daerah;

Rencana Tindak Lanjut

Merujuk penjelasan BPKAD adalah sebagai berikut:

1. Memberikan cut off penyusunan dan reviu secara berkala terhadap rancangan KUA PPAS, KUPA PPAS, maupun Rancangan APBD;
2. Melakukan early warning H-1 bulan sebelum akhir tahun kepada setiap unit keungan SKPD, melakukan percepatan proses pengajuan dan verifikasi berkas, dan mengoptimal kan seluruh pegawai bidang pengampu dan keterlibatan secara sukarela pegawai bidang lain untuk saling membantu jika dibutuhkan;
3. Reviu berkala terhadap laporan Barang Milik Daerah (BMD);
4. Melakukakan rekonsiliasi ICSA (Internal Control Self Assesment) rutin setiap bulan terhadap masing-masing unit keuangan SKPD mulai dari penerimaan, kas, aset, hingga akuntansi;
5. Membuat reward & punishment terhadap unit keuangan SKPD jika tidak ikut terlibat aktif dalam proses rekonsiliasi ICSA (Internal Control Self Assesment) berupa tidak dicairkannya berkas SP2D (masih tahap short-term plan untuk tahun 2025);
6. Melakukan perekrutan pegawai baru yang memiliki kapasitas mumpuni dibidang Informasi Teknologi (IT) yang tersebar dalam setiap bidang teknis pengelola keuangan daerah, mengikuti kegiatan Free webinar yang sering diadakan oleh Kemendagri/Kemenkeu terkait penyusunan laporan keuangan daerah yang dilaksanakan secara daring melalui media zoom, diklat bersama dan bimbingan teknis menjadikan faktor yang urgensial dibutuhkan untuk setiap pegawai dalam rangka peningkatan kualitas SDM.

Penjelasan Kinerja Indeks Persepsi Anti Korupsi

Menurut BPS, berbagai macam unsur yang mampu menggambarkan perilaku korupsi sehari-hari atau (petty corruption) masyarakat Indonesia.Untuk mengukur perilaku anti korupsi di masyarakat, disusun sebuah indikator yaitu Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK). IPAK disusun berdasarkan dua dimensi, yaitu Dimensi Persepsi dan Dimensi Pengalaman. Dimensi Persepsi berupa penilaian atau pendapat terhadap kebiasaan perilaku anti korupsi di masyarakat. Sementara itu, Dimensi Pengalaman berupa pengalaman anti korupsi yang terjadi di masyarakat.

Data yang dikumpulkan melalui IPAK mencakup pendapat terhadap kebiasaan di masyarakat dan pengalaman berhubungan dengan pelayanan publik dalam hal perilaku penyuapan (bribery), pemerasan (extortion) dan nepotisme. Penyuapan (bribery), yakni

apabila seorang pegawai pemerintah menerima imbalan yang disodorkan oleh seorang dengan maksud mempengaruhinya agar memberikan perhatian istimewa pada kepentingan si pemberi. Pemerasan (extortion) yakni permintaan pemberian-pemberian atau hadiah dalam pelaksanaan tugas-tugas publik, termasuk pejabat-pejabat yang menggunakan dana publik yang mereka urus bagi keuntungan mereka sendiri atau mereka yang bersalah melakukan penggelapan di atas harga yang harus dibayar oleh publik. Nepotisme yaitu pengangkatan sanak saudara, teman-teman atau rekan-rekan politik pada jabatan-jabatan publik tanpa memandang jasa mereka atau konsekuensinya pada kesejahteraan publik.

Permasalahan

Merujuk penjelasan dari Inspektorat, dijelaskan sebagai berikut;

1. Penentuan target dan kinerja sasaran pengawasan belum sepenuhnya berbasis risiko;
2. Belum optimalnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada perangkat daerah;
3. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang belum Optimal.

Hasil Kinerja

Pencapaian Kinerja Tahun 2024

Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
Membangun Institutional Penyelenggaraan Pemerintah yang Efektif dan Bersih	Indeks Persepsi Anti Korupsi	3.74	3.85	102.94%	Sangat Baik

Keandalan Data Kinerja

Formula	Perhitungan	Hasil Perhitungan	Dasar Perhitungan
Diukur oleh BPS	Diukur oleh BPS	3.85	Berita Resmi Statistik

Perbandingan dengan Target Akhir RPJMD

Sasaran	Indikator	Target Akhir RPJMD	Realisasi	Capaian	Keterangan
Membangun Institutional Penyelenggaraan Pemerintah	Indeks Persepsi Anti Korupsi	3.8	3.85	101.32%	Target Akhir RPJMD telah

yang Efektif dan Bersih					terlampaui

Faktor-faktor Penunjang

Merujuk data dari Inspektorat, Faktor Pendukung dalam mencapai sasaran strategis yaitu Sumber Daya Manusia , Sumber Daya Anggaran, Sarana dan Prasarana

Faktor-faktor Penghambat

Merujuk penjelasan Inspektorat adalah sebagai berikut:

1. Sumber Daya Manusia (SDM) Inspektorat Darah belum memenuhi perhitungan analisis kebutuhan SDM dan beban kerja;
2. SDM APIP belum mampu menjadi role model bagi unit organisasi lain di lingkungan pemerintah Kabupaten Kediri;
3. Perencanaan Pengawasan belum menggunakan profil risiko yang dimiliki seluruh OPD yang ada di Kabupaten Kediri;
4. Belum melakukan evaluasi secara menyuluruh atas register risiko yang dimiliki seluruh OPD;
5. Belum melakukan Tindak Lanjut atas telaah sejawat eksternal secara berkelanjutan;
6. Peran reviu berjenjang atas setiap pengawasan belum optimal;
7. Kegiatan reviu internal antar irban untuk pelaksanaan Pengawasan Tahun 2023 dan 2024 belum dilaksanakan;
8. Laporan Ikhtisar hasil pengawasan kepada manajemen belum memuat isu strategis yang ada di daerah setiap semester;
9. Anggaran pengawasan Inspektorat belum sesuai dengan aturan Permendagri Nomor 15 Tahun 2023;
10. Evaluasi belum dilaksanakan secara berkelanjutan terhadap pola koordinasi dan sistem koordinasi internal Inspektorat, partisipasi Inspektorat di dalam forum strategis pemerintah daerah, identifikasi terhadap area pengawasan Inspektorat, alokasi anggaran pengawasan, serta kebijakan pelaporan;
11. Probity Audit atas proyek strategis Pemda dan menggugah dokumennya ke dalam aplikasi PK APIP belum dilakukan;
12. Audit ketaatan belum berdasarkan pada area yang berisiko tinggi terkait perijinan, rekrutmen, mutasi dan promosi pegawai, perencanaan dan penganggaranAPBD, hibah, bansos dll; dan

13. Audit kinerja belum berdasarkan atas program strategis daerah yang mendukung sektor unggulan/perekonomian daerah lintas sektoral (cross cutting) seperti ketahanan pangan, pariwisata, UMKM, kemiskinan ekstrim, stunting lintas sektoral serta belum melaksanakan pemantauan hasil audit kinerja agar ditindaklanjuti oleh OPD terkait.

Rencana Tindak Lanjut

Merujuk penjelasan Inspektorat adalah sebagai berikut:

1. Menguatkan dukungan terhadap pelaksanaan tugas Inspektorat Kabupaten Kediri melalui:
    a. Pemenuhan jumlah SDM Inspektorat Daerah agar dapat memenuhi perhitungan kebutuhan SDM; dan
    b. Pemenuhan alokasi anggaran guna mendukung pengawasan intern dan pemenuhan kuantitas dan kualitas SDM Inspektorat Daerah sesuai dengan kebijakan/peraturan perundang-undangan yang berlaku dan beban kerja Inspektorat.
2. Inspektur Kabupaten Kediri menginstruksikan untuk:
    a. Mengimplementasikan seluruh infrastruktur Kapabilitas APIP Level 3 secara terus menerus sesuai dengan pedoman, sehingga menjadi sebuah budaya (culture) organisasi APIP untuk mencapai pada praktik-praktik profesional yang terbaik;
    b. Melakukan evaluasi secara terus menerus pada setiap topik dan elemen;
    c. Mendokumentasikan elemen menuju Level 4 serta mengimplementasikan infrastruktur untuk mencapai praktik praktik profesional yang terbaik;
    d. Melakukan PPM/PKS yang lebih intensif dengan materi audit kinerja, probity audit ataupun materi yang berkaitan dengan current issues;
    e. Melakukan tertib administrasi mengenai pemberian jasa konsultasi;
    f. Meningkatkan pengembangan SDM pada Inspektorat secara optimal dengan mengikuti pegawai mengikuti sertifikasi profesional penunjang pengawasan (CRMO,SAAP,CRMP,QRMP dll);
    g. Memastikan tindak lanjut atas saran/rekomendasi hasil audit kinerja;
    h. Meningkatkan partisipasi aktif para pegawai di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Kediri dalam Organisasi profesi;
    i. Melakukan assurance dan konsultasi atas Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Pemerintah Daerah di Kabupaten Kediri;

j. Melakukan survey kepuasan pegawai dan stakeholder secara berkelanjutan dan;
k. Menindaklanjuti atas Aol peningkatan Kapabilitas APIP yang perlu mendapatkan perbaikan.

Analisa Efisiensi

Realisasi Anggaran

Sasaran	Indikator	Pagu	Realisasi	Capaian	Keterangan
Membangun Institusional Pemerintahan yang Efektif dan Bersih	Nilai SAKIP	740.395.029.749	729.180.657.640	98,49%	Zona Hijau
	Indeks Kepuasan Masyarakat				
	Opini BPK terhadap LKPD				
	Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)				

Analisa Efisiensi

Sasaran	Indikator	Capaian Kinerja	Capaian Anggaran	Analisa Efisiensi	Keterangan
Membangun Institusional Pemerintahan yang Efektif dan Bersih	Nilai SAKIP	89.48%	98,49%	0,31%	Belum efektif
	Indeks Kepuasan Masyarakat	102.77%			
	Opini BPK terhadap LKPD	100.00%			
	Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)	102.94%			

Sasaran 7

Meningkatkan Profesionalitas ASN

ASN (Aparatur Sipil Negara) merupakan motor penggerak pelaksanaan pemerintahan sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Dalam hal ini pegawai ASN juga bertugas dalam melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pemangku jabatan pembina kepegawaian yang berwenang sesuai dengan ketentuan dari perundang-undangan yang ada. Sebagaimana dijelaskan oleh banyak pakar pemerintahan dan administrasi negara, berhasil atau tidaknya perjalanan pemerintahan ditentukan ‘man behind the gun’ jika dalam pemerintahan maka para ASN.

Maka diperlukan adanya pengukuran tingkat profesionalitas pada ASN itu sendiri. Pengukuran tersebut dilakukan melalui/diatur dalam Peraturan BKN Nomor 8 Tahun 2019-Tata Cara Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Peraturan ini sejatinya ditetapkan dalam tujuan melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 38 Tahun 2018 tentang Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.

Profesionalitas ASN juga memiliki standar dasar dengan kriteria yang digunakan dalam mengukur tingkat profesionalitas ASN mencakup dimensi kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan disiplin. Terdapat instrumen pengukuran indeks profesionalitas ASN seperti bahan, alat, dan cara yang akan digunakan dalam mendapatkan data indeks profesional berupa dimensi, identitas dari pegawai ASN, dan deskripsi indikator.

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas organisasi, manajemen Sumber Daya Manusia menjadi hal yang penting untuk dilakukan. Sebagai faktor utama dalam pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) profesionalitas dan integritas menjadi perhatian utama bagi Pemerintah Kabupaten Kediri. Upaya peningkatan Indeks Profesionalisme (IP) Aparatur Sipil Negara (ASN) di daerah merupakan langkah strategis dalam meningkatkan kinerja pemerintahan, pelayanan publik, dan efisiensi birokrasi di tingkat lokal.

Permasalahan

Merujuk dari Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia, Berikut adalah beberapa latar belakang penting terkait upaya peningkatan profesionalitas ASN di Kabupaten Kediri

1. Tuntutan Reformasi Birokrasi
2. Penguatan Kapasitas ASN

3. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
4. Mendorong Pemerataan Pembangunan Daerah
5. Penguatan Akuntabilitas dan Transparansi
6. Tantangan SDM ASN di Daerah

Selain hal diatas, beberapa permasalahan terkait kepegawaian adalah sebagai berikut;

1. Beberapa ASN mengalami demotivasi untuk meningkatkan profesionalitas karena faktor rutinitas pekerjaan yang monoton;
2. Belum ada regulasi tentang pengembangan kompetensi ASN di daerah;
3. Belum ada standar kompetensi untuk semua jabatan sebagai dasar penyusunan analisis kebutuhan diklat sehingga tidak dapat mengetahui secara akurat terkait kompetensi ASN yang mengakibatkan adanya gap kompetensi;
4. Belum terpenuhinya jumlah ASN sesuai kebutuhan analisis jabatan (Anjab) dan analisis beban kerja (ABK);
5. Tantangan dalam meningkatkan Indeks Profesionalitas ASN;
6. Masih ditemukan pelanggaran disiplin PNS;
7. Belum terwujudnya satu data kepegawaian.

Perencanaan

Berdasarkan perencanaan dalam RKPD dan Perjanian Kinerja Perubahan Tahun 2024 adalah 70,1. Namun target tersebut mengalami penajaman dan pencermatan ulang dari BKD Kabupaten Kediri untuk ditingkatkan targetnya menjadi 81.62.

Upaya-upaya Pencapaian Kinerja

Merujuk data dari Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Kediri disebutkan sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Parade Webinar Tahun 2024 sebagai upaya meningkatkan capaian IP ASN Pemerintah Kabupaten Kediri;
2. Menyelenggarakan diklat manajerial Kepala Puskesmas untuk menunjang pelayanan prima pada fasilitas kesehatan, Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) 1 Angkatan, Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) 1 Angkatan, mengirim peserta 3 orang mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) ke BPSDM Jawa Timur dan mengirim peserta 10 orang untuk pelatihan pengadaan barang dan jasa level 1 di BPSDM Jawa Timur;

3. Menyelenggarakan program BKD Melekat (BKD Melayani Lebih Dekat) sebagai bentuk inovasi dalam pelayanan public terdiri dari konsultasi tugas belajar, konsultasi kepegawaian berupa mutasi, kenaikan pangkat, penyusunan SKP dan PMM khusus guru dan sosialisasi disiplin ASN;
4. Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja pegawai secara berkala;
5. Menyelenggarakan sosialisasi peraturan disiplin dan monitoring evaluasi disiplin pegawai secara berkala.
6. Mengeluarkan Surat Edaran (SE) seperti netralitas ASN. Sejauh ini sampai dengan triwulan III tahun 2024 sudah terbit 3 Surat Edaran terkait dengan Netralitas ASN.

Hasil Kinerja

Hasil kinerja secara umum IP ASN pada Tahun 2023 telah melampaui target akhir RPJMD yaitu sebesar 71,00 tetapi masih dibawah IP ASN provinsi yaitu sebesar 89,59.

Pencapaian Kinerja Tahun 2024

Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
Meningkatnya Profesionalitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN	70.1	81.62	116.43%	Sangat Baik

Keandalan Data Kinerja

Formula	Perhitungan	Hasil Perhitungan	Dasar Perhitungan
Diukur oleh BKN	Diukur oleh BKN Berdasarkan 4 Komponen: 1. Kualifikasi 2. Kompetensi 3. Kinerja 4. Disiplin	Kualifikasi 21,53 Kompetensi 30,12 Kinerja 24,97 Disiplin 5 Total IP ASN 81,62	Surat Kepala Kantor Regional II BKN Surabaya tanggal 9 Oktober 2024 Nomor /B-AK.04/SD/KR.II/2024

Perbandingan dengan Target Akhir RPJMD

Sasaran	Indikator	Target Akhir RPJMD	Realisasi	Capaian	Keterangan
Meningkatnya Profesionalitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN	70.1	81.62	116.43%	Target Akhir RPJMD telah terlampaui

Realisasi Anggaran

Sasaran	Indikator	Pagu	Realisasi	Capaian	Keterangan
Meningkatnya Profesionalitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN	12,338,157,561.00	11,288,326,422.00	91.49%	Zona Hijau

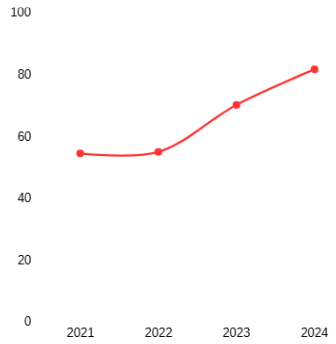
Analisa Efisiensi

Sasaran	Indikator	Capaian Kinerja	Capaian Anggaran	Analisa Efisiensi	Keterangan
Meningkatnya Profesionalitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN	116.43%	91.49%	24.94%	Efisien

Benchmarking

Perkembangan Indeks Profesionalitas ASN Kabupaten Kediri

Gambar 16 Perkembangan Indeks Professionalitas ASN Kabupaten Kediri Tahun 2021-2024



Sumber: LKjIP Kabupaten Kediri 2023 dan data BKPSDM Kabupaten Kediri Tahun 2024 (dimodifikasi)

Perbandingan Capaian Indeks Profesionalitas ASN:

1. Provinsi : 89,59
2. Kabupaten Kediri : 81,62

Pihak-pihak yang terlibat

Merujuk data dari Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Kediri disebutkan sebagai berikut:

1. Kementerian PAN RB

2. Badan Kepegawaian Negara
3. Lembaga Administrasi Negara
4. BKN Kanreg II Surabaya
5. BPSDM Jawa Timur
6. OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri
7. PT. Taspen
8. Perguruan Tinggi

Program Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Sasaran

Program	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
Program Kepegawaian	Indeks Profesionalisme dimensi Kinerja dan Disiplin	29,82	30,47	102,18	Sangat Mendukung
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Indeks Profesionalisme dimensi Kompetensi dan Kualifikasi	36,18	51,65	142,76	Sangat Mendukung

Faktor-faktor pendukung

Merujuk data yang disampaikan oleh BKPSDM adalah sebagai berikut:

1. Program Pendidikan dan Pelatihan yang rutin dan terus melakukan inovasi dalam penyelenggaraan maupun tema—tema pengembangan kompetensi yang relevan dengan kondisi terkini membantu ASN untuk terus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan;
2. Sarana dan Prasarana yang memadai dan mendukung, seperti teknologi sehingga ASN dapat mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi dari mana saja;
3. Monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan secara berkala yakni setiap 3 bulan sekali sehingga kinerja ASN tetap terpantau dan jika terdapat masalah bisa segera diselesaikan sedini mungkin;
4. Layanan kepegawaian yang mudah dan tidak berbelit-belit dengan prosedur yang sederhana sehingga memudahkan pengguna layanan.

Faktor-faktor Penghambat

Merujuk data yang disampaikan oleh BKPSDM adalah sebagai berikut:

1. Kesadaran pegawai tentang pentingnya mengikuti pengembangan kompetensi untuk dapat menyesuaikan baik dari sisi keterampilan maupun pengetahuan dengan kondisi di era digital saat ini;
2. Belum optimal dalam mengelola beban kerja yang cukup tinggi sehingga waktu bekerja habis untuk mengerjakan pekerjaan yang bersifat administratif sehingga menyebabkan kurangnya motivasi pegawai dalam mengikuti pengembangan kompetensi;
3. Seluruh pegawai belum sepenuhnya memahami tentang peraturan disiplin ASN;
4. Masih terdapat ASN yang belum melek teknologi.

Rencana Tindak Lanjut

Merujuk data yang disampaikan oleh BKPSDM adalah sebagai berikut:

1. Menyusun program-program pengembangan kompetensi disesuaikan dengan isu-isu terkini dan relevan dengan kondisi kerja yang sebernarnya di instansi pemerintahan;
2. Mengupayakan dalam salah satu program pengembangan kompetensi (webinar/podcast) selalu memasukkan tema tentang manajemen stres dan/atau yang berhubungan dengan Kesehatan baik fisik maupun mental untuk dapat mendorong motivasi pegawai agar lebih produktif;
3. Menyelenggarakan sosialisasi peraturan disiplin ASN, sosialisasi dilakukan baik secara offline maupun dilakukan secara online melalui media sosial BKD dan pop up yang muncul pada halaman depan aplikasi SIPRES, melakukan pendampingan kepada satuan kerja yang membutuhkan konsultasi terkait langkah preventif sebelum dijatuhi hukuman disiplin;
4. Menyelenggarakan pelatihan teknis yang berkaitan dengan penggunaan teknologi informasi.

Apresiasi dan Penghargaan Kinerja

Merujuk data yang disampaikan oleh BKPSDM adalah sebagai berikut:

1. Instansi Terbaik II Realisasi SK Kenaikan Pangkat Wilayah Kanreg II BKN Surabaya
2. Instansi Terbaik I Realisasi SK Pensiun Wilayah KANREG II BKN Surabaya

3. Penghargaan atas Sinergitas dan Dukungan dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024
4. Sertifikat Sebagai Mitra Penilaian Kompetensi dan Potensi yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024

Sasaran 8

Transformasi Digital Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Dalam era globalisasi dan perkembangan teknologi yang pesat, transformasi digital menjadi suatu keharusan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kualitas pelayanan publik. Kabupaten Kediri, sebagai salah satu daerah yang terus berinovasi, menyadari pentingnya adaptasi teknologi dalam penyelenggaraan pelayanan publik untuk memenuhi tuntutan masyarakat yang semakin dinamis. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Kediri melalui Dinas Komunikasi dan Informatika meluncurkan program "Transformasi Digital Penyelenggaraan Pelayanan Publik" dengan tujuan mengintegrasikan teknologi informasi ke dalam sistem pelayanan, mempercepat proses administrasi, serta meningkatkan aksesibilitas dan kepuasan masyarakat. Program ini diharapkan dapat menjadi langkah strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern, efektif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

SPBE atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik adalah penyelenggaraan pemerintahan yang di mana memanfaatkan teknologi dan komunikasi untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat yang berkualitas dan terpercaya. Sesuai dengan Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau e-government.

Semakin tingginya penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memberikan peluang bagi pemerintah untuk melakukan inovasi pembangunan dan pelayanan yang lebih cepat, dapat diandalkan, dan terpercaya. Dengan demikian, penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TIK dapat memberikan layanan kepada instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku bisnis, masyarakat dan pihak-pihak lainnya.

Merujuk Kementerian PANRB, SPBE memberikan peluang untuk mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel. Selain itu, pelaksanakan SPBE juga meningkatkan kolaborasi antar instansi pemerintah, meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik kepada masyarakat luas, dan menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk kolusi, korupsi, dan nepotisme melalui penerapan sistem pengawasan dan pengaduan masyarakat berbasis elektronik.

Permasalahan

Merujuk dari Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut:

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM):
   Kurangnya jumlah dan keterbatasan kompetensi SDM Informatika di Dinas Kominfo membuat implementasi transformasi digital menjadi kurang optimal.
2. Anggaran yang Terbatas:
   Keterbatasan anggaran untuk pengembangan sistem digital, pelatihan SDM, pemeliharaan infrastruktur, dan pembaruan teknologi menjadi kendala dalam mempercepat transformasi digital.
3. Integrasi Sistem dan Data yang Belum Optimal:
   Adanya sistem yang masih terfragmentasi dan tidak terintegrasi antar OPD menyebabkan ketidakefisienan, serta data yang belum terpadu.
4. Resistensi terhadap Perubahan:
   Adanya resistensi dari sebagian aparatur pemerintah atau masyarakat terhadap perubahan dari sistem manual ke digital, baik karena ketidaksiapan maupun ketidaknyamanan dengan teknologi baru, menghambat proses transformasi.
5. Banyaknya ancaman serta serangan Siber terhadap sistem elektronik yang dikelola Pemerintah.

Perencanaan

Berdasarkan perencanaan dalam RKPD dan Perjanian Kinerja Perubahan Tahun 2024 adalah 70,1. Namun target tersebut mengalami penajaman dan pencermatan ulang dari BKD Kabupaten Kediri untuk ditingkatkan targetnya menjadi 81.62.

Upaya-upaya Pencapaian Kinerja

Merujuk data dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri disebutkan sebagai berikut:

1. Pengoptimalan jumlah SDM TIK melalui pembukaan program PKL dan magang seluas-luasnya
2. Pengoptimalan aplikasi IOP untuk integrasi data dan aplikasi

3. Optimalisasi pengelolaan data melalui penjadwalan masing- masing OPD untuk piket di Ruang Command Center
4. Pengoptimalan aplikasi PESONA untuk pelayanan administrasi desa secara digital
5. Melakukan berbagai pelatihan pada OPD dan desa untuk pengoptimalan penggunaan aplikasi yang dikembangkan Kominfo
6. Optimalisasi kapasitas server yang terbatas melalui backup dan pemeliharaan secara rutin
7. Penggunaan firewall, antivirus, SSL, serta berbagai aplikasi yang bisa memberi perlindungan terhadap serangan siber
8. Penguatan manajemen akses yang ketat

Hasil Kinerja

Pencapaian Kinerja Tahun 2024

Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
Transformasi digital penyelenggaraan pelayanan public	Indeks SPBE	4.3	4.62	107.44%	Sangat Baik

Keandalan Data Kinerja

Formula	Perhitungan	Hasil Perhitungan	Dasar Perhitungan
Diukur oleh KemenPANRB	Diukur oleh KemenPANRB	4.62	Keputusan MenPANRB Nomor 663 Tahun 2024 tentang Hasil Evaluasi SPBE Laporan Hasil Evaluasi SPBE Kabupaten Kediri Tahun 2024

Gambar 17 Indeks SPBE Kabupaten Kediri



Sumber: LHE SPBE Pemerintah Kabupaten Kediri

Perbandingan dengan Target Akhir RPJMD

Sasaran	Indikator	Target Akhir RPJMD	Realisasi	Capaian	Keterangan
Transformasi digital penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks SPBE	5	4.62	92.40%	Target Akhir RPJMD belum Terlampaui

Realisasi Anggaran

Sasaran	Indikator	Pagu	Realisasi	Capaian	Keterangan
Transformasi digital penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks SPBE	5,187,306,000.00	5,079,466,720.00	98%	Zona Hijau

Analisa Efisiensi

Sasaran	Indikator	Capaian Kinerja	Capaian Anggaran	Analisa Efisiensi	Keterangan
Transformasi digital penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks SPBE	102.21%	98%	4.29%	Efisien

Benchmarking

Wilayah Lain	Indeks SPBE	Keterangan	Rujukan Data
Nasional	4.75	Lebih Baik dari Kabupaten Kediri	Data Kompilasi dari Dinas Kominfo Kabupaten Kediri
Provinsi Jawa Timur	4.45	Lebih Baik dari Kabupaten Kediri	
Kabupaten Banyuwangi	4.77	Lebih Baik dari Kabupaten Kediri	
Kabupaten Kediri	4.62	Lebih Baik dari Kabupaten Kediri	
Kota Kediri	3.89	Kabupaten Kediri lebih baik	
Kabupaten Nganjuk	3.84	Kabupaten Kediri lebih baik	
Kabupaten Tulungagung	3.78	Kabupaten Kediri lebih baik	

Pihak-pihak yang Terlibat

Internal pemkab:

1. Seluruh OPD
2. Seluruh Kecamatan dan Desa

Eksternal Pemkab (Pemerintah & Swasta)

1. Diskominfo Prov Jatim
2. BPS Kab Kediri
3. SMK disekitar Kediri
4. PTN dan PTS disekitar Kediri
5. PT. Telkom Indonesia
6. PT. LDP (Lintas Data Prima)
7. PT Indonesia Comnets Plus (ICON+)

Program Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Sasaran

Program	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
Program Aplikasi Informatika	Indeks SPBE	4.5	4.62	102.67%	Sangat Mendukung

Program	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral	2	2.5	125.00%	Sangat Mendukung
Program Penyeenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	3	3.1	103.33%	Sangat Mendukung
Program Informasi dan Komunikasi Publik	Cakupan layanan informasi dan komunikasi publik	4	4.2	105.00%	Sangat Mendukung

Faktor-faktor pendukung

Merujuk data yang disampaikan oleh Dinas Kominfo adalah sebagai berikut:

1. Dukungan dari pimpinan baik dari sisi kebijakan maupun Anggaran
2. Kemampuan dari SDM Kominfo yang mampu beradaptasi terhadap keterbatasan yang ada
3. Sinergi yang baik antara Kominfo dengan OPD yang lain
4. Kompetensi yang mencukupi dalam melaksanakan tugas-tugas yang diberikan dengan optimal

Faktor-faktor Penghambat

Merujuk data yang disampaikan oleh Dinas Kominfo adalah sebagai berikut:

1. Keterbatasan infrastruktur server yang dimiliki Dinas Kominfo dan mengelola berbagai aplikasi yang membutuhkan resource besar
2. Kurangnya jumlah SDM sehingga belum optimal dalam mengatasi masalah yang muncul
3. Kurangnya kompetensi terkait pengamanana sistem aplikasi dari berbagai serangan dan ancaman siber yang muncul
4. Rendahnya kesadaran terhadap praktik keamanan siber yang baik dari sebagaian besar ASN

Rencana Tindak Lanjut

Merujuk data yang disampaikan oleh Dinas Kominfo adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kapasitas infrastruktur server melalui pengadaan baru serta mulai meingkatkan penggunaan PDN
2. Meningkatkan jumlah SDM TIK berkualitas baik melalui PPPK maupun ASN tambahan

3. Mendorong SDM TIK di Kominfo untuk mengikuti berbagai pelatihan teknis TIK dengan biaya penuh dari Kominfo
4. Melakukan berbagai sosialisasi terkait kesadaran keamanan siber maupun kesadaran berselancar di dunia maya

Apresiasi dan Penghargaan Kinerja

1. Dhahanapura Award - peningkatan satu data kab Kediri
2. Mas Dito Award – masyarakat digital online

Tujuan 5

Meningkatnya Daya Saing Sektor Ekonomi Daerah

Merujuk data Kementerian Keuangan, Pertumbuhan ekonomi adalah sebuah proses dari perubahan kondisi perekonomian yang terjadi di suatu negara secara berkesinambungan untuk menuju keadaan yang dinilai lebih baik selama jangka waktu tertentu. Teori pertumbuhan ekonomi menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi atau menentukan pertumbuhan ekonomi dan prosesnya dalam jangka panjang, penjelasan mengenai bagaimana faktor-faktor itu berinteraksi satu dengan yang lainya, sehingga dapat menimbulkan terjadinya proses pertumbuhan.

Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan dalam kemampuan dari suatu perekonomian dalam memproduksi barang dan jasa. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi lebih menunjuk pada perubahan yang bersifat kuantitatif (quantitatif change) dan biasanya diukur dengan menggunakan data produk domestik bruto (PDB) atau pendapatan output perkapita. Tingkat pertumbuhan ekonomi menunjukkan persentase kenaikan pendapatan nasional riil pada suatu tahun tertentu dibandingkan dengan pendapatan nasional riil pada tahun sebelumnya makin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi maka semakin cepat proses pertambahan keluaran wilayah sehingga prospek perkembangan wilayah makin baik. Dengan di ketahuinya sumber-sumber pertumbuhan ekonomi maka dapat ditentukan sektor prioritas pembangunan. Terdapat tiga faktor atau komponen utama yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu akumulasi modal (capital accumulation), pertumbuhan penduduk (growth in population), dan kemajuan teknologi (technological progress).

Merujuk Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) Daya saing daerah (IDSD) adalah ukuran kemampuan suatu daerah untuk bersaing dengan daerah lain. IDSD juga dapat menggambarkan tingkat produktivitas, perkembangan, persaingan, dan kemandirian suatu daerah. Merujuk perkembangan Tujuan IDSD adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui tingkat daya saing daerah secara komprehensif
2. Merefleksikan tingkat produktivitas daerah
3. Menilai keberhasilan suatu daerah dalam bersaing dengan daerah lain
4. Mendukung daya saing nasional
5. Menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah
6. Aspek daya saing daerah
7. Kemampuan ekonomi daerah
8. Fasilitas wilayah atau infrastruktur
9. Iklim berinvestasi
10. Sumber daya manusia
11. Stabilitas pasar
12. Kapasitas tenaga kerja
13. Akses keuangan
14. Ukuran pasar
15. Peningkatan daya saing daerah
16. Pemerintah mengarahkan dan mensinergikan berbagai potensi sumber daya yang dimiliki stakeholder
17. Penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi
18. Mengoptimalkan potensi yang dimiliki untuk menciptakan daya saing daerah
19. Mengoptimalkan ekosisten, potensi, dan berbagai hasil iptek dan inovasi

Hasil Kinerja

Pencapaian Kinerja Tahun 2024

Tujuan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
Meningkatkan Daya Saing Sektor Ekonomi Daerah	Pertumbuhan Ekonomi	4.8	4.95	103.13%	Baik

Keandalan Data Kinerja

Formula	Perhitungan	Hasil Perhitungan	Dasar Perhitungan
Diukur oleh BPS	Diukur oleh BPS	4.95	Kabupaten Kediri dalam Angka 2025 Nomor Publikasi 35060.25002 Hal 640

Perbandingan dengan Target Akhir RPJMD

Tujuan	Indikator	Target Akhir	Realisasi	Capaian	Keterangan

		RPJMD			
Meningkatkan Daya Saing Sektor Ekonomi Daerah	Pertumbuhan Ekonomi	6.22	4.95	79.58%	Target Akhir RPJMD belum Terlampaui

Penjelasan Umum Kinerja

Melihat komposisi perekonomian Kabupaten Kediri pada tahun 2024 mengalami peningkatan yang cukup signifikan sebesar 4.95. Dari data tersebut terjadi perubahan komposisi perekonomian di Kabupaten Kediri yang awalnya didominasi oleh Lapangan Usaha Pertanian sebesar 22.33% mengalami penurunan komposisi menjadi 21.33%. Kini komposisi terbesar perekonomian di Kabupaten Kediri adalah Industri Pengolahan yang awalnya 22.09% menjadi 23.06%.

Sasaran 9

Meningkatnya Investasi di Daerah

Pada tahun 2024, Realisasi Pertumbuhan Investasi Daerah di Kabupaten Kediri adalah 27.99% dengan Nilai Realisasi 20.090.644.396.746,00 lebih tinggi dari Nilai Realisasi Tahun 2023 yakni 15.454.428.960.228,00.

Sebagian ahli ekonomi memandang investasi merupakan salah satu faktor penting yang memainkan peran vital terhadap pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Ketika pengusaha atau individu atau pemerintah melakukan investasi, maka akan ada sejumlah modal yang ditanam, ada sejumlah pembelian barang modal (yang tidak dikonsumsi), tetapi digunakan untuk produksi, sehingga dapat memacu produktivitas untuk menghasilkan barang dan jasa.

Menurut kajian dari Kementerian Sekretariat Negara, peningkatan investasi diyakini memberikan andil dalam mendongkrak pembangunan ekonomi suatu daerah. Dalam ekonomi makro, investasi juga berperan sebagai salah satu komponen dari pendapatan nasional, Produk Domestik Bruto (PDB) atau Gross Domestic Product (GDP). Investasi memiliki hubungan positif dengan PDB atau pendapatan nasional, jika investasi naik, maka PDB akan naik, begitu juga sebaliknya, saat investasi turun maka PDB akan ikut turun.

Dukungan investor dalam pembangunan ekonomi, ditengah keterbatasan APBD dan APBN menjadi pilihan strategis yang tepat dalam membalikkan perlambatan ekonomi. Melalui optimalisasi dukungan investasi dalam mempercepat berbagai program

pembangunan ekonomi produktif. Dengan demikian, investasi dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mengantarkan Indonesia menjadi Negara Maju

Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memaksimalkan potensi ekonomi, Pemerintah Kabupaten Kediri mengupayakan realisasi investasi yang baik. Nilai realisasi investasi di Kabupaten Kediri pada tahun 2022 direncanakan akan tumbuh sebesar 5%. Hal tersebut ditinjau dari ekspektasi pertumbuhan di sektor primer, sektor sekunder, dan sektor tersier. Peningkatan investasi di Kabupaten Kediri diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kediri. Persentase pertumbuhan investasi di daerah adalah prosentase kenaikan/ penurunan investasi yang masuk ke Kabupaten Kediri dalam periode tertentu.

Permasalahan

Merujuk data dari DPMPTSP disebutkan permasalahan-permasalahan Tren pertumbuhan investasi di daerah cenderung fluktuatif karena sebagian besar investasi yang masuk ke Kabupaten Kediri Tahun 2019–2023 bersumber dari investasi Bandara, sehingga ketika proyek Bandara selesai, ada kemungkinan penurunan investasi

Perencanaan

Pada tahun 2024 ini, target Pertumbuhan Investasi Daerah dalam RPJMD adalah 7,0. Target tersebut sesuai pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2024 dan Perjanjian Kinerja Perubahan Bupati Kediri tahun 2024.

Upaya-upaya Pencapaian Kinerja

Upaya-upaya yang telah dilaksanakan oleh DPMPTSP bersama dengan dinas-dinas lain adalah sebagai berikut;

1. Pengawasan Penanaman Modal;
2. Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya
3. Pelayanan Pendampingan Keliling dan Pelayanan Konsultasi/ Pendampingan di Kantor;
4. Fasilitasi Kemitraan antara Pelaku Usaha Berskala Menengah- Besar dan UMKM;
5. Penyusunan Investment Ready to Offer (I-PRO)
6. Promosi Langsung atas Potensi dan Peluang Investasi ke Pengusaha Luar Daerah.

Hasil Kinerja

Pada tahun 2024, realisasi Pertumbuhan Investasi Daerah yang diambilkan dari Rekapitulasi Investasi Daerah Kabupaten Kediri, disebutkan bahwa realisasi Pertumbuhan Investasi Daerah Kabupaten Kediri adalah 26.16%. Realisasi tersebut berada di atas target yang telah ditetapkan dengan teknis perhitungan sebagai berikut;

Pencapaian Kinerja Tahun 2024

Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
Meningkatnya investasi di daerah	Pertumbuhan Investasi Daerah	7.0%	29.99%	425.45%	Sangat Baik

Gambar 18 Rekapitulasi Pengukuran Pertumbuhan Investasi Tahun 2024



URAIAN	2023	2024
A. Realisasi Investasi (Tahun n)	Rp. 3.204.083.366.778	Rp. 4.636.215.436.458
- PMA	Rp. 35.290.571.234	Rp. 33.673.500.000
- PMDN	Rp. 3.168.792.795.544	Rp. 4.602.541.936.458
B. Nilai Investasi (Akumulasi)/ (A (n)+B (n-1))	Rp. 15.454.428.960.288	Rp. 20.090.644.396.746

RUMUS PERSENTASE PERTUMBUHAN INVESTASI TAHUN 2023

$$\frac{\text{Nilai Investasi Tahun 2024 - Nilai Investasi Tahun 2023}}{\text{Nilai Investasi Tahun 2023}} \times 100\%$$

$$\frac{\text{Rp. 20.090.644.396.746 - Rp. 15.454.428.960.288}}{\text{Rp. 15.454.428.960.288}} \times 100\%$$

$$\frac{\text{Rp. 4.636.215.436.458}}{\text{Rp. 15.454.428.960.288}} \times 100\%$$

30.00

Sumber : LKIIP DPMPTSP Kabupaten Kediri Tahun 2023-2024

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (diolah)

Keandalan Data Kinerja

Formula	Perhitungan	Hasil Perhitungan	Dasar Perhitungan
Nilai Investasi Tahun n - Nilai Investasi Tahun n-1 / Nilai Investasi Tahun n-1 x 100%	(20.090.644.396.746-154.54.428.960.288)/ 15.454.428.960.288 x 100%	29.99%	Dokumen Rekapitulasi Realisasi Investasi

Perbandingan dengan Target Akhir RPJMD

Sasaran	Indikator	Target Akhir RPJMD	Realisasi	Capaian	Keterangan
Meningkatnya investasi di daerah	Pertumbuhan Investasi Daerah	9%	29.78%	330.89%	Target RPJMD telah terlampaui

Realisasi Anggaran

Sasaran	Indikator	Pagu	Realisasi	Capaian	Keterangan
Meningkatnya investasi di daerah	Pertumbuhan Investasi Daerah	7,869,748,279.00	7,417,337,605.00	94.25%	331.20%

Analisa Efisiensi

Sasaran	Indikator	Capaian Kinerja	Capaian Anggaran	Analisa Efisiensi	Keterangan
Meningkatnya investasi di daerah	Pertumbuhan Investasi Daerah	425.45%	94.25%	331.20%	Efisien

Pembandingan/Benchmarking

Perbandingan Realisasi dengan Tahun Sebelumnya

2021	2022	2023	2024
-	28.48%	26.16%	29.78%

Dari data diatas didapati adanya peningkatan yang signifikan pada tahun 2023 dan tahun 2024. Peningkatan signifikan tersebut akan dijadikan bahan dalam melakukan perencanaan tahun berikutnya.

Perbandingan Kinerja

Dari data yang dihimpun oleh DPMPTSP didapati data Pertumbuhan Investasi Daerah Tahun 2024 dengan hasil sebagai berikut;

Tabel Perbandingan Pertumbuhan Investasi Daerah

Wilayah	Pertumbuhan Investasi	Keterangan	Rujukan Data
Kabupaten Kediri	29.78%	-	Data Rekapitulasi DPMPTSP Kabupaten Kediri
Provinsi Jawa Timur	1.52%	Kabupaten Kediri Lebih Baik	
Nasional	29.78%	Lebih Baik dari Kabupaten Kediri	

Pihak-pihak yang Terkait

DPMPTSP Kabupaten Kediri bekerja sama dengan Kementerian Investasi/BKPM, DPMPTSP Provinsi Jawa Timur dan OPD terkait berperan pada kegiatan pengawasan dan

penyelesaian permasalahan dan hambatan penanaman modal serta fasilitasi kemitraan usaha;

Program Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Kinerja

Tabel 21 Perbandingan Pertumbuhan Investasi Daerah

Program	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase investor yang diberikan insentif	25%	25%	100%	Sangat Mendukung
Program Promosi Penanaman Modal	Prosentase pelaksanaan strategi dan kegiatan promosi yang dilaksanakan	100%	100%	100%	Sangat Mendukung
Program Pelayanan Penanaman Modal	Prosentase pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu	100%	100%	100%	Sangat Mendukung
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Prosentase kegiatan pengendalian pelaksanaan penanaman	82%	122.15%	148.96%	Sangat Mendukung
Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Prosentase pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	100%	100%	100%	Sangat Mendukung

Faktor-faktor Pendukung

Merujuk data dari DPMPTSP, Ada pelaporan susulan investasi Bandara sehingga sebagian besar investasi yang masuk ke Kabupaten Kediri Tahun 2024 bersumber dari investasi Bandara

Faktor-faktor Penghambat

Merujuk data dari DPMPTSP, Ketika proyek Bandara selesai, ada kemungkinan penurunan investasi.

Rencana Tindak Lanjut

Merujuk data dari DPMPTSP, Meningkatkan kepatuhan pelaku usaha di bidang penanaman modal.

Apresiasi Kinerja

Merujuk data dari DPMPTSP, Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Daerah Tahun 2024 **"Kategori Sangat Baik"**

Sasaran 10

Meningkatnya Daya Beli Masyarakat

Pada tahun 2024, pengeluaran riil per kapita per tahun yang disesuaikan masyarakat Kabupaten Kediri mencapai Rp 12,39 juta per tahun atau Rp. 1.032.333,00 . Capaian ini meningkat 436 ribu rupiah (3,65 persen) dibandingkan tahun sebelumnya, lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan tahun 2020-2023 yang sebesar 2,81 persen per tahun.

Merujuk penjelasan dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian daya beli masyarakat adalah seberapa tinggi tingkat kemampuan konsumen atau masyarakat luas dalam membeli serta mendapatkan barang yang mereka butuhkan. Hal tersebut dipengaruhi oleh pendapatan per kapita, struktur industri hulu ke hilir mulai dari rantai pasok, SDM, penelitian dan pengembangan, hingga akses pasar baik pasar tradisional maupun pasar non tradisional.

Tidak dapat dipungkiri bahwa pelemahan daya beli masyarakat pada masa pandemic covid-19 secara umum menyebabkan penurunan ekonomi. Hal tersebut terjadi akibat turunnya kemampuan masyarakat dalam melakukan konsumsi. Penyebab dari menurunnya kemampuan daya beli adalah tingginya angka PHK dan menurunnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Kendati demikian, terdapat beberapa hal yang mempengaruhi fluktuasi daya beli masyarakat sebagai berikut;

1. Perubahan Harga
2. Inflasi
3. Pendapatan Riil Masyarakat
4. Nilai Tukar Mata Uang
5. Pajak
6. Lapangan Pekerjaan
7. Ketersediaan Kredit
8. Suku Bunga

Daya beli masyarakat secara umum dapat ditinjau sebagai faktor kunci dalam perkembangan ekonomi di suatu wilayah. Secara langsung daya beli masyarakat memiliki korelasi dengan kesejahteraan masyarakat. Semakin tinggi daya beli masyarakat dapat

diasumsikan pula semakin sejahtera masyarakat dengan tetap memperhatikan tingkat inflasi dan satuan komoditas. Semakin tinggi indeks pengeluaran masyarakat, semakin masyarakat dapat mengonsumsi apa yang mereka butuhkan.

Upaya Pemerintah Kabupaten Kediri dalam mengembangkan sektor perdagangan adalah dengan acuan peningkatan daya beli masyarakat. Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Kediri melalui Dinas Perdagangan telah menetapkan arah kebijakan terkait dengan meningkatnya sektor perdagangan dan meningkatnya pertumbuhan Industri Kecil Mikro (IKM) dengan pendekatan strategis yakni kestabilan harga dan jumlah komoditas bahan pokok dan barang penting dalam pasar ekonomi di Kabupaten Kediri.

Permasalahan

Merujuk data dari Dinas Perdagangan disebutkan sebagai berikut;

1. Kondisi sarana prasarana distribusi perdagangan yang belum sesuai SNI
2. Fluktuasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting
3. Belum optimalnya kegiatan ekspor oleh pelaku usaha
4. Belum optimalnya perlindungan konsumen dan tertib niaga
5. Kurang optimalnya pengembangan perdagangan dalam negeri
6. Rendahnya produktivitas Industri
7. Belum optimalnya Penerapan sistem informasi dan perumusan kebijakan pengembangan industri dan perdagangan
8. Belum optimalnya penerapan standardisasi, desain produk, dan teknologi industry

Merujuk Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dijelaskan sebagai berikut:

1. Pemutakhiran data koperasi dan UMKM berbasis sistem informasi
2. Pemanfaatan teknologi informasi dalam implementasi pemasaran produk anggota koperasi dan UMKM
3. Peningkatan kapasitas, kapabilitas, inovasi koperasi dan UMKM
4. Kemudahan perizinan / legalitas untuk UMKM
5. Profesionalisme SDM koperasi dan UMKM dalam manajemen usaha dan pengelolaan keuangan
6. Kemitraan usaha antara koperasi dan UMKM dan UMKM dengan pengusaha besar
7. Digitalisasi dan modernisasi koperasi
8. Keberlanjutan / kontiunuitas produksi produk UMKM

Perencanaan

Pada tahun 2024 ini, target Indeks Pengeluaran sebesar Rp. 1.145.155,00 . Target tersebut sesuai pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2024 dan Perjanjian Kinerja Perubahan Bupati Kediri tahun 2024.

Upaya-upaya Pencapaian Kinerja

Upaya-upaya yang telah dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan dan Dinas Koperasi Usaha Mikro bersama dengan dinas-dinas lain adalah sebagai berikut;

Merujuk penjelasan dari Dinas Perdagangan adalah sebagai berikut:

1. Membangun dan Mengelola Sarana Distribusi Perdagangan
2. Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
3. Mengendalikan Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan
4. Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/ Kota
5. Pengembangan Ekspor
6. Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen
7. Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
8. Menyusun, Menerapkan dan Mengevaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
9. Menyediakan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota

Merujuk penjelasan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro sebagai berikut:

1. Pemutakhiran data koperasi dan UMKM berbasis sistem informasi
2. Pemanfaatan teknologi informasi dalam implementasi pemasaran produk anggota koperasi dan UMKM
3. Peningkatan kapasitas, kapabilitas, inovasi koperasi dan UMKM
4. Kemudahan perizinan / legalitas untuk UMKM
5. Profesionalisme SDM koperasi dan UMKM dalam manajemen usaha dan pengelolaan keuangan
6. Kemitraan usaha antara koperasi dan UMKM dan UMKM dengan pengusaha besar
7. Digitalisasi dan modernisasi koperasi
8. Keberlanjutan / kontiunuitas produksi produk UMKM

Hasil Kinerja

Pada tahun 2024, sebagaimana penjelasan dari Dinas Perdagangan dan Dinas Koperasi Usaha Mikro bersama dengan dinas-dinas lain adalah sebagai berikut;

Pencapaian Kinerja Tahun 2024

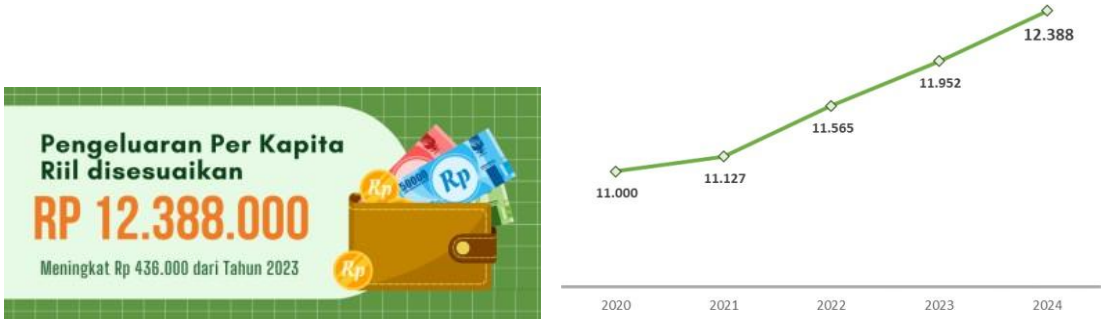
Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
Meningkatnya daya beli masyarakat	Indeks Pengeluaran (hitungan perbulan)	1,145,155	1,032,333	90.15%	Baik

Keandalan Data Kinerja

Formula	Perhitungan	Hasil Perhitungan	Dasar Perhitungan
Diukur oleh BPS	Diukur oleh BPS	1,032,333	Berita Resmi Statistik Kabupaten Kediri No. 03/12/3506/Th.VI, 03 Desember 2024

Dimensi ketiga yang mewakili pembangunan manusia adalah standar hidup layak yang direpresentasikan dengan pengeluaran riil per kapita per tahun (yang disesuaikan). Pada tahun 2024, pengeluaran riil per kapita per tahun yang disesuaikan masyarakat Kabupaten Kediri mencapai Rp 12,39 juta per tahun. Capaian ini meningkat 436 ribu rupiah (3,65 persen) dibandingkan tahun sebelumnya, lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan tahun 2020-2023 yang sebesar 2,81 persen per tahun.

Gambar 19 Pengeluaran Per Kapta Riil



Sumber: Berita Resmi Statistik Kabupaten Kediri 2024

Perbandingan dengan Target Akhir RPJMD

Sasaran	Indikator	Target Akhir RPJMD	Realisasi	Capaian	Keterangan
Meningkatnya daya beli masyarakat	Indeks Pengeluaran (hitungan perbulan)	1,393,267	1,032,333	74.09%	Target Akhir RPJMD Belum Tercapai

Realisasi Anggaran

Sasaran	Indikator	Pagu	Realisasi	Capaian	Keterangan
Meningkatnya daya beli masyarakat	Indeks Pengeluaran (hitungan perbulan)	26,221,565,498.00	25,440,326,428.00	97.02%	Zona Hijau

Analisa Efisiensi

Sasaran	Indikator	Capaian Kinerja	Capaian Anggaran	Analisa Efisiensi	Keterangan
Meningkatnya daya beli masyarakat	Indeks Pengeluaran (hitungan perbulan)				

Perbandingan Kinerja

Dari data yang dihimpun oleh Dinas Perdagangan didapati data Pertumbuhan Investasi Daerah Tahun 2024 dengan hasil sebagai berikut; Untuk indeks pengeluaran Kabupaten Kediri lebih rendah di bandingkan dengan kota kediri dengan selisih sebesar -106.833 jika di bandingkan provinsi lebih rendah Kabupaten Kediri dengan selisih sebesar -38.667 dan jika di bandingkan nasional lebih tinggi Kabupaten kediri dengan selisih sebesar 3.916

Tabel Perbandingan Indeks Pengeluaran

Wilayah	Indeks Pengeluaran	Keterangan	Rujukan Data
Nasional	1,028,417.00	Kabupaten Kediri lebih baik	BPS diolah oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Provinsi	1,071,000.00	Lebih baik dari Kabupaten Kediri	
Kabupaten Kediri	1,032,333.00	-	

Pihak-pihak yang Terkait

Pihak – pihak yang terlibat antara lain instansi vertikal baik dengan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi serta dengan Kementrian Perdagangan, Kemenperin, instansi horizontal dengan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kediri yang terkait serta dengan pihak eksternal antara lain perbankan untuk program e-retribusi

Program Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Kinerja

Analisa Program/Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Kinerja

Program	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Tingkat pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi	17.36%	13.37%	77%	Cukup Mendukung
program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam yang cukup sehat	1.71%	1.15%	67%	Cukup Mendukung
Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	Persentase SDM Koperasi terlatih	0.20%	0.16%	80%	Mendukung
Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase Partisipasi Koperasi Aktif	33.67%	34.49%	102%	Sangat Mendukung
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Partisipasi Usaha Mikro	26.02%	24.41%	94%	Mendukung
Program Pengembangan UMKM	Persentase Usaha Mikro yang meningkat omsetnya	9.87%	8.42%	85.31%	Mendukung
Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Pasar yang memenuhi standar	50%	50%	100.00%	Sangat Mendukung
Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	90%	90%	100.00%	Sangat Mendukung
Program Pengembangan Ekspor	Persentase Produk Ekspor Unggulan	70%	70%	100.00%	Sangat Mendukung
Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Persentase Pelaku Usaha yang memenuhi Uji Metrologi Legal	90%	90%	100.00%	Sangat Mendukung
Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase Kegiatan Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	1.93%	1.93%	100.00%	Sangat Mendukung
Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Pertumbuhan industri yang terstandarisasi	15%	15%	100.00%	Sangat Mendukung
Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Cakupan layanan sistem informasi industri nasional	15%	15%	100.00%	Sangat Mendukung

Faktor-faktor Pendukung

Merujuk data dari Dinas Perdagangan disebutkan sebagai berikut;

1. Pelaku Usaha (UMKM, Pedagang, Produsen): Mereka adalah ujung tombak perdagangan. Peningkatan kualitas produk, inovasi, dan strategi pemasaran yang efektif akan sangat mempengaruhi volume penjualan Dukungan masyarakat

2. Pemerintah Daerah: Memberikan dukungan melalui kebijakan yang kondusif, infrastruktur yang memadai, dan anggaran
3. Asosiasi dan Organisasi Perdagangan: Memfasilitasi kerjasama antar pelaku usaha, memberikan pelatihan, dan membantu dalam promosi produk
4. Pelaku IKM: Mereka adalah aktor utama dalam pertumbuhan IKM. Peningkatan kapasitas produksi, inovasi produk, dan manajemen usaha yang baik akan sangat mempengaruhi pertumbuhan IKM
5. Pemerintah Daerah: Memberikan dukungan melalui kebijakan yang kondusif, infrastruktur yang memadai, dan anggaran Asosiasi dan Organisasi IKM: Memfasilitasi kerjasama antar pelaku IKM, memberikan pelatihan, dan membantu dalam promosi produk

Merujuk data dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro sebagai berikut;

Faktor Pendukung Internal:

1. Kebijakan dari Pemerintah Kabupaten Kediri yang mendukung perkembangan koperasi dan usaha mikro, seperti kemudahan perizinan berusaha serta fasilitasi perizinan berusaha ke desa/kecamatan untuk mempermudah akses usaha mikro terhadap layanan perizinan berusaha
2. Peningkatan Keterampilan dan Kapasitas usaha mikro dengan melaksanakan program kegiatan Pelatihan produksi dan restrukturisasi usaha bagi usaha mikro baik untuk peningkatan kualitas SDM usaha mikro atau pun produk usaha mikro serta pelatihan pembuatan produk untuk mendukung pertumbuhan wirausaha baru
3. Menyediakan atau memfasilitasi akses pembiayaan untuk koperasi dan usaha mikro, melalui Fasilitas Pembiayaan Mikro melalui kegiatan kemitraan usaha mikro dengan perbankan serta
4. pemberian bantuan modal usaha bagi usaha mikro dan koperasi melalui mekanisme hibah
5. Sinkronisasi program kegiatan antar instansi dalam Pemerintah Kabupaten Kediri sehingga program kegiatan dapat efektif.

Faktor Pendukung Eksternal:

1. Dukungan dari Pemerintah Pusat (Kementrian Koperasi dan UKM RI) dan Provinsi Jawa Timur kepada Pemerintah Kabupaten Kediri mendapatkan bantuan ingan dari pemerintah pusat berupa program-program pemberdayaan koperasi dan UMKM, baik dalam bentuk pelatihan, bimtek, fasilitasi legalitas usaha

2. Kerja sama dengan dunia usaha atau sektor swasta seperti dengan bank jatim melalui CSR bantuan alat produksi bagi usaha mikro, dengan bank himbara melalui akses pembiayaan (kredit usaha) bagi usaha mikro dan koperasi serta bantuan bimtek/pelatihan dari pegadaian dan Bulog

Faktor-faktor Penghambat

Merujuk data dari Dinas Perdagangan disebutkan sebagai berikut;

1. Tingkat ekspor yang bergantung terhadap pasar global, dimana sering terjadi fluktuasi kenaikan atau penurunan yang sangat signifikan. Sehingga nilai persentase ekspor tidak bisa diprediksi dengan baik dan selalu bergantung permintaan pasar global dalam suatu periode tertentu.
2. Pengusaha/perusahaan yang enggan melaporkan aktivitas ekspor impor mereka
3. Peningkatan jumlah IKM di Kabupaten Kediri sering bergantung pada bahan baku produksi industri. Dimana keberlanjutan produksi produk daerah oleh IKM sering menjadi masalah, dan produksi terhenti karena kurangnya ketersediaan bahan baku.
4. Pelaku industri yang masih baru enggan mengurus ijin industri, meskipun saat ini sudah dipermudah dengan OSS

Merujuk data dari Dinas Kopusmik adalah sebagai berikut:

Faktor internal

1. Keterbatasan anggaran menjadikan program kegiatan pemberdayaan dan pembinaan koperasi dan usaha mikro tidak dapat menyentuh seluruh koperasi dan usaha mikro yang ada di Kabupaten Kediri
2. Kurangnya kapasitas pegawai Dinas Koperasi dan Usaha Mikro yang terlatih dan berkompeten dalam menangani sektor koperasi dan usaha mikro mempengaruhi kualitas pelayanan kepada koperasi dan usaha mikro
3. Kurang optimalnya sinergi dari perangkat daerah pengampu sektor ekonomi jadi beberapa kegiatan masih ada yang tumpang tindih

Faktor eksternal

1. Adanya ketergantungan usaha mikro dan koperasi terhadap program dari Pemerintah Kabupaten Kediri sehingga menghambat inovasi dan kemandirian usaha mikro dan koperasi

2. Keterbatasan dalam memahami teknologi baru dan menggunakan platform digital untuk pemasaran dan transaksi menjadi penghambat daya saing usaha mikro sehingga akses pasar usaha mikro terbatas

Rencana Tindak Lanjut

Merujuk data dari Dinas Perdagangan disebutkan sebagai berikut;

1. Melakukan perhitungan potensi capaian ekspor berdasarkan data realisasi tahun-tahun sebelumnya
2. Mengundang atau melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha atau perusahaan agar bisa berpartisipasi dalam pelaporan aktivitas ekspor impornya
3. Melakukan pendampingan kepada IKM untuk menumbuhkan IK baru
4. Melakukan sosialisasi kepada IKM serta pendampingan ijin industri

Merujuk data dari Dinas Kopusmik adalah sebagai berikut:

1. Bekerjasama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, swasta dan perbankan untuk melakukan pemberdayaan dan pembinaan terhadap koperasi dan usaha mikro
2. Melakukan Analisa kebutuhan Pendidikan dan pelatihan kompetensi pegawai untuk di usulkan kepada Badan Kepegawaian Daerah
3. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi program kegiatan dengan OPD terkait sektor ekonomi
4. Meningkatkan motivasi kewirausahaan bagi usaha mikro serta memberikan fasilitasi pemasaran usaha mikro untuk meningkatkan pendapatan usaha mikro dan anggota koperas
5. Memberikan pelatihan pemasaran digital kepada usaha mikro secara sederhana dan mudah sehingga Masyarakat dapat dengan mudah mengimplementasikannya.

Apresiasi Kinerja

Merujuk data dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dengan Dinas Perdagangan disebutkan sebagai berikut;

1. Pasar Tertib Ukur Tahun 2024 dari Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan
2. Juara 1 Stand Terbaik Pameran Kriya Indonesia di Yogyakarta oleh Dekranasda Provinsi Yogyakarta

Tujuan 6

Meningkatnya Daya Dukung dan Kemandirian Sektor Pertanian dan Pangan Daerah

Merujuk pada data Kementerian Pertanian Kemandirian pangan (bahasa Inggris: food resilience) menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan adalah "Kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat". Berkaitan dengan masalah pemenuhan kebutuhan pangan, definisi kemandirian menurut Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) yaitu "Kemampuan untuk mencegah bencana dan krisis serta mengantisipasi, menyangga, menampung atau memulihkannya secara tepat waktu, efisien, dan berkelanjutan. Ini termasuk melindungi, memulihkan, dan meningkatkan sistem mata pencaharian dalam menghadapi ancaman yang berdampak pada pertanian, pemenuhan nutrisi, ketahanan pangan, dan keamanan pangan".

Kemandirian pangan berbeda dengan ketahanan pangan dalam hal sumber untuk mencukupi kebutuhan primer tersebut. Kemandirian pangan mensyaratkan kemampuan produksi dalam negeri, sedangkan ketahanan pangan tidak mempersoalkan sumber pasokan pangan; bisa berasal dari dalam negeri atau merupakan hasil impor. Berdasarkan definisi kemandirian pangan menurut UU Pangan, beberapa aspek yang terkait dengan usaha mencukupi kebutuhan pangan setiap warga negara secara bermartabat, yaitu kemampuan produksi pangan dalam negeri, keanekaragaman produk atau komoditas pangan, serta pemanfaatan sumber daya alam dan manusia, termasuk kearifan lokal masyarakat.

Pencapaian Kinerja Tahun 2024

Tujuan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
Meningkatkan Daya Dukung dan Kemandirian Sektor Pertanian	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian	3.03	-1.73	-57.10%	Kurang Baik

Keandalan Data Kinerja

Formula	Perhitungan	Hasil Perhitungan	Dasar Perhitungan
Diukur oleh BPS	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian	-1.73	Berita Resmi Statistik

Perbandingan dengan Target Akhir RPJMD

Tujuan	Indikator	Target Akhir RPJMD	Realisasi	Capaian	Keterangan
Meningkatkan Daya Dukung dan Kemandirian Sektor Pertanian	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian	0.44	-1.73	-393.18%	Target Akhir RPJMD Belum Tercapai

Penjelasan Umum Kinerja

Perkembangan Pertanian di Kabupaten Kediri tidak dapat dilepaskan dari kondisi kewilayahan di Kabupaten Kediri yang mana disampaikan sesuai dengan RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2021-2026. Pada RPJMD Tahun 2021-2026 terdapat 4 kawasan aglomerasi pertanian yakni:

1. Ngawasondat (Ngancar, Wates, Plosoklaten, dan Kandat) sebagai penghasil buah-buahan nanas;
2. Pakancupung (Pare, Kandangan, Puncu, dan Kepung) sebagai penghasil sayur-mayuran;
3. Palempari (Papar, Plemahan, Kayen Kidul, Pagu dan Purwoasri) sebagai penghasil padi dan jagung;
4. Segobatam (Semen, Grogol, Banyakan Tarokan) sebagai penghasil buah-buahan mangga podang.

Pada tahun 2023, terdapat peningkatan yang cukup tinggi pada Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian. Pada tahun 2022 realisasi Pertumbuhan PDRB Sektor pertanian sebesar 0.02, pada tahun 2023 realisasi Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian 3.03, dan pada tahun 2024 realisasi Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian sebesar -1.73. Tidak dapat dipungkiri bahwa pembangunan Bandara Dhoho Kabupaten Kediri telah menyusutkan lahan pertanian terutama pada aglomerasi Segobatam. Pembangunan dengan harga USD 40.000 mengambil 457 hektar lahan, terutama lahan-lahan pertanian di kawasan aglomerasi Segobatam. Potensi panen mangga di kawasan pembangunan Bandara tersebut mengalami penurunan dan panen raya juga mengalami penurunan produksi. Faktor lain penyebab sektor pertanian mengalami penurunan angka adalah karena pengaruh pola musiman (masa tanam) juga pengaruh *el nino* yang menyebabkan tanaman tidak bisa tumbuh optimal sehingga produksi GKG (Gabah Kering Giling) mengalami penurunan dari 183.534 ton tahun 2023 menjadi 174.072 ton pada tahun 2024 (turun 5,16%), demikian juga produksi beras dari 105.976 ton tahun 2023 menjadi 100.513 ton pada tahun 2024 (turun 5,16%). Disamping itu luas area panen dari 31.268 hektar tahun 2023 menjadi 30.497 hektar pada tahun 2024 (turun 2,47%).

Gambar 20 Foto Pembangunan Bandara dan Masterplan Bandara Dhoho Kabupaten Kediri





Namun demikian, didapati perkembangan data PDRB Sektor Pertanian pada tahun 2020-2024 dari Kabupaten Kediri dalam Angka Tahun 2024 sebesar pada 2024 adalah 6.208,51, pada 2023 adalah 6.317,80, pada 2022 adalah 6.131,98. Secara kuantitatif, ketercapaian target dalam RPJMD dapat diukur sebagai berikut;

Gambar 21 Data PDRB Pertanian Kehutanan dan Perikanan Kabupaten Kediri

Tabel / *Table* 12.2 **Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kabupaten Kediri Menurut Lapangan Usaha (miliar rupiah), 2020-2024**
Gross Regional Domestic Product at 2010 Constant Market Prices of Kediri Regenc by Industry (billion rupiahs), 2020-2024

	Lapangan Usaha/*Industry*	2020	2021	2022	2023*	2024**
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/*Agriculture, Forestry, and Fishing*	6.079,42	6.130,62	6.131,98	6.317,80	6.208,51

Tabel / *Table* 12.4 **Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kabupaten Kediri Menurut Lapangan Usaha (persen), 2020-2024**
Growth Rate of Gross Regional Domestic Product at 2010 Constant Market Prices of Kediri Regency by Industry (percent), 2020-2024

	Lapangan Usaha/*Industry*	2020	2021	2022	2023*	2024**
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/*Agriculture, Forestry, and Fishing*	0,42	0,84	0,02	3,03	-1,73

Dari dua hal diatas, dapat dipetakan peta perencanaan dengan dua hal yakni melakukan pengukuran target pertumbuhan yang dihitungkan sekalian dengan target PDRB dengan data dasar PDRB Tahun 2021. Hal yang kedua adalah membandingkan perhitungan target PDRB dengan data dasar 2021 tersebut dengan realisasi PDRB Sektor Pertanian tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 22 Perhitungan Metode 1 atas Perkembangan data PDRB Sektor Pertanian

	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
Target Pertumbuhan	0.42	0.43%	0.43%	0.43%	0.44%	0.44%
Target PDRB	6079.42	6105.56	6131.82	6158.18	6185.28	6212.49
Realisasi Pertumbuhan	0.42	0.84	0.02	3.03	-1.73	
Realisasi PDRB	6079.42	6160.62	6131.98	6317.8	6208.51	
Capaian	100.00%	100.90%	100.00%	102.59%	100.38%	

Perbandingan atas PDRB						

Sumber: Kabupaten Kediri dalam Angka 2025 dimodifikasi

Melihat dari metode diatas, dapat diasumsikan bahwa pencapaian target PDRB Sektor pertanian tersebut masih berada diatas target yang ditetapkan dalam RPJMD dengan capaian 100.38%. Dengan demikian secara PDRB Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian sudah tercapai, namun secara pertumbuhan yang diperbandingkan tahun sebelumnya, kinerja tidak dapat tercapai karena adanya penurunan Produktivitas Sektor Pertanian hingga tumbuh pada posisi minus.

Sasaran 11

Meningkatkan Ketersediaan Pangan dan Akses Pangan Masyarakat

Pada Tahun 2024 Ketersediaan Pangan Utama Kabupaten Kediri yakni 144.61 meningkat dari 128.08 pada Tahun 2023. Jika dibandingkan dengan kebutuhan konsumsi beras per kapita Kabupaten Kediri sebesar 72,24 kg/kapita/ tahun, maka ketersediaan pangan masih surplus sebesar 74,20 kg/kapita/tahun. Ini menunjukan ketersediaan pangan utama Kabupaten Kediri masih sangat aman dalam memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat Kabupaten Kediri.

Sesuai dengan UU No. 18 tahun 2012 tentang Pangan, Ketahanan Pangan didefinisikan sebagai kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Pembangunan ketahanan pangan dan gizi dilakukan secara sistemik dengan melibatkan lintas sektor. Pendekatan ini diarahkan untuk mewujudkan ketersediaan pangan yang memadai melalui produksi pangan domestik dan perdagangan; tercapainya stabilitas ketersediaan dan akses pangan secara makro-meso dan mikro; tercapainya kualitas (keragaman dan keamanan pangan) dan kuantitas konsumsi pangan yang didukung oleh perbaikan infrastruktur.

Ketahanan Pangan terbangun melalui 3 (tiga) pilar, yaitu ketersediaan pangan (food availability), keterjangkauan pangan (food accessibility) baik secara fisik maupun ekonomi, dan pemanfaatan pangan (food utilization). Apabila ketiga pilar ketahanan pangan terpenuhi, maka masyarakat atau rumah tangga tersebut mampu memenuhi ketahanan pangannya masing-masing.

Pilar ketersediaan pangan didefinisikan sebagai kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri, cadangan pangan, serta impor dan bantuan pangan. Pilar akses atau keterjangkauan pangan pada tingkat rumah tangga didefinisikan sebagai kemampuan rumah tangga untuk memperoleh cukup pangan yang bergizi, melalui satu atau kombinasi dari berbagai sumber pangan seperti produksi sendiri, persediaan pangan yang dimiliki rumah tangga, pembelian, barter, hadiah dan sajian dalam suatu pertemuan, pinjaman dan bantuan pangan. Dalam kerangka ketahanan pangan, akses atas pangan menjadi penting karena pangan yang tersedia dalam jumlah yang cukup di suatu wilayah belum tentu dapat dimanfaatkan apabila rumah tangga tersebut memiliki keterbatasan akses fisik, ekonomi atau sosial. Pilar pemanfaatan pangan merujuk pada penggunaan pangan oleh rumah tangga dan kemampuan individu untuk mengkonsumsi pangan dan tubuh dapat menyerap dan metabolisme zat gizi dengan baik. Pemanfaatan pangan meliputi cara penyimpanan, pengolahan, penyiapan dan pemenuhan persyaratan keamanan makanan dan minuman. Pemanfaatan pangan juga berkaitan dengan kondisi kebersihan, kebiasaan pemberian makan (terutama bagi individu dengan kebutuhan makanan khusus), distribusi makanan dalam rumah tangga sesuai dengan kebutuhan individu (pertumbuhan, kehamilan dan menyusui), dan status kesehatan setiap anggota rumah tangga. Mengingat peran yang besar dari seorang ibu dalam meningkatkan status gizi keluarga, terutama untuk bayi dan anak-anak, pendidikan ibu sering digunakan sebagai salah satu proxy untuk mengukur kualitas pemanfaatan pangan rumah tangga.

Ketersediaan pangan utama menggambarkan jumlah beras yang tersedia bagi tiap orang penduduk di Kabupaten Kediri per tahun untuk dapat memenuhi kebutuhan konsumsi. Ketersediaan pangan utama dipengaruhi oleh jumlah produksi beras, keluar masuknya beras dari dan ke luar Kabupaten Kediri, stok akhir bulog serta jumlah penduduk Kabupaten Kediri.

Melihat hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Kediri melakukan upaya dalam rangka meningkatkan ketersediaan pangan dan akses pangan masyarakat. Upaya ini baik secara langsung atau secara tidak langsung harus ditunjang dengan hal-hal yang ada disekitarnya. Pemerintah Kabupaten Kediri melihat pengembangan ketersediaan pangan dan akses pangan masyarakat harus dilaksanakan lebih massif, terutama yang berdampak langsung kepada tersedianya dan kemudahan akses pangan masyarakat.

Permasalahan

Merujuk data dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan disebutkan permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

1. Masih adanya daerah rentan rawan pangan di Kabupaten Kediri.

2. Fluktuasi harga komoditas pangan strategis.
3. Pola konsumsi masyarakat belum beragam, bergizi, seimbang dan aman.
4. Masih ditemukan pangan segar tidak aman yang yang beredar di Masyarakat.

Perencanaan

Target rata-rata ketersediaan pangan utama (beras) per penduduk Kabupaten Kediri tahun 2024 adalah sebesar 146,10 kg/kapita/tahun. Sedangkan target akhir periode RPJMD 2021-2026 adalah sebesar 149,04 kg/kapita/tahun.

Upaya-upaya Pencapaian Kinerja

Upaya-upaya yang telah dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan bersama dengan dinas-dinas lain adalah sebagai berikut:

1. Melakukan penggalian potensi di wilayah rentan rawan pangan untuk dapat dikembangkan sehingga pencegahan kerawanan pangan lebih efektif, terarah dan berdampak nyata bagi masyarakat.
2. Penguatan stabilitas harga dan peningkatan akses pangan masyarakat melalui pemantauan harga dan stok pangan di tingkat produsen, distributor/penggilingan dan konsumen, operasi pasar dan Gerakan Pangan Murah, koordinasi lintas sektor, pengembangan kelembagaan cadangan pangan (lumbung pangan masyarakat), pengembangan dan peningkatan kapasitas pengembangan Lembaga Usaha Pangan Masyarakat (LUPM) melalui Pasar Mitra Tani (PMT).
3. Pemberdayaan Masyarakat dalam pemanfaatan pekarangan melalui program IBU ASUH STUNTING yakni kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) secara berkelanjutan disertai monitoring dan evaluasi sebagai salah satu upaya pendukung pencegahan stunting serta solusi pemenuhan pangan di tingkat rumah tangga yang beraneka ragam serta bisa dikembangkan menjadi sumber pendapatan di tingkat rumah tangga.
4. Sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan untuk mendorong masyarakat dalam konsumsi pangan berbahan baku lokal non beras serta pelaku usaha kecil dan menengah untuk memproduksi pangan olahan non beras.
5. Sosialisasi, pembinaan, pengawasan mutu dan keamanan pangan olahan dan pangan segar di kalangan petani dan pelaku usaha pangan serta peningkatan jaminan mutu dan daya saing produk melalui fasilitasi sertifikasi Prima untuk Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) serta rekomendasi ijin edar Pangan Segar Asal Tumbuhan Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK)

Hasil Kinerja

Target rata-rata ketersediaan pangan utama (beras) per penduduk Kabupaten Kediri tahun 2024 adalah sebanyak 146,10 kg/kapita/tahun. Pada akhir tahun 2024 diperoleh jumlah ketersediaan pangan utama sebanyak 146,44 kg/kapita/tahun atau dengan capaian kinerja sebesar 100,24% (kategori Sangat Baik).

Pencapaian Kinerja Tahun 2024

Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
Meningkatnya Ketersediaan Pangan dan Akses Pangan Masyarakat	Ketersediaan Pangan Utama	146.1	146.44	100.23%	Sangat Baik

Keandalan Data Kinerja

Formula	Perhitungan	Hasil Perhitungan	Dasar Perhitungan
Jumlah ketersediaan pangan utama (beras) / Jumlah penduduk	246.679,39 kg / 1.684.454 jiwa	146,44 kg/kapita/tahun	Data Ketersediaan Pangan Beras Tahun 2024

Tabel 23 Pengukuran Hasil Nilai Tukar Petani Kabupaten Kediri Tahun 2024

DATA KETERSEDIAAN PANGAN BERAS TAHUN 2024

NO.	URAIAN	VOLUME	SATUAN
1	Produksi Gabah	299.617,17	Ton
2	Produksi Beras (1*0,65)	194.751,16	Ton
3	Jumlah Penduduk 2024	1.684.454	jiwa
4	Perkiraan Beras keluar	29.212,67	Ton
5	Perkiraan Beras Masuk	21.422,63	Ton
6	Beras Bantuan Pangan Bapanas 2024 9 kali 130.092 KPM @10 kg	11.708,28	Ton
8	Stok Beras Penggilingan	34.010,00	Ton
9	Stok Bulog	14.000,00	Ton
10	Tingkat konsumsi / kapita	72,24	kg/kap/th
11	Ketersediaan Beras Produksi Sendiri	115,62	kg/kap/th
12	Jumlah ketersediaan beras total (2+5+6+8+9-4)	246.679,39	Ton
	Ketersediaan Pangan Utama Beras (12*1000/3)	**146,44**	**kg/kap/tahun**

Sumber: Data Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Kediri Tahun 2024

Perbandingan dengan Target Akhir RPJMD

Sasaran	Indikator	Target Akhir RPJMD	Realisasi	Capaian	Keterangan
Meningkatnya Ketersediaan Pangan dan Akses Pangan Masyarakat	Ketersediaan Pangan Utama	149.04	146.44	98.26%	Target Akhir RPJMD Belum Tercapai

Realisasi Anggaran

Sasaran	Indikator	Pagu	Realisasi	Capaian	Keterangan
Meningkatnya Ketersediaan Pangan dan Akses Pangan Masyarakat	Ketersediaan Pangan Utama	4,090,217,400.00	4,071,769,350.00	99.55%	Zona Hijau

Analisa Efisiensi

Sasaran	Indikator	Capaian Kinerja	Capaian Anggaran	Analisa Efisiensi	Keterangan
Meningkatnya Ketersediaan Pangan dan Akses Pangan Masyarakat	Ketersediaan Pangan Utama	100.23%	99.55%	0.68%	Efisien

Pembandingan/Benchmarking

Perbandingan Realisasi dengan Tahun Sebelumnya

Realisasi Nilai Tukar Petani di Kabupaten Kediri dengan tahun-tahun sebelumnya adalah sebagai berikut;

2021	2022	2023	2024
144.58	117.48	128.08	146.44

Dari data diatas didapati adanya penurunan signifikan tahun 2022 dan terjadinya peningkatan yang signifikan pada tahun 2023 dan tahun 2024. Peningkatan signifikan tersebut akan dijadikan bahan dalam melakukan perencanaan tahun berikutnya.

Perbandingan Kinerja

Perkembangan data yang diolah oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan adalah sebagai berikut:

Kabupaten Kediri	Daerah Lain	Provinsi Jawa Timur	Nasional
146.44 kg/kapita/tahun	No Data	126.99 kg/kapita/tahun	No Data

Ketersediaan pangan utama Kabupaten Kediri masih di atas proyeksi capaian Provinsi Jawa Timur yakni sebesar 126,99 kg/kapita/tahun. Adapun dibandingkan dengan capaian nasional, saat laporan ini disusun belum diperoleh angka data ketersediaan pangan nasional sehingga tidak dapat disandingkan dengan capaian ketersediaan pangan utama Kabupaten Kediri.

Pihak-pihak yang Terkait

Merujuk pada data yang disampaikan oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan pihak-pihak yang terkait adalah sebagai berikut;

Pihak Instansi Vertikal

1. Kementerian Pertanian, menunjang pencapaian kinerja dengan memberikan dana DAK Fisik untuk infrastruktur pertanian (RJIT,JUT dan ITD) serta DAN Non Fisik untuk operasional BPP dan peningkatan SDM petani dan petugas.
2. Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Ketindan Malang, menunjang pencapaian kinerja dalam meningkatkan SDM petani dan petugas.
3. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, menunjang pencapaian kinerja dalam meningkatkan SDM petani dan petugas,

Stakeholder, Pihak Swasta dan Masyarakat

1. Perusahaan Pupuk Indonesia, menunjang pencapaian kinerja dalam menyediakan pupuk bersubsidi kepada petani untuk budidaya tanaman, baik pangan, hortikultura dan perkebunan.
2. Distributor pupuk dan kios, menunjang pencapaian kinerja dalam menyalurkan pupuk bersubsidi kepada petani
3. Kelompok tani, menunjang pencapaian kinerja dalam melaksanakan program – program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan.

Program Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Kinerja

Analisa Program/Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Kinerja

Program	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Jumlah rumusan kebijakan infrastruktur kemandirian pangan yang tersusun	100%	100%	100.00%	Sangat Mendukung

Program	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Koefisien variasi harga pangan utama	10%	10%	100.00%	Sangat Mendukung
	Skor Pola Pangan Harapan	95	91.2	96.00%	Mendukung
Program Penanganan Kerawanan Pangan	Jumlah penanganan desa rentan pangan	1 Peta	1 Peta	100.00%	Sangat Mendukung
Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase keamanan pangan segar	79%	100%	126.58%	Sangat Mendukung

Faktor-faktor Pendukung

Merujuk data yang disampaikan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan sebagai berikut;

1. Pemantauan harga dan stok pangan secara berkelanjutan di sisi produksi, gudang distributor/ penggilingan maupun di tingkat konsumen (pasar).
2. Adanya kegiatan penyaluran Cadangan Beras Pemerintah dari Badan Pangan Nasional melalui Bulog bagi penduduk Kabupaten Kediri juga mempengaruhi meningkatnya ketersediaan pangan di Kabupaten Kediri.
3. Berkembangnya usaha penggilingan di Kabupaten Kediri dapat mengungkit jumlah ketersediaan pangan.
4. Mitigasi daerah rentan pangan melalui Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan/Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA).
5. Kabupaten Kediri merupakan wilayah surplus pangan dengan kualitas sumberdaya lahan dan air yang masih dapat dikembangkan.
6. Adanya potensi bahan pangan lokal yang beraneka ragam.

Faktor-faktor Penghambat

Merujuk data yang disampaikan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan sebagai berikut:

1. Ancaman krisis pangan global/ketersediaan pangan seiring meningkatnya jumlah penduduk dan permasalahan lahan pertanian seperti: alih fungsi lahan, penurunan kesuburan tanah, ketersediaan air dan perubahan iklim ekstrim yang berpotensi mengganggu stabilitas produksi pangan utama.
2. Ketersediaan pangan utama sangat bergantung pada angka produksi. Sedangkan produksi gabah masih sangat dipengaruhi oleh mahalnya harga pupuk dengan

ketersediaan pupuk yang terbatas yang memicu petani untuk beralih ke komoditas selain padi sehingga berpotensi menyebabkan produksi gabah berkurang.

Rencana Tindak Lanjut

Merujuk data yang disampaikan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan sebagai berikut:

1. Memastikan ketersedian pangan bagi masyarakat mencukupi melalui pemantauan di sisi produksi, cadangan pangan masyarakat serta stok yang ada di gudang distributor/ penggilingan serta pemantauan harga pangan di tingkat konsumen (pasar).
2. Koordinasi juga senantiasa dilakukan dengan instansi terkait baik Badan Pangan Nasional maupun Bulog terkait stok serta perumusan kebijakan terkait stok pangan.
3. Dari sisi konsumsi pangan, konsumsi akan beras diupayakan menurun melalui diversifikasi pangan berbasis sumber daya lokal. Kegiatan yang dilakukan untuk penganekaragaman konsumsi pangan antara lain dengan pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan pekarangan sebagai sumber pangan keluarga. Masyarakat diberikan pelatihan dan bantuan bibit tanaman sayur dan buah serta sarana produksi pertanian untuk dibudidayayakan di pekarangan. Selain itu dilaksanakan juga sosialisasi konsumsi produk peternakan sebagai sumber protein hewani sehingga diharapkan masyarakat mengetahui pentingnya protein hewani dalam pemenuhan gizi. Dengan adanya diversifikasi pangan yang bergizi dan seimbang, diharapkan ketergantungan konsumsi beras menurun sehingga dapat mendukung stabilitas ketahanan pangan

Apresiasi dan Penghargaan Kinerja

Ketersediaan pangan utama tahun 2024 berhasil mencapai target dan meningkat dibandingkan tahun 2023. Jika dibandingkan dengan kebutuhan konsumsi beras per kapita Kabupaten Kediri sebesar 72,24 kg/kapita/ tahun, maka ketersediaan pangan masih surplus sebesar 74,20 kg/kapita/tahun. Ini menunjukan ketersediaan pangan utama Kabupaten Kediri masih sangat aman dalam memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat Kabupaten Kediri.

Sasaran 12

Meningkatnya Kesejahteraan Petani

Pada tahun 2024, realisasi Nilai Tukar Petani yang merujuk dari Laporan Penyusunan Nilai Tukar Petani Tahun 2024 yakni 104.69 mengalami peningkatan dari 104.44 pada tahun 2023. Nilai Tukar Petani tertinggi terdapat di Kecamatan Mojo dengan Nilai Tukar Petani sebesar 107.78 dan Nilai Tukar Petani terendah berada di Kecamatan Tarokan dengan Nilai Tukar Petani sebesar 102.89.

Sektor pertanian mempunyai peranan yang sangat penting dalam membangun perekonomian nasional termasuk perekonomian daerah, karena sektor pertanian berfungsi sebagai penyedia bahan pangan untuk ketahanan pangan masyarakat, sebagai instrumen pengentasan kemiskinan, penyedia lapangan kerja, serta sumber pendapatan masyarakat.

Sebagai penyedia pangan serta lapangan pekerjaan, pertanian yang merupakan salah satu sektor vital dalam menghadapi perkembangan bertambahnya populasi manusia, terutama dalam pembangunan berkelanjutan. Kondisi pertanian di Indonesia memiliki permasalahan serius antara lain terkait lahan, irigasi, benih, pupuk, alat mesin pertanian, penyuluh lapangan (sumber daya petani), tenaga kerja, hingga permasalahan tata niaga pertanian.

Menurut Kementerian Pertanian, petani adalah pelaku utama pembangunan. Dalam hal ini, petani memiliki peran yang besar terhadap penyediaan pangan yang berperan penting sebagai kebutuhan primer. Kementerian Pertanian sendiri juga mencanangkan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia pada tahun 2045.

Merujuk kajian dari Kementerian Pertanian terdapat beberapa hal yang menjadi kunci dalam menningkatkan kesejahteraan petani dengan pendekatan kesisteman (systemic approach) dengan parameter sebagai berikut;

1. Merevisi regulasi yang menghambat
2. Membangun infrastruktur
3. Mekanisasi pertanian
4. Perbaikan teknis produksi Pendampingan dan penguatan SDM
5. Penanganan pasca panen
6. Serta pengendalian harga

Menurut Kementerian Koordinator bidang Perekonomian prinsip-prinsip untuk meningkatkan kesejahteraan petani melindungi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

melalui penetapan pengaturan tata ruang, terutama pengendalian alih fungsi lahan sawah berkelanjutan, penyediaan benih unggul yang berkualitas, penyediaan pupuk bersubsidi lebih ditingkatkan, meminimalkan impor hasil pertanian, dan harga hasil pertanian lebih ditingkatkan.

Masyarakat Kabupaten Kediri mayoritas masih bekerja di sektor agrikultur. Sekitar 17% masyarakat Kabupaten Kediri bekerja dengan waktu penuh di sektor tersebut, ditambah dengan masyarakat lain yang bekerja paruh waktu.. Migrasi profesi dari sektor pertanian akhir-akhir ini meningkat. Selain itu, tidak banyak anak muda di usia produktif yang bekerja di sektor pertanian.

Salah satu faktor kunci dalam peningkatan kesejahteraan petani adalah inovasi teknologi di bidang pertanian. Mulai dari penggunaan bibit unggul, penggunaan alat mesin pertanian, dan pemupukan. Bibit unggul merupakan bibit yang memiliki mutu terjamin sehingga dapat menjamin keberhasilan usaha tani. Alat dan mesin pertanian dapat meningkatkan kualitas dan efisiensi dalam mengolah lahan pertanian. Pemupukan dilakukan untuk memberikan nutrisi pada tanaman guna meningkatkan produksi.

Melihat hal diatas serta menurunnya tren dalam pembangunan sektor pertanian secara langsung disebabkan oleh banyak hal. Terutama hal-hal yang menyangkut kebutuhan petani secara umum. Tingkat perekonomian dan kesejahteraan petani di Kabupaten Kediri menjadi perhatian utama bagi Pemerintah Kabupaten Kediri.

Inovasi di bidang pertanian yang menjadi program unggulan Pemerintah Kabupaten Kediri adalah DITO (Desa Inovasi Tani Organik). Bupati Kediri, Mas Dhito menyampaikan, pertanian organik memiliki nilai ekonomi jauh menguntungkan dibandingkan pertanian konvensional. Sebab, dengan tani organik biaya produksi dapat ditekan karena petani tidak lagi bergantung dengan pupuk kimia. Selain itu pula harga jual produksi tani organik lebih tinggi daripada harga jual produksi tani konvensional.

Pemerintah Kabupaten Kediri dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani melihat kesejahteraan petani adalah hal yang wajib untuk diperhatikan. Indikator Nilai Tukar Petani (NTP) digunakan sebagai indikator kesejahteraan, dimana perhitungan NTP dihitung dengan indeks yang diterima petani dibandingkan dengan indeks yang dikeluarkan oleh petani.

Sebagai salah satu sektor penting, pertanian memiliki hubungan langsung dengan kehidupan manusia karena menyediakan kebutuhan dasar bagi manusia. Pertanian dalam arti luas tidak hanya mencakup kegiatan tanaman pangan, seperti padi dan jagung, tetapi juga mencakup hortikultura dan perkebunan. Kegiatan pertanian merupakan kegiatan

pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri dan sumber energi. Penyelenggaraan urusan pertanian bertujuan untuk meningkatkan produktivitas sektor pertanian yang mencakup indikator kontribusi sub sektor pertanian, hortikultura dan Perkebunan terhadap PDRB serta tingkat pembangunan kawasan pertanian, hortikultura dan perkebunan di Kabupaten Kediri. Penyelenggaraan urusan pertanian juga memuat indikator tentang Nilai Tukar Petani (NTP) yang merupakan salah satu ukuran kesejahteraan petani.

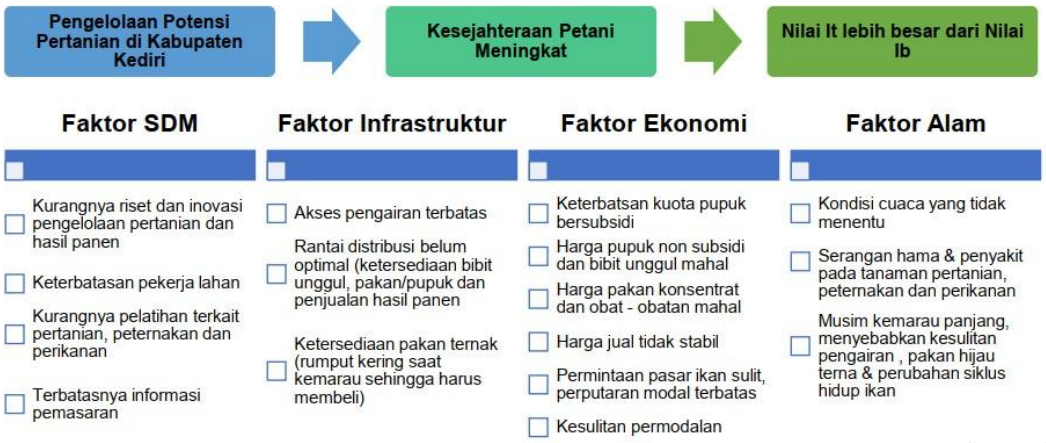
Permasalahan

Merujuk data dari Dinas Pertanian dan Perkebunan disebutkan permasalahan-permasalahan sebagai berikut;

1. Terjadinya anomali iklim, memberi pengaruh negatif yaitu tidak adanya kepastian ketersediaan air dan munculnya berbagai macam OPT (Organisme Pengganggu Tanaman) dan positif bagi tanaman yaitu musim kering yang cukup panjang membuat rasio bunga menjadi buah lebih tinggi untuk beberapa tanaman buah – buahan.
2. Meningkatnya serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT).
3. Perubahan pemanfaatan lahan ke sub sektor lainnya (pemukiman dan lain – lain)
4. Tingkat Kesuburan Lahan yang menurun akibat pemakaian pupuk kimia yang terus menerus dan berlebihan.
5. Pengaruh harga komoditas di pasaran
6. Terjadinya bencana alam (Kekeringan / Banjir)
7. Kurang tersedianya Sarana Dan Prasarana Pertanian
8. Semakin terbatasnya ketersediaan pupuk bersubsidi akibat kebijakan pemerintah pusat yang mengurangi subsidi pupuk. (diisi permasalahan sasaran yang diampu) (dapat mengacu pada Renstra/RPJMD anda)

Sedang merujuk pada Laporan Penyusunan Nilai Tukar Petani (NTP) disebutkan beberapa permasalahan sebagai berikut:

Gambar 22 Peraga Penjelasan Permasalahan Hasil Analisa dari Tim Penyusun NTP Kabupaten Kediri



Sumber: Laporan Akhir Penilaian Nilai Tukar Petani Kabupaten Kediri 2024 (Bappeda Kabupaten Kediri dan Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Universitas Brawijaya)

Perencanaan

Pada tahun 2024 ini, target Nilai Tukar Petani (NTP) dalam RPJMD adalah 104. Target sesuai pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2024 dan Perjanjian Kinerja Perubahan Bupati Kediri tahun 2024.

Upaya-upaya Pencapaian Kinerja

Upaya-upaya yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan, serta Dinas Perikanan bersama dengan dinas-dinas lain adalah sebagai berikut;

1. Peningkatan SDM petugas dengan pengiriman pelatihan ke Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan dan bekerjasama dengan Perhiptani;
2. Pemberian bantuan pestisida kepada kelompok tani melalui petugas Dipertabun dan pelaksanaan Gerdal OPT tanaman secara terpadu dan serempak
3. Membangun/ merehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier (RJIT), Irigasi Air Tanah Dangkal (ITD) dengan sumur submersible untuk mencukupi kebutuhan air disaat musim kemarau.
4. Kegiatan memanfaatkan pekarangan (P2L/ Pertanian Pangan Lestari) dan Gemar Tabur (Gerakan Menanam Tanaman sayur dan Buah di Pekarangan)

5. Pelatihan, pendampingan dan sosialisasi pembuatan dan pemanfaatan pupuk organik
6. Fasilitasi pemasaran, pelatihan GHP dan antisipasi dampak perubahan iklim
7. Pemberian bantuan pompa air dengan sumber dana dari pemerintah pusat dan membangun ITD di beberapa titik lokasi
8. Pembangunan infrastruktur pertanian (irigasi dan jalan usaha tani/ JUT)
9. Pelatihan, pendampingan dan sosialisasi pembuatan dan pemanfaatan pupuk organik

Upaya-upaya yang dilaksanakan oleh Dinas Perikanan adalah sebagai berikut:

1. Adanya kegiatan pembinaan untuk kelompok pembudidaya ikan dengan mengadakan sosialisasi CPIB (cara pembenihan ikan yang baik), CBIB (cara budidaya ikan yang baik) dan CPPIB (cara pembuatan pakan ikan yang baik) serta pendampingan pengajuan sertifikat CPIB, CBIB dan CPPIB.
2. Adanya kegiatan pemberian bantuan/hibah kepada masyarakat (kelompok pembudidaya ikan/pokdakan) berupa benih, induk, pakan dan saprodi (peralatan budidaya ikan)
3. Adanya pemantauan kesehatan ikan dan lingkungan melalui pemantauan kualitas air, pemantauan obat-obatan dan pemantauan kualitas pakan serta layanan cepat SIMOLI CEKAT (Inovasi Mobil Keliling Cek Kualitas Air Budidaya Air Tawar)
4. Adanya penguatan kelembagaan melalui kegiatan workshop kelembagaan perikanan
5. Adanya kegiatan bimbingan teknis tentang teknologi budidaya dan pembenihan ikan

Hasil Kinerja

Pada tahun 2024, realisasi Nilai Tukar Petani yang merujuk dari Laporan Penyusunan Nilai Tukar Petani Tahun 2024, dengan teknis perhitungan sebagai berikut;

Pencapaian Kinerja Tahun 2024

Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
Meningkatnya Kesejahteraan Petani	Nilai Tukar Petani (NTP)	104.44	104.69	100.24%	Sangat Baik

Keandalan Data Kinerja

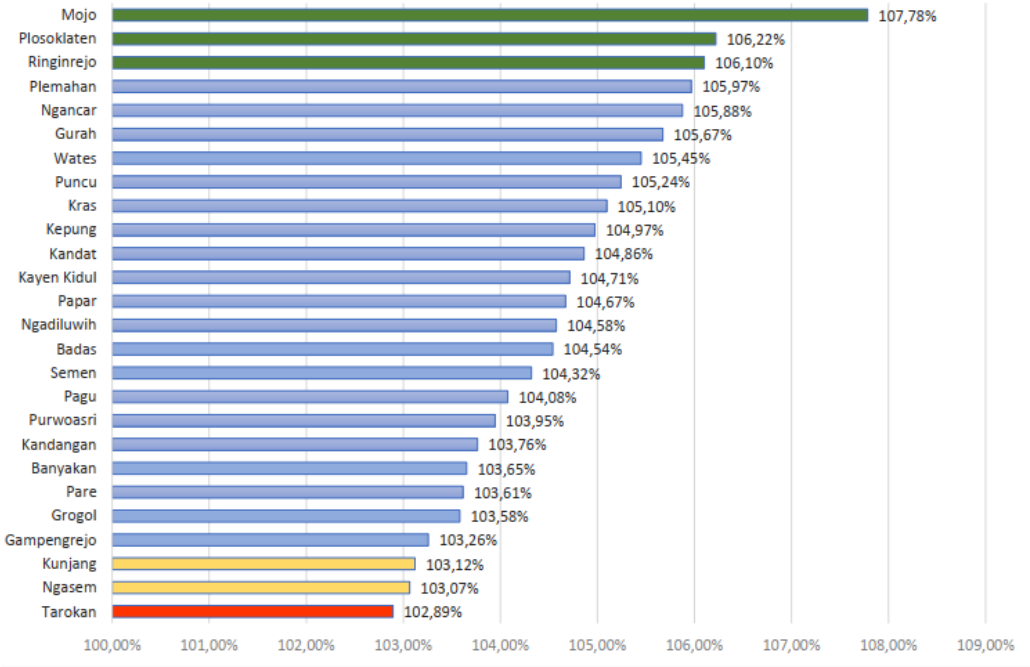
Formula	Perhitungan	Hasil Perhitungan	Dasar Perhitungan
	Metodologi Pengukuran dilaksanakan dengan metode survei *purposive sampling* terhadap 852 Petani dan Pedagang /Penyedia Jasa di beberapa sampel pasar di Kabupaten Kediri;	104.69	Laporan Akhir Penyusunan Nilai Tukar Petani Kabupaten Kediri Tahun 2024 - Bappeda Kabupaten Kediri dan Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Universitas Brawijaya

Tabel 24 Pengukuran Hasil Nilai Tukar Petani Kabupaten Kediri Tahun 2024

No	Subsektor	Nilai Tukar Petani
	Semua Subsektor Kab. Kediri	
1	**Nilai Tukar Petani**	**104,69**
	Indeks Harga yang diterima Petani (It)	123,23
	Indeks Harga yang dibayar Petani (Ib)	117,70
	Indeks Konsumsi Rumah Tangga	119,89
	Indeks Biaya Produksi dan Penambahan Barang Modal (BPPBM)	114,66

Sumber: Laporan Akhir Penyusunan Nilai Tukar Petani Kabupaten Kediri 2024 (Bappeda Kabupaten Kediri dan Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Universitas Brawijaya)

Gambar 23 Peraga Grafik Pesebaran Nilai Tukar Petani per-Kecamatan di Kabupaten Kediri



Sumber: Laporan Akhir Penyusunan Nilai Tukar Petani Kabupaten Kediri 2024 (Bappeda Kabupaten Kediri dan Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Universitas Brawijaya)

Perbandingan dengan Target Akhir RPJMD

Sasaran	Indikator	Target Akhir RPJMD	Realisasi	Capaian	Keterangan
Meningkatnya Kesejahteraan Petani	Nilai Tukar Petani	105	104.69	99.70%	Target Akhir RPJMD Belum Tercapai

Realisasi Anggaran

Sasaran	Indikator	Pagu	Realisasi	Capaian	Keterangan
Meningkatnya Kesejahteraan Petani	Nilai Tukar Petani (NTP)	66,375,730,892.00	64,616,329,418.00	97.35%	Zona Hijau

Analisa Efisiensi

Sasaran	Indikator	Capaian Kinerja	Capaian Anggaran	Analisa Efisiensi	Keterangan
Meningkatnya Kesejahteraan Petani	Nilai Tukar Petani (NTP)	100.62%	97.35%	3.27%	Efisien

Benchmarking

Kabupaten Kediri	Provinsi Jawa Timur	Nasional
104.65	111.96	116.79

Pihak-pihak yang Terkait

Merujuk pada data yang disampaikan oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan pihak-pihak yang terkait adalah sebagai berikut;

Pihak Instansi Vertikal

1. Kementerian Pertanian, menunjang pencapaian kinerja dengan memberikan dana DAK Fisik untuk infrastruktur pertanian (RJIT,JUT dan ITD) serta DAN Non Fisik untuk operasional BPP dan peningkatan SDM petani dan petugas.
2. Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Ketindan Malang, menunjang pencapaian kinerja dalam meningkatkan SDM petani dan petugas.
3. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, menunjang pencapaian kinerja dalam meningkatkan SDM petani dan petugas,

Stakeholder, Pihak Swasta dan Masyarakat

1. Perusahaan Pupuk Indonesia, menunjang pencapaian kinerja dalam menyediakan pupuk bersubsidi kepada petani untuk budidaya tanaman, baik pangan, hortikultura dan perkebunan.
2. Distributor pupuk dan kios, menunjang pencapaian kinerja dalam menyalurkan pupuk bersubsidi kepada petani
3. Kelompok tani, menunjang pencapaian kinerja dalam melaksanakan program – program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan.

Merujuk penjelasan dari Dinas Perikanan, pihak yang terlibat adalah Bappeda, Dinas Perikanan, Dinas Pertanian dan Perkebunan, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan, BPS, APCK, KKC, KBC, Pokdakan, dan masyarakat pembudidaya ikan secara umum

Program Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Kinerja

Program	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Kelompok tani yang dilakukan monitoring dan evaluasi dalam pemanfaatan sarana pertanian	100%	100%	100%	Sangat Mendukung
	Persentase pemanfaatan benih/bibit unggul pertanian	82.21%	82.21%	100%	Sangat Mendukung
	Jumlah desa yang melaksanakan inovasi tani organik	60	60	100.00%	Sangat Mendukung
Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase jaringan Irigasi tingkat usaha tani dalam kondisi baik	74%	74%	100%	Sangat Mendukung
Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Cakupan pencegahan dan penanggulagngan bencana pertanian (Serangan OPT)	100%	98%	98%	Sangat Mendukung
Program Penyuluhan Pertanian	Cakupan Bina Kelompok Tani	100%	100%	100%	Sangat Mendukung
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pembesaran (ton)	24565	24687	100.50%	Sangat Mendukung
	Ikan Hias (ribu ekor)	387636	388412	100.20%	Sangat Mendukung
	Benih (juta ekor)	21437	21544	100.50%	Sangat Mendukung
Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Cakupan usaha perikanan tangkap yang diawasi	100%	100%	100.00%	Sangat Mendukung
Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah Konsumsi Asal Ikan (kg/kapita/tahun)	47	47	100.00%	Sangat Mendukung

Faktor-faktor Pendukung

Merujuk data yang disampaikan oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan sebagai berikut:

1. Koordinasi, monitoring dan evaluasi dari pimpinan yang berjalan dengan baik;
2. Didukung oleh 197 ASN (PNS dan PPPK);
3. Adanya kebijakan dari Bupati menambah tunjangan TPP bagi ASN sehingga ASN lebih bersemangat dalam bekerja;
4. Mendukung program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan.

Merujuk data yang disampaikan oleh Dinas Perikanan adalah Kualitas Sumberdaya air yang memang cocok untuk usaha perikanan utamanya pembenihan di wilayah kecamatan Pare dan sekitarnya.

Faktor-faktor Penghambat

Merujuk data yang disampaikan oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan sebagai berikut:

1. Fasilitas penunjang pekerjaan kantor maupun dilapangan yang terbatas;
2. Masih ada pegawai yang kurang memahami tugas dan prosedur kerja;
3. Adanya kebijakan dari Bupati menambah tunjangan TPP bagi ASN sehingga ASN lebih bersemangat dalam bekerja;
4. Mendukung program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan.

Merujuk data yang disampaikan oleh Dinas Perikanan adalah sebagai berikut:

1. Keterbatasan induk ikan yang berkualitas (lele, nila, gurami, patin, dan ikan hias)
2. Belum optimalnya penanganan penyakit ikan
3. Masih terbatasnya kemampuan SDM pelaku usaha perikanan terkait manajemen usaha sehingga hasil produksi belum optimal
4. Pengetahuan penanganan panen yang baik belum dipahami secara luas oleh pembudidaya dan pemasar perikanan sehingga kualitas ikan yang diproduksi belum optimal

5. Belum optimalnya promosi produk perikanan baik offline maupun online sehingga jangkauan pemasaran terbatas yang berdampak pada pendapatan rumah tangga perikanan (RTP) yang belum optimal
6. Belum optimalnya kelembagaan pokdakan maupun poklahsar dalam melakukan kerjasama antar kelompok dan diluar kelompok dalam hal penyediaan pakan, penjualan produksi maupun permodalan
7. Keterbatasan pengetahuan terkait keamanan pangan bagi pengolah perikanan
8. Terbatasnya pengetahuan para pengolah produk perikanan terkait packaging yang benar dan menarik
9. Belum banyak pengolah perikanan yang memiliki sertifikasi keamanan pangan
10. Rendahnya tingkat konsumsi ikan
11. Terbatasnya diversifikasi olahan perikanan

Rencana Tindak Lanjut

Merujuk data yang disampaikan oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan sebagai berikut:

1. memfasilitasi kebutuhan penunjang pekerjaan kantor maupun di lapangan secara bertahap;
2. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pegawai secara periodik agar kinerja lebih optimal dan menyelenggarakan pendidikan dan latihan (Diklat) untuk meningkatkan SDM pertanian;
3. Mengusulkan kepada pemerintah Kab. Kediri agar kebutuhan anggaran untuk program dan kegiatan bidang pertanian lebih diprioritaskan;
4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Dipertabun yang telah dilaksanakan di masyarakat secara periodik;

Merujuk penyampaian Dinas Perikanan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan upaya perbanyakan induk ikan yang berkualitas (lele sangkuriang dan nila sultana)
2. Meningkatkan kemampuan pembudidaya melalui pelatihan dan bimbingan teknis
3. Terus menggalakkan upaya promosi produk perikanan baik offline maupun online
4. Membentuk asosiasi untuk mempermudah kerjasama antar kelompok dan diluar kelompok dalam hal penyediaan pakan, penjualan produksi maupun permodalan
5. Melaksanakan bimtek mutu dan keamanan pangan bagi kelompok pengolah dan pemasar perikanan (poklahsar)

6. Mengusulkan kepada DKP Jawa Timur agar mendapat fasilitasi sertifikasi keamanan pangan
7. Menggalakkan Makin Kece Sekali (Makan Ikan Kediri Cerdas Stunting Tak Ada Lagi)
8. Melaksanakan kegiatan Cooking Class olahan perikanan
9. Lebih menggalakkan kegiatan yang berwawasan agribisnis dengan penguatan kelembagaan pembudidaya ikan sekaligus juga dapat meningkatkan kesadaran pembudidaya ikan untuk meningkatkan efisiensi usaha perikanan
10. Memfasilitasi kelompok dengan Perbankan (BPD, BRI, Bank Daerah) untuk memperoleh modal dan penguatan modal kelompok
11. Kegiatan yang dilakukan tidak berhenti dalam satu tahun namun berkesinambungan dari tahun ke tahun sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan.

Tujuan 7

Menurunkan Kesenjangan Pembangunan Antar Wilayah

Pada Tahun 2024, Merujuk Laporan Akhir Penyusunan Indeks Kepuasan Layanan Infrastrutkur, Realisasi Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Kabupaten Kediri yakni 69.84 meningkat dari 66.82 pada tahun 2023. Kontribusi nilai terbesar ada pada sektor Air Bersih dengan Nilai sebesar 92.17 dan kontribusi nilai terendah ada pada sektor Persampahan dengan Nilai 41.91.

Merujuk Kamus Besar Bahasa Indonesia melalui Wikipedia Infrastruktur atau prasarana adalah seluruh struktur dan juga fasilitas dasar, baik itu fisik maupun sosial seperti bangunan, pasokan listrik, irigasi, jalan, jembatan dan lain sebagainya yang dibutuhkan untuk operasional aktivitas masyarakat maupun perusahaan. Infrastruktur fisik dan sosial dapat didefinisikan sebagai kebutuhan dasar fisik pengorganisasian sistem struktur yang diperlukan untuk jaminan ekonomi sektor publik dan sektor privat sebagai layanan dan fasilitas yang diperlukan agar perekonomian dapat berfungsi dengan baik Istilah ini umumnya merujuk kepada hal infrastruktur teknis atau fisik yang mendukung jaringan struktur seperti fasilitas antara lain dapat berupa jalan, kereta api, air bersih, bandara, kanal, waduk, tanggul, pengolahan limbah, perlistrikan, telekomunikasi, pelabuhan secara fungsional, infrastruktur selain fasilitasi akan tetapi dapat pula mendukung kelancaran aktivitas ekonomi masyarakat, distribusi aliran produksi barang dan jasa sebagai contoh bahwa jalan dapat melancarkan transportasi pengiriman bahan baku sampai ke pabrik kemudian untuk distribusi ke pasar hingga sampai kepada masyarakat.

Merujuk Kementerian Keuangan, Pembangunan infrastruktur merupakan jantung pertumbuhan ekonomi nasional. infrastruktur menjadi salah satu aspek penting dan vital untuk mempercepat pembangunan ekonomi. Lebih dari itu, infrastruktur juga merupakan salah satu faktor penentu dalam pemerataan pembangunan dan kesejahteraan. Bagi Indonesia, infrastruktur bisa menjadi alat pemersatu bangsa. Banyak studi dan diskusi yang menyimpulkan demikian. Mantan Presiden Bank Dunia Robert B Zoellick mengatakan, infrastruktur yang minim merupakan salah satu dari tiga penyebab mengapa Negara berpendapatan menengah terperangkap dan tidak mampu beranjak menjadi negara maju. Oleh karena itu, merupakan satu keharusan bagi pemerintah di Negara berkembang untuk menetapkan alokasi anggaran yang cukup besar untuk membangun infrastruktur. Tanpa komitmen yang kuat, Negara berkembang mungkin akan terjebak pada kondisi pertumbuhan yang stagnan.

Perkembangan pembangunan yang pesat menjadikan tingginya perubahan lingkungan, kebutuhan dan kepuasan masyarakat. Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab pada peningkatan kualitas hidup masyarakat terkait pada aksesibilitas layanan infrastruktur daerah. Dalam hal ini diperlukan kegiatan Pengukuran Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) Kabupaten Kediri untuk mengevaluasi target dan capaian pelayanan infastruktur di daerah.

IKLI merupakan ukuran yang digunakan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat atas pembangunan infrastruktur oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang dalam hal ini adalah Pemerintah Kabupaten Kediri. IKLI menjadi alat yang menghasilkan gambaran mengetahui perspektif masyarakat secara obyektif, komprehensif dan kredibel, baik dalam aspek pembangunan fisik maupun aspek manfaat. Berdasarkan pendekatan teori sistem, batasan kriteria efektif dalam pengukuran pembangunan tiap jenis infrastruktur yakni: ketersediaan fisik (availability), kualitas fisik (quality), kesesuaian (appropriateness), pemanfaatan (utility) dan penyerapan tenaga kerja (job creation), dan kontribusi terhadap perekonomian.

Permasalahan

Merujuk penjelasan dari Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda), disebutkan beberapa permasalahan dalam pembangunan guna menurunnya kesenjangan antar wilayah sebagai berikut;

1. Permasalahan Infrastruktur Bidang Jalan dan Jembatan
    a. Belum terpenuhinya infrastruktur jalan yang dilengkapi jalur sepeda dan pejalan kaki.

   b. Belum adanya ketaatan pengguna jalan dengan mentaati batas tonase jalan
2. Permasalahan Infrastruktur Bidang Air Bersih
   a. Akses Air Bersih yang Belum Merata
   b. Keterbatasan Infrastruktur Distribusi
   c. Kualitas Air yang Tidak Konsisten
3. Permasalahan Infrastruktur Bidang Irigasi
   a. Kondisi Jaringan Irigasi yang Kurang Optimal: Sebagian jaringan irigasi mengalami kerusakan atau sedimentasi, mengakibatkan distribusi air ke lahan pertanian tidak merata dan efisien.
   b. Kurangnya Pemeliharaan dan Rehabilitasi: Minimnya upaya pemeliharaan rutin dan rehabilitasi jaringan irigasi menyebabkan penurunan fungsi dan efisiensi sistem irigasi.
   c. Keterbatasan Sumber Daya Air: Pada musim kemarau, ketersediaan air untuk irigasi menurun drastis, mempengaruhi produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani.
4. Permasalahan Infrastruktur Bidang Kawasan perumahan dan kawasan permukiman
   a. Keterbatasan Penyediaan Rumah Layak Huni: Masih terdapat masyarakat yang tinggal di hunian tidak layak, baik dari segi konstruksi maupun fasilitas dasar.
   b. Permukiman Kumuh: Beberapa area permukiman berkembang menjadi kawasan kumuh akibat kepadatan penduduk, kurangnya sanitasi, dan minimnya fasilitas umum.
   c. Pengelolaan Tata Ruang yang Kurang Optimal: Perencanaan dan pengelolaan tata ruang permukiman belum sepenuhnya mempertimbangkan aspek keberlanjutan dan mitigasi bencana.
5. Permasalahan Infrastruktur Bidang Ruang Terbuka Hijau
   a. Terjadi konversi besar-besaran RTH ke fungsi lain dalam 5 tahun terakhir.
   b. Berkurangnya luas RTH mengancam keseimbangan ekologis dan keanekaragaman hayati.
   c. Kurangnya pengawasan dan regulasi yang ketat dalam menjaga fungsi RTH.
   d. Tekanan pembangunan dan kebutuhan lahan permukiman mempercepat alih fungsi.
6. Permasalahan Infrastruktur Bidang Persampahan
   a. Sistem Pengelolaan Sampah yang Belum Terintegrasi: Pengumpulan, pengangkutan, dan pengolahan sampah belum berjalan secara efektif dan efisien.

b. Keterbatasan Fasilitas Pengolahan Sampah: Jumlah dan kapasitas Tempat Pembuangan Akhir (TPA) serta fasilitas daur ulang masih belum mencukupi kebutuhan.
c. Kesadaran Masyarakat yang Rendah: Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah, seperti pemilahan dan pengurangan sampah, masih perlu ditingkatkan.

7. Permasalahan Infrastruktur Bidang Perhubungan
   a. Transportasi Umum yang Terbatas: Layanan transportasi umum belum menjangkau seluruh wilayah dan frekuensinya masih rendah, menyulitkan mobilitas masyarakat.
   b. Kemacetan Lalu Lintas: Pada titik-titik tertentu, terutama di area perkotaan, terjadi kemacetan akibat volume kendaraan yang tinggi dan manajemen lalu lintas yang kurang optimal.

Perencanaan

Nilai Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur dapat digunakan sebagai evaluasi dari kinerja unit layanan infrastruktur. Target dan capaian kinerja termuat di dalam visi dan misi RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2021-2026 dari hasil penelitian yang dilakukan sebagai berikut :

No	Tahun	Target (%)	Capaian (%)
1	2021	66.45	66.65
2	2022	66.90	66.82
3	2023	67.50	66.82
4	2024	68.10	69,84
5	2025	68.70	
6	2026	69.30	

Uraian di atas menjadi landasan kuat pentingnya upaya untuk mengukur kepuasan layanan infrastruktur agar mampu mengoptimalkan pelayanan publik dan mengetahui umpan balik dari masyarakat dalam rangka mengevaluasi dan mengembangkan layanan infrastruktur ke depan yang lebih berkualitas dan merata. Target utamanya adalah menyusun evaluasi secara berkala dan berkesinambungan agar pemerintah daerah dapat melaksanakan tugas dan perannya secara optimal. Atas dasar itulah, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui secara obyektif persepsi masyarakat terhadap kinerja penyediaan layanan infrastruktur, meliputi beberapa atribut yang langsung dirasakan oleh masyarakat untuk mengetahui tingkat kepuasan atas penyediaan layanan infrastruktur di Kabupaten Kediri.

Upaya-upaya Pencapaian Kinerja

1. Mengidentfikasi dan menggambarkan kondisi riil terkait layanan infrastruktur di Kabupaten Kediri meliputi jalan dan jembatan, transportasi, infrastruktur air bersih dan irigasi, infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman, infrastruktur ruang public (RTH) , infrastruktur Pendidikan, infrastruktur Kesehatan, infrastruktur sanitasi dan persampahan;
2. Mengukur angka/capaian indeks kepuasan layanan infrastruktur tahun 2025;
3. Menganalisis antara hasil capaian yang diperoleh pada tahun 2024 dengan target/sasaran yang telah ditetapkan di dokumen perubahan RPMJD Kabupaten Kediri 2021-2026;
4. Mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan-permasalahan infrastruktur Kabupaten Kediri menurut indikator ketersediaan fisik (availability), kualitas fisik (quality), kesesuaian (appropriateness), pemanfaatan (utility). penyerapan tenaga kerja (job creation), dan kontribusi terhadap perekonomian yang terjadi pada pengukuran capaian Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Kabupaten Kediri;
5. Mengidentifikasi dan menganalisis prioritas atribut-atribut pelayanan infrastruktur untuk meningkatkan nilai Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Kabupaten Kediri;
6. Memberikan rekomendasi kebijakan dan langkah-langkah apa yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kediri berdasarkan hasil penelitian.

Pencapaian Kinerja Tahun 2024

Tujuan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	eterangan
Menurunkan Kesenjangan antar Wilayah	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	68.1	69.84	102.56%	Sangat Baik

Keandalan Data Kinerja

Formula	Perhitungan	Hasil Perhitungan	Dasar Perhitungan
Metode Survei dengan Skala Likert dengan menghitung Indeks Kepuasan Pengguna (IKP) $\boldsymbol{Bobot\ nilai\ rata - rata\ tertimbang} = \frac{jumlah\ bobot}{jumlah\ unsur\ X} = 1 = N$ Keterangan: N= bobot nilai per unsur Untuk memperoleh nilai Indeks Kepuasan Pengguna (IKP) unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata	Sebagaimana terlampir dibawah	69.84	Laporan Akhir Perhitungan Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI)

tertimbang dengan rumus sebagai berikut. $IKP = total\ dari\ nilai\ persepsi\ per\ unsur\ x\ nilai\ penimbang$ $total\ unsur\ yang\ terisi$			

Tabel 25 Pengukuran Hasil

Jalan dan Jembatan	88,08
Air Bersih	92,17
Irigasi	59,51
Perumahan dan Permukiman	82,5
RTH	44,36
Persampahan	41,91
Perhubungan	80,31
Rata-rata	**69,84**

Sumber: Laporan Akhir Penyusunan IKLI Kabupaten Kediri

Perbandingan dengan Target Akhir RPJMD

Tujuan	Indikator	Target Akhir RPJMD	Realisasi	Capaian	Keterangan
Menurunkan Kesenjangan antar Wilayah	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	69.3	69.84	100.78%	Target Akhir RPJMD telah terlampaui

Analisa Keterlibatan Pihak Lain

Direktorat Kerjasama dan Pengelolaan Usaha (DKPU) Institut Teknologi Sepuluh November Kampus Sukolilo Surabaya selaku Penyusunan Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) Kabupaten Kediri, perangkat daerah terkait yang diantaranya adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas Pertanian dan Perkebunan, Pemerintah Desa dan Masyarakat Kabupaten Kediri sebagai responden.

Faktor-faktor Penunjang

Merujuk data dari Bappeda disebutkan sebagai berikut:

1. Faktor Internal
    a. Kompetensi dan Profesionalisme SDM
        i. Ketersediaan tenaga kerja yang memiliki keahlian teknis dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi infrastruktur.

ii. Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan dan sertifikasi guna meningkatkan efektivitas layanan.

b. Kebijakan dan Regulasi yang Jelas
   i. Adanya regulasi yang mendukung penyelenggaraan layanan infrastruktur secara transparan dan berkelanjutan.
   ii. Prosedur kerja yang jelas dan efisien dalam pengelolaan layanan publik.

c. Dukungan Anggaran dan Pengelolaan Keuangan yang Efektif
   i. Pengalokasian anggaran yang memadai dan tepat sasaran untuk pembangunan infrastruktur.
   ii. Pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel dalam setiap program pembangunan.

d. Penggunaan Teknologi dan Inovasi
   i. Pemanfaatan sistem digital dalam pelayanan infrastruktur seperti e-KIR, monitoring kondisi jalan, dan pemetaan kebutuhan infrastruktur.
   ii. Inovasi dalam metode pembangunan untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas hasil pembangunan.

2. Faktor Eksternal

a. Kolaborasi dengan Perangkat Daerah dan Stakeholder
   i. Sinergitas dengan pemerintah daerah, swasta, akademisi, dan masyarakat dalam perencanaan serta pelaksanaan proyek infrastruktur.
   ii. Kemitraan dengan investor dalam penyediaan infrastruktur strategis melalui skema KPBU (Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha).

b. Partisipasi dan Kepuasan Masyarakat
   i. Adanya mekanisme umpan balik dan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan serta pengawasan pembangunan infrastruktur.
   ii. Kepuasan masyarakat yang meningkat seiring dengan pelayanan infrastruktur yang lebih baik.

c. Dukungan Regulasi dari Pemerintah Pusat
   i. Kebijakan nasional yang sejalan dengan pembangunan daerah, seperti program Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk infrastruktur.
   ii. Peraturan yang memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan dan pemanfaatan anggaran untuk infrastruktur.

d. Kondisi Geografis dan Ketersediaan Sumber Daya Alam
   i. Wilayah yang mendukung pengembangan infrastruktur dengan ketersediaan bahan baku dan akses yang memadai.

ii. Pemanfaatan potensi lokal dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.

Faktor-faktor Penghambat

Merujuk data dari Bappeda disebutkan sebagai berikut:

1. Bidang Irigasi
    1. Kurang meratanya penyediaan irigasi di kawasan Timur Sungai Brantas, seperti Kecamatan Papar, Gurah, dan Ngadiluwih.
    2. Penyediaan diesel diperlukan pada saat musim kemarau di Kecamatan Kecamatan Papar, Ngadiluwih, Grogol, Mojo, dan Gurah
    3. Mayoritas penyediaan diesel irigasi disewakan sebesar Rp. 20.000 per jam
2. Ruang Terbuka Hijau (RTH)
    1. Saat ini sudah terdapat setara 2.484 Ha RTH (dengan menggunakan perhitungan IHBI) di Kabupaten Kediri dari total 5.537,80 Ha yang seharusnya tersedia (ketercapaian 44,87%).
    2. Nilai kepuasan RTH adalah 3,94 dari nilai maksimal 5 dan nilai harapan adalah 4,57.
    3. Hal-hal yang perlu ditingkatkan menurut pengguna RTH adalah penerangan (lampu taman), pengelolaan parkir (parkir masih terbatas), pengelolaan sampah (pemisahan sampah organik dan anorganik), dan penataan RTH yang memungkinkan area RTH menjadi salah satu aktivitas ekonomi masyarakat sekitar (contohnya ada area untuk berjualan)
3. Persampahan
    1. Tidak ada proses pemilahan di rumah tangga, sampah dipilah di TPS3R
    2. Sebagian masyarakat tidak menyalurkan sampah ke TPS, melainkan melakukan pembakaran atau menyetor sampah ke bank sampah atau menjual sampah jenis dus ke pengepulan
    3. Sampah rumah tangga di Kecamatan Grogol, Gurah, dan Wates tidak diangkut setiap hari, melainkan diangkut 2-3 kali seminggu, sehingga sebagian rumah tangga menyalurkan sampahnya langsung ke TPS/ TPS3R
4. Perumahan dan Permukiman
    1. Nilai kinerja bidang perumahan dan permukiman memiliki kategori baik sekali yakni mencapai 82,50. Sudah dilakukan penanganan luasan permukiman kumuh seluas 85,75 Ha dari total luasan kumuh 132,99 Ha, sehingga capaian

luasan permukiman yang tertangani yakni mencapai 64,48%. Masih terdapat 35,52% luasan permukiman kumuh yang perlu ditangani di Kabupaten Kediri

2. Nilai kepuasan bidang perhubungan adalah 3,96 dari nilai maksimal 5 dan nilai harapan adalah 4,84.
3. Hal yang perlu ditingkatkan menurut warga adalah distribusi bantuan RTLH seharusnya lebih merata dan tepat sasaran, sebab masih terdapat beberapa rumah tidak layak yang memerlukan bantuan RTLH namun belum mendapatkannya

5. Jalan dan Jembatan
    1. 88,09% panjang jalan Kabupaten Kediri sudah dalam kondisi baik atau mantap
    2. Nilai kepuasan bidang jalan dan jembatan adalah 4,12 dari nilai maksimal 5 dan nilai harapan adalah 4,66.
    3. Hal-hal yang perlu ditingkatkan menurut pengguna jalan dan jembatan adalah: (a) perlu adanya perbaikan permukaan jalan yang rusak dan berlubang karena dilalui kendaraan berat; dan beberapa ruas jalan dirasa masih memiliki lebar yang kurang terutama jika dilalui oleh dua arah kendaraan secara bersamaan.
6. Perhubungan
    1. Nilai kinerja bidang perhubungan memiliki kategori baik sekali yakni mencapai 80,31. Berikut indikator yang menyumbang ketercapaian kinerja bidang perhubungan: (a) Ketercapaian angkutan yang memenuhi standar keselamatan (Uji Kir) sudah mencapai 95,50%; (b) Ketersediaan rambu dan fasilitas pelengkap jalan baru mencapai 65,12%
    2. Nilai kepuasan bidang perhubungan adalah 4,79 dari nilai maksimal 5 dan nilai harapan adalah 5,00.
    3. Hal-hal yang perlu ditingkatkan menurut pengguna jalan dan jembatan adalah: (a) Perlu dilakukan penambahan rambu jalan, penertiban marka jalan dan perbaikan lampu lalu lintas yang rusak; (b) Perlu adanya penambahan lampu lalu lintas di jalur cepat; (c) Server uji kendaraan sering mengalami masalah dan hambatan

Rencana Tindak Lanjut

Merujuk data dari Bappeda disebutkan sebagai berikut:

1. Bidang Irigasi
    a. Memantapkan penyediaan infrastruktur konektivitas antar wilayah di Kabupaten Kediri guna menunjang produktivitas antar wilayah:
    b. Pembangunan dan pemeliharaan fasilitas serta sarana irigasi, pengairan, dan sarana produksi lainnya di wilayah-wilayah sentra produksi pertanian
2. Ruang Terbuka Hijau (RTH)
    a. Peningkatan tata kelola lingkungan hidup berbasis masyarakat
3. Persampahan
    a. Memantapkan penyediaan infrastruktur konektivitas antar wilayah di Kabupaten Kediri guna menunjang produktivitas antar wilayah;
    b. Penguatan sistem sanitasi lingkungan wilayah Kabupaten Kediri;
    c. Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman;
4. Perumahan dan Permukiman
    a. Meningkatkan penataan perumahan dan kawasan pemukiman yang sehat dan berkelanjutan:
    b. Pembangunan rumah layak huni
5. Jalan dan Jembatan
    a. Memantapkan penyediaan infrastruktur konektivitas antar wilayah di Kabupaten Kediri guna menunjang produktivitas antar wilayah:
    b. Pembangunan dan pemeliharaan jalan serta jembatan yang menghubungkan sentra produksi dan pemasaran
6. Perhubungan
    a. Memantapkan sistem transportasi antar wilayah guna peningkatan mobilitas orang dan barang antar wilayah:
    b. Peningkatan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan
    c. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung LLAJ
    d. Peningkatan pengujian berkala kendaraan bermotor

Sasaran Strategis 13

Meningkatnya Sarana Infrastruktur Daerah

Pada Tahun 2024, Realisasi Proporsi Panjang Jalan Kabupaten dalam kondisi Baik sebesar 87.00%, Persentase Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik 80.79%, Cakupan Penyelesaian Peraturan Tata ruang 100.00%, Cakupan desa/kelurahan yang mendapat air minum 86.06%, dan Persentase Rumah Layak Huni 53,55%.

Ekspektasi masyarakat akan infrastruktur yang berkualitas kini menjadi perhatian utama Pemerintah Kabupaten Kediri. Tidak dapat dipungkiri bahwa infrastruktur yang dapat diandalkan kini menjadi dambaan bagi masyarakat. Karena dalam proses perekonomian pula, infrastruktur menjadi hal dasar yang harus dipenuhi sebelum berlanjut pada tahap-tahap selanjutnya.

Upaya menurunkan kesenjangan antar wilayah dengan pemerataan di masing-masing kecamatan dengan proporsi yang telah diperhitungkan. Seperti kawasan-kawasan jalan dengan jeglongan sewu (ribuan lubang jalan) secara langsung berusaha diperbaiki. Selama ini, banyak jalanan di Kabupaten Kediri dalam kondisi buruk dikarenakan masih tingginya kesenjangan pembangunan. Infrastruktur atau prasarana adalah seluruh struktur dan juga fasilitas dasar, baik itu fisik maupun sosial seperti bangunan, pasokan listrik, irigasi, jalan, jembatan dan lain sebagainya. Infrastruktur fisik dan sosial dapat didefinisikan sebagai kebutuhan dasar fisik pengorganisasian sistem struktur yang diperlukan untuk jaminan ekonomi sektor publik dan sektor privat, sebagai layanan dan fasilitas yang diperlukan agar perekonomian dapat berjalan dengan optimal.

Istilah ini umumnya merujuk kepada hal infrastruktur teknis atau fisik yang mendukung jaringan struktur seperti fasilitas antara lain dapat berupa jalan, jembatan, irigasi dan infrastruktur lain yang menjadi tanggung-jawab Pemerintah Kabupaten/Kota. Peningkatan Infrastruktur ini juga mempengaruhi produksi, inflasi, dan investasi. Menurut Kementerian PUPR infrastruktur memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Oleh karena demikian pembangunan sektor ini menjadi fondasi dari pembangunan ekonomi selanjutnya. Sebagaimana dalam beberapa dekade terakhir ditengarai pembangunan ekonomi Indonesia tertinggal akibat lemahnya pembangunan infrastruktur.

Permasalahan

Merujuk data dari Dinas PUPR disebutkan permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

1. Masih ada beberapa kegiatan penanangan ruas jalan maupun jembatan yang seharusnya bukan merupakan kewenangan Kabupaten;
2. Masih ada penanganan ruas jalan tidak bersamaan dengan perbaikan saluran drainase/talud yang mengakibatkan umur rencana jalan tidak optimal
3. Usulan kegiatan yang berasal dari Musrenbang seringkali tidak memperhatikan kesinambungan.

Merujuk data dari Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman disebutkan sebagai berikut;

1. Updating data air minum yang belum optimal
2. Akses sumber air minum dengan pemukiman masyarakat yang jauh
3. Kualitas Air Minum yang belum seluruhnya baik
4. Digitalisasi data rumah yang belum optimal
5. Masih keluarga yang tidak mampu membangun rumah layak huni karena penghasilan rendah

Perencanaan

Pada tahun 2024 ini, target dibagi atas beberapa hal sebagai berikut;

1. Proporsi Panjang Jalan Kabupaten Kondisi Baik
2. Persentase Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik
3. Cakupan Penyelesaian Peraturan Tata Ruang
4. Cakupan Desa atau Kelurahan yang telah mendapatkan layanan air minum
5. Persentase Rumah Layak Huni

Upaya-upaya Pencapaian Kinerja

Upaya-upaya yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) adalah dengan melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan perencanaan dan penganggaran.

Merujuk data dari Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman adalah sebagai berikut;

1. Meningkatkan kolaborasi penanganan pemasalahan air minum dengan pemerintah desa maupun PDAM
2. Memanfaatkan sumber pendanaan lain selain APBD seperti DAK Air Minum dan Dana Insentif Fiskal
3. Memanfaatkan program BSPS dari pemerintah pusat
4. Peningkatan program pembangunan RTLH

Hasil Kinerja

Hasil kinerja pada tahun 2024 adalah sebagai berikut

Pencapaian Kinerja Tahun 2024

Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
Meningkatnya Sarana Infrastruktur Daerah	Proporsi Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik	80.50%	87.00%	108.07%	Sangat Baik
	Persentase Panjang Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik	70.50%	80.79%	114.60%	Sangat Baik
	Cakupan Penyelesaian Peraturan Tata Ruang	75%	100.00%	133.33%	Sangat Baik (Diatas Ekspektasi)
	Cakupan Desa atau Kelurahan yang telah mendapatkan layanan air minum	86%	86.08%	100.09%	Sangat Baik
	Persentase Rumah Layak Huni	49.67%	53.55%	107.81%	Sangat Baik

Keandalan Data Kinerja

Formula	Perhitungan	Hasil Perhitungan	Dasar Perhitungan
Panjang Jalan Kabupaten Kondisi Baik/Total Panjang Jalan Kabupatenx100%	1065.01 : 1224.2 x 100%	87,00	Data Survei Kondisi Jalan bidang PT
Panjang Jaringan Irigasi Kondisi Baik /Panjang Jaringan Irigasi Kabupaten x 100%	141.246,12 / 174.829 x 100%	80.79	Data dari Bidang OP
Jumlah Peraturan Tata Ruang yang diterbitkan / Jumlah Peraturan Rencana Tata Ruang yang diterbitkan	3/3 x 100%	100%	Data dari Bidang Penataan Ruang
Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah	481314/559128 x 100%	86.06%	Hasil Data diolah Dinas Perkim

Formula	Perhitungan	Hasil Perhitungan	Dasar Perhitungan
tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM kabupaten dibagi jumlah total proyeksi rumah tangga diseluruh kabupaten dikali 100%			
Jumlah kumulatif unit rumah yang ditangani dibagi jumlah total rencana unit rumah yang akan ditangani dikali 100%	8985/16779 x 100%	53.55%	Hasil Data diolah Dinas Perkim

Perbandingan dengan Target Akhir RPJMD

Sasaran	Indikator	Target Akhir RPJMD	Realisasi	Capaian	Keterangan
Meningkatnya Sarana Infrastruktur Daerah	Proporsi Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik	89.69%	87.00%	97.00%	Target Akhir RPJMD Belum Tercapai
	Persentase Panjang Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik	100.00%	80.79%	80.79%	Target Akhir RPJMD Belum Tercapai
	Cakupan Penyelesaian Peraturan Tata Ruang	71.42%	100.00%	140.02%	Target Akhir RPJMD telah terlampaui
	Cakupan Desa atau Kelurahan yang telah mendapatkan layanan air minum	93.15%	86.08%	92.41%	Target Akhir RPJMD Belum Tercapai
	Persentase Rumah Layak Huni	82.51%	53.55%	64.90%	Target Akhir RPJMD Belum Tercapai

Realisasi Anggaran

Sasaran	Indikator	Pagu	Realisasi	Capaian	Keterangan
Meningkatnya Sarana Infrastruktur Daerah	Proporsi Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik	97,901,983,165.00	94,277,649,241.00	96.30%	Zona Hijau
	Persentase Panjang Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik				
	Cakupan Penyelesaian Peraturan Tata Ruang				
	Cakupan Desa atau Kelurahan yang telah mendapatkan layanan air minum				
	Persentase Rumah Layak Huni				

Analisa Efisiensi

Sasaran	Indikator	Capaian Kinerja	Capaian Anggaran	Analisa Efisiensi	Keterangan
Meningkatnya Sarana Infrastruktur Daerah	Proporsi Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik	97.58%	96.30%	4.90%	Efisien
	Persentase Panjang Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik	93.93%			
	Cakupan Penyelesaian Peraturan Tata Ruang	100.00%			
	Cakupan Desa atau Kelurahan yang telah mendapatkan layanan air minum	100.10%			
	Persentase Rumah Layak Huni	114.74%			

Pembandingan/Benchmarking

Indikator	2022	2023	2024
Proporsi Panjang Jaringan Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik	87,99	79.08%	87.00%
Persentase Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik	74,68	69.18%	80.79%
Cakupan Penyelesaian Peraturan Tata Ruang	50	62.50%	100.00%
Cakupan desa/kelurahan yang mendapat air minum	85,23%	86%	86.08%
Persentase Rumah Layak Huni	29,95%	41.14%	53.55%

Dari data diatas didapati adanya peningkatan yang signifikan pada tahun 2023 dan tahun 2024. Peningkatan signifikan tersebut akan dijadikan bahan dalam melakukan perencanaan tahun berikutnya.

Pihak-pihak yang Terkait

Merujuk data dari DPUPR disebutkan sebagai berikut;

1. Bappeda
2. BPKAD
3. UKPBJ
4. Inspektorat
5. Penyedia Jasa

6. Pejabat Pengadaan

Merujuk data Dinas Perkim disebutkan sebagai berikut;

1. Kementerian PUPR
2. Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa Timur
3. Kelompok Masyarakat (Pokmas)
4. KPSPAM (Kelompok Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi) Desa

Program Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Kinerja

Analisa Program/Kegiatan yang Mendukung

Program	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
Program Penyelenggaraan Jalan	Panjang jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik	1,091.50	1,065.01	97.57%	Mendukung
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Panjang jaringan Irigasi Sekunder dalam Kondisi Baik	150,370.42	141,246.12	93.93%	Mendukung
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah Peraturan Tata Ruang yang diselesaikan	3	3	100.00%	Sangat Mendukung
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Rumah Tangga / KK mendapatkan akses air melalui SPAM	86%	86.06%	100.10%	Sangat Mendukung
Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase Pengelolaan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	72.22%	72.22%	100.00%	Sangat Mendukung
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Cakupan pelayanan SPALD yang aman	18.67	41.11	220.21%	Sangat Mendukung
Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase Bangunan Gedung yang Memiliki IMB	100%	100%	100%	Sangat Mendukung
Program Kawasan Permukiman	Persentase Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman yang memiliki izin	49.67%	53.55%	114.74%	Sangat Mendukung
Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan	100%	100%	100%	Sangat Mendukung
Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Prosentase Penyelesaian ganti kerugian tanah	100%	100%	100%	Sangat Mendukung
Program Redistribusi Tanah, Dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	Persentase Penyelesaian Redistribusi tanah yang telah ditetapkan	100%	100%	100%	Sangat Mendukung

Faktor-faktor Pendukung

Merujuk data dari PUPR adalah sebagai berikut;

1. Tersedianya anggaran yang cukup;
2. Koordinasi Lintas Sektor yang Lancar;
3. Cuaca yang Mendukung;
4. Tim Kerja yang Kompak dan Penyedia Jasa yang Rekomended.

Merujuk data Dinas Perkim adalah sebagai berikut;

1. Kebijakan dari Pemerintah Kabupaten Kediri yang memprioritaskan urusan pelayanan kebutuhan dasar bidang air minum, sanitasi dan perumahan
2. Harmonisasi yang baik antar stakeholder dalam penanganan permasalahan air minum, sanitasi dan rumah tidak layak huni

Faktor-faktor Penghambat

Merujuk data dari PUPR adalah sebagai berikut;

1. Banyaknya Usulan Rehab atau Pembangunan Infrastrutkur yang bukan kewenangan Kabupaten
2. Beberapa Infrastruktur terbangun tidak tepat rencana umur karena belum ada bangunan pelengkapnya seperti talud dan drainase

Merujuk Dinas Perkim adalah sebagai berikut;

1. Updating data air minum,sanitasi dan perumahan yang belum optimal
2. Belum memadainya Sistem Informasi yang akurat dan sistematis
3. Berkurangnya fungsi SPAM akibat kurangnya pemeliharaan oleh masyarakat

Rencana Tindak Lanjut

Merujuk data dari PUPR adalah sebagai berikut;

1. Usulan-usulan rehab/pembangunan diluar kewenangan Kabupaten dengan kondisi rusak berat/urgent untuk segera dibuatkan Nota Dinas kepada Bupati Kediri;
2. Meningkatkan Pengawasan dan Evaluasi Pembangunan dengan Kebutuhan Bangunan Pelengkapnya.

Merujuk data dari Dinas Perkim adalah sebagai berikut;

1. Meningkatkan kolaborasi dengan PDAM sebagai BUMD yang melaksanakan fungsi pelayanan air minum
2. Meningkatkan peran swadaya masyarakat untuk melaksanakan perbaikan rumah tidak layak huni di desa
3. Updating data dapat dilaksanakan lebih optimal

Penghargaan dan Apresiasi Kinerja

1. eringkat 4 dengan Predikat Baik atas Penilaian Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang dari Gubernur Jawa Timur

Sasaran Strategis 14

Meningkatnya Pelayanan Transportasi Daerah

Pada Tahun 2024, realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat pada Unit Layanan Perhubungan yakni 87.44 mengalami peningkatan dari 86.59 pada Tahun 2023.

Transportasi telah menjadi kebutuhan dasar masyarakat oleh karenanya kesinambungan ketersediaan pelayanan jasa transportasi dalam memenuhi kebutuhan aktivitas produksi, konsumsi dan distribusi harus mendapat perhatian secara berkelanjutan. Menurut Kementerian Perhubungan, transportasi pribadi maupun transportasi umum sudah menjadi kebutuhan utama bagi masyarakat. Perkembangan transportasi yang cepat ini seyogyanya beriringan dengan peningkatan pelayanan transportasi. Hal ini membuat masyarakat desa mengalami kesulitan dalam mengakses layanan-layanan transportasi.

Transportasi dewasa ini menjadi hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari, ekspektasi dan tuntutan masyarakat untuk menyelenggarakan pelayanan transportasi daerah semakin tinggi. Tuntutan terkait pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan transportasi daerah di Kabupaten Kediri semakin tinggi.

Upaya Pemerintah Kabupaten Kediri dalam meningkatkan sarana infrastruktur. Upaya ini baik secara langsung atau secara tidak langsung harus ditunjang dengan hal-hal yang ada disekitarnya. Pemerintah Kabupaten Kediri melihat peningkatan sarana infrastruktur daerah adalah hal yang wajib untuk diperhatikan.

Permasalahan

Merujuk data dari Dinas Perhubungan disebutkan permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

1. Keterbatasan SDM pada unit pelayanan.
2. Teknologi alat penguji pada pelayanan uji berkala sudah tidak sesuai dengan perkembangan teknologi saat ini
3. Kurang pahamnya Masyarakat dalam penggunaan aplikasi layanan PKB

Perencanaan

Pada tahun 2024 ini, target Target untuk Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap unit pelayanan perhubungan Dinas Perhubungan pada Tahun 2024 adalah 86,70 dan Target pada akhir Renstra/RPJMD di Tahun 2026 ada pada angka 86,92.

Upaya-upaya Pencapaian Kinerja

Merujuk dari Dinas Perhubungan, dalam Upaya pencapaian kinerja pelayanan Transportasi daerah didukung oleh anggaran pada Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor sebesar Rp. 855.134.124,- dengan realisasi anggaran sebesar 98,36 dan di dukung oleh aplikasi e sukma Jatim dari Pemprov Jatim yang mendukung ketercapaian hasil survey Kepuasan Masyarakat secara online dengan hasil 87,44 indeks

Hasil Kinerja

Hasil capaian kinerja IKM pada Tahun 2024 dalam kategori Tercapai, karena besaran capaian nya ada pada angka 100,85%

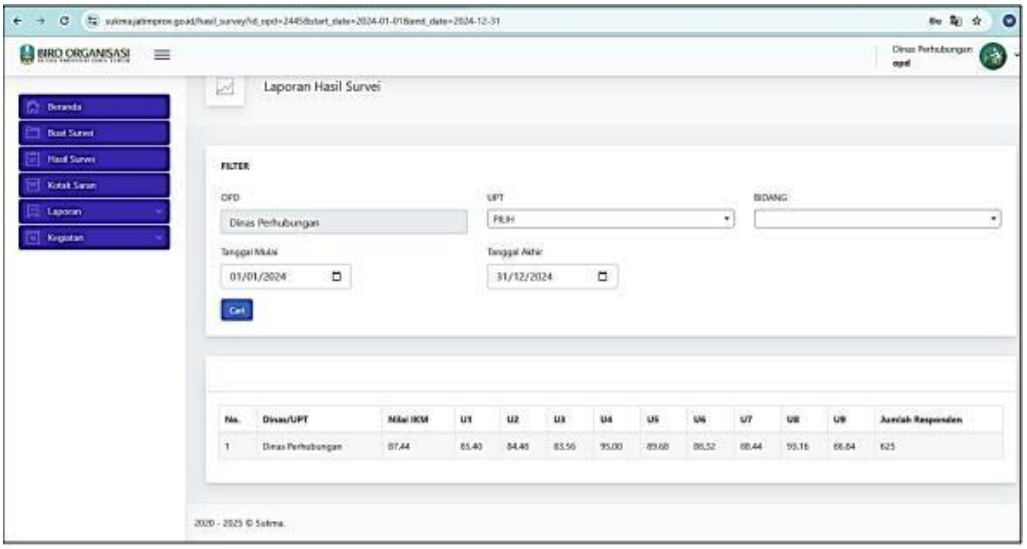
Pencapaian Kinerja Tahun 2024

Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
Meningkatnya Pelayanan Transportasi Daerah	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Unit Layanan Perhubungan	86.59	87.44	100.98%	Sangat Baik

Keandalan Data Kinerja

Formula	Perhitungan	Hasil Perhitungan	Dasar Perhitungan
Diukur dalam e-Sukma Jatim	Diukur dalam e-Sukma Jatim	87.44	Hasil Resmi e-Sukma Jatim

Gambar 23 Tangkapan Layar e-Sukma Jatim Nilai IKM Unit Layanan Perhubungan



2.3 Indeks Kepuasan Masyarakat

Hasil pengukuran IKM yang berhasil didapatkan oleh Dinas Perhubungan sebesar **87,44** yang sebelumnya pada tahun 2023 **86,59**. Merujuk pada kategori yang telah ditetapkan pada PERMENPANRB No 14 Tahun 2017, nilai tersebut masuk pada kategori "Baik" (B).

SKM UNIT PELAYANAN
87,44
MUTU PELAYANAN
B

Gambar IKM Unit Pelayanan

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri

Perbandingan dengan Target Akhir RPJMD

Sasaran	Indikator	Target Akhir RPJMD	Realisasi	Capaian	Keterangan
Meningkatnya Pelayanan Transportasi Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Unit Layanan Perhubungan	86.25	87.44	101.38%	Target Akhir RPJMD telah terlampaui

Realisasi Anggaran

Sasaran	Indikator	Pagu	Realisasi	Capaian	Keterangan
Meningkatnya Pelayanan Transportasi Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Unit Layanan Perhubungan	855,134,124.00	841,095,680.00	98.36%	Zona Hijau

Analisa Efisiensi

Sasaran	Indikator	Capaian Kinerja	Capaian Anggaran	Analisa Efisiensi	Keterangan
Meningkatnya Pelayanan Transportasi Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Unit Layanan Perhubungan	100.85%	98.36%	2.49%	Efisien

Perbandingan dengan Tahun sebelumnya

Indikator	2022	2023	2024
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Unit Layanan Perhubungan	86	86.59	87.44

Dari data diatas didapati adanya peningkatan yang signifikan pada tahun 2023 dan tahun 2024. Peningkatan signifikan tersebut akan dijadikan bahan dalam melakukan perencanaan tahun berikutnya.

Perbandingan Kinerja

Dari data yang dihimpun oleh didapati data Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2024 dengan hasil sebagai berikut;

Kabupaten Kediri	Provinsi Jawa Timur	Nasional
87.44	91.46	No Data

Program Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Kinerja

Program/Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
Pengujian Kendaraan Bermotor	Jumlah Pemenuhan Kebutuhan PKB	21	21	100%	Sangat Mendukung

Faktor-faktor Pendukung

Merujuk data dari Dinas Perhubungan, Sistem yang sudah berkembang dan terintegrasi.

Faktor-faktor Penghambat

Merujuk data dari Dinas Perhubungan, Keterbatasan Masyarakat Pengguna Layanan dalam Memahami Sistem Aplikasi Layanan PKB.

Rencana Tindak Lanjut

Merujuk data dari Dinas Perhubungan, Mengadakan Kegiatan Sosialisasi Terkait Sistem Pelayanan PKB dan Aplikasi Survei Kepuasan Layanan.

Tujuan 8

Meningkatnya Daya Saing Pariwisata Daerah

Merujuk data dari Emrizal, Akademisi dari Universitas Gadjah Mada dijelaskan bahwa daya saing destinasi merupakan faktor penting yang secara positif berpengaruh terhadap pertumbuhan kunjungan(market share) dan pengeluaran wisatawan. Penelitian iniberfokus pada relasi antara tipologi psychographic wisatawan dengan sepuluh faktor daya saing destinasi pariwisata regional yang diadaptasi dari faktor daya saing model World Economic Forum (WEF). Teradaptasinya faktor-faktor daya saing destinasi pariwisata regional (provinsi) berbasis demand;

Prioritas terhadap faktor-faktor daya saing destinasi pariwisata regional adalah bervariasi antar tipe psychographic wisatawan. Tipe psychocentric cendrung lebih mengutamakan faktor citra baik destinasi (image), keamanan, alam, aksesibilitas dan biaya, sedangkan tipe allocentric lebih cendrung memberi prioritas pada budaya, alam, keragaman pilihan aktivitas, masyarakat lokal dan lingkungan. Namun demikian, faktor alam dan biaya perjalanan (cost) dinilai sama-sama penting (setara) oleh semua tipe wisatawan.Dilihat berdasarkan pola hubungannya, disimpulkan bahwa terdapat relasi dinamis antara tipologi wisatawan dengan faktor-faktor daya saing destinasi pariwisata regional. Sumatera Utara saat ini lebih kompetitif terhadap pasar kelompok pro- allocentric.

Merujuk data dari BPS, dijelaskan bahwa PDRB sektor akomodasi dan makan minum adalah produk domestik regional bruto (PDRB) dari sektor penyediaan akomodasi dan makan minum. Sektor ini mencakup penyediaan akomodasi penginapan dan penyediaan makanan dan minuman. PDRB merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi dalam suatu wilayah atau daerah dalam jangka waktu tertentu. PDRB dapat digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah.

Pencapaian Kinerja Tahun 2024

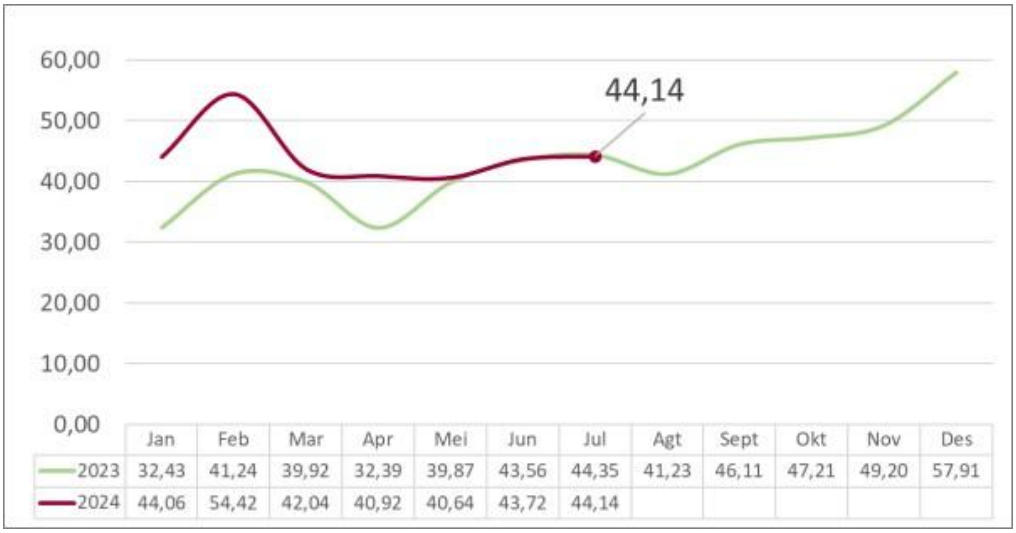
Tujuan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
Meningkatkan Daya Saing Pariwisata Daerah	Pertumbuhan PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makanan Minum	9.79	9.7	99.08%	Baik

Keandalan Data Kinerja

Formula	Perhitungan	Hasil Perhitungan	Dasar Perhitungan
Diukur oleh BPS	PDRB Sektor Akomodasi Makan	9.7	Berita Resmi Statistik

	Minum / PDRB Sektor Akomodasi Makan Minum Tahun Sebelumnya x 100%		

Gambar 24 Tingkat Penghunian Kamar (TPK) dan Rata-rata Lama Menginap Tamu (RLMT) dalam Hotel Berbintang di Kabupaten Kediri



	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sept	Okt	Nov	Des
2023	32,43	41,24	39,92	32,39	39,87	43,56	44,35	41,23	46,11	47,21	49,20	57,91
2024	44,06	54,42	42,04	40,92	40,64	43,72	44,14					



Sumber: BRS No. 2/09/3506/TH.V 01 September 2024

Perbandingan dengan Target Akhir RPJMD

Tujuan	Indikator	Target Akhir RPJMD	Realisasi	Capaian	Keterangan
Meningkatkan Daya Saing Pariwisata Daerah	Pertumbuhan PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makanan Minum	5.04	9.7	192.46%	Target Akhir RPJMD telah terlampaui

Sasaran Strategis 15

Meningkatnya Pendapatan Daerah dari Sektor Pariwisata

Pada tahun 2024 presentase pertumbuhan pad pariwisata melampaui target yaitu 10,95%, data tersebut diambilkan dari data perbandingan total PAD Pariwisata yang diterima tahun 2024 yakni 3.805.247.000,00 dengan total PAD Pariwisata yang diterima yakni 3.429.548.000,00.

Adanya pariwisata dengan kearifan lokal tidak hanya menarik wisatawan karena destinasinya saja. Melainkan juga dengan kearifan budaya lokal yang dapat membangkitkan ekonomi sekaligus membuka lapangan kerja. Sebenarnya, Indonesia sudah lama mengembangkan seni budaya dengan kearifan lokal dalam berbagai event dan festival yang dapat menarik wisatawan.

Merujuk Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dijelaskan bahwa optimalisasi pariwisata sejalan dengan tujuan pembangunan kepariwisataan, Pemerintah mengembangkan desa wisata yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan rakyat, menghapus kemiskinan, mengatasi pengangguran, melestarikan alam, lingkungan dan sumber daya, serta memajukan kebudayaan.

Meninjau penjelasan dari Kementerian Sekretariat Negara peran strategis pariwisata dalam perekonomian diprediksi akan semakin meningkat pada masa-masa mendatang, karena pariwisata mampu mentransformasi diri ke dalam kelompok industri terbesar dunia (The World's Largest Industry), pariwisata akan memainkan peran sentral dalam meningkatkan pendapatan daerah, devisa negara, persentase PDRB dan penciptaan lapangan kerja. Pariwisata dijelaskan sebagai lokomotif perkembangan perekonomian pasca Covid-19 di berbagai tempat di seluruh dunia.

Selain hal diatas, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif juga menjelaskan tentang empat pilar fokus yang perkembangan pariwisata dan ekonomi kreatif. Adapun empat pilar tersebut adalah;

1. Pengelolaan bisnis pariwisata yang berkelanjutan dengan kenyamanan wisatawan,
2. Partisipasi ekonomi masyarakat berkelanjutan jangka panjang,
3. Keberlanjutan budaya yang harus selalu dikembangkan, diadaptasi dengan teknologi dan dijaga,
4. Serta aspek dampak pariwisata terhadap lingkungan.

Tingginya antusias masyarakat akan wisata yang berkualitas menjadi perhatian bagi Pemerintah Kabupaten Kediri. Antusias yang tinggi di masa-masa modern ini akibat munculnya sosial media, menarik perhatian banyak pihak untuk datang dan berwisata pada tempat-tempat tersebut. Oleh karena demikian, Pemerintah Kabupaten Kediri berupaya agar antusiasme masyarakat tersebut tidak menghilang namun dapat dimanfaatkan dengan baik, terutama dapat dimanfaatkan oleh masyarakat di Kabupaten Kediri.

Permasalahan

Merujuk data dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah Masih terbatasnya jaringan pemasaran pariwisata (promosi masih bersifat parsial) dan belum adanya acuan analisa pasar yang komperhensif, dan belum optimalnya dan pengembangan potensi pariwisata Kabupaten Kediri.

Perencanaan

Pada tahun 2024 ini, target Nilai Tukar Petani (NTP) dalam RPJMD adalah 104. Target sesuai pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2024 dan Perjanjian Kinerja Perubahan Bupati Kediri tahun 2024.

Upaya-upaya Pencapaian Kinerja

Merujuk penjelasan dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kediri adalah sebagai berikut:

1. Direct Promotion keluar provinsi bekerja sama dengan para jasa usaha pariwisata di Kabupaten Kediri
2. Memasang iklan terkait pariwisata di Kabupaten Kediri
3. Pembukaan Kawasan Wisata Corah yang sempat ditutup dikarenakan pandemi Covid-19
4. Menggunakan platform Media Sosial untuk mempromosikan kawasan wisata di Kabupaten Kediri

Hasil Kinerja

Pada tahun 2024 presentase pertumbuhan pad pariwisata melampaui target yaitu 10,95%, data tersebut diambilkan dari data perbandingan total PAD Pariwisata yang diterima tahun 2024 yakni 3.805.247.000,00 dengan total PAD Pariwisata yang diterima yakni 3.429.548.000,00.

Pencapaian Kinerja Tahun 2024

Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
Meningkatnya Pendapatan Daerah dari Sektor Pariwisata	Pertumbuhan PAD Pariwisata	5%	10.95%	219.00%	Sangat Baik (Diatas Ekspektasi)

Keandalan Data Kinerja

Formula	Perhitungan	Hasil Perhitungan	Dasar Perhitungan
Persentase Pertumbuhan PAD Pariwisata	PAD Tahun n - PAD tahun n-1 / PAD Tahun n-1 x 100%	3.805.247.000,00 - 3.429.548.000,00 / 3.429.568.000,00 x 100%	Data Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2021-2026

Perbandingan dengan Target Akhir RPJMD

Sasaran	Indikator	Target Akhir RPJMD	Realisasi	Capaian	Keterangan
Meningkatnya Pendapatan Daerah dari Sektor Pariwisata	Pertumbuhan PAD Pariwisata	9%	10.95%	121.67%	Target Akhir RPJMD telah terlampaui

Realisasi Anggaran

Sasaran	Indikator	Pagu	Realisasi	Capaian	Keterangan
Meningkatnya Pendapatan Daerah dari Sektor Pariwisata	Pertumbuhan PAD Pariwisata	15,789,352,019.00	15,362,048,485.00	97.29%	Zona Hijau

Analisa Efisiensi

Sasaran	Indikator	Capaian Kinerja	Capaian Anggaran	Analisa Efisiensi	Keterangan
Meningkatnya Pendapatan Daerah dari Sektor Pariwisata	Pertumbuhan PAD Pariwisata	219.00%	97.29%	121.71%	Efisien

Pembandingan/Benchmarking

Perbandingan Realisasi dengan Tahun Sebelumnya

Realisasi Nilai Tukar Petani di Kabupaten Kediri dengan tahun-tahun sebelumnya adalah sebagai berikut;

Indikator	2022	2023	2024
Pertumbuhan PAD Pariwisata	94.59%	70.74%	10.95%

Perbandingan Kinerja

Dari data yang dihimpun oleh didapati data Realisasi Persentase Keluarga Sejahtera Tahun 2024 dengan hasil sebagai berikut;

Kabupaten Kediri	Provinsi Jawa Timur	Nasional
10.95%	No Data	No Data

Pihak-pihak yang Terkait

Disparbud Kabupaten Kediri bekerja sama dengan OPD terkait dalam kegiatan pertumbuhan pad pariwisata

Program Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Kinerja

Program	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Prosentase peningkatan obyek dan daya tarik wisata	10%	10.46%	104.60%	Sangat Mendukung
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Persentase SDM pariwisata dan ekonomi kreatif yang berkompetensi dasar	0.08	2.752	3440.00%	Sangat Mendukung
Program Pemasaran Pariwisata	Lama Tinggal (Length of Stay) wisatawan di Kabupaten Kediri	1	1	100.00%	Sangat Mendukung

Faktor-faktor Pendukung

Merujuk penjelasan dari Disparbud, ketercapaian target terjadi karena Pembukaan kembali wisata corah yang sempat ditutup dikarenakan Covid-19

Faktor-faktor Penghambat

Merujuk penjelasan dari Disparbud, hambatan-hambatan kinerja adalah belum optimalnya informasi dan pemasaran pariwisata secara global, dan masih terbatasnya kerjasama antar daerah di bidang pariwisata.

Rencana Tindak Lanjut

Merujuk penjelasan Disparbud dijelaskan bahwa meningkatkan kunjungan wisata daerah baik wisatawan nusantara dan mancanegara, adanya dukungan stakeholders dari berbagai daerah Kabupaten/Kota

Sasaran Strategis 16

Meningkatnya Kualitas Lingkungan

Sesuai dengan Undang-Undang No.23 Tahun 1997, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Merujuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, lingkungan yang lestari penting untuk keberlangsungan hidup manusia dan generasi selanjutnya. Agar tetap mendapatkan hidup layak, salah satu yang harus diupayakan generasi kini yakni merawat lingkungan dalam kaitannya dengan perubahan iklim. Utamanya dalam upaya pengendalian perubahan iklim. Untuk urusan penanganan isu perubahan iklim, tergambar salah satunya pada inisiasi pemerintah.

Dinas Lingkungan Hidup sebagai perangkat yang membantu tugas Bupati Kabupaten Kediri berkewajiban untuk mendukung tercapainya visi dan misi yang telah ditetapkan dala dokumen perencanaan daerah. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kediri akan mendukung terlaksananya visi dan misi Bupati Kediri yaitu Misi Ketujuh yaitu Optimalisasi Tata Kelola Lingkungan Hidup, Sumber Daya Alam dan Mitigasi Bencana. Tujuan dari Misi tersebut adalah Meningkatkan kualitas Lingkungan Hidup dan Kelestarian Sumber Daya Alam dengan indikator tujuan yang ingin dicapai adalah Indek Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), Untuk mewujudkan Misi Ketujuh, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kediri telah menetapkan tujuan yang ingin dicapai untuk jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang yaitu Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Sasaran strategis yang ingin dicapai adalah pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan dengan indikator kinerja :

1. Indeks Kualitas air
2. Indeks Kualitas udara
3. Indeks Kualitas Tutupan Lahan

Permasalahan

Merujuk data dari Dinas Lingkungan Hidup disebutkan permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

1. Terjadinya degradasi lingkungan dan meningkatnya beban pencemaran karena meningkatnya laju pembangunan.
2. Peningkatan jumlah penduduk yang berdampak pada meningkatnya potensi pencemaran.
3. Terjadinya fenomena perubahan iklim.
4. Fasilitas pengurangan sampah belum optimal
5. Sarana prasarana pengelolaan persampahan masih kurang

Perencanaan

Pada tahun 2024 ini, target Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, dan Indeks Kualitas Lahan sesuai pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2024 dan Perjanjian Kinerja Perubahan Bupati Kediri tahun 2024 sebagai berikut;

Upaya-upaya Pencapaian Kinerja

Dengan mengacu pada sejumlah kebijakan dan startegi untuk mewujudkan target sasaran strategis, Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kediri melaksanakan beberapa langkah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kepatuhan usaha terhadap dokumen Lingkungan
2. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan pencemaran melalui sosialisasi ramah lingkungan dengan sasaran Masyarakat desa serta bimtek pengelolaan limbah dengan sasaran palaku usaha
3. Konservasi sumber daya air melalui penanaman bibit di daerah tangkapan air dan daerah rawan longsor.
4. Meningkatkan pengelolaan persampahan berbasis masyarakat melalui Bimtek dan sosialisasi pengelolaan sampah dengan sasaran Bank sampah, Calon Pengelola TPS3R dan Aparat Desa.
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas RTHKP dengan Revitalisasi Taman Kawasan SLG dan Jalur Hijau Soekarno - Hatta

Hasil Kinerja

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja 2024 bahwa kinerja sasaran Dinas Lingkungan Hidup telah tercapai dengan penjelasan sebagai berikut;

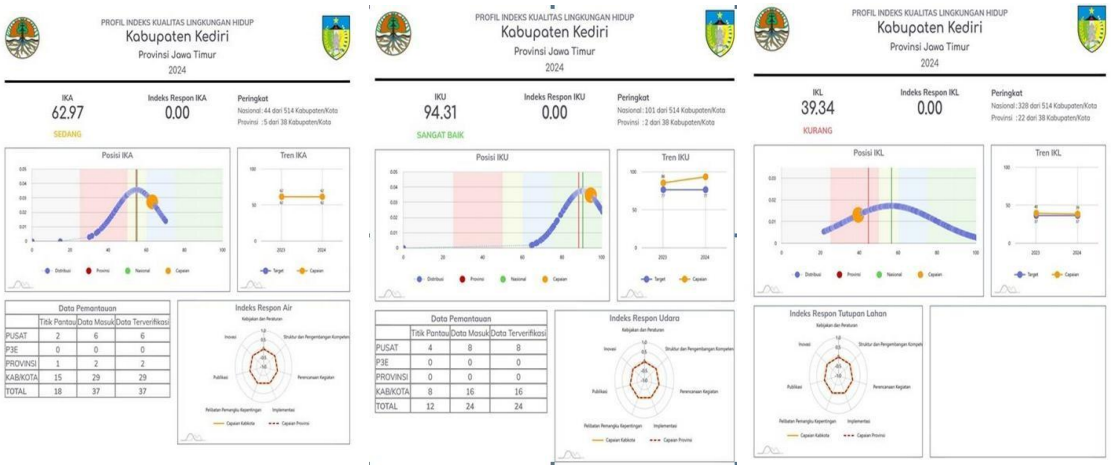
Pencapaian Kinerja Tahun 2024

Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
Meningkatkan Kualitas Lingkungan	IKA	62.87	62.97	100.16%	Sangat Baik
	IKU	86.12	94.31	109.51%	Sangat Baik
	IKL	40.49	39.34	97.16%	Baik

Keandalan Data Kinerja

Formula	Perhitungan	Hasil Perhitungan	Dasar Perhitungan
Formula Mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Pengukuran dilaksanakan oleh Kementerian LHK	Hasil Perhitungan disampaikan dalam gambar berikut:	Report Profil Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 2024

Gambar 25 Profil Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Kediri Tahun 2024



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kediri (2024)

Perbandingan dengan Target Akhir RPJMD

Sasaran	Indikator	Target Akhir RPJMD	Realisasi	Capaian	Keterangan
Meningkatkan Kualitas Lingkungan	IKA	62.97	62.97	100.00%	Target Akhir RPJMD telah tercapai
	IKU	77.68	94.31	121.41%	Target Akhir RPJMD

					telah terlampaui
	IKL	37.42	39.34	105.13%	Target Akhir RPJMD telah terlampaui

Realisasi Anggaran

Sasaran	Indikator	Pagu	Realisasi	Capaian	Keterangan
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air (IKA)	16.797.351.695,00	15.845.775.463,00	94,33%	
	Indeks Kualitas Udara (IKU)	21.180.128.383,00	17.640.362.188,00	83,29%	
	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	1.265.200.200,00	1.200.639.050,00	94,90%	

Analisa Efisiensi

Sasaran	Indikator	Capaian Kinerja	Capaian Anggaran	Analisa Efisiensi	Keterangan
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	IKA	100.16%	94.33%	Efisien	
	IKU	109.51%	83.29%	Efisien	
	IKL	97.16%	94.90%	Belum Efektif	

Pembandingan/Benchmarking

Perbandingan Realisasi dengan Tahun Sebelumnya

Realisasi Nilai Tukar Petani di Kabupaten Kediri dengan tahun-tahun sebelumnya adalah sebagai berikut;

	2022	2023	2024
IKA	62,22	62.97	62.97
IKU	80,94	86.12	94.31
IKL	39,34	40.49	39.34

Perbandingan Kinerja

Capaian IKLH Kabupaten Kediri masih dibawah nasional dan provinsi karena untuk perhitungan IKLH untuk kabupaten/kota dan nasional dilakukan dengan formula yang berbeda, untuk provinsi memasukkan indeks kualitas air laut, sedangkan untuk nasional selain memasukkan indeks kualitas air laut juga memasukkan indeks kualitas lahan gambut. Untuk Capaian Indeks kualitas air, Kabupaten Kediri diatas nasional maupun provinsi hal ini dikarenakan di kabupaten kediri masih banyak sumber air, embung dan sungai dengan kualitas air yang baik. Untuk kualitas lahan kabupaten kediri masih dibawah provinsi dikarenakan di Kabupaten Kediri tidak mempunyai hutan yang luas.

Dari data yang dihimpun oleh didapati data Realisasi Persentase Keluarga Sejahtera Tahun 2024 dengan hasil sebagai berikut;

1. Nilai Indeks Kualitas Air Kabupaten Kediri berada Peringkat 44 dari 514 Kabupaten/Kota di Indonesia
2. Nilai Indeks Kualitas Udara Kabupaten Kediri berada Peringkat 101 dari 514 Kabupaten/Kota di Indonesia
3. Nilai Indeks Kualitas Lahan Kabupaten Kediri berada pada peringkat 328 dari 514 Kabupaten/Kota di Indonesia

Pihak-pihak yang Terkait

alam mencapai tujuan dan sasaran serta pelaksanaan program kegiatan urusan lingkungan hidup ada beberapa pihak yang terlibat baik instansi vertical, SKPD terkait maupun kelompok Masyarakat, antara lain kelompok pengelola TPS3R, Bank sampah, Pegiat lingkungan dan sekolah adiwiyata.

Program Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Kinerja

Program	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Tingkat ketersediaan kajian pengelolaan lingkungan hidup	83 %	83,33%	100,40%	Sangat Mendukung
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Prosentase hasil pemantauan kualitas lingkungan yang memenuhi baku mutu	78,57%	66,67%	84,85%	Mendukung
PROGRAM PENGELOLAAN	Persentase Ruang Terbuka Hijau	0,045%	0,0364%	80,82%	Mendukung

Program	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	kawasan perkotaan				
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Jumlah kegiatan/usaha yang dibina terkait Pengelolaan Limbah B3	274 usah a/ kegia tan	274 usaha/ kegiatan	100%	Sangat Mendukung
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Usaha dan/atau Kegiatan berizin Lingkungan dan PPLH yang dibina	72%	88,89%	115,44%	Sangat Mendukung
PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Persentase MHA dan kearifan lokal terkait PPLH yang dibina	50%	0	0	Kurang Mendukung
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase lembaga kemasyarakatan yang mendapat penyuluhan LH	24,02%	71,13%	296,13%	Sangat Mendukung
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Jumlah event penghargaan Lingkungan Hidup yang diadakan atau diikuti dalam 1 tahun	4 kali	1 kali	33,33%	Kurang Mendukung
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Aduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) yang terselesaikan	87,5%	100%	114,29%	Sangat Mendukung
PROGRAM	Prosentase sampah	75,67%	31,67%	41,85%	Kurang Mendukung

Program	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	yang dikelola				

Faktor-faktor Pendukung

Merujuk penjelasan dari DLH, Secara umum, faktor-faktor penunjang pengupayaan peningkatan lingkungan hidup di Kabupaten Kediri adalah dengan kuatnya kolaborasi dan sinergi antar sektor, baik itu sektor pemerintahan, sektor swasta, lapisan masyarakat, sekolahan, serta sektor-sektor lainnya yang mendukung pengupayaan peningkatan kualitas lingkungan di Kabupaten Kediri. Selain itu, kuatnya dukungan masyarakat terutama dari lapisan LSM pecinta alam dan lingkungan dalam ikut serta mendukung melalui kegiatan-kegiatan penghijauan, menanam pohon di pekarangan, dsb.

Upaya perbaikan kualitas udara dan peningkatan vegetasi melalui kegiatan penanaman pohon kakija, selain itu pula peningkatan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP) dan pengawasan konservasi sera pengawasan dan penataan industri yang dilaksanakan dengan optimal. Hal tersebut menunjang meningkatnya kenaikan kualitas udara dengan peningkatan vegetasi baik di kawasan perkotaan melalui kegiatan penanaman kakija, peningkatan RTHKP dan kegiatan konservasi.

Faktor-faktor Penyebab

Merujuk penjelasan dari DLH, Secara umum pula, hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pengupayaan peningkatan lingkungan hidup di Kabupaten Kediri terbatas pada kurangnya kesepahaman dan perbedaan persepsi dalam pelaksanaan kegiatan. Namun demikian, permasalahan-permasalahan tersebut dapat ditindaklanjuti dengan baik dan dapat melanjutkan kinerja sesuai dengan apa yang direncanakan. Penurunan hasil Indeks Kualitas Air (IKA) dikarenakan adanya keterbatasan pengawasan terhadap industri, terutama industri kecil.

Selain demikian, terdapatnya aliran Sungai Brantas yang membawa cemaran aliran air dari daerah-daerah hulu mulai dari kawasan Batu, Malang, Blitar, Tulungagung hingga ke Kediri. Tidak dapat dipungkiri bahwa cemaran-cemaran tersebut turut memengaruhi perhitungan Indeks Kualitas Air yang diukur oleh Kementerian KLHK dengan sampel air dari Sungai Brantas.

Rencana Tindak Lanjut

Merujuk penjelasan dari DLH, Mengoptimalkan pengawasan terhadap usaha kegiatan, Peningkatan Upaya pemantauan lingkungan dengan perbaikan sarpras pemantauan lingkungan, mendorong penerbitan perkada Pembatasan penggunaan plastik sekali pakai dan peningkatan ruang public berupa taman kota

Sasaran Strategis 17

Meningkatnya Sinergitas antar Pemerintah, Masyarakat dan Swasta dalam Penanggulangan Bencana

Pada tahun 2024, realisasi Indeks Resiko Bencana Tahun 2024 yang diambilkan dari Surat BPBD Provinsi Jawa Timur adalah 97.89 lebih baik daripada realisasi tahun sebelumnya sebesar Tahun 2023

Sesuai dengan UU No.24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Kegiatan Penanggulangan Bencana pada dasarnya adalah serangkaian kegiatan baik sebelum, saat dan sesudah terjadi bencana yang dilakukan untuk mencegah, mengurangi, menghindari dan memulihkan diri dari dampak bencana. Penanganan bencana tidak lagi menekankan pada aspek tanggap darurat, tetapi lebih menekankan pada keseluruhan manajemen risiko bencana. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Selanjutnya ketiga upaya tadi disebut sebagai tahapan penanggulangan bencana yang meliputi tahapan Pra Bencana, Tanggap Darurat dan Pasca Bencana.

Merujuk data kajian BNPB, kebencanaan harus ditangani secara serius sejak terjadinya gempabumi dan disusul tsunami yang menerjang Aceh dan sekitarnya pada 2004 dan lainnya seperti Gunung Kelud tahun 2014. Kebencanaan merupakan pembahasan yang sangat komprehensif dan multi dimensi. Menyikapi kebencanaan yang frekuensinya terus meningkat setiap tahun, pemikiran terhadap penanggulangan bencana harus dipahami dan diimplementasikan oleh semua pihak. Kelembagaan dapat ditinjau dari sisi formal dan non formal. Secara formal, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) merupakan focal point lembaga pemerintah di tingkat pusat. Sementara itu, focal point penanggulangan bencana di tingkat provinsi dan kabupaten/kota adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Dari sisi non formal, forum-forum baik di tingkat nasional dan lokal dibentuk untuk memperkuat penyelenggaran penanggulangan bencana di Indonesia. Di tingkat nasional, terbentuk Platform Nasional (Planas) yang terdiri unsur masyarakat sipil, dunia usaha, perguruan tinggi, media dan lembaga internasional.

Penanggulangan bencana tidak dapat dilaksanakan tanpa adanya sinergitas antar unsur-unsur masyarakat dalam wilayah tersebut. Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan kebencanaan di Kabupaten Kediri saat ini sedang menjadi perhatian masyarakat, baik di tingkat daerah maupun di tingkat nasional. Hal tersebut terjadi karena Kabupaten Kediri memiliki tingkat rawan bencana yang cukup tinggi, mulai dari bencana gunung meletus, tanah longsor, serta bencana-bencana lainnya.

Permasalahan

Merujuk data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah disebutkan adalah masing belum optimalnya kuantitas Sumber Daya Manusia yang sesuai Standar Kebutuhan Unit Kerja.

Perencanaan

Pada tahun 2024 ini, target Indeks Resiko Bencana (IRB) mengalami penajaman dari yang awalnya ditargetkan 120,54 sesuai dengan Renstra BPBD ditingkatkan menjadi 97.59 sebagaimana termaktub pada Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024.

Upaya-upaya Pencapaian Kinerja

Upaya-upaya yang telah dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Sosial serta bersama dengan dinas-dinas lain adalah sebagai berikut;

1. Meningkatkan intensitas pembinaan administrasi pelaksanaan tugas terhadap unsur organisasi melalui Pembinaan, Pendampingan, dan Evaluasi atas kinerja.
2. Meningkatkan kualitas laporan keuangan Perangkat Daerah melalui reviu, monitoring dan evaluasi.
3. Penyusunan rencana penanggulangan bencana yang komprehensif, peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia, penguatan keterlibatan masyarakat, pengelolaan data serta kolaborasi dengan berbagai pihak terkait.
4. Penggunaan sumber daya yang efisien untuk menjalankan program-program mitigasi dan tanggap darurat secara efektif.

Hasil Kinerja

Pada tahun 2024, realisasi Indeks Resiko Bencana yang diambilkan dari Surat BPBD Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut:

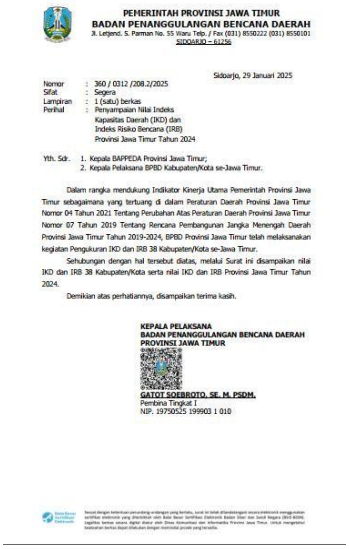
Pencapaian Kinerja Tahun 2024

Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
Meningkatnya Sinergitas antar Pemerintah, Masyarakat dan Swasta dalam Penanggulangan Bencana	Indeks Resiko Bencana	83	97.89	82.06%	Baik

Keandalan Data Kinerja

Formula	Perhitungan	Hasil Perhitungan	Dasar Perhitungan
Diukur oleh BPBD Provinsi Jawa Timur dengan Verifikasi dari BNPB	Indikator dihitung secara tahunan dengan metode pengukuran yang dilakukan oleh BPBD Provinsi Jawa Timur dan BNPB	97.89	Surat BPBD Provinsi Jawa Timur tanggal 29 Januari 2025 nomor 360/0312/208.2/2025

Gambar 26 Surat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur tentang Nilai IRB Tahun 2024



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Jl. Letjend. S. Parman No. 55 Waru Telp. / Fax (031) 8550222 (031) 8550101
SIDOARJO – 61256

Sidoarjo, 29 Januari 2025

Nomor : 360 / 0312 /208.2/2025
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Penyampaian Nilai Indeks Kapasitas Daerah (IKD) dan Indeks Risiko Bencana (IRB) Provinsi Jawa Timur Tahun 2024

Yth. Sdr. 1. Kepala BAPPEDA Provinsi Jawa Timur;
2. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten/Kota se-Jawa Timur.

Dalam rangka mendukung Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagaimana yang tertuang di dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 07 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024, BPBD Provinsi Jawa Timur telah melaksanakan kegiatan Pengukuran IKD dan IRB 38 Kabupaten/Kota se-Jawa Timur.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, melalui Surat ini disampaikan nilai IKD dan IRB 38 Kabupaten/Kota serta nilai IKD dan IRB Provinsi Jawa Timur Tahun 2024.

Demikian atas perhatiannya, disampaikan terima kasih.

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR

GATOT SOEBROTO, SE. M. PSDM.
Pembina Tingkat I
NIP. 19750525 199903 1 010

LAMPIRAN : Surat Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jawa Timur
NOMOR : 360 / 0312 /208.2/2025
TANGGAL : 29 Januari 2025

C. HASIL PERHITUNGAN IRB 38 KABUPATEN/KOTA SE-JAWA TIMUR TAHUN 2015-2024

NO	KABUPATEN/KOTA	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	PACITAN	215,20	215,20	192,20	126,21	123,14	123,27	108,39	121,05	108,98	109,04
2	PONOROGO	155,20	155,20	155,20	140,77	127,14	115,05	105,04	99,83	94,24	86,70
3	TRENGGALEK	198,00	198,00	198,00	170,95	151,25	151,25	151,25	136,02	122,95	115,27
4	TULUNGAGUNG	201,20	201,20	201,20	183,75	151,47	137,64	125,08	118,63	111,34	105,06
5	BLITAR	210,00	210,00	210,00	198,00	178,97	160,26	146,16	134,86	125,76	117,66
6	KEDIRI	178,00	178,00	178,00	143,69	143,69	130,59	121,46	111,47	104,51	97,89
7	MALANG	219,20	219,20	199,81	142,10	137,09	133,20	129,84	174,34	118,63	114,33
8	LUMAJANG	231,20	231,20	198,74	129,74	113,84	117,76	113,78	110,47	107,09	104,09
9	JEMBER	219,20	219,20	219,07	198,80	181,18	158,19	146,00	137,18	130,23	123,07
10	BANYUWANGI	219,20	208,70	208,44	168,20	151,34	137,35	127,80	120,18	114,14	109,28
11	BONDOWOSO	166,00	166,00	166,00	166,00	166,96	134,75	113,09	105,57	98,38	91,88
12	SITUBONDO	168,40	168,40	168,40	168,40	146,05	128,39	113,66	102,44	94,13	87,80
13	PROBOLINGGO	194,00	194,00	194,00	181,29	156,76	140,16	128,47	119,66	113,05	107,00
14	PASURUAN	214,00	214,00	214,00	214,00	180,34	156,26	139,18	126,32	116,77	109,38
15	MOJOKERTO	149,60	149,60	149,60	132,07	85,29	81,87	79,25	75,25	72,00	69,88
16	MOJOKERTO	163,60	163,60	163,60	163,60	140,04	123,74	110,66	99,88	91,17	84,38
17	JOMBANG	154,80	154,80	154,80	154,80	148,00	128,95	114,16	103,18	105,17	98,32
18	NGANJUK	152,80	152,80	152,80	152,80	152,87	118,32	107,88	99,87	93,79	88,33
19	MADIUN	155,20	155,20	155,20	155,20	134,81	118,18	111,16	115,47	109,41	101,43
20	MAGETAN	152,80	152,80	152,80	152,80	135,80	123,24	115,72	103,51	94,17	87,07
21	NGAWI	143,20	143,20	143,20	143,20	131,28	113,08	100,72	90,57	100,51	93,90
22	BOJONEGORO	130,00	104,65	101,38	96,93	93,84	90,44	87,53	84,88	81,75	79,40
23	TUBAN	175,20	175,20	175,20	160,08	145,08	133,04	123,10	114,78	108,07	
24	LAMONGAN	179,00	174,00	167,38	139,25	125,24	113,86	107,72	99,50	94,48	90,80
25	GRESIK	175,70	137,79	116,77	101,35	99,20	94,35	90,50	84,80	91,42	87,50
26	BANGKALAN	164,40	164,40	158,88	139,82	129,84	118,71	109,19	101,14	94,45	88,40
27	SAMPANG	154,80	154,80	154,80	154,80	140,63	127,19	116,66	108,15	97,05	90,84
28	PAMEKASAN	180,40	180,40	180,40	180,40	172,53	158,19	134,45	120,85	107,44	97,00
29	SUMENEP	204,80	204,80	204,80	204,80	184,63	160,95	146,16	133,27	123,13	114,94
30	KOTA KEDIRI	140,80	140,80	140,80	140,80	127,75	120,69	97,63	89,58	79,18	74,20
31	KOTA BLITAR	132,00	132,00	132,00	132,00	118,79	106,06	101,65	98,75	91,12	85,98
32	KOTA MALANG	113,60	113,60	113,60	113,60	100,17	91,26	84,15	79,13	68,09	61,85
33	KOTA PROBOLINGGO	148,40	148,40	148,40	148,40	139,83	132,14	104,10	101,18	97,72	94,33
34	KOTA PASURUAN	158,40	158,40	158,40	158,40	136,12	132,87	121,14	108,09	102,29	96,70
35	KOTA MOJOKERTO	141,80	141,80	141,80	141,80	135,05	128,57	122,57	116,92	109,01	98,63
36	KOTA MADIUN	136,00	136,00	136,00	136,00	121,18	116,78	116,73	108,85	99,64	91,82
37	KOTA SURABAYA	166,80	166,80	166,80	166,80	150,14	134,14	124,58	114,53	115,51	109,31
38	KOTA BATU	134,40	134,40	134,40	134,40	118,04	109,05	93,51	88,08	81,05	75,11
		171,34	168,54	165,79	151,42	137,08	128,41	117,24	108,59	102,65	96,70
		Δ	-2,45	-3,15	-13,38	-14,52	-11,47	-8,18	-8,57	-7,04	-5,98

Keterangan :

NILAI IRB	KABUPATEN/KOTA
< 13	Rendah
13 – 144	Sedang
> 144	Tinggi

----------oooOooo----------

Perbandingan dengan Target Akhir RPJMD

Sasaran	Indikator	Target Akhir RPJMD	Realisasi	Capaian	Keterangan
Meningkatnya Sinergitas antar Pemerintah, Masyarakat dan Swasta dalam Penanggulangan Bencana	Indeks Resiko Bencana	116.32	97.89	115.84%	Target Akhir RPJMD telah terlampaui

Realisasi Anggaran

Sasaran	Indikator	Pagu	Realisasi	Capaian	Keterangan
Meningkatnya Sinergitas antar Pemerintah, Masyarakat dan Swasta dalam Penanggulangan Bencana	Indeks Resiko Bencana	5,338,031,327.00	4,119,363,699.00	77.17%	

Analisa Efisiensi

Sasaran	Indikator	Capaian Kinerja	Capaian Anggaran	Analisa Efisiensi	Keterangan
Meningkatnya Sinergitas antar Pemerintah, Masyarakat dan Swasta dalam Penanggulangan Bencana	Indeks Resiko Bencana	100.31%	77.17%	Efisien	

Pembandingan/Benchmarking

Perbandingan Realisasi dengan Tahun Sebelumnya

Realisasi Nilai Tukar Petani di Kabupaten Kediri dengan tahun-tahun sebelumnya adalah sebagai berikut;

2022	2023	2024
112,47	104.53	97.89

Dari data diatas didapati adanya peningkatan yang signifikan pada tahun 2023 dan tahun 2024. Peningkatan signifikan tersebut akan dijadikan bahan dalam melakukan perencanaan tahun berikutnya.

Perbandingan Kinerja

Dari data yang dihimpun oleh didapati data Indeks Resiko Bencana Tahun 2024

Tabel Perbandingan Indeks Resiko Bencana

Wilayah	Indeks Resiko Bencana	Keterangan	Rujukan Data
Provinsi Jawa Timur	95.75		Surat Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jawa Timur tanggal 29 Januari 2025 nomor 360/0312/208.2/2025
Kabupaten Ngawi	90.99		
Kabupaten Tuban	108.02		

Pihak-pihak yang Terkait

Merujuk penjelasan dari BPBD adalah sebagai berikut;

1. Dinas Perumahan dan Permukiman, dalam menunjang pencapaian kinerja BPBD dan Dinas Perkim melaksanakan koordinasi terkait pemberian bantuan rehabilitasi rumah warga yang terdampak bencana
2. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dalam penanganan dampak akibat bencana BPBD berkoordinasi dengan Dinas PUPR terkait perbaikan fasilitas umum seperti jembatan rusak, jalan longsor, tanggul sungai longsor, normalisasi sungai dan sebagainya.
3. Dinas Sosial, BPBD berkoordinasi dengan Dinas Sosial terkait pemberian bantuan sosial kepada masyarakat terdampak bencana serta penyediaan dapur umum di pengungsian akibat bencana.
4. Pemerintah Desa dan Kecamatan, BPBD beserta Pemerintah Desa dan/atau Pemerintah Kecamatan berkoordinasi dalam hal penanganan dan rencana tindak lanjut di wilayah terdampak bencana, mendampingi pelaksanakan assessment serta memberikan aksesjalannya proses penanganan dampak bencana

5. Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas Kementerian PUPR , BPBD bersinergi dengan BBWS mengingat di wilayah Kabupaten Kediri terdapat aliran hulu sungai Brantas yang menjadi kewenangan BBWS Brantas. Pada saat terjadi bencana di sepanjang aliran sungai, BPBD berkoordinasi dengan BBWS Brantas dalam pelaksanaan assessment dan rencana penanganan dampak akibat bencana.
6. Perum Jasa Tirta I (PJT I), BPBD juga berkolaborasi dengan PJT I dalam penanganan tanggul longsor serta kegiatan normalisasi sungai. Kolaborasi ini dilaksanakan untuk mengurangi risiko banjir dan menjaga ekosistem sungai agar tetap bersih dan sehat.
7. Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB), dukungan FPRB yaitu dalam mengurangi risiko terjadinya bencana di wilayah Kabupaten Kediri, berkoordinasi dengan BPBD dalam memperkuat sistem ketangguhan dalam menghadapi bencana, mengadakan pertemuan forum lintas sektor dalam pencegahan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi ancaman bencana, serta bersinergi dalam menjaga kelestarian lingkungan.
8. TNI / Polri, dalam penanganan bencana BPBD Kabupaten Kediri juga didukung oleh personil TNI / Polri.
9. LSM, Ormas, Forum Relawan juga berperan dalam penanganan dampak yang ditimbulkan oleh bencana.

Program Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Kinerja

Program	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
Program Penanganan Bencana Bencana	Persentase Bencana yang ditangani	100%	87%	87%	Mendukung

Faktor-faktor Pendukung

Merujuk pada LKjIP BPBD Kabupaten Kediri Tahun 2024 disampaikan beberapa faktor pendukung sebagai berikut:

1. Terlaksananya manajemen kinerja internal dengan memaksimalkan ketersedian jumlah pegawai terhadap beban kerja.
2. Mengupayakan dengan maksimal kompetensi aparatur untuk mendukung terlaksananya program kegiatan.
3. Memaksimalkan ketersediaan anggaran untuk mendukung terlaksananya program kegiatan.
4. Memaksimalkan peran masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana

Faktor-faktor Penghambat

Merujuk pada LKjIP BPBD Kabupaten Kediri Tahun 2024 disampaikan beberapa faktor penghambat sebagai berikut:

1. Belum idealnya jumlah aparatur dengan beban kerja.
2. Belum idealnya kompetensi ijazah dengan posisi / pekerjaan yang diampu
3. Capaian serapan anggaran yang masih dibawah 80 % yaitu sebesar 77,17 % dikarenakan tidak terlaksananya perubahan tipologi perangkat daerah dari tipe B ke tipe A sehingga anggaran penyediaan gaji dan tunjangan ASN yang sudah dianggarkan tidak bisa terserap maksimal
4. Belum maksimalnya kemandirian masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana.

Rencana Tindak Lanjut

Merujuk pada LKjIP BPBD Kabupaten Kediri Tahun 2024 disampaikan beberapa rencana tindak lanjut sebagai berikut:

1. Pengusulan jumlah pegawai pada penambahan usulan ASN di BPBD
2. Penganggaran diklat teknis / peningkatan kapasitas kepada karyawan
3. Memaksimalkan kinerja dan optimalisasi serapan anggaran serta pertanggungjawaban laporan kinerja dan keuangan yang efisien.
4. Mengoptimalkan himbauan kepada masyarakat terkait upaya penanggulangan bencana melalui media sosial, sosialisasi, serta pertemuan lintas sektor.

Apresiasi dan Penghargaan

Pada Tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Kediri mendapatkan Penghargaan dalam Bidang Kebencanaan Sebagai Berikut:

1. Juara 3 Lomba Pendirian Tenda dalam Rangka Kegiatan Gelar Peralatan Penanggulangan Bencana Jawa Timur Tahun 2024

Tujuan 10

Meningkatkan Potensi Seni dan Budaya Generasi Muda untuk Pembangunan Daerah

Gambar 27 Bupati Kediri Launcing Potensi Seni dan Budaya Kabupaten Kediri



Sasaran Strategis 18

Meningkatnya Pelestarian Seni Budaya Daerah

Pada tahun 2024 Presentase Cakupan Event skala kabupaten Tercapai sebesar 56,65% dengan sebanyak 183 event Budaya Skala Kabupaten yang diikuti/diselenggarakan dan 323 event Budaya dari desa sampai Kabupaten. Realisasi tersebut mengalami peningkatan dari realisasi Cakipan Event Budaya Skala Kabupaten yakni 35.86% pada Tahun 2023.

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, melihat momentum kebangkitan ekonomi dan mengedepankan pelestarian tradisi lokal serta lingkungan. Fungsi dari pelestarian budaya lokal adalah sebagai identitas lokal.

Selain itu pula, Kemenparekraf mendorong pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif (parekraf) berbasis budaya dan kearifan lokal untuk membangkitkan perekonomian di sektor parekraf pascapandemi. Karena pada kenyataannya, perekonomian dari sektor

kepariwisataan kini tengah menjadi potensi terutama dalam kondisi pasca pandemi Covid-19.

Pengembangan pariwisata bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata, namun juga dukungan dan sinergi berbagai pihak yakni pemerintah, pengusaha, pengelola objek wisata, masyarakat, media hingga kampus. Sinergi harus terus diperkuat mengingat keberhasilan dalam pembangunan dan pengembangan pariwisata, selalu diperlukan dukungan dan sinergi berbagai pihak.

Permasalahan

Merujuk data dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan disebutkan permasalahan adalah Masih terbatasnya sarana-prasarana seni budaya daerah, dan Belum adanya gedung kesenian /pertunjukan seni yang representatif

Perencanaan

Pada tahun 2024 ini, target Pelestarian Seni Budaya Daerah dengan indikator Cakupan Event Budaya Skala Kabupaten dalam RPJMD 8% mengalami penajaman menjadi 35.86% sesuai dengan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024.

Upaya-upaya Pencapaian Kinerja

Upaya-upaya yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dengan dinas-dinas lain adalah sebagai berikut;

1. Mengikuti event yang ada di Kabupaten Kediri;
2. Mendampingi event yang berkaitan dengan promosi pariwisata dan kebudayaan;

Hasil Kinerja

Pada tahun 2024, realisasi Persentase Keluarga Sejahtera yang diambilkan dari Data Hasil Survei Keluarga Sejahtera dalam Aplikasi INkelud terdapat 454.395 Keluarga yang masuk dalam Kategori Kategori Keluarga Sejahtera Tahap II, III, dan III Plus/Jumlah Keluarga. Data keluarga yang berjumlah 454.395 tersebut dibagi dengan jumlah keluarga yang ada di Kabupaten Kediri yakni 504.603 dan dikalikan 100% dengan teknisT

Sasaran Strategis 19

Meningkatnya Daya Dukung Generasi Muda Bagi Daerah

Dalam rangka meningkatkan peran pemuda dan menyongsong bonus demografi Kabupaten Kediri, para pemuda harus memiliki dampak dan daya dukung terhadap pembangunan daerah. Hal tersebut berusaha diupayakan agar fenomena bonus demografi di Indonesia

utamanya di Kabupaten Kediri dapat terlaksana dengan baik, dimana para pemuda menjadi produktif dan bukannya membebani pembangunan.

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan menjelaskan terdapatnya tiga lapisan yang digunakan untuk mendukung pembangunan pemuda, yakni:

1. Lapisan Pengembangan individu, yang dipetakan dalam domain pendidikan dan domain kesehatan dan kesejahteraan. Pada lapisan ini Pembangunan pemuda memastikan terpenuhinya layanan dasar pada pemuda untuk memastikan produktivitasnya.
2. Lapisan Pengembangan Penghidupan dan Kesejahteraan, dimana pemuda diharapkan mendapat akses terhadap pekerjaan yang lebih baik sehingga terpenuhi penghidupan yang sejahtera. Pada lapisan pengembangan penghidupan dan kesejahteraan dipetakan dalam domain lapangan dan kesempatan kerja.
3. Lapisan partisipasi dalam bidang kehidupan, pemuda diharapkan dapat berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.

Permasalahan

Merujuk data dari Dinas Pertanian dan Perkebunan disebutkan permasalahan-permasalahan sebagai berikut;

Perencanaan

Pada tahun 2024 ini, target Nilai Tukar Petani (NTP) dalam RPJMD adalah 104. Target sesuai pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2024 dan Perjanjian Kinerja Perubahan Bupati Kediri tahun 2024.

Upaya-upaya Pencapaian Kinerja

Upaya-upaya yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan, serta Dinas Perikanan bersama dengan dinas-dinas lain adalah sebagai berikut;

Hasil Kinerja

Pada tahun 2024, realisasi Persentase Keluarga Sejahtera yang diambilkan dari Data Hasil Survei Keluarga Sejahtera dalam Aplikasi INkelud terdapat 454.395 Keluarga yang masuk dalam Kategori Kategori Keluarga Sejahtera Tahap II, III, dan III Plus/Jumlah Keluarga. Data keluarga yang berjumlah 454.395 tersebut dibagi dengan jumlah keluarga yang ada di Kabupaten Kediri yakni 504.603 dan dikalikan 100% dengan teknis

Tujuan 11

Mendorong Daya Saing Ekonomi Masyarakat dan Desa

Sasaran Strategis 20

Meningkatnya Kemandirian Masyarakat dan Desa

Sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 78 (1) desa memiliki tujuan dalam rangka pembangunan desa yaitu peningkatan pelayanan dasar, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan, pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif, pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna, dan peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat desa. Kementerian Desa dan PTT meninjau bahwa implementasi UU Desa secara umum telah berhasil dilaksanakan. Hal tersebut terbukti dengan penggunaan tiga persen Dana Desa untuk operasional pemerintahan desa dan juga hingga penggunaan dana desa untuk ketahanan pangan agar dapat menjawab tantangan ancaman krisis pangan global.

Selain daripada amanat regulasi diatas, peran desa dalam meningkatkan kesejahteraan menjadi sangat penting. meningkatnya angka urbanisasi, pergeseran penduduk dari kawasan perdesaan menuju kawasan perkotaan. Fenomena tersebut tidak hanya terjadi di Kabupaten Kediri saja, banyak tempat kini sedang mengalami hal tersebut. Pelaksanaan pembangunan desa dari periode ke periode pemerintahan hingga saat ini ternyata belum sepenuhnya berjalan optimal untuk membebaskan masyarakat desa, khususnya masyarakat miskin dari belenggu kemiskinan dan keterbelakangan. Lahirnya UU tentang Desa telah memberikan legal standing dan landasan strategis untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa menuju desa yang mandiri dan sejahtera. UU Desa memberikan pengakuan dan penyerahan kekuasaan berskala desa. Melalui kewenangan ini, desa dapat memanfaatkan potensi yang dimiliki sebagai perwujudan kemandirian desa. Oleh sebab itu, salah satu misi Kabupaten Kediri adalah mengoptimalkan agar Masyarakat dan desa bisa mengelola potensi yang ada guna menciptakan desa yang mandiri.

Permasalahan

Merujuk data dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa disebutkan permasalahan-permasalahan sebagai berikut;

1. Kurang sinkronisasinya pedoman yang menjadi acuan pencapaian indikator sasaran yang akan dicapai;
2. Kurang berperannya lembaga ekonomi desa dalam upaya keberdayaan ekonomi desa;
3. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam upaya pembangunan desa;
4. Pemberdayaan masyarakat dalam mengelola potensi desa belum optimal;
5. Kurang adanya sinergitas program yang ada di pemerintah dan desa;
6. Kemampuan sumber daya manusia yang belum optimal dalam pengelolaan pemerintaan desa baik dari segi aparatur pemerintah dan masyarakat.

Perencanaan

Pada tahun 2024 ini, target Persentase Desa Maju dan Desa Mandiri didasarkan dari IDM dalam RPJMD adalah 54,81%. Target tersebut mengalami penajaman pada Tahun 2024, sesuai pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2024 dan Perjanjian Kinerja Perubahan Bupati Kediri tahun 2024 target 84,55%.

Upaya-upaya Pencapaian Kinerja

Upaya-upaya yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, bersama dengan dinas-dinas lain adalah sebagai berikut;

1. Koordinasi secara berkala baik secara horizontal dengan internal pemerintah daerah dan secara vertikal dengan pemerintah provinsi dan pusat mengenai panduan pencapaian indikator sasaran;
2. Meningkatkan peran lembaga ekonomi desa melalui pengembangan BUMDes, BUMDESMA dan pasar desa;
3. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pembangunan desa melalui lembaga kemasyarakatan desa, seperti pendamping desa, PKK, Karang Taruna dan Posyandu;
4. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam mengelola potensi desa melalui pendampingan, pelatihan, dan perluasan jaringan untuk akses permodalan dan pasar;
5. Sinkronisasi program dan kegiatan yang ada di pemerintah dan desa;
6. Penguatan kapasitas Sumber Daya Manusia di Desa baik dari aparatur pemerintah desa dan Masyarakat.

Hasil Kinerja

Menurut data dari DPMPD, disampaikan sebagai berikut;

1. Meningkatnya kelompok usaha ekonomi Masyarakat dengan target 310 desa, realisasi 258 desa dan capaian 83%;
2. Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam Pembangunan dengan target jumlah desa mandiri 16 desa, realisasi 87 desa dan capaian 544% serta target jumlah desa maju 170 desa, realisasi 236 desa dan capaian 139%;
3. Meningkatnya kapasitas lembaga desa dengan target 87%, realisasi 84% dan capaian 97%;
4. Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa dengan target 89%, realisasi 89% dan capaian 100%.

Uraian diatas disampaikan dengan teknis perhitungan sebagai berikut;

Pencapaian Kinerja Tahun 2024

Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
Meningkatkan kemandirian masyarakat dan desa	Persentase desa mandiri dan desa maju didasarkan dari IDM	84.55%	94.46%	111,72%	Sangat Baik

Keandalan Data Kinerja

Formula	Perhitungan	Hasil Perhitungan	Dasar Perhitungan
Jumlah Desa Mandiri dan Desa Maju di Kabupaten Kediri / Jumlah Desa x 100%	Jumlah Desa Mandiri dan Desa Maju Kabupaten dibagi Jumlah Desa dikali Seratus Persen - Pembilang : jumlah desa mandiri dan desa maju di Kab. Kediri pada tahun pelaporan. - Penyebut : Jumlah desa yang ada di Kabupaten Kediri pada tahun pelaporan	Persentase Desa Mandiri dan Desa Maju didasarkan dari IDM	- Kepmen Desa PDTT No. 400 TAhun 2024 tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa Tahun 2024 - Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) TAhun 2024

Perbandingan dengan Target Akhir RPJMD

Sasaran	Indikator	Target Akhir RPJMD	Realisasi	Capaian	Keterangan

Meningkatnya Kemandirian Masyarakat Desa	Persentase Desa Maju dan Desa Mandiri didasarkan IDM	68.80%	94.46%	137.30%	Target Akhir RPJMD telah terlampaui

Realisasi Anggaran

Sasaran	Indikator	Pagu	Realisasi	Capaian	Keterangan
Meningkatnya Kemandirian Masyarakat Desa	Persentase desa mandiri dan desa maju didasarkan dari IDM	17,012,033,080.00	16,137,059,528.00	94.86%	

Analisa Efisiensi

Sasaran	Indikator	Capaian Kinerja	Capaian Anggaran	Analisa Efisiensi	Keterangan
Meningkatnya Kemandirian Masyarakat Desa	Persentase desa mandiri dan desa maju didasarkan dari IDM	84.55%	94.46%	111.72%	

Pembandingan/Benchmarking

Perbandingan Realisasi dengan Tahun Sebelumnya

Realisasi Nilai Tukar Petani di Kabupaten Kediri dengan tahun-tahun sebelumnya adalah sebagai berikut;

2021	2022	2023	2024
Belum ada Data	63.56	84.55	94.17

Dari data diatas didapati adanya peningkatan yang signifikan pada tahun 2023 dan tahun 2024. Peningkatan signifikan tersebut akan dijadikan bahan dalam melakukan perencanaan tahun berikutnya.

Perbandingan Kinerja

Dari data yang dihimpun oleh didapati data Realisasi Persentase Keluarga Sejahtera Tahun 2024 dengan hasil sebagai berikut;

Kabupaten Kediri	Daerah Lain/Kota Kediri	Provinsi Jawa Timur	Nasional
94,17%	No Data	89,92%	53,30%

Gambar 28 Perbandingan Jumlah Desa Mandiri dan Desa Maju Tahun 2024

STATUS DESA	Rata-Rata Nasional	Provinsi Jatim	Kabupaten Kediri	Kabupaten Tulungagung	Kabupaten Nganjuk	Kabupaten Jombang
Desa Mandiri	17.203	4.019	87	130	78	184
Desa Maju	23.063	2.924	236	116	175	118
Desa Berkembang	24.532	778	20	11	11	
Desa Tertinggal	6.100					
Desa Sangat Tertinggal	4.363					
Desa Tidak Memenuhi Kriteria	4					
JUMLAH TOTAL	**75.265**	**7.721**	**343**	**257**	**264**	**302**

Sumber: LKjIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kediri 2024

Pihak-pihak yang Terkait

Merujuk data dari DPMPD, disampaikan sebagai berikut;

1. SKPD Pemerintah Kabupaten Kediri, berperan dalam hal menjamin keterkaitan dan konsistensi perencanaan, pelaksanaan dan monitoring serta evaluasi dari kinerja yang ditargetkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
2. Pemerintah Pusat, berperan dalam hal koordinasi dan memberikan arah kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah;
3. Perguruan Tinggi, berperan dalam hal penyediaan data dan rekomendasi kebijakan atas hasil kinerja yang ditargetkan;
4. Swasta, berperan dalam hal pelaksanaan kegiatan untuk mencapai sasaran yang ditargetkan;
5. Masyarakat berperan sebagai sasaran dari pelaksanaan program yang disusun

Program Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Kinerja

Program	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
Program Penataan Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi dalam penataan desa	343	343	100.00%	Sangat Mendukung
Program Peningkatan Kerjasama Desa	Jumlah kerjasama desa yang dilakukan anar desa dan pihak ketiga	343	343	100.00%	Sangat Mendukung
Program Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang dibina dalam menjalankan manajermen pemerintahan	343	343	100.00%	Sangat Mendukung
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa yang difasilitasi	343	343	100.00%	Sangat Mendukung

Faktor-faktor Pendukung

Merujuk data dari DPMPD, disampaikan sebagai berikut;

1. Komitmen dan tanggungjawab kepala daerah;
2. Intensifnya koordinasi dengan berbagai pihak baik dari internal maupun eksternal Pemerintah Kabupaten Kediri.

Faktor-faktor Penghambat

Merujuk data dari DPMPD, disampaikan sebagai berikut;

1. Kebijakan yang tumpah tindih antara pusat dan daerah;
2. Kapasitas Sumber Daya Manusia dan sarana dan prasarana yang mendukung perekonomian desa belum optimal;
3. Kurangnya jaringan kerjasama dalam hal pengelolaan potensi desa.

Rencana Tindak Lanjut

Merujuk data dari DPMPD, disampaikan sebagai berikut;

1. Melakukan sinkronisasi kebijakan, program dan kegiatan secara berkala dan berkelanjutan;
2. Penguatan kapasitas pemerintahan desa baik aparatur pemerintah dan masyarakat serta fasilitasi penyediaan sarana prasarana, akses, dan aktivitas daya dukung perekonomian desa;
3. Optimalisasi perluasan jaringan dalam hal pengelolaan potensi desa melalui peran lembaga desa dalam pembangunan seperti pengembangan BUMDes sebagai upaya meningkatkan perekonomian desa.

3.4. Kebijakan Strategis yang Ditetapkan

Strategi merupakan ilmu, seni, atau wawasan yang diperlukan oleh pemerintah daerah dalam memanajemen setiap program kegiatannya dengan merintis cara, langkah, atau tahapan untuk mencapai tujuan. Sedangkan dalam pengelolaan pembangunan daerah perlu adanya manajemen strategis yang menetapkan tujuan pemerintah daerah serta pengembangan kebijakan dan perencanaan untuk mencapai visi dan misi kepala daerah melalui pemberdayaan setiap potensi sumber daya yang ada. Dalam pencapaian tujuan dan sasaran pemerintah daerah, strategi akan dijabarkan dalam arah kebijakan yang merupakan program prioritas dalam pencapaian pembangunan daerah.

Arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pelaksanaan misi pembangunan. Strategi dan arah kebijakan akan merumuskan perencanaan yang komprehensif, sinkron, konsisten, dan selaras dengan visi misi kepala daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan daerah. Selain itu, strategi dan arah kebijakan merupakan sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan

perbaikan kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan setiap program-program kegiatan baik internal maupun eksternal, pelayanan maupun pengadministrasian, serta perencanaan, monitoring, maupun evaluasi. Strategi dan Arah Kebijakan Kabupaten Kediri Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 26 Strategi dan Arah Kebijakan Kabupaten Kediri Tahun 2021-2026

VISI: TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN KEDIRI YANG MAJU, BERKARAKTER NASIONALIS-RELIGIUS, SERTA SEJAHTERA BERDASARKAN EKONOMI KERAKYATAN YANG DIDUKUNG BIROKRASI YANG MELAYANI.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Misi 1: Pengembangan Sumber Daya Manusia yang Berkarakter Nasionalis-Religius			
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	Peningkatan standarisasi dan inovasi layanan pendidikan	Pengembangan layanan pendidikan dasar yang merata di seluruh unit pendidikan
			Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar
			Pengintegrasian nilai-nilai kebangsaan, pendidikan karakter, dan kearifan lokal di tingkat pendidikan
			Penguatan kapasitas sumber daya dan manajemen pendidikan
			Pemberian beasiswa dan bantuan pendidikan
			Inovasi layanan pendidikan berbasis teknologi informatika
			Fasilitasi layanan pendidikan inklusi
	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan masyarakat	Peningkatan pemerataan dan kualitas layanan kesehatan	Mengembangkan sarana dan prasarana kesehatan yang berkualitas serta terjangkau
			Meningkatkan kompetensi dan ketersediaaan SDM bidang kesehatan
			Pembinaan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam kepesertaan jaminan kesehatan
			Penerapan pola hidup sehat bagi keluarga
			Menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi
			Penataan Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)
			Peningkatan promosi kesehatan dalam menghadapi kondisi pandemi
			Peningkatan kualitas layanan kesehatan dan fasilitas kesehatan sampai dengan desa
			Penambahan layanan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda)
			Peningkatan kapasitas tenaga kerja lokal yang unggul

	Meningkatnya kualitas tenaga kerja dan kesempatan kerja	Mencetak tenaga kerja unggul siap pakai	Fasilitasi pelatihan kerja sesuai dengan kebutuhan pasar dan mendukung ekonomi daerah
			Fasilitasi pemasaran dan bursa tenaga kerja
			Perlindungan ketenagakerjaan
			Fasilitasi sertifikasi tenaga kerja
			Penyediaan *job training*
			Standarisasi sarana prasarana Balai Latihan Kerja (BLK)
			Fasilitasi pendampingan dan konsultasi ketenagakerjaan
Menurunkan angka kemiskinan	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat berbasis keluarga	Penguatan dan peningkatan ekonomi berbasis keluarga	Pemberian bantuan bagi masyarakat miskin dan rentan serta terdampak krisis (contohnya pandemi)
			Pemberdayaan keluarga miskin melalui pelatihan *life skill* dan *economic skill*
			Pengembangan program usaha bersama berbasis keluarga
			Penanganan masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial
			Penguatan kesiapsiagaan terhadap korban sosial dan bencana
		Pengarusutamaan gender dalam pembangunan	Pemberdayaan perempuan di setiap kegiatan pembangunan
			Perlindungan perempuan dan anak dari kasus kekerasan
			Penyediaan pusat pendampingan dan konsultasi bagi perempuan dan anak
		Penguatan Program Keluarga Berencana	Penyebarluasan program keluarga berencana dan keluarga sehat sampai dengan desa
			Fasilitasi pendampingan tenaga penyuluh di kegiatan masyarakat
			Fasilitasi alat kesehatan keluarga (contohnya KB)
			Penyediaan layanan konseling keluarga
Meningkatkan harmonisasi dan kondusivitas daerah	Meningkatnya penerapan nilai nasionalisme, agama, dan semangat demokrasi di masyarakat	Penguatan dan kampanye nilai nasionalisme, agama, dan demokrasi di semua tingkatan masyarakat	Perumusan pengarusutamaan penerapan nilai nasionalisme, agama, dan demokrasi di setiap tingkatan masyarakat
			Menyisipkan semangat nasionalisme kebangsaan di setiap kegiatan Perangkat Daerah
			Penguatan peran tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama sebagai mitra dan media propaganda positif di

	Meningkatnya peran masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban umum	Kerjasama pemerintah dan masyarakat dalam meningkatkan keamanan dan ketertiban umum	Penguatan kelembagaan peran masyarakat di skala lingkungan dalam kegiatan ketentraman dan ketertiban
			Fasilitasi kegiatan kemasyarakatan
			Monitoring bersama masyarakat secara berkala
Misi 2: Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik			
Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Membangun institusional penyelenggaraan pemerintah yang efektif dan bersih	Percepatan penerapan kebijakan reformasi birokrasi	Evaluasi terhadap peta jalan reformasi birokrasi
			Perumusan kebijakan percepatan reformasi birokrasi
			Peningkatan koordinasi kelembagaan antar eksekutif dan legislatif
			Manajemen perubahan dengan mengubah pola komunikasi pemimpin-rakyat
			Penguatan tugas-tugas kewilayahan
			Pendelegasian kewenangan untuk mencapai birokrasi yang efektif dan efisien dalam penyelenggaraan pemerintahan
			Penguatan kapasitas perencanaan daerah
			Optimalisasi peran Dewan Riset Daerah
			Peningkatan kreasi dan inovasi daerah
			Optimalisasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
	Meningkatkan Profesionalitas ASN	Peningkatan profesionalitas dan produktivitas ASN	Pemberian *reward and punishment* di jajaran birokrasi
			Penataan dan penguatan organisasi
			Peningkatan kualitas SDM dan kesejahteraan aparatur
			Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dan Insentif untuk Tenaga Kontrak, Guru Honorer, serta
			Peningkatan pengawasan dan akuntabilitas kinerja
	Transformasi digital penyelenggaraan pelayanan publik	Digitalisasi birokrasi, informasi, dan layanan publik	Penyiapan *roadmap* dan *masterplan* digitalisasi birokrasi, informasi, dan layanan publik
			Pengembangan *e-government*
			Penerapan Tata Naskah Dinas Elektronik
			Pengembangan *Smart*-Pertanian melalui program Desa Inovasi Tani Organik (DITO)
			Pengembangan ekonomi digital (*e-commerce*)
			Menyediakan pelayanan cerdas menggunakan teknologi informasi berbasis *Big Data*, *Artificial Intelligence*, *Robotics*, *Cloud Computing* sehingga masyarakat bisa melayani dirinya sendiri dari rumah

			Pengembangan, pengintegrasian, dan pemanfaatan interoperabilitas sistem informasi dalam satu *big data*
			Penyediaan infrastruktur pendukung layanan teknologi informatika
			Pengembangan aplikasi pendukung layanan publik, informasi, promosi potensi daerah, pariwisata, dan aktivitas penunjang masyarakat lainnya
			Penguatan komunikasi informasi publik melalui media sosial, media tatap muka, dan radio
			Pengembangan komunikasi tematik melalui program NGOPI (Ngobrol Persoalan dan Solusi)
			Kerjasama dan penguatan jejaring komunikasi media masa, komunitas, dan kelompok informasi masyarakat
			Peningkatan kualitas dan kuantitas inovasi pelayanan publik
			Inovasi pelayanan publik jemput bola
			Penguatan jejaring komunikasi persandian daerah
			Peningkatan tertib administrasi arsip dan pelayanan publik
			Penyediaan Mall Pelayanan di kecamatan atau desa
			Mendorong intensitas komunikasi pemberi pelayanan kepada pengguna layanan untuk selalu melakukan
			perbaikan layanan guna meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat
			Peningkatan komunikasi dan informasi publik NGOPI (Ngobrol Persoalan dan Solusi)
			Penyediaan mobil siaga
Misi 3: Pengembangan Ekonomi Kerakyatan dan Peningkatan Investasi Daerah			
Meningkatkan daya saing sektor ekonomi daerah	Meningkatnya daya beli masyarakat	Peningkatan fasilitasi pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi	Pemberdayaan peningkatan produktivitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi dan restrukturisasi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan Koperasi
			Pembinaan dan pengembangan usaha bagi wirusahawan baru
			Peningkatan Akses pasar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan koperasi ke daerah daerah yang potensial

			Fasilitasi penerapan teknologi tepat guna
			Fasilitasi Kemitraan Usaha dengan perusahaan besar dan *stakeholder* potensial lainnya
		Meningkatnya kelancaran distribusi arus barang dan jasa secara aman dan terkendali	Pengembangan sarana dan prasarana serta fasilitas perdagangan yang semakin tersebar dan merata di wilayah Kabupaten Kediri
			Meningkatkan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di seluruh wilayah Kabupaten Kediri
			Pengendalian harga dan stok kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar
			Peningkatan pelaksanaan metrologi legal, berupa tera, tera ulang, dan pengawasan
			Peningkatan penggunaan produk dalam negeri
		Menumbuhkan sektor industri kecil dan menengah berbasis komoditas unggulan daerah	*Roadmap* pengembangan potensi sektor Industri Kabupaten Kediri
			Fasiltasi kemitraan usaha industri kecil dengan berbagai pihak potensial lainnya
			Pembinaan dan Pelatihan bagi pelaku industri kecil berbasis komoditas masyarakat
	Meningkatnya investasi di daerah	Peningkatan iklim kondunsif yang mendorong peningkatan realisasi investasi pada sektor unggulan daerah yang meyerap tenaga kerja lokal	Penetapan Pemberian Fasilitas / Insentif Bidang Penanaman Modal
			Pengembangan peta digital potensi investasi Kabupaten Kediri
			Peningkatan promosi potensi penanaman modal
			Pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu
			Pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal
			Pengelolaan data dan informasi perizinan yang terintegrasi dengan SATU DATA Provinsi dan Nasional
Misi 4: Revitalisasi Pertanian untuk Ketahanan dan Swasembada Pangan			
Meningkatkan daya dukung dan kemandirian sektor pertanian dan pangan daerah	Meningkatnya ketersediaan pangan dan akses pangan masyarakat	Peningkatan produksi dan nilai tambah produk pertanian	Pengembangan kawasan pertanian berkelanjutan
			Pengembangan kawasan agropolitan
			Pengembangan kawasan pertanian organik
			Optimalisasi lahan pertanian marginal dan pekarangan
			Pengembangan komoditas unggulan pertanian
			Pengembangan sistem pemasaran produk agro
			Pengembangan komoditas unggulan peternakan

			Pengembangan Desa Inovasi Tani Organik (DITO) di setiap kecamatan
			Penguatan gerakan pertanian organik, sertifikasi produk, dan kerjasama pemasaran organik
	Meningkatnya kesejahteraan petani	Peningkatan diversifikasi dan pengolahan pangan	Pengembangan lumbung pangan desa
			Peningkatan distribusi pangan
			Peningkatan ketersediaan pangan
			Pengembangan olahan pangan berbasis sumber daya
			Peningkatan keamanan pangan
		Peningkatan produksi perikanan	Pengembangan perikanan berkelanjutan
			Pengembangan olahan dan pemasaran produk
			Peningkatan pengawasan sumber daya perikanan dan perairan secara umum
Misi 5: Peningkatan Infrastruktur dan Konektivitas antar Wilayah			
Menurunkan kesenjangan pembangunan antar wilayah	Meningkatnya sarana infrastruktur daerah	Memantapkan penyediaaan infrastruktur konektivitas antar wilayah di Kabupaten Kediri guna menunjang produktivitas antar wilayah	Pembangunan dan pemeliharaan jalan serta jembatan yang menghubungkan sentra produksi dan
			Pembangunan infrastruktur di Kawasan Ekonomi Khusus (Kampung Inggris, SLG, kawasan bandara, PDP Margo Mulyo, dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi)
			Pembangunan dan pemeliharaan fasilitas serta sarana irigasi, pengairan, dan sarana produksi lainnya di
			Pengembangan dan pemeliharaan sumber daya air baku dan air bersih untuk mendukung kebutuhan
			Penguatan sistem sanitasi lingkungan wilayah Kabupaten Kediri
			Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman
			Penataan kawasan dan wilayah Kabupaten Kediri guna
			Pengembangan peta digital ruang wilayah Kabupaten Kediri dalam mendukung kebijakan SATU DATA
		Meningkatkan penataan perumahan dan kawasan pemukiman yang sehat dan berkelanjutan	Pembangunan rumah layak huni
			Penataan kawasan perumahan dan pemukiman
			Pembangunan sarana dan prasarana pendukung kawasan
			Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penataan lingkungan perumahan dan pemukiman

			Penataan kawasan kumuh perkotaan
	Meningkatnya pelayanan transportasi daerah	Memantapkan sistem transportasi antar wilayah guna peningkatan mobilitas orang dan barang antar wilayah	Peningkatan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk
			Penguatan implementasi Rencana Induk Jaringan LLAJ
			Peningkatan sarana dan prasarana pendukung LLAJ
			Peningkatan pengujian berkala kendaraan bermotor
			Peningkatan penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang
			Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam
			Peningkatan pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota
Misi 6: Optimalisasi Kepariwisataan Berbasis Kearifan Lokal			
Meningkatkan daya saing pariwisata daerah	Meningkatnya pendapatan daerah dari sektor pariwisata	Peningkatan pariwisata lokal berbasis desa dan kawasan	Identifikasi obyek wisata yang memiliki keunggulan karakter lokal belum dan sedang berkembang
			Pengembangan DEWI (Desa Wisata) & *Roadmap* Pemulihan Destinasi Wisata
			Perbaikan sarana pendukung aksesibilitas interkonektivitias antar obyek wisata yang bisa ditempuh dalam *trip* sehari (kerjasama dengan PUPR)
			Pengembangan Desa Wisata Pintar (S*mart* DEWI) berbasis karakter lokal didukung promosi *e-commerce* (kerjasama dengan Kominfo)
Misi 7: Optimalisasi Tata Kelola Lingkungan Hidup, Sumber Daya Alam, dan Mitigasi Bencana			
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kelestarian sumber daya alam	Meningkatnya kualitas lingkungan	Peningkatan tata kelola lingkungan hidup berbasis masyarakat	Pengembangan aplikasi pemantauan kondisi area pembuangan sampah dan limbah (kerjasama dengan Kominfo)
			Pengawasan lingkungan di tingkat kecamatan, seperti satgas yang didukung ketentraman dan ketertiban (trantib)
			Peningkatan pemanfaatan ruang-ruang hijau di gedung pemerintahan dan sekolah
			Pengembangan kelompok atau komunitas berbasis desa atau kecamatan
			Peningkatan hasil olahan limbah bernilai ekonomi kerjasama dengan ekonomi kreatif dan *Smart* DEWI
	Meningkatnya sinergitas antara	Optimalisasi dan penguatan peran	Peningkatan kesepahaman mengenai pengurangan risiko bencana ada di semua elemen (urusan)

	pemerintah, masyarakat, dan swasta dalam penanggulangan bencana	pemerintah, masyarakat, dan swasta berbasis desa tangguh bencana	Kerjasama pengembangan desa tangguh dengan sektor pertanian, wisata, dan informasi
Misi 8: Pengembangan Seni Budaya, Olahraga dan Kreativitas Pemuda			
Meningkatkan potensi seni budaya dan peran generasi muda untuk pembangunan daerah	Meningkatnya pelestarian seni budaya daerah	Pengembangan seni budaya, kearifan lokal, dan nilai tradisi berbasis masyarakat	Penguatan seni budaya, kearifan lokal, dan nilai tradisi di masyarakat sebagai potensi daerah
			Sinergitas seni budaya di kurikulum pendidikan dalam rangka keberlanjutan daya dukung potensi daerah
			Fasilitasi kegiatan seni budaya dan nilai tradisi masyarakat sampai dengan tingkat desa
			Peningkatan peran masyarakat dalam kegiatan berbasis seni budaya dan tradisi lokal
			Pembangunan sarana *event* seni budaya di tiap kecamatan
			Penyelenggaraan *event* seni budaya berskala nasional dan internasional
			Promosi potensi seni budaya lokal berbasis masyarakat
	Meningkatnya daya dukung generasi muda bagi daerah	Pembinaan organisasi kepemudaan dan olahraga prestasi	Meningkatkan pembinaan organisasi kepemudaan: pemuda yang mandiri dan kreatif
			Meningkatkan sarana prasarana olahraga
Misi 9: Perwujudan Kemandirian Desa untuk Kesejahteraan Masyarakat			
Mendorongdaya saing ekonomi masyarakat dan desa	Meningkatnya kemandirian masyarakat dan desa	Penguatan peran dan partisipasi masyarakat dan desa dalam pengelolaan dan pengembangan ekonomi lokal	Optimalisasi peran lembaga desa dalam pembangunan
			Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan potensi desa
			Penguatan kapasitas pemerintahan desa
			Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai upaya meningkatkan perekonomian desa
			Fasilitasi penyediaan sarana prasarana, akses, dan aktivitas daya dukung perekonomian desa
			Sinergitas program pemerintah dengan desa

Sumber : RPJMD Kab. Kediri Th, 2021-2026

3.5. Prioritas Pembangunan Kabupaten Kediri

Prioritas Pembangunan Kabupaten Kediri tahun 2024 berpedoman pada visi Bupati dan Wakil Bupati berikut:

”Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Kediri yang Maju, Berkarakter Nasionalis-Religius, serta Sejahtera Berdasarkan Ekonomi Kerakyatan yang Didukung Birokrasi yang Melayani”

Penjabaran makna dari visi Kabupaten Kediri yaitu :

MAJU

Suatu kondisi harapan yang akan diwujudkan untuk masyarakat Kediri dengan semakin meningkatnya daya saing daerah yang diiringi dengan kemajuan pembangunan kawasan, sumber daya manusia, birokrasi pemerintahan, layanan publik, serta dukungan teknologi yang unggul.

BERKARAKTER NASIONALIS RELIGIUS

merupakan cara berpikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap nilai-nilai kebangsaan, gotong royong, norma agama, sosial budaya sehingga menempatkan pribadi sebagai manusia yang beradab dalam bingkai Pancasila.

SEJAHTERA

merupakan kondisi masyarakat Kediri yang memiliki taraf hidup yang baik dan mampu memenuhi standar kebutuhan hidup yang layak melalui kegiatan keseharian yang mapan.

EKONOMI KERAKYATAN

merupakan sistem ekonomi yang ditujukan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat banyak melalui kegiatan ekonomi yang menitikberatkan pada peran masyarakat dengan mempergunakan sumber daya ekonomi lokal yang tumbuh

menjadi satu kesatuan bangunan ekonomi daerah.

BIROKRASI YANG MELAYANI

merupakan kondisi birokrasi pemerintahan yang memenuhi sebagian besar reformasi birokrasi, manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja untuk bertransformasi menjadi pelayan publik yang baik sekaligus mitra dan pengayom masyarakat menuju kesejahteraan dan kemajuan Kediri.

Visi tersebut dijabarkan lebih rinci dengan tujuan dan sasaran pada masing misi-misi sebagai berikut :

Tabel 27 TUJUAN DAN SASARAN MASING-MASING MISI

Tujuan	**Sasaran**
Misi 1 Pengembangan Sumber Daya Manusia yang Berkarakter Nasionalis-Religius	
Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing	a. Meningkatnya Aksesibilitas, Kualitas dan Manajemen Pendidikan b. Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat c. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
Tujuan	**Sasaran**
Menurunkan angka kemiskinan	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat berbasis keluarga
Tujuan	**Sasaran**
Meningkatkan Harmonisasi dan Kondusivitas Daerah	Meningkatnya Penerapan Nilai Nasionalisme, Agama, dan Semangat Demokrasi di Masyarakat
Misi 2 Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	

Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	a. Membangun institusional penyelenggaraan pemerintah yang efektif dan bersih b. Meningkatkan Profesionalitas ASN c. Transformasi digital penyelenggaraan pelayanan publik
Misi 3 Pengembangan Ekonomi Kerakyatan dan Peningkatan Investasi Daerah	
Meningkatkan Daya Saing Sektor Ekonomi Daerah	a. Meningkatnya daya beli masyarakat b. Meningkatnya Investasi Daerah
Misi 4 Revitalisasi Pertanian untuk Ketahanan dan Swasembada Pangan	
Meningkatnya Daya Dukung dan Kemandirian Sektor Pertanian dan Pangan Daerah	a. Meningkatnya ketersediaan pangan dan akses pangan masyarakat b. Meningkatnya Kesejahteraan Petani
Misi 5 Peningkatan Infrastruktur dan Konektivitas antar Wilayah	
Menurunkan Kesenjangan Pembangunan antar Wilayah	a. Meningkatnya sarana infrastruktur daerah b. Meningkatnya pelayanan transportasi
Misi 6 Optimalisasi Kepariwisataan Berbasis Kearifan Lokal	
Meningkatkan Daya Saing Pariwisata Daerah	Meningkatnya pendapatan daerah dari sektor pariwisata
Misi 7 Optimalisasi Tata Kelola Lingkungan Hidup, Sumber Daya Alam dan Mitigasi Bencana	
Tujuan	**Sasaran**
Meningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kelestarian Sumber Daya Alam	a. Meningkatnya kualitas lingkungan b. Meningkatnya sinergitas antar pemerintah, masyarakat dan swasta dalam penanggulangan bencana
Tujuan	**Sasaran**
Misi 8 Pengembangan Seni Budaya, Olahraga dan Kreativitas Pemuda	

Meningkatkan Potensi Seni Budaya dan Peran Generasi Muda untuk Pembangunan Daerah	Meningkatnya Kelestarian Seni Budaya Lokal dan Daya Dukung Generasi Muda bagi Daerah
Misi 9 Perwujudan Kemandirian Desa untuk Kesejahteraan Masyarakat	
Mendorong Daya Saing Ekonomi Masyarakat dan Desa	Meningkatnya Kemandirian Masyarakat dan Desa

Dengan menganalisis hasil evaluasi, isu strategis, rancangan kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan serta dalam rangka pencapaian prioritas pembangunan tahun 2024, maka tema pembangunan Kabupaten Kediri Tahun 2024 adalah : **"Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Transformasi Ekonomi Inklusif Berkelanjutan Didukung Birokrasi Melayani untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat"** dengan arah kebijakan sebagai berikut :

a. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan;
b. Akselerasi industrialisasi dan peningkatan nilai tambah hasil produksi berbasis potensi lokal;
c. Penguatan daya saing usaha dan investasi di daerah;
d. Pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan dan penurunan stunting;
e. Percepatan Pembangunan infrastruktur dan konektivitas;
f. Peningkatan kualitas pelayanan publik;
g. Keamanan dan kondusivitas politik saat Pemilu Serentak Tahun 2024; dan
h. Peningkatan kewaspadaan dini bencana dan pengelolaan lingkungan hidup.

Tema pembangunan tersebut kemudian menjadi muatan nilai dalam pelaksanaan pembangunan untuk masing-masing prioritas yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

Adapun pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Kediri terkait dengan pembangunan daerah pada tahun 2024 bahwa Pemerintah Daerah harus tetap

konsisten dalam pembangunan sumber daya manusia melalui upaya peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan, melalui program peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan pemerataan dan kualitas pelayanan kesehatan, peningkatan kualitas dan perlindungan tenaga kerja, serta perlindungan pada perempuan dan anak. Pemerintah daerah juga dituntut aktif dalam upaya pembangunan karakter yang sejalan dengan revolusi mental dan nilai-nilai kearifan lokal dengan peningkatan kualitas keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Pemerintah Daerah diharapkan dapat melaksanakan pembangunan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan pembangunan sektor Pertanian, UMKM, Koperasi dan Pariwisata, yang diwujudkan melalui program pembangunan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan, pengembangan kawasan agropolitan, revitalisasi pertanian, pengembangan pola kemitraan inti plasma yang berwawasan pasar, pengembangan smart pertanian melalui pemanfaatan inovasi teknologi, optimalisasi lahan kurang produktif, pengembangan UMKM, penguatan dan pemberdayaan koperasi, pengembangan ekonomi digital, peningkatan investasi dan daya saing produk unggulan berbasis sumber daya lokal, dan penggunaan teknologi informasi serta pemanfaatan artificial intelligence, pengembangan pariwisata daerah, serta optimalisasi perusahaan daerah.

Pemerintah Daerah harus bekerja ekstra dalam upaya pengentasan kemiskinan dan penurunan stunting yang ada di wilayah Kabupaten Kediri. Upaya pengentasan kemiskinan dapat ditempuh melalui perluasan dan penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan, pengembangan kesehatan dan pendidikan, perlindungan sampai dengan pemberdayaan masyarakat miskin. Sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia, upaya penurunan stunting tidak hanya dilakukan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan saja, tetapi diharapkan bisa dilakukan oleh semua

pihak, baik itu pemerintah desa, pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Dengan adanya sinergi dan kerja sama di berbagai sektor pemerintahan diharapkan bisa menurunkan angka stunting. Pengentasan kemiskinan dan penurunan stunting merupakan persoalan yang harus dihadapi dan dipecahkan bersama, dan tidak bisa hanya dilakukan oleh salah satu SKPD saja, tetapi harus dilakukan dengan meningkatkan kolaborasi dan keterlibatan seluruh Dinas terkait, serta harus mendapat dukungan dari seluruh lapisan masyarakat.

Pemerintah daerah harus meningkatkan pembangunan infrastruktur pada daerah-daerah pusat produksi, pusat distribusi dan pelayanan dasar, melalui optimalisasi pemanfaatan sarana prasarana irigasi, peningkatan infrastruktur pada lahan kering kurang produktif, kawasan non budidaya dan kawasan terisolir, pembangunan rumah tidak layak huni, pembangunan infrastruktur energi alternatif, pembangunan embung untuk pertanian, penanggulangan bencana dan energi air, serta memberikan prioritas lebih pada pembangunan infrastruktur di kawasan ekonomi khusus, seperti di Kawasan Kampung Inggris, Kawasan SLG, Kawasan Bandara, PDP Margo Mulyo dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Selain itu Pemerintah daerah diharapkan aktif dalam membaca segala peluang investasi dan dampak positif, serta mampu memprediksi dan meminimalisir segala dampak negatif atas pelaksanaan pembangunan infrastruktur dan konektivitas antar wilayah, diantaranya pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) Jalan Tol Kertosono-Kediri-Tulungagung, jaringan jalur strategis antar wilayah pusat sub wilayah pengembangan wilayah Kediri sekitarnya, serta berupaya maksimal dalam peningkatan jaringan jalan strategis antar kecamatan, antar desa, dan desa dengan ibukota kecamatan, guna mendukung aktivitas perekonomian warga masyarakat Kabupaten Kediri.

Reformasi Birokrasi harus dilaksanakan Pemerintah Daerah secara berkelanjutan dalam rangka mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang profesional dan memiliki komitmen tinggi memberikan pelayanan publik yang terbaik bagi masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan publik harus dapat diwujudkan dengan menjalankan pemerintahan daerah yang profesional, serta berkomitmen melaksanakan reformasi birokrasi, yang ditujukan pada perubahan mental aparatur, dengan mendorong terciptanya budaya kerja positif dan kondusif, guna mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, serta dengan terus menerus melakukan inovasi, dengan memanfaatkan teknologi informasi dan artificial intelligent dalam memberikan pelayanan publik yang cepat dan berkualitas bagi masyarakat Kabupaten Kediri.

Pelestarian lingkungan hidup harus seiring dan sejalan dengan pelaksanaan pembangunan daerah, yang dapat dilakukan pemerintah daerah melalui penegakan peraturan lingkungan hidup, penanganan dan pengelolaan persampahan, peningkatan dan pengembangan Ruang Terbuka Hijau. Pemerintah daerah harus meningkatkan kesiapsiagaan dan ketahanan bencana, mitigasi dan deteksi dini pada daerah rawan bencana di wilayah Kabupaten Kediri, serta terus meningkatkan sarana dan prasarana penanggulangan bencana, untuk dapat melindungi keselamatan warga masyarakat Kabupaten Kediri.

Pemerintah Daerah dituntut aktif dalam menciptakan dan memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kabupaten Kediri, dengan mengutamakan tindakan preventif dan persuasif, melalui kegiatan sosialisasi kepada masyarakat tentang penanaman kembali nilai-nilai nasionalisme dan wawasan kebangsaan, persatuan dan kesatuan bangsa, pencegahan paham radikalisme dan terorisme, peningkatan nilai-nilai toleransi dan kerukunan, pencegahan konflik SARA, serta penanaman nilai-nilai kearifan lokal seperti gotong royong, kepedulian dan

pengembangan budaya lokal, guna menjaga stabilitas, kondusivitas dan keamanan daerah menghadapi Pilpres, Pileg dan Pilkada Tahun 2024..

Selanjutnya masing-masing prioritas pembangunan daerah dijelaskan dalam program dan kegiatan prioritas, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 28 PENJELASAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

No.	Kesesuaian Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Perangkat Daerah *Leading Sector*
1.	**Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)**			
	Nasional : "Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing" **Provinsi Jawa Timur :** "Peningkatan Kepedulian Sosial dan Pelestarian Nilai-nilai Budaya Lokal" **Kabupaten Kediri :** "Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)"	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan SD yang Terakreditasi A	Dinas Pendidikan
			Persentase Satuan Pendidikan SMP yang Terakreditasi A	
			Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Literasi yang Memenuhi Kompetensi Minimum	
			Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Numerasi yang Memenuhi Kompetensi Minimum	
			Persentase Satuan PAUD yang Terakreditasi	
			Cakupan Pelayanan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	
			Persentase LKP/PKBM yang Terakreditasi	
		Program Pengembangan Kurikulum	Persentase Penerapan Kurikulum Muatan Lokal pada Satuan Pendidikan	Dinas Pendidikan

No.	Kesesuaian Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Perangkat Daerah *Leading Sector*
		Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rasio Guru Satuan SD, SMP, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan terhadap Peserta Didik SD, SMP, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Dinas Pendidikan
		Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Persentase Kelayakan Izin Operasional SD, SMP, PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan Masyarakat	Dinas Pendidikan
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase Pemuda yang Dibina/Dilatih	Dinas Pendidikan
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase Atlet Pelajar yang Dibina/Dilatih	Dinas Pendidikan
		Program Pembinaan Sejarah	Prosentase Sejarah Lokal yang Dilestarikan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		Program Pengembangan Kebudayaan	Prosentase Peningkatan Budaya Lokal yang Dilestarikan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
			Prosentase Peningkatan Kesenian Lokal yang Dilestarikan	
		Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Prosentase Peningkatan Group Kesenian yang Diberdayakan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Prosentase CB yang Dilestarikan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

No.	Kesesuaian Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Perangkat Daerah *Leading Sector*
		Program Pengelolaan Permuseuman	Prosentase Sarpras Museum yang Dipelihara	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase Perpustakaan yang Terkelola dengan Baik	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2.	**Transformasi Ekonomi Inklusif**			
	Nasional : "Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan" **Provinsi Jawa Timur :** "Peningkatan dan Kemandirian Pangan dan Pengelolaan Sumber Daya Energi" **Kabupaten Kediri :** "Transformasi Ekonomi Inklusif"	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Produktivitas Ternak : - Service per Conception - Calving Interval - Conception Rate	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
			Jumlah SPR yang Terbentuk	
		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Cakupan Pemanfaatan Prasarana Peternakan dan Kesehatan Hewan yang Tersedia	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
		Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Penanganan Kasus Penyakit Hewan	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
			Jumlah Unit Usaha Produk Hewan yang Tersertifikasi NKV	
		Program Perizinan Usaha Pertanian	Jumlah Usaha Pengolahan Hasil Peternakan Bersertifikat BPOM	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
			Persenatse Toko Obat Hewan yang Berizin	
		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Kelompoktani yang Dilakukan Monitoring dalam Pemanfaatan Sarana Pertanian	Dinas Pertanian dan Perkebunan

No.	Kesesuaian Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Perangkat Daerah *Leading Sector*
			Persentase Pemanfaatan Benih/Bibit Unggul Pertanian	
			Jumlah Desa yang Melaksanakan Inovasi Tani Organik	
		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Prosentase Prasarana Pertanian dengan Kondisi Baik	Dinas Pertanian dan Perkebunan
		Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Cakupan Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Pertanian (Serangan OPT)	Dinas Pertanian dan Perkebunan
		Program Penyuluhan Pertanian	Cakupan Bina Kelompok Tani	Dinas Pertanian dan Perkebunan
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Pasar yang Memenuhi Standar	Dinas Perdagangan
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Dinas Perdagangan
		Program Pengembangan Ekspor	Persentase Produk Ekspor Unggulan	Dinas Perdagangan
		Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase Pelaku Usaha yang Memenuhi Uji Metrologi Legal	Dinas Perdagangan
		Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase Kegiatan Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Dinas Perdagangan

No.	Kesesuaian Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Perangkat Daerah *Leading Sector*
		Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Pertumbuhan Industri yang Terstandarisasi	Dinas Perdagangan
		Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Cakupan Layanan Sistem Informasi Industri Nasional	Dinas Perdagangan
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Dinas Perikanan
			Pembesaran (Ton) Ikan Hias (Ribu Ekor) Benih (Juta Ekor)	
		Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Cakupan Wilayah Pengawasan Sumber Daya Ikan di Perairan Umum Darat	Dinas Perikanan
		Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah Konsumsi Asal Ikan (Kg/Kapita/Tahun)	Dinas Perikanan
		Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Tingkat Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
		Program Penilaian Kesehatan KSP/ USP Koperasi	Persentase Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam yang Cukup Sehat	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
		Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase SDM Koperasi Terlatih	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
		Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase Partisipasi Koperasi Aktif	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

No.	Kesesuaian Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Perangkat Daerah *Leading Sector*
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Partisipasi Usaha Mikro	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
		Program Pengembangan UMKM	Persentase Usaha Mikro yang Meningkat Omsetnya	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Prosentase Peningkatan Obyek dan Daya tarik Wisata	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		Program Pemasaran Pariwisata	Lama Tinggal (*Length of Stay*) Wisatawan di Kabupaten Kediri	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Prosentase SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Berkompetensi Dasar	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3.	**Penanggulangan Kemiskinan dan Percepatan Penurunan Stunting**			
	Nasional : "Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan" **Provinsi Jawa Timur :** "Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan"	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial	Dinas Sosial
		Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Persentase Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Dinas Sosial
		Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PMKS yang Mendapat Program Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial
		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Pelaksanaan Perlindungan dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial

No.	Kesesuaian Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Perangkat Daerah *Leading Sector*
	Kabupaten Kediri : "Penanggulangan Kemiskinan dan Percepatan Penurunan Stunting"	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase Kegiatan yang Dilaksanakan yang Mengacu ke Rencana Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja
		Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Dinas Tenaga Kerja
		Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan (Dalam dan Luar Negeri) melalui Mekanisme Layanan antar Kerja dalam Wilayah Kabupaten/Kota	Dinas Tenaga Kerja
		Program Hubungan Industrial	Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak	Dinas Tenaga Kerja
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Kecamatan STBM	Dinas Kesehatan
			Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Terakreditasi	
			Indeks Keluarga Sehat	
			Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan (FKTL) Terakreditasi	
			Persentase Nakestrad dan Hattra yang Memiliki Izin	
			AKI	
			AKB	

No.	Kesesuaian Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Perangkat Daerah *Leading Sector*
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Kecukupan Rasio dan Kompetensi Tenaga Kesehatan	Dinas Kesehatan
		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Prosentase Pemberian Rekomendasi Apotek, TO, TK, Alkes dan Optikal, UMOT	Dinas Kesehatan
			Prosentase Produk Makanan Minuman Tertentu yang Bersertifikat P-IRT	
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase UKBM Purnama Mandiri (Posyandu Balita, Poskestren, Poskesdes, SBH, Desa Siaga)	Dinas Kesehatan
		Program Penataan Desa	Tingkat Penyelenggaraan Penataan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
		Program Peningkatan Kerja Sama Desa	Persentase Kerjasama antara Desa yang Terfasilitasi	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
		Program Administrasi Pemerintahan Desa	Tingkat Tertib Administrasi Pemerintahan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa yang Dibina	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

No.	Kesesuaian Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Perangkat Daerah *Leading Sector*
		Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase OPD yang Responsif Gender	DP2KBP3A
		Program Perlindungan Perempuan	Persentase Kasus Kekerasan terhadap Perempuan yang Tangani oleh P2TP2A	DP2KBP3A
		Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase Kegiatan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak yang Dilaksanakan di Tingkat Desa	DP2KBP3A
		Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase Kasus Kekerasan terhadap Anak yang Diselesaikan oleh P2TP2A	DP2KBP3A
		Program Pengendalian Penduduk	Persentase Desa/Kelurahan yang Memiliki Data Mikro Keluarga	DP2KBP3A
		Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase *Unmeet Need*	DP2KBP3A
		Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Cakupan Keluarga Sasaran menjadi Anggota Kelompok Kegiatan (BKB, BKR, BKL)	DP2KBP3A
			Persentase Perkawinan Perempuan Usia <20 Tahun	
4.	**Pembangunan Infrastruktur Konektivitas**			
	Nasional : "Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Prosentase Panjang Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik	Dinas PUPR

No.	Kesesuaian Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Perangkat Daerah *Leading Sector*
	Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar" **Provinsi Jawa Timur :** "Penguatan Konektivitas antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur Ekonomi dan Pelayanan Dasar" **Kabupaten Kediri :** "Pembangunan Infrastruktur Konektivitas"	Program Penyelenggaraan Jalan	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik	Dinas PUPR
		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Cakupan Penyelesaian Peraturan Tata Ruang	Dinas PUPR
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Rumah Tangga/KK Mendapatkan Akses Air melalui SPAM	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase Pengelolaan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Cakupan Pelayanan SPALD yang Aman	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase Bangunan Gedung yang Memiliki IMB	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Program Kawasan Permukiman	Persentase Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman yang Memiliki Izin	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	Prosentase Penyelesaian Ganti Kerugian Tanah	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

No.	Kesesuaian Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Perangkat Daerah *Leading Sector*
		Program Redistribusi Tanah, dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Persentase Penyelesaian Redistribusi Tanah yang Telah Ditetapkan	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Ketersediaan Kajian Penyelenggaraan dan Pengembangan Bidang Perhubungan	Dinas Perhubungan
			Persentase Ketersediaan Perlengkapan Jalan	
			Persentase Peningkatan Ketertiban dan Keselamatan LLAJ	
			Persentase Angkutan Jalan yang Memenuhi Standart Keselamatan	
5.	**Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik**			
	Nasional : "Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan" **Provinsi Jawa Timur :** "Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata"	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Ketepatan Waktu Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS	BPKAD
			Ketepatan Waktu Penyampaian Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS	
			Ketepatan Waktu Pengajuan Rancangan Perda tentang APBD	

No.	Kesesuaian Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Perangkat Daerah *Leading Sector*
	Kabupaten Kediri : "Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik"		Ketepatan Waktu Pengajuan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD	
			Prosentase Penerbitan SP2D Tepat Waktu	
			Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan	
			Ketepatan Waktu Penyampaian Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD	
			Keandalan Pelaporan Keuangan	
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Aset Pemerintah Daerah yang Diamankan	BPKAD
		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan PAD	Bapenda
		Program Kepegawaian Daerah	Indeks Profesionalisme Dimensi Kinerja dan Disiplin	BKD
		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Indeks Profesionalisme Dimensi Kompetensi dan Kualifikasi	BKD
		Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan yang Disusun Tepat Waktu	Bappeda

No.	Kesesuaian Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Perangkat Daerah *Leading Sector*
		Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan Program RKPD dengan RPJMD	Bappeda
		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Prosentase Pelaku Usaha yang Diberikan Insentif/Fasilitas di Bidang Penanaman Modal	DPMPTSP
		Program Promosi Penanaman Modal	Prosentase Pelaksanaan Strategi dan Kegiatan Promosi yang Dilaksanakan	DPMPTSP
		Program Pelayanan Penanaman Modal	Prosentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu	DPMPTSP
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Prosentase Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	DPMPTSP
		Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Prosentase Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	DPMPTSP
		Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Penyelesaian Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Sekretariat Daerah
			Persentase Pemenuhan Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
		Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Rekomendasi Kebijakan Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Sekretariat Daerah

No.	Kesesuaian Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Perangkat Daerah *Leading Sector*
			Persentase Layanan Administrasi Perekonomian dan Pembangunan yang Terlaksana	
		Program Pengelolaan Perbatasan	Persentase Pemenuhan Pengelolaan Perbatasan	Sekretariat Daerah
		Program Pendaftaran Penduduk	Kepemilikan Dokumen Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Program Pencatatan Sipil	Cakupan Kepemilikan Dokumen Akta Catatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Peningkatan Kualitas Pelayanan Adminduk	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Tersusunnya Buku Profil Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Program Informasi dan Komunikasi Publik	Cakupan Layanan Informasi Komunikasi dan Pengaduan	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Program Aplikasi Informatika	Cakupan Layanan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Ketersediaan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Cakupan Keamanan Persandian dan TI	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Program Pengelolaan Arsip	Tingkat Tertib Pengelolaan Arsip OPD	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

No.	Kesesuaian Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Perangkat Daerah *Leading Sector*
		Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Persentase Autentisitas Arsip Statis yang Ditetapkan	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
		Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Hasil Penelitian yang Telah Diimplementasikan	Balitbangda
		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRP	Presentase Pelaksanaan Fasilitasi Pembahasan Propemperda dan Rancangan Perda	Sekretariat DPRD
		Program Penyelenggaraan Pengawasan	Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Inspektorat
		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah	Inspektorat
			Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	
			Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)	
6.	**Peningkatan Stabilitas, Kondusivitas dan Keamanan Daerah Menghadapi Pilpres, Pileg, dan Pilkada**			
	Nasional : "Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Cakupan Kelompok yang Dibina tentang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Bakesbangpol

No.	Kesesuaian Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Perangkat Daerah *Leading Sector*
	Pelayanan Publik" **Provinsi Jawa Timur :** "Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat di Jawa Timur" **Kabupaten Kediri :** "Peningkatan Stabilitas, Kondusivitas dan Keamanan Daerah Menghadapi Pilpres, Pileg, dan Pilkada"	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Persentase Partai Politik yang Difasilitasi	Bakesbangpol
		Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Pembinaan Ormas	Bakesbangpol
		Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase Kelompok Masyarakat yang Dibina terkait Narkoba, Kerukunan Beragama dan Kepercayaan	Bakesbangpol
		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase Konflik Sosial yang Ditindak Lanjuti	Bakesbangpol
		Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani	Satpol PP
		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Cakupan Layanan Kasus Penanganan Bencana Kebakaran	Satpol PP

No.	Kesesuaian Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Perangkat Daerah *Leading Sector*
7.	**Pembangunan Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana**			
	Nasional : "Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim" **Provinsi Jawa Timur :** "Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup" **Kabupaten Kediri :** "Pembangunan Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana"	Program Penanggulangan Bencana	Tingkat Ketersediaan Kajian Risiko Bencana Kabupaten	BPBD
		Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Tingkat Ketersediaan Kajian Pengelolaan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Prosentase Hasil Pemantauan Kualitas Lingkungan yang Memenuhi Baku Mutu	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Persentase Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Jumlah Kegiatan/Usaha yang Dibina terkait Pengelolaan Limbah B3	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase Usaha dan/atau Kegiatan Berizin Lingkungan dan PPLH yang Dibina	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Mendapat Penyuluhan LH	Dinas Lingkungan Hidup

No.	Kesesuaian Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Perangkat Daerah *Leading Sector*
		Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase Aduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) yang Terselesaikan	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Pengelolaan Persampahan	Prosentase Sampah yang Dikelola	Dinas Lingkungan Hidup

Sumber : Bappeda

3.6. Tindak lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

Tabel 29 Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

Rekomendasi DPRD Tahun N-1	Perangkat Daerah	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1. Pengelolaan Keuangan Daerah **a. Pengelolaan Pendapatan Daerah** Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp 3.163.467.890.431,88. Realisasi Pendapatan Daerah ini meningkat sebesar Rp 103.609.410.281,12 atau meningkat 3,4 persen dibandingkan Tahun Anggaran 2022, atau meningkat 8,2 persen dibandingkan Tahun Anggaran 2021. Realisasi Pendapatan Daerah yang terus meningkat setiap tahun ini patut diapresiasi dan perlu untuk terus dijaga kesinambungannya. Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp 2.526.670.467.437,00. Realisasi Pendapatan Transfer ini meningkat Rp148.349.323.564,00 atau tumbuh 6,2 persen dibanding Tahun Anggaran 2022. Besarnya realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2023	- BPKAD - BAG PBJ&AP	Terus meningkatkan *sinkronisasi* serta sinergi kebijakan dan program dengan pemerintah pusat maupun provinsi**.** Untuk melakukan ***optimalisasi*** aset daerah dilakukan beberapa upaya sebagai berikut: a. Melakukan identifikasi dan inventarisasi aset berupa pendataan ulang aset untuk memastikan semua aset telah tercatat dengan baik, monitoring secara sistematis dan *real-time* melalui e-Simbada, mengkategorikan aset berdasarkan potensi pengembangan ekonomi; seperti aset yang dapat dijual, disewakan, atau dikembangkan dalam skema kerjasama;	

artinya bahwa sebesar 79,87 persen Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 ditopang oleh Pendapatan Transfer, terutama Transfer Pemerintah Pusat. Oleh sebab itu, Pemerintah Daerah perlu untuk terus meningkatkan sinkronisasi serta sinergi kebijakan dan program dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi dan di sisi lain tetap terus berupaya meningkatkan kemandirian anggaran melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Realisasi PAD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 636.075.970.326,88, atau berkontribusi sebesar 20,11 persen terhadap total Pendapatan Daerah. Kontribusi PAD tahun anggaran 2023 menurun 1,12 persen dibanding Tahun Anggaran 2022 yang sebesar 21,23 persen, tetapi masih jauh di atas kondisi tahun 2021 dimana kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah sebesar 17,58 persen. Memperhatikan bahwa kontribusi PAD Tahun Anggaran 2023 mengalami sedikit penurunan, maka pemerintah daerah perlu menyusun peta jalan (roadmap) dan menjalankan langkah-langkah strategis dalam rangka meningkatkan PAD, di antaranya:		b. Pemanfaatan aset untuk sektor unggulan Kabupaten Kediri, berupa; optimalisasi aset untuk area wisata dan ekonomi kreatif, pertanian dan agrobisnis, industri dan perdagangan, serta mengembangkan aset strategis untuk menjadi pusat inovasi digital dan *coworking space* (*Smart City & Digital Economy*); c. Melakukan kerjasama pemanfaatan aset pihak ke-3 dan senantiasan melukan studi kelayakan untuk menentukan aset mana yang lebih menguntungkan jika dikerjasamakan dibandingan dengan dikelola langsung oleh Pemda; d. Melakukan digitalisasi dan transparasni pengelolaan aset, dengan pemanfaatan Linktree sebagtai integrasi data aset daerah Kabupaten Kediri; e. Optimalisasi aset yang tidak	

		produktif, dengan menyusun startegi relokasi, revitalisasi, atau pelepasan aset yang tidak strategis dan tidak berkontribusi optimal terhadap PAD; f. Melakukan evaluasi berkala melalui Rekonsiliasi ICSA (*Internal Control Self Assesment*) yang dilakukan rutin setiap bulan kepada setiap SKPD; Untuk Mengatasi ***Rendahnya Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah*** melalui Penyusunan Rencana Anggaran dan Belanja Daerah dilakukan upaya-upaya sebagai berikut: a. Melakukan kajian mendalam, menganalisa pola realisasi pendapatan dari tahun-tahun sebelumnya, serta memastikan penyusunan target lebih realistis berdasarkan data historis dan kondisi ekonomi Kabupaten Kediri; b. Mengoptimalisasi sumber-sumber pendapatan	

		dengan cara identifikasi sumber penerimanaa yang selama ini belum dimaksimalkan, melalui: • Pendapatan jasa lainnya yang sah (seperti; retribusi yang nilainya masih tergolong kecil); • Pendapatan dari kerja sama pemanfaatan aset daerah melalui skema Build Operate Transfer (BOT), Kerja Sama Pemanfaatan (KSP), atau Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU); • Dana transfer atau hibah dari pusat maupun provinsi yang dapat dimanfaatkan lebih optimal. c. Peningkatan Koordinasi dengan OPD terkait melalui; • Menguatkan sinergi antara BPKAD dengan OPD penghasil agar pengelolaan dan penagihan pendapatan lebih efektif.	

		Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah sebagai bagian dari anggota TAPD Kabupaten Kediri berperan aktif membantu pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pendapatan daerah tahun 2024 sesuai dengan Tupoksi. Upaya yang telah dilakukan adalah dengan aktif mengikuti rapat TAPD Kabupaten Kediri dan melaksanakan fungsi pengadaan barang/jasa dengan baik untuk mendapatkan barang/jasa yang berkualitas sehingga berperan dalam optimalisasi aset daerah	
1) Melakukan optimalisasi aset daerah sebagai salah satu upaya meningkatkan PAD di masa yang akan datang dengan memperhatikan trend perkembangan industri ke depan 2) Pemerintah daerah	BAPENDA	Dalam peningkatan PAD, Pemerintah Kabupaten Kediri telah melaksanakan penguatan mekanisme pemungutan pajak daerah yang dimulai dari pendataan dan pendaftaran	

perlu untuk terus mendorong inovasi dan akuntabilitas pengelolaan pajak dan retribusi daerah dalam rangka meningkatkan PAD. Peningkatan PAD dari Pajak dapat ditempuh melalui identifikasi dan pendataan wajib pajak baru, penerapan monitoring masa berlaku pajak reklame berbasis digital, penegakan aturan perpajakan secara disiplin dan peningkatan akuntabilitas perhitungan nilai pajak setiap wajib pajak. Peningkatan PAD dari Retribusi Daerah dapat didorong melalui peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur pelayanan parkir, penerapan SOP yang disiplin termasuk reward and punishment yang terukur terkait pemungutan retribusi parkir dan peningkatan akuntabilitas pengelolaan pendapatan hasil retribusi parkir berbasis digital.		obyek pajak dengan melakukan updating database pajak daerah. Selain itu Pemerintah Kabupaten Kediri juga memberikan kemudahan pembayaran pajak daerah melalui pembayaran online melalui bank dan channel bank jatim dan juga berbagai platform online yakni melalui Tokopedia serta indomaret. Sedangkan pengawasan, penagihan hingga pemeriksaan dilakukan dengan membentuk tim pemeriksaan pajak daerah yang saat ini aktif melakukan pemeriksaan kepada wajib pajak. Pemerintah Kabupaten Kediri juga melakukan kerjasama dengan instansi terkait antara lain Badan Pertanahan Nasional serta kerja sama dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk sinergi pengelolaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Selain itu dibentuk kerja	

		sama antara Badan Pendapatan daerah dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) untuk sinergi perizinan dan integrasi sistem informasi antara SIMPATDA dan SIMPATIK dalam rangka pengelolaan reklame	
3) Pemerintah daerah perlu untuk terus mendorong peningkatan kinerja BUMD melalui strategi inovasi yang berkelanjutan, baik inovasi produk dan layanan jasa kepada pelanggan, inovasi terhadap strategi pemasaran, inovasi dalam rangka efisiensi biaya operasional dan optimalisasi asset BUMD. Inovasi menjadi kunci bagi BUMD untuk dapat menciptakan atau menangkap peluang trend industri di masa yang akan datang yakni industri hijau yang lebih ramah lingkungan.	BAPENDA	Dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, Pemerintah kabupaten Kediri melakukan optimalisasi Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Kediri dengan reorganisasi BUMD sesuai fokus dengan proses bisnis yang sekarang dilakukan	
4) Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun	BAPENDA	Realisasi Lain-lain Pendapatan	

Anggaran 2023 hanya sebesar 22,86 persen. Terhadap rendahnya realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah ini maka ke depan pemerintah daerah perlu lebih cermat dalam menyusun rencana anggaran dan belanja daerah yang terkait hal tersebut		Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2023 menurun dikarenakan Penurunan BLUD pada tahun 2023 terjadi karena penurunan dana penanganan kasus Covid dibandingkan dengan tahun 2022	
b. Pengelolaan Belanja Daerah Kondisi umum Belanja Daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 3 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, terdapat beberapa perubahan baik perubahan karena adanya penambahan kegiatan baru ataupun pergeseran kegiatan yang disesuaikan dengan perkembangan pelaksanaan APBD. Realisasi total Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 3.288.924.911.656,4, meningkat 4,27 persen dibandingkan Tahun 2022, atau meningkat	- BPKAD - BAG PBJAP - PUPR	Untuk meningkatkan ***realisasi*** belanja daerah telah dilakukan beberapa upaya sebagai berikut: a. Melakukan rapat monitoring realisasi APBD setiap bulan yang dipimpin langsung oleh Bupati; b. Melakukan Rekonsiliasi ICSA (*Internal Control Self Assesment*) kepada masing-masing SKPD setiap bulan, baik rekonsiliasi terkait aset, kas/belanja, maupun alur proses terkait Akuntansi meliputi LRA manual sebagai bahan *controlling* pada LRA yang dihasilkan oleh SIPD RI sehingga LRA manual yang dihasilkan bisa	

11,97 persen dibandingkan Tahun 2021. Capaian serapan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar 93,39 persen, meningkat 1,39 persen dibandingkan capaian serapan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022. Capaian serapan serta kualitas dari Belanja Daerah ke depan perlu untuk terus ditingkatkan oleh Pemerintah Daerah. Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 2.196.425.893.300,31, meningkat 2,33 persen dibandingkan Tahun Anggran 2022, atau meningkat 10,12 persen dibandingkan tahun 2021. Rasio realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2023 mencapai 66,78 persen terhadap total Belanja Daerah. Tahun 2022, rasio realisasi Belanja Operasi sebesar 68,1 persen, sedangkan Tahun 2021 sebesar 67,9 persen. Artinya, rasionalisasi rasio Belanja Operasi terhadap Total Belanja Daerah dalam 3 tahun terakhir terus dijalankan dengan baik	-	secara *realtime* memantau penyerapan anggaran dan deteksi kekeliruan, potensi SiLPA sejak dini, dan meminimalisir resiko kesalahan diakhir tahun menjelang pelaporan (dokumen pertanggungjawaban) dan tidak ada keterlambatan dalam pecatatan; c. Verifikasi keseluruhan transaksi belanja untuk meminimalisir data temuan BPK saat diaudit; d. Mengupayakan Menerapkan mekanisme *early warning system* (EWS) bagi OPD yang realisasi belanjanya jauh di bawah target agar segera dilakukan evaluasi dan percepatan. Tingkat persentase realisasi penyerapan anggaran SKPD Tahun 2024 sebesar 93,46% atau sebesar Rp. 3.477.005.665.525, 94 **lebih besar** dibandingkan dengan penyerapan anggaran Tahun 2023 sebesar 93,39% atau sebesar Rp. 3.288.924.911.656, 40 (Data LRA	

oleh Pemerintah Daerah dan ke depan perlu untuk terus dilakukan serta kualitas dari belanja tersebut harus terus ditingkatkan. Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 483.080.137.961,09, meningkat 30,27 persen dibandingkan tahun 2022, atau meningkat 51,29 persen dibandingkan tahun 2021. Rasio Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 mencapai 14,69 persen terhadap total Belanja Daerah. Tahun 2022, rasio realisasi Belanja Modal sebesar 11,8 persen, sedangkan Tahun 2021 sebesar 10,9 persen. Artinya, dalam 3 tahun terakhir terjadi peningkatan cukup signifikan rasio Belanja Modal terhadap total Belanja Daerah. Nilai dan kualitas dari Belanja Modal diharapkan terus dapat ditingkatkan pada tahun anggaran berikutnya. Realisasi Belanja Transfer Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 608.709.404.295,00, mengalami penurunan sebesar 3,9 persen dibandingkan Tahun		*unaudited*). Kegiatan monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran telah dilaksanakan Tahun 2024 melalui kegiatan monev anggaran tingkat kabupaten dan yang diadakan oleh Pemprov. Jawa Timur serta Rapat TEPRA yang dipimpin langsung oleh Bupati atau Sekretaris Daerah. Selain itu juga telah diterbitkan Surat Edaran Sekretaris Daerah tentang Percepatan Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2024 untuk mendorong optimalisasi penyerapan belanja modal dan operasi yang terkait dengan belanja pengadaan barang/jasa. Dinas PUPR Pagu Belanja : Rp. 153.425.351.453,00 Realisasi Belanja : Rp.148.720.156.066,33,(96,93%) Silpa : Rp. 4.705.195.386,67 Belanja Terdiri dari : Belanja Operasi : 47.444.809.975,00 Belanja Modal : Rp. 101.275.346.091,33	

2022, tetapi masih lebih tinggi sebesar 3,30 persen dibandingkan tahun 2021. Rasio realisasi Belanja Transfer Tahun anggaran 2023 adalah sebesar 18,51 persen dari total Belanja Daerah. Nilai dan kualitas dari Belanja Transfer diharapkan terus dapat ditingkatkan pada Tahun Anggaran berikutnya karena menjadi pendorong pembangunan di level Desa. Silpa yang masih cukup tinggi menandakan penyerapan Anggaran dari Silpa sebelumnya kurang optimal hal ini perlu di dorong agar penyerapan dari Silpa sebelumya cukup signifikan.			
2. Implementasi Strategi dan Arah Kebijakan Daerah a. **Bidang Keimanan dan Ketakwaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa** Penerapan nilai nasionalisme, agama dan semangat demokrasi ditinjau dari tingkat pemahaman elemen masyarakat mulai menurun baik dari wawasan kebangsaan, nilai-nilai kebangsaan, serta karakter bangsa.	. BAGIAN KESRA . BAKESBANGPOL . DINAS PENDIDIKAN	1. Melaksanakan kegiatan Peringatan Hari Besar Agama dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan YME dan menjaga kerukunan antar umat beragama.	

Disamping itu, diwarnai dengan mulai memudarnya tingkat partisipasi masyarakat dalam ikut serta menjaga dan memelihara kondusifitas lingkungan dan kondusifitas wilayah/daerah, maka pemerintah daerah perlu menjalankan langkah-langkah, di antaranya: 1) Sinkronisasi kerukunan umat beragama, diharap pemerintah terus mengadakan pembinaan agar hubungan antar umat beragama tetap harmonis, serta penanggulangan kelompok radikal yang dapat mengganggu kerukunan antar umat beragama; 2) Perlu Peningkatan Sarana dan prasarana tempat ibadah agar dapat memadai sehingga masyarakat nyaman dalam beribadah; 3) Perlu pembinaan yang berkelanjutan Pemerintah Daerah dalam rangka pembinanan kerukunan antar umat beragama; 4) Perlu Peningkatan sarana dan Prasarana Taman		2. Melaksanakan kegiatan Doa Bersama (umat Islam, Kristiani, Hindu) dalam rangka memperingati Hari Jadi Kabupaten Kediri dan HUT RI. Kegiatan ini antara lain bertujuan untuk menjaga hubungan antar umat beragama agar tetap rukun dan harmonis. 3. Pemberian bantuan hibah kepada tempat ibadah, TPQ dan Pondok Pesantren di wilayah Kabupaten Kediri guna meningkatkan sarana prasarana tempat ibadah, TPQ dan Pondok pesantren sehingga masyarakat dapat beribadah dan	

Pendidikan Al Quran (TPQ) dan Pondok Pesantren dan perlu di alokasikan dana insentif kesejahteraan bagi guru guru TPQ dan Pondok Pesantren		menuntut ilmu agama dengan nyaman. 4. Bidang Ketahanan Ekososbud, Agama dan Ormas dalam Pembinaan Kerukunan Umat , Tahun 2025 merupakan Awal Masa Periode Kepengurusan FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) masa bhakti 2025-2029. Sehingga di awal tahun 2025 menyiapkan SK Kepengurusan keberlanjutan FKUB serta SK Tim Pembina FKUB dengan melibatkan berbagai SKPD maupun instansi vertical terkait guna	

		mendukung kelancaran tugas-tugas FKUB serta program kegiatan FKUB masa bhakti 2025-2029 sebagaimana amanah Peraturan Menteri Bersama Menteri Agama dan Mendagri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006. Disisi lain guna optimalisasi Pembinaan Bidang Ketahanan Ekososbud, Agama dan Ormas melakukan Rapat Koordinasi 7 kali dalam setahun dengan maksud dan tujuan a. agar tetap terjalin koordinasi Bakesbangpol dengan Pengurus FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) secara intensif	

		dalam forum Rakor b. Tersampaikannya seta termonevnya secara berkala Program kegiatan FKUB baik yang sudah berjalan maupun yang belum karena ada beberapa gendala sehingga bisa terselesaikan secara kolaborasi. c. Bidang Ketahanan Ekososbud, Agama dan Ormas Guna melaksanakan fungsi Pembinaan yang berkelanjutan dalam Pembinaan Kerukunan atar umat beragama. beberapa hal yang dilakukan adalah : Pemberian Supproting anggaran melalui Dana Hibah bagi FKUB (Forum	

		Kerukunan Umat Beragama) secara rutin tiap tahun sebagaimana pada Tahun 2024 sesuai amanah Permendagri No 15 Tahun 2023 tentang Penyusunan APBD 5. Penerima Bisyaroh Tahun 2024 sebanyak 9.000 orang mengcover BPJS Ketenagakerjaan dan BOSDA Madin sharing antara BKK Provinsi dan APBD sebanyak 2.101 guru ngaji.	
b. Bidang Kehidupan Berdemokrasi, Berbangsa dan Bernegara. 1) Partisipasi Masyarakat a) Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidik melalui Pendidikan Politik	BAKESBANGPOL	a) Telah diupayakan pelaksanaan Pendidikan Politik kepada pimpinan SKPD dan Camat se Kabupaten Kediri berupa sosialisasi	

dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik, Tujuan peningkatan peran parpol melalui pendidikan politik adalah untuk mencetak politisi-politisi yang santun dan beretika baik dari kalangan anggota parpol maupun dari masyarakat, utamanya dengan menggunakan dana Banpol yang telah diberikan oleh Pemerintah dan dana atas inisiatif Parpol sendiri. Maksud diadakannya Kegiatan Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik agar kesadaran politik anggota parpol maupun masyarakat luas semakin baik. Selain itu masyarakat diharapkan bisa lebih berpartisipasi dalam demokrasi dan dalam		pelaksanaan Pilkada dan Netralitas ASN dengan Narasumber dari KPU, Bawaslu dan Forkopimda. Diharapkan camat bisa segera menyampaikan informasi dari sosialisasi tersebut kepada jajaran dibawahnya, yakni kepala desa dan perangkat desa. Demikian juga kepala desa diharapkan menyampaikan secara langsung kepada Masyarakat. b) Sosialisai pemilu dan pilkada serentak juga dilakukan melalui radio, spanduk dan Videotron. Dimana yang menjadi sasaran adalah Masyarakat yang tidak sempat mengikuti sosialisasi secara langsung. Sehingga mereka tetap bisa mendapat informasi terkait pilkada agar menjadi semangat untuk berpartisipasi.	

pelaksanaan pemilu. Efeknya, Indek Demokrasi Indonesia di daerah akan semakin baik. Adapun manfaat dari program ini yaitu timbul pemahaman tentang pentingnya pendidikan politik bagi seluruh lapisan masyarakat sehingga muncul kesadaran dan peran aktif seluruh stakeholder dan masyarakat dalam peningkatan pendidikan politik serta demokrasi di Kabupaten Kediri. Selain itu terfasilitasinya kegiatan antara pemerintah daerah, lembaga pendidikan dan perwakilan partai politik dalam pelaksanaan pendidikan politik, serta terwujudnya sinergitas antara pemerintah daerah, instansi vertikal dan partai politik dalam rangka mendukung suksesnya pelaksanaan		c) Selain itu ada Bantuan politik kepada partai politik yang secara garis besar digunakan untuk Pendidikan politik kepada Masyarakat. Diharapkan Partai Politik juga berperan aktif dalam Pendidikan politik yang menyangkut 4 aspek penting : yaitu 1. Budaya Politik, 2.Etika Politik, 3. keterwakilan Perempuan 30 % dalam pemilu dan 4. meningkatkan demokrasi politik dengan meminimalisir *money politic* pada pelaksanaan pemilu ataupun pemilukada. d) Sosialisasi Banpol : evaluasi / monitoring terhadap Bantuan yang telah diluncurkan kepada Partai Politik. e) Optimalisasi koordinasi dan sosialisasi dengan forkopimda, Pimpinan SKPD dan BUMD . sinergitas disini	

Pemilu serentak Tahun 2024. b) Secara umum, permasalahan yang menjadi penghambat upaya peningkatan penerapan nilai nasionalisme, agama, dan semangat demokrasi diidentifikasikan sebagai berikut: di masyarakat telah 1. Kurang optimalnya peran aparatur, elite politik, tokoh agama, tokoh masyarakat, LSM, tenaga pendidik, pelajar dan mahasiswa dalam memperkokoh wawasan kebangsaan; 2. Kurang optimalnya peran-peran masyarakat dalam menjaga inklusivitas dan demokrasi di Kabupaten Kediri. 3. Perlunya peningkatan		untuk mendukung pelaksanaan pemilu dan pemilukada dan meningkatkan partisipasi Masyarakat pada pemilu dan pemilukada. f) Hal ini semua untuk ketercapaian IDI yang ada di Bakesbangpol sebagaimana Amanah Permendagri no. 15 th 2024 terkait petunjuk penyusunan APBD 2024 halaman 161 point 2 (tentang Pendidikan politik). 1. Di Bidang Ketahanan Ekososbud, Agama dan Ormas program pemberdayaan masyarakat digencarkan dengan melibatkan LSM, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat dalam bentuk kegiatan-kegiatan Sosialisasi di Tahun 2023-2024 tentang Peran dan fungsi Ormas/Lembaga	

keterpaduan sistem pengamanan melalui penataan komunikasi dan koordinasi yang efektif antar stakeholder; 4. Jaringan data informasi strategis dalam rangka peningkatan kewaspadaan daerah perlu untuk ditingkatkan; 5. Perlunya sosialisasi terkait upaya pemecahan dan solusi atas upaya memberikan pemahaman terkait pentingnya persatuan dan kesatuan. 6. Perlunya sosialisasi ketahanan nasional melalui penanaman ideologi bangsa kepada Masyarakat. c) Sedangkan dari aspek tingkat		Masyarakat sesuai amanah peraturan perundang-undangan dalam ikut berpartisipasi dalam mensukseskan Pembangunan serta menggalakkan P4GN dari berbagai elemen masyakarat sesuai Perda No 8 Tahun 2021 dan Perbup No 54 Tahun 2022 dengan tujuan untuk dapat membangun ketahanan masyarakat yang kuat terhadap ancaman narkoba. Dengan memberikan pemahaman dan semangat memerangi narkoba, kita turut memperkokoh ketahanan sosial dan budaya, serta menjaga generasi penerus agar tetap memiliki rasa cinta tanah air, tanggung jawab sosial, dan semangat gotong royong, yang merupakan inti dari wawasan kebangsaan.	

partisipasi demokrasi, masyarakat pun mulai ada sedikit pergeseran pemahaman dan pengetahuan terkait demokrasi di Kabupaten Kediri. Karena ketiga hal tersebut adalah faktor-faktor kunci daerah yang kondusif. Selain meningkatkan karakter nasionalis dan agama masyarakat Kabupaten Kediri yang akan diwujudkan dengan meningkatnya kerukunan antar umat beragama, terpeliharanya semangat kepahlawanan, nilai-nilai dan karakter kebangsaan, serta partisipasi demokrasi dengan dimensi sebagai berikut: Meningkatnya toleransi umat beragama dengan menerima dan saling menghormati perbedaan keyakinan, baik dalam kehidupan		2. Bidang Ketahanan Ekososbud, Agama dan Ormas Sebagai Upaya yang nyata dalam menjaga inklusivitas Pembangunan di kabupaten Kediri, salah satu peranan Bakesbangpo adalah memberikan Hibah dan arahan kepada Lembaga Disabilitas Kabupaten Kediri (PDKK) agar tetap bisa terbina, terorganisir serta memiliki peranan yang nyata serta melibatkan peranan Lembaga Disabilitas dalam sosialisasi dan keterlibatan Ormas/Lembaga Disabilitas dalam Pembangunan Kabupaten Kediri - Telah diupayakan peningkatan pemahaman demokrasi di kalangan Masyarakat dengan	

sosial ataupun dalam peribadatan, Penerapan nilai-nilai dan karakter kebangsaan, Menumbuhkan semangat kepahlawan dalam sadar bela negara.		anggaran yang ada 3. Bidang Ketahanan Ekososbud, Agama dan Ormas dalam supporting stragi peningkatan kewaspadaan Daerah secara riel membentuk dan melibatkan Tokoh Masyarakat dalam Tim Mediasi dalam penyampaian informasi khususnya perihal permasalahan Ekonomi, sosial dan Budaya yang muncul di Masyarakat yang telah diwadahi melalui Jejaring informasi melalui FAKSIN-TASYAH serta Peningkatan dan perluasan Fungsi FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) dalam menjaring dan memelihara dalam Upaya memelihara kerukunan Umat di Kabupaten Kediri.	
		4. Bidang Ketahanan Ekososbud, Agama dan	

		Ormas dalam supporting stragi peningkatan kewaspadaan Daerah secara riel membentuk dan melibatkan Tokoh Masyarakat dalam Tim Mediasi dalam penyampaian informasi khususnya perihal permasalahan Ekonomi, sosial dan Budaya yang muncul di Masyarakat yang telah diwadahi melalui Jejaring informasi melalui FAKSIN-TASYAH serta Peningkatan dan perluasan Fungsi FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) dalam menjaring dan memelihara dalam Upaya memelihara kerukunan Umat di Kabupaten Kediri 5. Mengoptimalkan peran FKDM, Optimalisasi antar OPD dan lintas sektor dengan membentuk jaringan Tim Kewaspadaan Dini Daerah dan	

		tim terpadu penanganan konflik sosial. 6. Bidang Ketahanan Ekososbud, Agama dan Ormas dalam beberapa kesempatan melalui Sosialisasi P4GN sekaligus menyampaikan perihal pentingnya Persatuan dan Kesatuan serta Hankamtimas demi Kondusivitas Daerah dengan melibatkan serta merangkul IPSI dan semua perguruan silat di kabupaten kediri sebagai sasaran kegiatan sosialisasi dimaksud. 7. Bidang Ketahanan Ekososbud, Agama dan Ormas melakukan upaya tindak lanjut perlunya sosialisasi ketahanan nasional, berbagai kegiatan telah dilakukan untuk menanamkan ideologi bangsa	

		kepada masyarakat, terutama dalam bidang ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya. Kegiatan ini meliputi Sarasehan mengenai pentingnya ketahanan ekonomi berbasis pemberdayaan masyarakat, penguatan solidaritas sosial melalui program gotong royong, dan pelestarian budaya lokal dalam menyambut dibukanya Bandara Dhoho Kediri agar memberikan dampak positif karena dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, meningkatkan konektivitas antar daerah, dan membuka peluang kerja baru. Hal ini sejalan dengan sosialisasi ketahanan ekonomi yang mengedepankan pemanfaatan sumber daya lokal dan	

		pemberdayaan masyarakat. Dengan adanya bandara baru, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya memelihara ketahanan nasional yang berbasis pada nilai-nilai kebangsaan, serta menjaga keseimbangan antara perkembangan ekonomi dan pelestarian budaya. c) beberapa langkah strategis di Bidang Ketahanan Ekososbud, Agama dan Ormas untuk meningkatkan toleransi umat beragama, dengan memanfaatkan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Serta beberapa hal lain yang telah dilakukan adalah : 1. dialog antarumat beragama	

		dalam bentuk sarasehan lintas tokoh agama sekaligus membentuk kelompok-kelompok komunitas dengan sasaran Pemuda lintas agama, Tokoh Agama Wanita lintas agama, Pengurus Rumah idabah Lintas Ibadah serta guru Agama kitab suci lintas Agama. 2. Penguatan Literasi Moderasi beragama dengan lintas Agama serta dengan elemen masyarkat lain salah satunya Kelompok Aliran Kepercayaan di kabupaten Kediri penguatan peran ormas dengan dilibatkan dalam kegiatan keagamaan dan	

		sosial yang memperkuat toleransi dan kerukunan umat beragama	
2) Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Hubungan Antar Penyelenggara Pemerintahan a) Hal tersebut bertujuan untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang aman tertib dan teratur. Hal tersebut dimaksudkan untuk menegakkan perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Diharapkan dengan hal penyelenggaraan roda Pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat	SATPOL-PP	Dalam rangka upaya penambahan personel, Satpol PP telah membuat pengajuan penambahan anggota melalui BKD dalam formasi CPNS 2024. Upaya perbaikan pengelolaan administrasi monitoring dan evaluasi terhadap tindaklanjut pelanggaran Perda dan Perkada dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi yang tersedia, maupun memanfaatkan aplikasi pelaporan yang telah dibuat provinsi maupun pusat. Dalam rangka mewujudkan	

melakukan kegiatannya dengan aman. b) Sedang permasalahan dalam bidang ketentraman dan ketertiban masyarakat adalah sebagai berikut: 1) Masih kurang idealnya jumlah personil Satuan Polisi Pamong Praja dan PPNS jika dibandingkan dengan Jumlah Penduduk dan Luas Wilayah Kabupaten Kediri; 2) Kurang tertibnya administrasi, Monitoring dan		ketenteraman dan ketertiban umum, Pemerintah Kabupaten Kediri melalui Satpol PP telah berperan secara aktif untuk melakukan pencegahan dan penegakan hukum sesuai dengan kewenangan daerah yang dilaksanakan dalam bentuk program / kegiatan antara lain : - Deteksi Dini - Patroli Wilayah secara rutin di seluruh wilayah Kabupaten Kediri - Sosialisasi terkait Trantibumlinmas - Pengamanan kegiatan, unjuk rasa - Optimalisasi Satlinmas di Desa - Koordinasi dengan Instansi terkait - Penegakan Hukum berupa Tindakan Yustisi	

Evaluasi terhadap tindak lanjut pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. c) Tidak dapat dipungkiri bahwa pencapaian penerapan demokrasi di Kabupaten Kediri masih memiliki kelemahan. Nilai yang cukup rendah berada dalam dimensi Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan indikator kesempatan kerja antar wilayah. Selain itu, keterwakilan		(sanksi Administrasi dan Sanksi Pidana Ringan) dan Tindakan Non Yustisi (Teguran Lisan s/d Surat Peringatan)	

perempuan dalam dewan masih berada dibawah 30%. Hal tersebut juga menjadi perhitungan dalam penerapan demokrasi di Kabupaten Kediri. d) Dalam rangka mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum, maka Pemerintah Kabupaten Kediri perlu berperan secara aktif untuk melakukan pencegahan dan penegakan hukum sesuai dengan kewenangan daerah, aktif menanggulangi tersebarnya informasi palsu atau hoax dan berita bohong atau fakta yang			

direkayasa yang dapat merusak ketentraman dan ketertiban umum. **e)** Pemerintah Kabupaten Kediri perlu mengoptimalkan pemanfaatan kanal-kanal resmi yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Kediri untuk menyebarkan berbagai informasi sekaligus mengedukasi masyarakat. Hal tersebut dimaksudkan untuk mencegah terjadinya penyebaran disinformasi yang dapat menimbulkan disorientasi di lingkungan masyarakat			

c. Bidang Kesejahteraan Masyarakat 1) Peningkatan Mutu, Akses dan Sarana Prasarana Pendidikan a) Pada Tahun 2023 ini, Pemerintah Kabupaten Kediri telah menerapkan Kurikulum Merdeka Belajar. Mengacu pada Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kemerdekaan diartikan sebagai adanya kemampuan untuk hidup melalui kekuatan sendiri menuju arah yang lebih baik berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan yang ada. Artinya Merdeka Belajar tidaklah semata-mata diartikan sebagai kebebasan, tetapi dapat diartikan juga sebagai kemampuan seseorang, keberdayaannya agar mendapatkan kehidupan yang	DINAS PENDIDIKAN	Terselenggaranya Workshop Peningkatan Kompetensi dalam Pembelajaran Reflektif, Peningkatan Kompetensi Tim Pengembang MGMP/BK, Workshop Pemantapan Perencanaan Berbasis Data, Kegiatan Kelas Penggerak Pendidikan Daerah, Forum Penggerak Pendidikan Pendirian SMPN 2 Ngasem, SMPN 3 Mojo, Formasi guru PPPK sejumlah 100 formasi, mengusulkan kenaikan jumlah penerima insentif menjadi 9.656, sampai dengan akhir tahun 2024 lulusan guru penggerak sejumlah 700 guru.	

jauh lebih baik; b) Pemerintah Kabupaten Kediri tengah mengupayakan beberapa hal sebagai berikut: Optimalisasi Pendidikan Kesetaraan (Kejar Paket) Inovatif bagi Anak Putus Sekolah, Penambahan kuota penerima bantuan/beasiswa Pendidikan GNOTA yang tepat sasaran (SMA Dharma Wanita 1 Pare Boarding School, Becak Kari STIKES Pamenang, Mahasiswa dan Atlet Berprestasi, Mahasiswa Baru, Siswa SMA/SMK/MA dan SMP/MTs dari keluarga tidak mampu), Penambahan kuota Guru PPPK, Penambahan kuota penerima Insentif GTT/PTT dan Bisyaroh Guru Keagamaan, Regrouping SDN untuk		Program Regrouping jenjang pendidikan SD dalam rangka efisiensi, efektifitas dalam pengelolaan dan meningkatkan mutu layanan pendidikan di Kabupaten Kediri, Dinas Pendidikan pada tahun 2024 telah mensosialisasikan dan dilaksanakan pada satuan pendidikan SD. Penerima Insentif GTK Non ASN sebanyak 6.211 guru. Penerima Bisyaroh Tahun 2024 sebanyak 9.000 orang mengcover BPJS Ketenagakerjaan dan BOSDA Madin sharing antara BKK Provinsi dan APBD sebanyak 2.101 guru ngaji. Penerima Beasiswa Pendidikan Tahun 2024 sebesar Rp26.000.000.000 bagi penerima 7.968 dengan rincian :	

meningkatkan kualitas Pendidikan Sekolah Dasar, Pendirian SMPN di kawasan blank zonasi, Pemerataan distribusi guru berdasarkan zonasi, Pembinaan minat dan bakat siswa baik kemampuan literasi, numerasi dan non akademik serta Peningkatan kompetensi GTK melalui Platform Merdeka Mengajar dan Guru Penggerak untuk meningkatkan kualitas SPM Pendidikan dan Rapor Pendidikan; c) Bidang SDM pendidik dan motivasi siswa. Manajemen mutu pendidikan dalam sisi operasional perlu untuk dioptimalkan, karena di taraf konsep dan perencanaan sudah disusun dengan baik namun di sisi		Beasiswa Sambut Bandara 20 anak Beasiswa Kapal Pesiar 30 anak Beasiswa STIKES Pamenang 104 anak Beasiswa Atlet Prestasi 75 anak Beasiswa SMA Dharma Wanita 1 Pare (Boarding School) 260 anak Beasiswa Berdaya SD/MI : 495 anak Beasiswa Berdaya SMP/MTs : 3.116 anak Beasiswa Berdaya SMA/SMK/MA : 3.273 anak Beasiswa Guru PAUD : 37 guru Beasiswa Mahasiswa On Going : 292 anak Beasiswa Maba D3 : 18 anak Beasiswa Maba S1/D4 : 250 anak Terselenggaranya Latihan Dasar Kepelatihan untuk Siswa, Parenting SMPN 2 Ngasem. Peningkatan kompetensi SDM dilakukan dengan Pendidikan guru penggerak yang menghasilkan lulusan sejumlah 700 guru, uji kompetensi jabfung	

operasional masih banyak kendala; d) Secara umum, faktor-faktor penghambat dalam bidang pendidikan tidak memiliki kendala yang berarti. Apalagi dukungan Bupati Kediri dalam meningkatkan aksesibilitas, kuantitas dan kualitas pendidikan sangat tinggi. Dengan dukungan dan komitmen yang kuat dari Bupati Kediri tersebut menjembatani masalah-masalah yang menghambat permasalahan Pendidikan di Kabupaten Kediri. Faktor penghambat dalam bidang perpustakaan tidak memiliki kendala yang berarti, hanya saja kurangnya sarana prasarana untuk perpustakaan keliling sehingga pelayanan yang diberikan terbatas.		guru sejumlah 423 guru. Pengalokasian dana BOSP untuk peningkatan sarana prasarana sekolah (rehab ringan, buku, dll) Penambahan kuota guru PPPK tahun 2024 sejumlah 100 formas, mengusulkan kenaikan jumlah penerima insentif menjadi 9.656. Pendataan Anak Putus Sekolah melibatkan IT Desa. Ayo Kembali Bersekolah 5.000 ATS Wisuda Kesetaraan bagi 1.000 lulusan Kejar Paket A. B. dan C Terlaksananya pengadaan bangunan pendidikan sejumlah 9 unit bangunan di 6 SMP , terlaksananya rehabilitasi bangunan pendidikan sejumlah 21 ruang di 5 SMP, pengadaan perabot bangunan pendidikan sejumlah 15 paket di 3 SMP. Dalam rangka peningkatan pembangunan nfrastruktur sarana dan prasarana pendidikan untuk Sekolah Dasar	

Bahwa diketahui luas wilayah Kabupaten Kediri yang termasuk daerah yang luas dan memiliki instansi pendidikan yang cukup banyak tersebar di Kabupaten Kediri ini sehingga sarana pelayanan untukmenjangkau seluruh penjuru Kabupaten Kediri termasuk kurang; e) Di sektor Pendidikan, Kabupaten Kediri Tahun 2023 capaian kinerja yang harus diperhatikan adalah terkait harus ditingkatkan mengenai beberapa hal sebagai berikut; Optimalisasi Pendidikan esetaraan (Kejar Paket) bagi Anak Putus Sekolah, Penambahan kuota penerima bantuan/beasiswa, Penambahan kuota Guru PPPK, penerima Insentif		Negeri melalui sumber dana DAK Bidang Pendidikan SD dan DAU pada tahun anggaran 2024. Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri telah melaksanakan kegiatan rehabilitasi ruang kelas, rehabilitasi ruang Kepala Sekolah, rehabilitasi ruang guru, rehabilitasi ruang perpustakaan, rehabilitasi ruang UKS, rehabilitasi toilet/jamban siswa, pembangunan ruang kelas baru beserta perabotnya, pembangunan ruang guru beserta perabotnya, pembangunan ruangUKS beserta perabotnya, pembangunan ruang perpustakaan perabotnya, pembangunan ruang laboratorium TIK beserta perabotnya, pembangunan toilet/jamban siswa, pembangunan pagar sekolah, dan pengadaan sarana TIK. Pada Tahun Anggaran 2024 Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri telah	

GTT/PTT dan Bisyaroh Guru Keagamaan; f) Perlu peningkatan Pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana pendidikan baik Sekolah Negeri maupun Swasta; g) Peningkatan akses pendidikan dan sarana dan Prasarana Perpustakaan bagi calon peserta didik juga dapat diwujudkan melalui penyelenggaraan program paket A, B dan C; h) Perlu optimalisasi kemudahan belajar mengajar bagi masyarakat usia sekolah dan madrasah terutama penambahan quota GNOTA dan beasiswa; i) Permasalahan Pemerataan memberikan sarana, prasarana, dan mutu		melaksanakan kegiatan rehabilitasi, pembangunan dan pengadaan TIK yang pelaksanaannya di 62 satuan pendidikan SD di 25 Kecamatan di Kabupaten Kediri. Penambahan anggaran beasiswa pendidikantahun 2024 Rp.26.000.000.000 menjadi Rp30.000.000.000 dengan tambahan kuota beasiswa santri Madin/Ponpes Pada Tahun Anggaran 2024. Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri telah melaksanakan kegiatan rehabilitasi, pembangunan dan pengadaan TIK yang pelaksanaannya di 62 satuan pendidikan SD di 25 Kecamatan di Kabupaten Kediri. Kegiatan Parenting tentang Pentingnya Pendidikan bagi Anak dan Stop Kekerasan pada Anak. Sosialisasi Penerimaan Peserta Didik Baru dan Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru secara online, mudah, transparan	

Pendidikan yang sama di setiap sekolahan yang ada di Kabupaten Kediri. Dalam operasionalnya, ditemui cukup banyak kendala yang harus dioptimalkan lagi pengembanganny a; j) Peningkatan peran serta Orang tua dan Wali murid dalam upaya untuk mendukung aksesibilitas dan kualitas pendidikan yang baik, dukungan masyarakat dan wali murid menjadi penting untuk dilaksanakan. Namun begitu masih ditemui kendala-kendala yang menyebabkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan tidak dapat dilaksanakan dengan baik; k) Pemerintah Kabupaten Kediri harus mampu memfasilitasi		guna memfasilitasi semua masyarakat untuk mendapatkan akses pendidikan. Pelibatan sekolah swasta dalam upaya penerimaan siswa baru dan penanganan Anak tidak sekolah dan putus sekolah Terlaksananya pengadaan bangunan pendidikan sejumlah 9 unit bangunan di 6 SMP , terlaksananya rehabilitasi bangunan pendidikan sejumlah 21 ruang di 5 SMP, pengadaan perabot bangunan pendidikan sejumlah 15 paket di 3 SMP. PKBM berbasis Vokasi (PendidikanKeseta raan berbasis Ketrampilan dan Pelatihan) kemitraan dengan Masyarakat, Swasta, Badan Usaha dan Pemerintah. Optimalisasi Taman Bacaan Masyarakat dan Bantuan TIK bagi PKBM, perpustakaan digital guna meningkatkan kemampuan literasi warga belajar.	

akses pendidikan bagi calon peserta didik secara adil dan merata, salah satunya dengan menerapkan sistem zonasi yang tidak diskriminatif dan menyelenggarakan pendidikan gratis terutama bagi pengimplentasian program wajib belajar 12 tahun, serta melakukan perluasan terhadap akses pendidikan bagi peserta didik tertentu untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi; l) Peningkatan akses pendidikan bagi calon peserta didik dengan mendukung penyelenggaraan pendidikan informal yang telah tumbuh dan berkembang di masyarakat; m) Peningkatan akses pendidikan dan		Pelaksanaan lomba untuk kreativitas, bakat, minat, dan potensi peserta didik diantaranya yaitu FLS2N Tingkat Kabupaten, OSN, O2SN, Gala siswa Terlaksananya pengadaan bangunan pendidikan sejumlah 9 unit bangunan di 6 SMP , terlaksananya rehabilitasi bangunan pendidikan sejumlah 21 ruang di 5 SMP, pengadaan perabot bangunan pendidikan sejumlah 15 paket di 3 SMP. Pada tahun 2024 Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri melalui sumber dana DAK dan DAU tahun anggaran 2024 telah melaksanakan kegiatan rehabilitasi ruang kelas sebanyak 110 ruang kelas, rehabilitasi ruang guru 6 ruang, rehabilitasi ruang kepala sekolah 3 ruang, rehabilitasi toilet/jamban siswa 21 paket, rehabilitasi ruang perpustakaan 2 ruang, rehabilitasi ruang UKS 1 ruang, rehabilitasi tempat parkir siswa 1 paket,	

Perpustakaan bagi calon peserta didik juga dapat diwujudkan melalui penyelenggaraan program paket A, B dan C; n) Peningkatan daya saing peserta didik diformulasikan melalui pengembangan kurikulum pendidikan didasarkan pada bakat dan minat peserta didik serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; o) Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan serta Peningkatan Infrastruktur khususnya untuk mengimplementasikan program Pendidikan wajib belajar 12 tahun; p) Perlu dioptimalkan dan didayagunakan secara menyeluruh dan sosialisasi yang meluas		pembangunan RKB 13 ruang, pembangunan ruang UKS 16 ruang, pembangunan ruang perpustakaan 22 ruang,npembangunan ruang guru 7 ruang, pembangunan ruang laboratorium TIK 33 ruang, pembangunan toilet/jamban siswa 1 paket, pembangunan pagar sekolah 1 paket, paving sekolah 3 paket. Penerima Beasiswa Pendidikan Tahun 2024 sebesar Rp26.000.000.000 bagi penerima 7.968 dengan rincian : □ Beasiswa Sambut Bandara 20 anak □ Beasiswa Kapal Pesiar 30 anak □ Beasiswa STIKES Pamenang 104 anak □ Beasiswa Atlet Prestasi 75 anak □ Beasiswa SMA Dharma Wanita 1 Pare (Boarding School) 260 anak □ Beasiswa Berdaya SD/MI : 495 anak	

dalam program bantuan keuangan bagi anak didik di Kabupaten Kediri yang melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi baik negeri maupun swasta bagi anak didik yang kurang mampu berkaitan biaya; q) Fasilitas belajar mengajar perlu dipetakan dan dianalisis kembali mana-mana yang rusak dan harus diperbaiki termasuk sarana dan prasarana praktek dan ruang perpustakaan siswa; r) Kesejahteraan guru menjadi salah satu permasalahan krusial yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah Kabupaten Kediri. Hal itu dikarenakan hingga saat ini kesejahteraan guru masih belum dapat terpenuhi.		Beasiswa Berdaya SMP/MTs : 3.116 anak Beasiswa Berdaya SMA/SMK/MA : 3.273 anak Beasiswa Guru PAUD : 37 guru Beasiswa Mahasiswa On Going : 292 anak Beasiswa Maba D3 : 18 anak Beasiswa Maba S1/D4 : 250 anak Terlaksananya pengadaan bangunan pendidikan sejumlah 9 unit bangunan di 6 SMP , terlaksananya rehabilitasi bangunan pendidikan sejumlah 21 ruang di 5 SMP, pengadaan perabot bangunan pendidikan sejumlah 15 paket di 3 SMP. Pemkab Kediri melalui Dinas pendidikan memberikan Insentif bagi guru dan tenaga kependidikan dengan jumlah penerima sebanyak 6.451	
2) Dalam Pelayanan Kesehatan	DINAS KESEHATAN	i. Pada Tahun 2024 dilakukan	

a) Pemerintah Daerah memfasilitasi peningkatan pelayanan kesehatan di tingkat Puskesmas, baik dari aspek infrastruktur bangunan, peralatan kesehatan, SDM administrasi dan SDM Tenaga Kesehatan. Dalam rangka mewujudkan layanan kesehatan prima, penegakan SOP dan evaluasi internal perlu dilaksanakan secara rutin dan terukur;		pembangunan IGD Puskesmas Ngadiluwih; pembangunan pagar dan gedung relokasi puskesmas Pranggang dan Ngadi; Rehabilitasi dan pembangunan puskesmas Adan- Adan, Pare, Sumberjo, Kepung; i. Rehabilitasi dan pemeliharaan Puskesmas Wates; Kanopi dan paving puskesmas Kandangan, Gurah, Purwoasri, Bendo; Paving puskesmas Ngancar, gudang dan tempat limbah B3 puskesmas Bangsongan, pagar pustu Ngreco Kandat. i. Pengadaan genset untuk puskesmas Puhjarak, Badas,Kunjang, Ngadiluwih, Purwoasri, Silir dan Keling. Pengadaan IPAL puskesmas	

		Gampeng, Wonorejo, dan Bendo. v. Pemenuhan BMHP TB berupa mesin TCM sebanyak 2 buah untuk puskesmas Ngadiluwih dan Tiron, Biosafety cabinet sebanyak 3 buah untuk puskesmas Ngadiluwih, Tiron, Keling; modul TCM sebanyak 1 buah untuk RSUD SLG, catridge TCM TB sebanyak 11.250 buah untuk 8 faskes yaitu Puskesmas Keling, Puskesmas Wates, RSUD SLG, RSKK, Puskesmas Mojo, Ngadiluwih, Tiron, Tanon. Catridge XDR TB sebanyak 150 buah untuk RSKK dan Xpert check kit sebanyak 2 kit untuk Wates dan RSUD SLG.	

		Pemenuhan alat sebagai penunjang penanggulangan Dengue berupa mesin fogging sebanyak 4 buah untuk Puskesmas Kandangan, Tanon, Mojo, Bendo. i. Pengadaan RDT HIV Sifilis untuk ibu hamil sebanyak 24.875 tes. i. Pengadaan BMHP sebagai penunjang pemeriksaan laboratorium P2PM seperti RDT HIV 1, RDT HIV2, RDT HIV 3, RDT sifilis, RDT Dengue, RDT Malaria, bahan pemeriksaan malaria, RPR, Tabung K3 EDTA, alcohol swab, vacuneedle, plesterin, handgloves, tuberkulin, alcohol swab, dan pot sputum i. Pengadaan alat fotometer sejumlah 8	

		(delapan) unit sebagai alat penunjang indikator deteksi dini stroke, yang dialokasikan untuk Puskesmas Ngasem, Tiron, Gampeng, Pagu, Sambi, Bangsongan, Mojo, Wates. k. Pengadaan BMHP pemeriksaan IVA/Inspeksi Vuisual asam Asetat (Kapas lidi, sarung tangan, desinfektan, asam asetat) sebagai penunjang tercapainya deteksi dini kanker servik (mulut rahim) yang dialokasikan pada 37 puskesmas . l. Peningkatan mutu pelayanan di fasyankes secara internal melalui pengukuran dan pelaporan indikator mutu (INM).	

		i. Peningkatan mutu pelayanan difasyankes secara eksternal melaluiakreditasi yang diselenggarakan oleh Menteri atau lembaga penyelenggara akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri. i. Segera mengusulkan penetapan Perbup Pengangkatan tenaga Non ASN BLUD Puskesmas i. Memfasiliatasi SDM Kesehatan di Lingkungan Dinas Kesehatan Kab. Kediri untuk mengikuti pelatihan v. Peningkatan mutu sumber daya manusia dengan pelatihan pengendalian PPOK dan Asthma dengan memberangkatkan 5 orang tenaga kesehatan dari puskesmas Wates, Pagu, Sambi, Tanon dan Wonorejo di	

		UPT Latkesmas Murnajati-Lawang-Malang. v. Peningkatan mutu sumber daya manusia dengan pelatihan petugas kesehatan dalam upaya implementasi dan layanan UBM di fasilitas pelayanan kesehatan primer dengan memberangkatkan 18 orang tenaga kesehatan dari puskesmas dan 2 orang tenaga kesehatan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri di UPT Latkesmas Munajati – Lawang – Malang. i. Peningkatan mutu sumber daya manusia dengan pelatihan pelatihan penanggulangan gangguan indera bagi tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan	

		tingkat pertama dengan memberangkatkan 3 orang tenaga kesehatan dari puskesmas Silir, Puhjarak dan Pranggang di UPT latkesmas Murnajati-Madiun. i. Peningkatan mutu sumber daya manusia dengan pelatihan Pelatihan tenaga kesehatan terpadu kesehatan jiwa dengan memberangkatkan tenaga kesehatan dari 16 orang puskesmas dan 1 orang tenaga kesehatan dari dinas kesehatan kabupaten Kediri. i. Peningkatan mutu sumber daya manusia dengan pelatihan deteksi dini kanker payudara dan kanker servik (mulut rahim) di fasilitas kesehatan tingkat pertama bagi bidan dan	

		dokter dengan memberangkatkan 10 dokter dari puskesmas Semen, Ngadiluwih, Wates, Grogol, Pare, Tarokan, Ngasem, Kandangan, Badas dan Gurah, serta 1 orang tenaga kesehatan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri di UPT Latkesmas Murnajati-Lawang- Malang k. Peningkatan kapasitas petugas Sanitasi Lingkungan untuk 25 puskesmas di Bapelkes Murnajati k. Peningkatan Mutu SDM dengan mengikuti Workshop Penjaminan Mutu Labkesmas oleh ASLABKESDA Jawa Timur dengan memberangkatkan 2 orang tenaga	

		kesehatan dari UPT Labkesda ; i. Peningkatan Mutu SDM dengan mengikuti Pelatihan Surveilans Berbasis Laboratorium Penyakit Dan Faktor Risiko Bagi Tenaga Laboratorium oleh BBPK Ciloto dengan memberangkatkan 2 orang tenaga kesehatan dari UPT Labkesda;dan i. Peningkatan Mutu SDM dengan mengikuti Pelatihan Refreshing Malaria oleh BBLABKESMAS Surabaya dengan memberangkatkan 1 orang tenaga kesehatan dari UPT Labkesda. i. Peningkatan mutu sumber dayamanusia dengan On the Job training kasus	

		kegawatdarurata n Ibu dan anak bagi dokter, bidan, dan perawat FKTP ke RS dengan memberangkatk an dokter, bidan dan perawat dilaksankan di RSUD Kabupaten Kediri peserta dari Puskesmas Adan- Adan, Pare, Puhjarak, Keling, Kayen Kidul, Puncu, Kepung, Wates, Pranggang, Bendo, Badas dan RSUD SLG dari Puskesmas Ngadiluwih, Kras, Mojo, Gurah, Tiron, Blabak, Ngadi, Semen, Silir, Ngasem, Gampeng, Wonorejo	
b) Trend usia harapan hidup di Kabupaten Kediri dari Tahun 2016 hingga 2022 menunjukkan peningkatan yang cukup stabil. Pada awal periode, usia harapan hidup berada pada angka		v. Pada awal periode, usia harapa nhidup berada pada angka 72,2 tahun dan kemudian mengalami kenaikan yang bertahap setiap tahun hingga	

72,2 tahun dan kemudian mengalami kenaikan yang bertahap setiap tahun hingga mencapai 73,46 tahun pada Tahun 2022. Tren positif ini merupakan indikator penting bagi kesejahteraan dan perkembangan Kabupaten Kediri. Peningkatan usia harapan hidup berarti Masyarakat dapat menikmati masa hidup yang lebih panjang dan memiliki peluang yang lebih baik untuk berkontribusi pada pembangunan wilayah;		mencapai 75,07 tahun pada tahun 2024. Trend positif ini merupakan indikator penting bagi kesejahteraan dan perkembangan Kabupaten Kediri. Peningkatan usia harapan hidup berarti masyarakat dapat menikmati masa hidup yang lebih panjang dan memiliki peluang yang lebih baik untuk berkontribusi pada pembangunan wilayah.	
c) Capaian Usia Harapan Hidup Kabupaten Kediri masih berada dibawah capaian Persentase Pertumbuhan Investasi Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Pusat. Namun demikian		v. Usia Harapan Hidup Kabupaten Kediri tahun 2024 sebesar 75,07. Trend positif ini merupakan indikator penting bagi kesejahteraan dan perkembangan Kabupaten Kediri.	

jarak antara capaian Kabupaten Kediri dengan Provinsi dan juga Nasional tidak terlalu lebar. Pemerintah Kabupaten Kediri masih berada di atas capaian agregat dari 631 instansi pemerintah di seluruh Indonesia. d) Upaya Pemerintah Kabupaten Kediri untuk menjamin setiap warganya agar mendapatkan akses terhadap pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang bermutu, adil serta dengan biaya terjangkau telah berhasil dengan tercapainya target Universal Health Coverage (UHC) yaitu 96% dari target 72%. Keberhasilan tersebut berkat dukungan penuh lintas program lintas sektor yang bersinergi sesuai		Peningkatan usia harapan hidup berarti masyarakat dapat menikmati masa hidup yang lebih panjang dan memiliki peluang yang lebih baik untuk berkontribusi pada pembangunan wilayah. i. Menerbitkan Surat Keputusan Bupati Kediri Nomor : HK.04/444/418.08/2023 tentang Penetapan Data Awal Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) yang Didaftarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2024, menetapkan kuota sejumlah maksimal 286.179 jiwa sampai dengan akhir Desember 2024. - Menerbitkan Peraturan Bupati	

dengan tugas pokok dan kewenangan masing-masing sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Bupati Kediri tentang Tim Percepatan Pencapaian Universal Health Coverage (UHC) Program Jaminan Kesehatan Nasional. Lebih jauh lagi Upaya Pemerintah Kabupaten Kediri untuk meningkatkan Kesehatan masyarakat secara umum telah dilaksanakan dengan baik. Capaian Kinerja/indikator peningkatan UHH mencapai 73,27 melewati target yang telah ditetapkan yakni 72,92. Hal tersebut tidak terlepas dari meningkatnya kesadaran masyarakat Kabupaten Kediri akan pentingnya kesehatan;		Nomor 62 tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Universal Health Coverage Program JKN Kabupaten Kediri - Sampai dengan Desember 2024, capaian UHC Kabupaten Kediri sebesar 96,91% (1.636.282 jiwa) penduduk yang terdaftar JKN dengan rincian sebanyak 803.302 jiwa termasuk segmen kepesertaan PBI-JK sebanyak 302.685 jiwa peserta PBPU Pemda (Pekerja Bukan Penerima Upah yang didaftarkan Pemda). BP (Bukan Pekerja) sebanyak 32.4375 jiwa, PBPU (mandiri) sebanyak 195.586 jiwa, PPU BU (Pekerja Penerima Upah Badan Usaha) sebanyak 232.284 jiwa dan PPU PN (Pekerja Penerima Upah	

		Penyelenggara Negara) sebanyak 65.914 Jiwa.	
e) Rencana tindak lanjut dalam upaya mewujudkan dan mempertahankan UHC yaitu melalui pemenuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan, ketersediaan obat, pemerataan distribusi SDM Kesehatan di FKTP dan FKRTL, jaminan ketersediaan anggaran untuk pembayaran iuran peserta serta regulasi yang mendorong perbaikan penyelenggaraan Program JKN di Kabupaten Kediri;		i. Sesuai dengan amanah Permendagri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024, Pemda telah menganggarkan iuran dan bantuan iuran Jaminan Kesehatan bagi peserta PBPU dan BP Pemda tahun 2024 sebesar Rp. 134.327.391.800 ,- (Seratus tiga puluh empat milyar tiga ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU), pajak rokok dan DBHCHT. - Adanya Peraturan Bupati Kediri Nomor 62	

		tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Universal Health Coverage Program JKN Kabupaten Kediri diharapkan penyelenggaraan program JKN dapat lebih maksimal.	
f) Rujukan pasien dari wilayah barat sungai masih banyak yang masuk ke rumah sakit di luar wilayah Kabupaten Kediri, hal ini karena aksesnya yang lebih dekat dan lebih mudah dijangkau; Semakin banyaknya sektor swasta yang berminat untuk mengembangkan bisnis di bidang pelayanan kesehatan rujukan (pendirian klinik utama dan rumah sakit baru);		i. Upaya yang sudah dilakukan pada tahun 2024 antara lain, melaksanakan pembinaan dan pengawasan mutu rumah sakit pasca akreditasi dengan memastikan PPS (Perencanaan Perbaikan Strategis) yang sudah disusun dapat dipenuhi oleh rumah sakit sehingga mutu pelayanan benar benar berkualitas dan berkesinambungan. Disamping itu juga melaksanakan rekredensialing bersama BPJS kesehatan ke rumah sakit yang	

		bekerjasama dengan BPJS. Dengan menjaga dan meningkatkan mutu pelayanan secara terus menerus rumah sakit di Kabupaten Kediri akan menjadi pilihan utama masyarakat meskipun jarak tempuhnya jauh. - Dengan adanya perubahan regulasi dari sistem rujukan berjenjang menjadi rujukan berbasis kompetensi, rumah sakit dituntut untuk meningkatkan kompetensinya baik kompetensi SDM kesehatan termasuk spesialisasi/sub spesilaisasi dokter, kelengkapan sarana prasarana alat kesehatan dan obat obatan.	
g) Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu masih		k. Upaya untuk mendekatkan pelayanan kegawatdarurata	

belum terintegrasi dengan Sistem Penanggulangan Bencana di Daerah; Masih ada pelayanan kesehatan yang tidak dijamin oleh JKN yang memerlukan perhatian dari Pemerintah Daerah;		n ke masyarakat sudah dilaksanakan dengan adanya Public Safety Center (PSC) yang memberikan layanan pre hospital melalui call center 24 jam dan sudah terintegrasi dengan puskesmas dan rumah sakit. Harapannya PSC juga dapat terintegrasi dengan sektor lain dalam penanggulangan bencana, seperti BPBD, kepolisian, pemadam kebakaran, DLLAJ dan sektor terkait lainnya. k. Sementara untuk pelayanan kesehatan yang tidak dijamin oleh JKN dapat dimintakan melalui Pembiayaan Masyarakat Miskin Prop Jawa Timur yang ada di Dinas	

		Kesehatan Jawa Timur. i. Pemda Kab Kediri telah menganggarkan iuran dan bantuan iuran Jaminan Kesehatan bagi peserta PBPU dan BP Pemda tahun 2024 sebesar Rp. 134.327.391.800 ,- (Seratus tiga puluh empat milyar tiga ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU), pajak rokok dan DBHCHT. i. Untuk pelayanan kesehatan yang tidak dijamin oleh JKN, Program Pembiayaan Pelayanan Kesehatan bagi masyarakat miskin Provinsi Jawa Timur (Biakes Maskin) merupakan salah satu upaya dari Pemerintah Provinsi Jawa	

		Timur untuk memberikan kebutuhan dasar berupa pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin yang belum aktif dari peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) baik PBI-N maupun PBI-D, serta belum memiliki jaminan kesehatan apapun. Pembiayaan pelayanan kesehatan ini merupakan jaring ketiga yang sepenuhnya ditanggung oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui mekanisme klaim ke Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.	
h) Kegiatan pengembangan kompetensi SDM masih sangat diperlukan;		Pada tahun 2024 sudah dilakukanu paya pengembangan kompetensi SDM antara lain : i. Peningkatan mutu sumber day	

		amanusia dengan pelatihan pengendalian PPOK dan Asthma dengan memberangkatkan 5 orang tenaga kesehatan dari puskesmas Wates, Pagu, Sambi, Tanon dan Wonorejo di UPT Latkesmas Murnajati-Lawang-Malang. v. Peningkatan mutu sumber daya manusia dengan pelatihan petugas kesehatan dalam upaya implementasi dan layanan UBM di fasilitas pelayanan kesehatan primer dengan memberangkatkan 18 orang tenaga kesehatan dari puskesmas dan 2 orang tenaga kesehatan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri di UPT Latkesmas Munajati – Lawang – Malang.	

		v. Peningkatan mutu sumber daya manusia dengan pelatihan pelatihan penanggulangan gangguan indera bagi tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama dengan memberangkatkan 3 orang tenaga kesehatan dari puskesmas Silir, Puhjarak dan Pranggang di UPT latkesmas Murnajati-Madiun. i. Peningkatan mutu sumber daya manusia dengan pelatihan Pelatihan tenaga kesehatan terpadu kesehatan jiwa dengan memberangkatkan tenaga kesehatan dari 16 orang puskesmas dan 1 orang tenaga i. kesehatan dari dinas kesehatan kabupaten Kediri.	

		i. Peningkatan mutu sumber daya manusia dengan pelatihan deteksi dini kanker payudara dan kanker servik (mulut rahim) di fasilitas kesehatan tingkat pertama bagi bidan dan dokter dengan memberangkatkan 10 dokter dari puskesmas Semen, Ngadiluwih, Wates, Grogol, Pare, Tarokan, Ngasem, Kandangan, Badas dan Gurah, serta 1 orang tenaga kesehatan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri di UPT Latkesmas Murnajati-Lawang- Malang. k. Peningkatan kapasitas petugas Sanitasi Lingkungan untuk 25 puskesmas di Bapelkes Murnajati l. Peningkatan Mutu SDM dengan	

		mengikuti Workshop Penjaminan Mutu Labkesmas oleh ASLABKESDA Jawa Timur dengan memberangkatkan 2 orang tenaga kesehatan dari UPT Labkesda ; i. Peningkatan Mutu SDM dengan mengikuti Pelatihan Surveilans Berbasis Laboratorium Penyakit Dan Faktor Risiko Bagi Tenaga Laboratorium oleh BBPK Ciloto dengan memberangkatkan 2 orang tenaga kesehatan dari UPT Labkesda; dan i. Peningkatan Mutu SDM dengan mengikuti Pelatihan Refreshing Malaria oleh BBLABKESMAS Surabaya dengan	

		memberangkatkan 1 orang tenaga kesehatan dari UPT Labkesda. i. Peningkatan mutu sumber daya manusia dengan On the Job training kasus kegawatdarurataan Ibu dan anak bagi dokter, bidan, dan perawat FKTP ke RS dengan memberangkatkan dokter, bidan dan perawat dilaksankan di RSUD Kabupaten Kediri peserta dari Puskesmas Adan-Adan, Pare, Puhjarak, Keling, Kayen Kidul, Puncu, Kepung, Wates, Pranggang, Bendo, Badas dan RSUD SLG dari Puskesmas Ngadiluwih, Kras, Mojo, Gurah, Tiron, Blabak, Ngadi, Semen, Silir, Ngasem, Gampeng, Wonorejo	

i) Keterbatasan anggaran untuk merealisasikan pemenuhan SDM melalui formasi CASN serta jumlah SDM yang memasuki purna tugas baik tenaga kesehatan maupun non kesehatan sangat tidak sebanding dengan beban kerja saat ini. Kesehatan merupakan urusan dasar yang sangat kompleks, sehingga program dan pelayanan yang ditangani sangatlah luas. Sangat diperlukan SDM yang memadai baik jumlah maupun kompetensinya untuk dapat mencapai program dan memberikan pelayanan yang optimal;		v. Pengembangan kompetensi PNS di bidang kesehatan melalui program pendidikan berkelanjutan seperti pemberian rekomendasi untuk mengikuti seleksi penerimaan peserta PPDS/ PPDGS, Tugas Belajar, Ijin Belajar dan RPL (Rekognisi Pembelajaran Lampau) yang sesuai dengan kebutuhan daerah. Dalam rangka peningkatan kemampuan, SDM diberikan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi melalui pemberian tugas belajar maupun ijin belajar. v. Pola pengembangan Karier bagi Pejabat Fungsional untuk mengisi kebutuhan formasi SDMK,	

		melalui pelaksanaan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional Kesehatan.	
j) Upaya pemenuhan SDM melalui anggaran BLUD Puskesmas sudah dilaksanakan, akan tetapi kemampuan anggaran BLUD Puskesmas juga masih belum sebanding dengan kebutuhan SDM, sehingga masih banyak tenaga BLUD Puskesmas yang menerima gaji belum sesuai dengan standar UMK Kabupaten Kediri. Kemudahan akses pelayanan di Puskesmas dan Rumah Sakit perlu di perhatikan;		i. Pengajuan usulan pemenuhan kebutuhan pegawai untuk formasi Tahun 2024/2025 kepada BKD dan bagian organisasi berdasarkan perhitungan rencana kebutuhan prioritas. i. Pemenuhan kebutuhan SDMK melalui pendayagunaan pengembangan mutu pendidikan melalui Pendayagunaan Program Internsip Dokter dan Dokter Gigi Indonesia dan upaya pemberian kesempatan dan kerjasama dengan Institusi Pendidikan Kesehatan di Wilayah Kabupaten Kediri	

		untuk melaksanakan Praktek Kerja Lapangan di Puskesmas.	
k) Sinkronisasi percepatan pelayanan yang ditunjang digitalisasi penanganan pasien antara Puskesmas dan Rumah sakit;		i. Saat ini terdapat aplikasi Sistem Informasi Puskesmas (Teman Mas Abdi) yang sudah bridging dengan BPJS, Satu Sehat kemenkes, Center View Propinsi. Integrasi yang saat ini diproses adalah dengan Command Center Kabupaten Kediri yang dikomadoi Diskominfo. Ada rencana untuk integrasi dengan sistem rujukan yang langsung terhubung dengan rumah sakit (SISRUTE), menunggu Kode API dari bidang terkait untuk bisa diintegrasikan dengan Sistem Informasi Puskesmas.	
l) Jamkesda yang telah ada perlu terus ditingkatkan		k. Pemerintah Daerah tidak diperkenankan	

agar kebutuhan masyarakat akan kesehatan bisa terjamin;		mengelola sendiri (sebagian atau seluruhnya) Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan manfaat yang sama dengan Jaminan Kesehatan Nasional, termasuk mengelola sebagian Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan skema ganda sehingga sejak tahun 2023 Pemda Kabupaten Kediri mengintegrasikan Program Jamkesda ke dalam program Jaminan Kesehatan Nasional dengan yang dikelola oleh BPJS Kesehatan serta Pemerintah Daerah menganggarkan iuran dan bantuan iuran bagi setiap penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dengan manfaat	

		pelayanan di ruang perawatan kelas III.	
m) Pemberdayaan Posyandu di desa-desa agar tumbuh dengan baik dan perlu penambahan Anggaran dari APBD;		l. Perlu adanya dukungan kebijakan baik dari Tk Kabupaten, Kecamatan dan Desa untuk mengaktifkan Tim Pembina Posyandu dimana saaat ini masih berproses - Tahun 2024 sudah dilakukan pelatihan / workshop 25 ketrampilan kader posyandu	
3) Gender dan Perlindungan Anak, Peran Pemuda dan Masalah Sosial Upaya Pemerintah Kabupaten Kediri dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat berbasis keluarga masih menemui berbagai macam hambatan. Hambatan tersebut diidentifikasikan sebagai berikut;	BP2KBP3A		
a) Kurangnya keterlibatan aktif, advokasi dan koordinasi terhadap kelompok kerja Pengarusutamaan Gender terhadap kelompok kerja		i. Menmgoptimalkan organisasi wanita dan kader perempuan di desa untuk terlibat dalam pengarus	

Pengarusutamaan Gender		utamaan gender terutama perempuan kepala keluarga akan dibentuk lagi 30 Desa ramah perempuan dan anak	
b) Masih adanya pelanggaran terhadap hak anak, dimana sosialisasi terhadap hak anak dan peran strategis PPA masih belum optimal		1. Mengoptimalkan semua Satgas PPA yang ada disemua timgkatan termasuk desa dan sekolah untuk upaya pencegahan dan berani untuk melaporkan 2, Berkoordinasi dengan OPD untuk memberi ruang bagi anak-anak dalam pembangunan	
c) Unmet Need masih tinggi dimana masih tingginya angka		Unmet Need tahun 2023 11% dan tahun 2024 7,9%. Upaya yang dilakukan untuk menurunkan Unmet Need adalah : 1.Memperbaiki system pencatatan 2. Pelayanan KB gratis	

d) Usia perkawinan dibawah 20 tahun masih tinggi		Usia Kawin Pertama (UKP) kurang dari 20 tahun di Kab. Kediri 12,63 lebih dominan perkawinan diusia 21 tahun keatas	
e) Angka kelahiran belum dapat dikontrol secara optimal, terutama kurangnya koordinasi dengan stakeholders terkait		TFR Kab. Kediri saat ini sudah optimal sebesar 2.11. Dalam kurun 15 tahun terakhir, kelahiran turun dari 25,000 menjadi 16.000an, Yangn harus dilakukan sekarang adalah menjaga TFR tetap 2.11, dan mencegah kehamilan tidak diinginkan	
4) Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Pemerintah Kabupaten Kediri perlu melakukan pendataan dan pemutakhiran data PMKS sebagai basis data terlaksananya program penanganan PMKS. Adapun program penanganan PMKS yang dapat dilakukan Pemerintah Kabupaten Kediri meliputi pemberian pelatihan keterampilan dan praktik kerja bagi	DINAS SOSIAL		

anak terlantar, pembinaan alih profesi eks lokalisasi, pemberian pelatihan dan keterampilan eks korban narkotika, serta pemberian pendidikan dan pelatIhan (diklat) bagi anak putus sekolah di panti sosial remaja terlantar (PSRT). Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Kediri perlu melaksanakan program penanganan PMKS secara efektif, agar permasalahan PMKS di Kabupaten Kediri dapat teratasi dengan baik. a) Pemerintah Kabupaten Kediri perlu melakukan pendataan dan pemutakhiran data PMKS sebagai basis data terlaksananya program penanganan PMKS. Adapun program penanganan PMKS yang dapat dilakukan Pemerintah Kabupaten Kediri meliputi pemberian pelatihan		i. Pendataan dan pemutakhiran data PMKS telah dilakukan yaitu Data Lansia Miskin dan Data Penyandang Disabilitas se Kabupaten Kediri. Penanganan PMKS Remaja Putus Sekolah telah dilakukan melalui fasilitasi pengiriman peserta pelatihan ke UPT. PSBR Jombang, Blitar, dan Bojonegoro	

keterampilan dan praktik kerja bagi anak terlantar, pembinaan alih profesi eks lokalisasi, pemberian pelatihan dan keterampilan eks korban narkotika, serta pemberian pendidikan dan pelatihan (diklat) bagi anak putus sekolah di panti sosial remaja terlantar (PSRT). Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Kediri perlu melaksanakan program penanganan PMKS secara efektif, agar permasalahan PMKS di Kabupaten Kediri dapat teratasi dengan baik.		yang merupakan UPT milik Dinas Sosial Provinsi Jawa Toumr.	
b) Indikator keberhasilan pelayanan sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah berapa		i. Kendala-kendala yang disampaikan terkait dengan kewenangan DP2KBP3A. Sedangkan Rehabilitasi Sosial bagi	

jumlah PMKS yang berhasil dientaskan, tidak hanya sekedar jumlah PMKS yang dilayani. Oleh karena itu, program ke depan harus berorientasi pada pengentasan PMKS mesti banyak kendala dalam pelaksanaanya seperti : 1. Keterbatasan tenaga profesional yang mendampingi masalah KDRT dan Kekerasan Anak; 2. Kekerasan terhadap anak dan perempuan belum sepenuhnya bisa dicegah karena kompleksnya penyebab kekerasan; 3. Sistem pelayanan permasalahan perempuan dan anak belum dilaksanakan secara berjenjang; 4. Faktor sosial ekonomi masyarakat sebagai salah satu pemicu KDRT dan		Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) sudah difasiltasi dengan pengiriman ke UPT. RSBKW milik Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur.	

perkawinan anak; Belum adanya filterisasi tayangan di sosial media yang tidak baik untuk anak.			
5) Angka Kemiskinan dan Permukiman a) Angka kemiskinan kita masih belum turun signifikan. Prosentase penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Kediri tahun 2023 tidak mencapai target, dimana mestinya sesuai target adalah 9,835% akan tetapi prosentase angka kemisikinan saat ini masih 10,72%. Pemerintah harus bekerja keras untuk mengurangi angka kemiskinan dengan program yang nyata sehingga dapat mencapai target dalam RPJMD yakni 8,044%;	DINAS SOSIAL DPKP	v. Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial melaksanakan Kegiatan penyaluran DBHCHT dengan sasaran penerima adalah Buruh Pabrik Rokok, Buruh Petani Tembakau, dan Masyarakat miskin yang mendapatkan bantuan sosial dengan sasaran Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE). v. Kegiatan pelatihan pengembangan ekonomi dengan sasaran keluarga miskin yang telah mempunyai embrio usaha. i. Fasilitasi pemberdayaan sosial program kewirausahaan	

		inklusif produktif Provinsi jawa Timur.	
b) Pemerintah Kabupaten Kediri berperan aktif dalam melaksanakan pendataan dan pemutakhiran data warga miskin yang ada di Kabupaten Kediri. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Kediri dapat merumuskan dan mengusulkan kriteria kemiskinan yang sesuai dengan kondisi riil di daerah yang dijadikan acuan bagi pelaksanaan pendataan dan pemutakhiran data warga miskin; c) Prosentase rumah layak huni di Tahun 2023 adalah 41.14%. Padahal target dalam RPJMD untuk		i. Telah dilakukan penyusunan kajian akademis ke Balitbangda/Badan Inovasi Daerah tentang kajian akademis kriteria kemiskinan i. Pemutakhiran Data DTKS melalui aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) Kemensos dapat dilakukan setiap bulan melalui akun Desa/Kelurahan masing-masing, sehingga diperlukan keaktifan Desa untuk melakukan Verifikasi terhadap penerima bansos dari Kemensos. Prosentase capaian kinerja tahun 2023 sudah melebihi target prosentase RPJMD tahun tersebut yaitu	

prosentase rumah layak huni adalah 82,51%. Artinya sampai saat ini capaian target baru sekitar 49,86%. mohon agar Pemerintah Daerah untuk bisa mewujudkan target tersebut mengingat tahun iniadalah akhir masa jabatan Bupati Kediri. Selanjutnya mohon disertakan/disajikan datakuantitaif yang tidak hanya prosentase, namun berupa jumlah angka berapa banyak jumlah rumah tidak layak huni saat ini di Kabupaten Kediri agar lebih jelas dalam memotret kondisi real di masyarakat;		33,25%. Sedangkan prosentase rumah layak huni tahun 2024 meningkat menjadi 53,55% yang mana sudah melebihi target RPJMD tahun 2024 sebesar 49,67%.	
d) Pemerintah Kabupaten Kediri perlu meningkatkan koordinasi dengan lembaga pemerintah terkait sinkronisasi data dan penggunaan data warga miskin dalam berbagai			

program pemerintah; e) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Kediri tahun 2023 sebesar 5.79 persen. Nilai ini masih di atas Provinsi Jawa Timur (4,88 persen) dan nasional (5,32 persen) sehingga penciptaan lapangan kerja baik formal maupun informal perlu terus ditingkatkan. Upaya menurunkan TPT merupakan langkah strategis menurunkan angka kemiskinan; f) Data rumah tidak layak huni di Kabupaten Kediri masih sangat tinggi, ke depan untuk mempercepat supaya dalam RPJMD Tahun 2021-2026 dan dalam programnya mengalokasikan lebih banyak		Pemerintah Kabupaten Kediri sudah melaksanakan program pembangunan rumah tidak layak huni dari tahun 2021-2024 sebanyak 8.985 rumah dari total yang ditargetkan RPJMD sebanyak 16.779 rumah,	

sasaran program bedah rumah dan menambah alokasi volume dan biayanya;		yang artinya sudah lebih dari 53,55% rumah layak huni terbangun.	
g) Memberikan bantuan bagi warga miskin baik melalui bantuan tunai maupun non tunai guna memenuhi kebutuhan hidup; h) Pemerintah Kabupaten Kediri perlu memberikan perhatian terhadap upaya penurunan angka kemiskinan ekstrem dengan melakukan perlindungan ekonomi maupun dengan peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat. Hal ini disebabkan karena masyarakat dengan kondisi miskin ekstrem rawan terjadi permasalahan yang berkaitan dengan rawan pangan, dimana dalam jangka		Jumlah penerima bansos program sembako 124.968 keluarga; PKH : 64.117 keluarga; BLT DBHCHT : 21.250 orang; Paket Sembako bagi Lansia : 100 orang; Paket Sembako bagi ODKB/ODGJ : 100 orang	

panjang dapat menyebabkan terjadinya persoalan sosial lain yang lebih kompleks, seperti terjadinya stunting pada anak.			
d. **Bidang Ekonomi** 1) Infrastruktur Perdagangan a) Memberikan ruang bagi UMKM masyarakat supaya dapat masuk di supermarket yang ada di Kabupaten Kediri serta mempromosikan produk unggulan maupun produk UMKM di Kabupaten Kediri baik melalui offline maupun online dengan memanfaatkan kanal-kanal informasi maupun media sosial pemerintah; **(Bidang Perdagangan & B. Industri)**	DISDAG	a. Dinas perdagangan memfasilitasi UMKM untuk dapat memasarkan produk-produknya ke toko-toko swalayan minimarket dan supermarket di Kabupaten Kediri. Fasilitasi ini akan terus ditingkatkan dan diperluas dengan melibatkan lebih banyak produk dan toko swalayan . - Promosi produk unggulan dilaksanakan secara offline melalui event pameran lokal maupun nasional, serta melalui kegiatan misi dagang dan kerja sama antar daerah. Upaya promosi melalui online telah dilaksanakan	

		melalui kanal website Pemerintah daerah maupun media sosial resmi SKPD. Ke depan kegiatan promosi akan ditingkatkan dengan edukasi digital untuk mendorong UMKM memanfaatkan marketplace dan platform digital untuk meningkatkan jangkauan pasar.	
b) Pemerintah Kabupaten Kediri perlu melakukan revitalisasi terhadap sarana dan prasarana yang ada di pasar tradisional, guna menghapus kesan kumuh dan meningkatkan daya saing pasar tradisional dengan ritel modern; **(Bidang pasar)**		b.Pemerintah Kabupaten Kediri melalui Dinas Perdagangan melaksanakan langkah-langkah konkret guna meningkatkan kualitas pasar tradisional agar lebih bersaing dengan ritel modern. Beberapa upaya yang dilakukan antara lain: 1. Tahun 2025 Revitalisasi Pasar Ngadiluwih 2. Tahun 2026 Revitalisasi Ex.Pasar unggas Gringging dan	

		Revitalisasi Fasad Pasar Gringging 3. Tahun 2027 Revitalisasi Pasar Kandangan 4. Tahun 2028 Revitalisasi Pasar Gurah 5. Tahun 2029 Revitalisasi Pasar Pamenang	
c) Dalam rangka melindungi pedagang yang ada di pasar tradisional, maka Pemerintah Kabupaten Kediri perlu melakukan penertiban terhadap ritel modern dengan menerapkan sistem zonasi; **(Bidang perdagangan)**		c. Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Perdagangan Kabupaten Kediri berencana mengajukan Perda tentang Pengembangan, Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan untuk menetapkan zona dan Jarak yang relevan dengan perkembangan daerah serta sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan di pusat. Usulan ini sudah masuk pada Propemperda untuk dapat	

		dibahas pada tahun ini. Akan dilakukan tindak lanjut dengan SKPD terkait untuk penertiban ritel modern yang tidak sesuai ketentuan perizinan.	
d) Pemerintah Kabupaten Kediri perlu menyediakan informasi terkait komoditi dan potensi perdagangan yang dimiliki oleh Kabupaten Kediri secara up to date melalui website yang memadai. Penyediaan informasi berbasis website tersebut bertujuan agar masyarakat luas dapat mengakses informasi mengenai komoditi unggulan Kabupaten Kediri secara lebih mudah, sehingga dapat memulihkan daya beli masyarakat terhadap komoditi		d. Pemkab memiliki sistem informasi pemantauan harga komoditas melalui aplikasi "simarko" yang dikembangkan oleh Dinas Perdagangan. Aplikasi ini menyajikan informasi terkini mengenai berbagai komoditas utama bersumber dari pasar yang dikelola Dinas Perdagangan. Simarko dapat diakses oleh siapa saja, kapan saja, melalui perangkat yang terhubung dengan internet sehingga memudahkan masyarakat, pedagang, dan pemangku kepentingan dalam	

pertanian. **(Bidang Perdagangan)**		mengakses harga pasar secara *real-time* melalui website https://simarko.kedirikab.go.id/. Kedepan aplikasi Simarko akan di *upgrade* untuk meningkatkan kualitas data dan laporan yang dihasilkan	
2) Penanaman Modal a) Pemerintah Kabupaten Kediri mengupayakan realisasi investasi yang baik. Nilai realisasi investasi di Kabupaten Kediri pada Tahun 2022 direncanakan akan tumbuh sebesar 5%. Hal tersebut ditinjau dari ekspektasi pertumbuhan di sektor primer, sektor sekunder dan sektor tersier. Peningkatan investasi di Kabupaten Kediri diharapkan dapat meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kediri.	DPMPTSP	a) Upaya DPMPTSP dalam meningkatkan realisasi investasi diantaranya: 1. Kemudahan proses investasi melalui pelayanan perizinan secara online melalui oss.go.id; 2. mempromosikan potensi Kabupaten Kediri melalui pameran investasi di luar daerah 3. Membangun kemitraan antara pelaku usaha	

		menengah-besar dengan UMK yang siap untuk bermitra 4. Melakukan kegiatan pengendalian penanaman modal 5. Menyusun kajian IPRO	
b) Hambatan-hambatan yang menyebabkan dan kurang optimalnya penanaman modal di Kabupaten Kediri adalah belum adanya kawasan Industri di wilayah Kabupaten Kediri. Belum adanya kajian tentang Investment Project Ready to Offer (IPRO). Karena dengan kawasan industri dapat memudahkan proses perizinan tata ruang dan lingkungan bagi badan usaha yang ingin mendirikan perusahaan di Kabupaten Kediri;		b) Pada Tahun 2024, telah disusun kajian tentang Project Ready to Offer (IPRO) Industri Olahan Berbahan Dasar Buah di Kabupaten Kediri	
c) Kedepannya, pertumbuhan penanaman modal di Kabupaten Kediri akan		c) Kebijakan untuk mengedepankan pertumbuhan penanaman modal di sektor	

mengedepankan pada isu-isu sektor primer (pertanian, produksi aneka industri) sektor sekunder (perdagangan dan jasa). Hal tersebut sebagai langkah antisipasi berakhirnya pembangunan Bandara di Kecamatan Tarokan yang dijadwalkan akan berakhir pada Tahun 2024;		primer (pertanian dan produksi aneka industri) serta sektor sekunder (perdagangan dan jasa) di Kabupaten Kediri merupakan langkah strategis dalam menghadapi tantangan dan peluang pasca-berakhirnya pembangunan Bandara di Kecamatan Tarokan pada tahun 2024. Upaya yang dilakukan diantaranya: 1. Mengoptimalkan potesi lokal dengan Menyusun kajian tentang Project Ready to Offer (IPRO) Industri Olahan Berbahan Dasar Buah di Kabupaten Kediri; 2. Memfasilitasi pertumbuhan UKM di sektor	

		aneka industri, seperti makanan, kerajinan, dan produk lokal lainnya melalui pendampingan pelayanan perizinan baik di kantor DPMPTSP maupun pelayanan keliling; 3. melakukan kegiatan pengawasan dan fasilitasi permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya. Usaha yang berjalan lancar dan berkembang dapat menciptakan lapangan kerja	
d) Seiring dengan adanya pembangunan jalan		d) Pembangunan jalan tol yang melintasi jalur	

tol yang melintasi jalur karesidenan Kediri maka dapat meningkatkan iklim berusaha dan berinvestasi. Pemerintah Kabupaten Kediri perlu memfasilitasi kemudahan berinvestasi dengan tetap memperhatikan kebijakan, kondisi sosial masyarakat dan kelestarian lingkungan hidup secara berkelanjutan;		karesidenan Kediri merupakan momentum strategis untuk meningkatkan iklim berusaha dan berinvestasi di Kabupaten Kediri. Namun, perlu memastikan bahwa peningkatan investasi ini dilakukan secara bertanggung jawab, dengan memperhatikan kebijakan yang berlaku, kondisi sosial masyarakat, dan kelestarian lingkungan hidup. Langkah yang telah dilakukan DPMPTSP Kabupaten Kediri diantaranya: 1. Kemudahan proses investasi melalui pelayanan perizinan secara online melalui oss.go.id. adanya pengurusan perizinan berusaha melalui oss.go.id yang telah	

		terintegrasi dengan Kementerian/ Lembaga dengan memperhatikan resiko usaha yang diajukan. Pengajuan perizinan berusaha memiliki resiko Menengah Tinggi dan Tinggi, wajib diverifikasi Sektor Teknis terkait. Sehingga meminimalisir resiko dan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup secara berkelanjutan. 2. Upaya fasilitasi/kemudahan investasi pada tahun 2024, DPMPTSP telah menyusun draft Perda Penanaman Modal.	

		(progres: sudah diajukan ke Bagian Hukum, menunggu pembahasan Bersama legislatif). 3. Pengendalian penanaman modal untuk memastikan bahwa setiap proyek investasi mematuhi peraturan dan kebijakan yang berlaku 4. Mendukung pemberdayaan UKM local melalui fasilitasi pendampingan pelayanan perizinan 5. Fasilitasi kemitraan UKM dengan pelaku usaha Menengah Besar	
e) Minat investor untuk berinvestasi di Kabupaten Kediri mengalami		e) DPMPTSP Kabupaten Kediri mengambil	

peningkatan semenjak keberadaan bandara di Kabupaten Kediri dan adanya rencana pembangunan jalan Tol Nganjuk-Kediri-Tulungagung. Untuk merespon hal tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Kediri perlu memfasilitasi kemudahan berinvestasi dengan tetap memperhatikan kondisi sosial masyarakat dan kelestarian lingkungan hidup secara berkelanjutan;		langkah-langkah strategis untuk memfasilitasi kemudahan berinvestasi sambil memastikan bahwa pembangunan tersebut tetap memperhatikan kondisi sosial masyarakat dan kelestarian lingkungan hidup diantaranya: 1. Kemudahan proses investasi melalui pelayanan perizinan secara online melalui oss.go.id; 2. Mengadakan Forum Konsultasi Publik terkait pelayanan perizinan; 3. Pengendalian penanaman modal terhadap dampak sosial dan lingkungan dari proyek investasi	
f) Pemerintah Kabupaten Kediri		f) Pentingnya peran	

harus memprioritaskan investor lokal dan warga sekitar terkait keberadaan bandara dan rencana pembangunan jalan Tol Nganjuk Kediri-Tulungagung untuk menghindari persoalan yang dapat terjadi di kemudian hari. Pemberian prioritas kepada investor lokal dan warga sekitar tersebut merupakan salah satu upaya yang dapat meningkatkan kesejahteraan warga Kabupaten Kediri;		pemerintah Kabupaten Kediri dalam memprioritaskan kepentingan investor lokal dan warga sekitar dalam proyek-proyek strategis seperti pembangunan bandara dan jalan tol Nganjuk-Kediri-Tulungagung. Bukan hanya sebagai upaya untuk menghindari potensi konflik atau masalah di masa depan, tetapi juga sebagai langkah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat, kegiatan yang dilakukan diantaranya: 1. Melibatkan investor local dalam kegiatan fasilitasi Kerjasama dengan pelaku usaha menengah besar; 2. Mempersiapkan UKM	

		melalui pendampingan pelayanan perizinan, agar siap bermitra	
3) Pariwisata dan Kebudayaan a) Pertumbuhan PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Kabupaen Kediri sebesar 9.79 persen, di atas provinsi (8,05 persen), namun masih di bawah pertumbuhan nasional (10,01 persen) sehingga perlu dilakukan upaya peningkatan ke depan terutama untuk menangkap peluang keberadaan bandara dan jalan tol; b) Dalam upaya mengoptimalkan pariwisata berbasis seni budaya lokal di Kabupaten Kediri, Pemerintah Kabupaten Kediri melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan telah mengidentifikasikan permasalahan dan tantangan sebagai berikut:	DINAS PARBUD DINAS KOPUSMIK PUPR	laksanan kegiatan bersinergi dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan melalui pelaksanaan event-event Bersama antara lain pagelaran di TMII Jakarta serta adanya ruang untuk pelaku usaha mikro di Lokasi-lokasi wisata baik yang di Kelola oleh Pemerintah Kabupaten Kediri melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan ataupun yang di Kelola oleh Masyarakat (desa-desa wisata) seperti kegiatan pasar budaya harinjing dan kegiatan pergantian tahun	

1. Masih rendahnya kompetensi SDM kepariwisataan yang ditandai dengan masih minimnya tenaga kerja bersertifikat; 2. Tata kelola daya tarik wisata belum optimal, terutama pada bidang perencanaan, pelaksanaan, monitoring evaluasi, dan upaya perbaikan; 3. Belum diterapkannya digitalisasi pada pengelolaan obyek wisata dan masih rendahnya kesadaran insan insan pariwisata terhadap pelestarian lingkungan; 4. Sarana dan prasarana di obyek-obyek wisata perlu ditingkatkan untuk memenuhi kenyamanan dan kepuasan wisatawan;			

5. Perlu terciptanya konektivitas antar daya tarik wisata, sebab belum ada transportasi wisata antar Daya Tarik Wisata; 6. Masih minimnya return tourist adalah wisatawan akan terkesan sehingga ingin datang dan datang lagi di Kabupaten Kediri; 7. Perlunya mempromosikan pertumbuhan berkelanjutan, inklusif dan berkelanjutan ekonomi, kesempatan kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua; 8. Perlunya peningkatan kerjasama kepariwisataan dan kebudayaan untuk peluang investasi yang aman dan kondusif 9. Memberikan dan kebudayaan			

kepada mengoptimalkan anak sekolah pendidikan supaya menyelamatkan budaya asli bangsa serta menjaga kelestarian warisan kebudayaan bangsa; 10. Pemerintah Kabupaten Kediri juga diharapkan memberikan fasilitas bagi aktor penggerak wisata untuk dapat meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pengelolaan pariwisata lokal melalui berbagai bentuk, seperti pelatihan atau studi banding dengan wilayah lain yang memiliki potensi yang serupa dan lebih maju; 11. Memberikan dan kebudayaan kepada mengoptimalkan anak sekolah pendidikan supaya			

menyelamatkan budaya asli bangsa serta menjaga kelestarian warisan kebudayaan bangsa; 12. Pemerintah Kabupaten Kediri juga diharapkan dapat membantu melakukan promosi wisata daerah dengan menampilkan di media sosial pemerintah atau melalui rekomendasi yang diberikan saat adanya kunjungan kerja;			
13. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur yang paling dasar misalnya berupa akses jalan, air bersih, listrik, jaringan telekomunikasi untuk menunjang pengembangan sektor pariwisata; 14. Memberikan ruang bagi UMKM untuk dapat menunjukkan karya atau		n dibuatkan skala prioritas untuk penanganan infrastruktur akses pariwisata dan untuk Kawasan Wisata Gunung Kelud serta Air Terjun Dholo merupakan prioritas utama (Dinas PUPR)	

berjualan di sekitar wilayah wisata di Kabupaten Kediri sehingga dapat membantu menggerakkan ekonomi masyarakat;			
4) Pertanian dan Ketahanan Pangan a) Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian Kabupaten Kediri sebesar 3,03 persen di atas pertumbuhan Provinsi Jawa Timur (2,25 persen) dan nasional (1,3 persen). Nilai Tukar Petani di Kabupaten Kediri yang sebesar 104,44 masih di bawah Provinsi Jawa Timur (109,44) dan nasional (112,46) tetapi telah mencapai target yang ditetapkan sebesar 104. Sebagai wilayah yang berbasis sektor Pertanian, maka perlu terus dilakukan berbagai upaya strategis guna meningkatkan nilai tukar petani ke depan. Masih rendahnya nilai tukar petani dapat	DKPP	as Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) Kabupaten Kediri mendorong terwujudnya ketahanan pangan masyarakat mulai dari tingkat rumah tangga dengan melaksanakan kegiatan pemanfaatan lahan pekarangan yang kurang produktif melalui Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) dan program IBU ASUH STUNTING. Kegiatan ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat mulai tingkat rumah tangga untuk menyediakan sumber pangan dan gizi bagi keluarga. Bentuk kegiatan berupa sosialisasi dan pelatihan serta pemberian bantuan bibit/benih tanaman sayur dan sarana	

menjadi faktor penghambat penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Kediri; b) Sektor pertanian mempunyai peranan yang sangat penting dalam membangun perekonomian nasional termasuk perekonomian daerah, karena sektor pertanian berfungsi sebagai penyedia bahan pangan untuk ketahanan pangan masyarakat, sebagai instrumen pengentasan kemiskinan, penyedia lapangan kerja, serta sumber pendapatan masyarakat; c) Kondisi pertanian di Indonesia memiliki permasalahan serius antara lain terkait lahan, irigasi, benih, pupuk, alat mesin pertanian, penyuluh lapangan (sumber daya petani), tenaga kerja, hingga permasalahan tata niaga pertanian; d) Salah satu faktor kunci dalam peningkatan kesejahteraan petani adalah inovasi teknologi di bidang pertanian.		produksi pertanian pekarangan serta bantuan ternak ayam dan saran produksi peternakan kepada 740 orang kader PKK desa, ibu rumah tangga, kelompok tani dan kelompok wanita tani di 37 lokasi. Dengan pelaksanaan kegiatan KRPL dan IBU ASUH STUNTING yang berkelanjutan diharapkan dapat menjadi sarana sumber pangan dan sumber pendapatan keluarga serta mendukung upaya Pemerintah Kabupaten Kediri dalam penanganan stunting. Seiring bertambahnya jumlah penduduk makan kebutuhan akan konsumsi pangan semakin meningkat, maka diperlukan upaya diversifikasi pangan berbasis sumber daya lokal. Kegiatan yang dilakukan untuk penganekaragaman konsumsi pangan antara lain dengan	

Mulai dari penggunaan bibit unggul, penggunaan alat mesin pertanian, dan pemupukan. Bibit unggul merupakan bibit yang memiliki mutu terjamin sehingga dapat menjamin keberhasilan usaha tani. Alat dan mesin pertanian dapat meningkatkan kualitas dan efisiensi dalam mengolah lahan pertanian. Pemupukan dilakukan untuk memberikan nutrisi pada tanaman guna meningkatkan produksi;		pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan pekarangan sebagai sumber pangan keluarga. Masyarakat diberikan pelatihan dan bantuan bibit tanaman sayur/buah, ternak ayam serta sarana produksi pertanian dan peternakan untuk dibudidayakan di pekarangan. Dengan adanya diversifikasi pangan yang bergizi dan seimbang, diharapkan ketergantungan konsumsi beras menurun dan ketersediaan pangan selain beras menjadi lebih beragam sehingga dapat mendukung stabilitas ketahanan pangan. Upaya peningkatan kemampuan peternak dalam meningkatkan produksi peternakan secara berkelanjutan terus dilakukan melalui pelatihan peningkatan produksi peternakan serta	

		pelatihan pengembangan agribisnis peternakan yang bertujuan mendorong berkembangnya usaha peternakan dengan wawasan bisnis yang mampu menghasilkan produk peternakan yang berdaya saing sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan peternak. Pelatihan ini melibatkan generasi muda sebagai peserta dengan harapan dapat menggugah minat kaum milenial untuk mau dan mampu mengembangkan usaha peternakan modern dan melek teknologi sebagai mata pencaharian yang menjanjikan.	
e) Permasalahan yang sering terjadi pada Sektor Pertanian di Kabupaten Kediri : 1. Terjadinya anomali iklim, memberi pengaruh negatif yaitu tidak adanya kepastian ketersediaan air dan munculnya	DIPERTABUN	Penggunaan bahan organik melalui pupuk organik dan pestisida nabati dengan sosialisasi dan bimtek pembuatan pupuk organik secara terus menerus kepada petani, bimtek mitigasi dan antisipasi dampak perubahan iklim serta bekerjasama dengan PT Sumitomo mengadakan	1. Menghemat air dalam budidaya pertanian sehingga dalam musim kemarau petani tidak kesulitan air dalam usaha taninya. 2. Petani mampu mitigasi dan antisipasi dampak perubahan iklim sehingga bisa menyesuaikan pola tanam

berbagai macam OPT (Organisme Pengganggu Tanaman) dan positif bagi tanaman yaitu musim kering yang cukup panjang membuat rasio bunga menjadi buah lebih tinggi untuk beberapa tanaman buah – buahan;		demplot di Desa Mekikis Kec. Purwoasri penggunaan teknologi hemat air melalui intermitten/ teknologi *AWD (Alternate Wetting Drying*), sedangkan untuk serangan OPT dilakukan dengan Gerakan pengendalian (Gerdal) bersama petani dan bantuan obat – obatan kepada petani	2. Dampak serangan OPT tidak mengganggu produksi dan produktivitas tanaman budidaya.
2. Meningkatnya serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan pertanian dan Komuditas Pertanian;		Melaksanakan gerakan pengendalian (Gerdal) OPT bersama petugas dan petani serta bantuan obat – obatan pestisida	Dampak serangan OPT tidak mengganggu produksi dan produktivitas tanaman budidaya
3. Pengaruh harga komoditas di pasaran yang fluktuatif		Menjalin Kerjasama/ kemitraan dengan daerah lain dan perusahaan	Mengurangi resiko kerugian petani saat panen raya/ harga jatuh
4. Semakin terbatasnya ketersediaan pupuk bersubsidi akibat kebijakan pemerintah pusat yang mengurangi subsidi pupuk.		Penggunaan bahan organik yang lebih banyak ke lahan dengan sosialisasi dan pelatihan pembuatan pupuk organik ke petani	Pengurangan penggunaan pupuk kimia dan perbaikan tingkat kesuburan tanah
5. Sistem usaha peternakan yang masih		Dalam rangka upaya peningkatan usaha peternakan,	

bersifat tradisional belum bisa menjamin kesejahteraan peternak 6. Banyaknya produk olahan hasil peternakan yang belum memiliki izin edar serta akses pemasaran produk olahan hasil peternakan perlu ditingkatkan; 7. Pengetahuan penanganan panen yang baik belum dipahami secara luas oleh pembudidaya dan pemasar perikanan sehingga kualitas ikan yang diproduksi belum optimal;		tahun 2024 telah dilaksanakan hibah uang untuk pengembangan peternakan bagi 129 kelompok ternak produktif. Selain itu terus dilaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas peternak dalam meningkatkan produksi peternakan secara berkelanjutan melalui pelatihan peningkatan produksi peternakan ruminansia dan non ruminansia serta pelatihan pengembangan agribisnis peternakan yang bertujuan mendorong berkembangnya usaha peternakan dengan wawasan bisnis dengan memanfaatkan perkembangan teknologi yang	

8. Masih terbatasnya kemampuan SDM pelaku usaha perikanan terkait manajemen usaha sehingga hasil produksi belum optimal; 9. Belum optimalnya kelembagaan pokdakan maupun poklahsar dalam melakukan kerjasama antar kelompok dan diluar kelompok dalam hal penyediaan pakan, penjualan produksi maupun permodalan; 10. Keterbatasan induk ikan yang berkualitas (lele, nila,		mampu menghasilkan produk peternakan yang berdaya saing dan meningkatkan kesejahteraan peternak. Tahun 2024 telah dilakukan pelatihan pengolahan produk hasil peternakan yang menyasar pelaku usaha olahan produk hasil peternakan. Di dalamnya juga dilakukan pembinaan dan sosialisasi pengurusan ijin edar pelaku usaha produk hasil peternakan serta mengikutsertakan pelaku usaha produk hasil peternakan dalam event-event pameran	

gurami, patin, dan ikan hias); 11. Belum optimalnya penanganan penyakit ikan 12. Masih terbatasnya kemampuan SDM pelaku usaha perikanan terkait manajemen usaha sehingga hasil produksi belum optimal; 13. Pengetahuan penanganan panen yang baik belum dipahami secara luas oleh pembudidaya dan pemasar perikanan sehingga kualitas ikan yang diproduksi belum optimal; 14. Belum optimalnya promosi produk			

perikanan baik offline maupun online sehingga jangkauan pemasaran terbatas yang berdampak pada pendapatan rumah tangga perikanan (RTP) yang belum optimal; 15. Belum optimalnya kelembagaan pokdakan maupun poklahsar dalam melakukan kerjasama antar kelompok dan diluar kelompok dalam hal penyediaan pakan, penjualan produksi maupun permodalan; 16. Keterbatasan pengetahuan terkait			

keamanan pangan bagi pengolah perikanan; 17. Terbatasnya pengetahuan para pengolah produk perikanan terkait packaging yang benar dan menarik; 18. Belum banyak pengolah perikanan yang memiliki sertifikasi keamanan pangan; 19. Rendahnya tingkat konsumsi ikan; 20. Terbatasnya diversifikasi olahan perikanan;			
f) Pemerintah Kabupaten Kediri melakukan upaya dalam rangka meningkatkan ketersediaan pangan dan akses pangan masyarakat. Upaya		DKPP Kabupaten Kediri berupaya memastikan ketersedian pangan bagi masyarakat mencukupi melalui pemantauan di sisi produksi, cadangan pangan masyarakat serta stok yang ada di gudang distributor/	

ini baik secara langsung atau secara tidak langsung harus ditunjang dengan hal-hal yang ada disekitarnya. Pemerintah Kabupaten Kediri melihat pengembangan ketersediaan pangan dan akses pangan masyarakat harus dilaksanakan lebih massif, terutama yang berdampak langsung kepada tersedianya dan kemudahan akses pangan masyarakat;		penggilingan serta pemantauan harga pangan di tingkat konsumen (pasar). Koordinasi juga senantiasa dilakukan dengan Badan Pangan Nasional dan Bulog terkait pelaksanan kebijakan terkait stok dan penyaluran pangan. Tahun 2024 telah disalurkan sebanyak 38.400 paket bantuan pangan pokok bagi masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan akses pangan sekaligus sebagai salah satu upaya mengurangi angka kemiskinan dan mengendalikan angka inflasi	
g) Produksi pangan tidak berbanding lurus dengan pertambahan penduduk sehingga ketersediaan pangan cenderung melandai;		Seiring bertambahnya jumlah penduduk makan kebutuhan akan konsumsi pangan semakin meningkat, maka diperlukan upaya diversifikasi pangan berbasis sumber daya lokal. Kegiatan yang	

		dilakukan untuk penganekaragaman konsumsi pangan antara lain dengan pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan pekarangan sebagai sumber pangan keluarga. Masyarakat diberikan pelatihan dan bantuan bibit tanaman sayur/buah, ternak ayam serta sarana produksi pertanian dan peternakan untuk dibudidayakan di pekarangan. Dengan adanya diversifikasi pangan yang bergizi dan seimbang, diharapkan ketergantungan konsumsi beras menurun dan ketersediaan pangan selain beras menjadi lebih beragam sehingga dapat mendukung	

		stabilitas ketahanan pangan.	
h) Permasalahan ketahanan pangan di Kabupaten Kediri diakibatkan; 1. Masih terjadi fluktuasi harga pangan yang dapat berdampak pada menurunnya akses pangan masyarakat; 2. Masih tingginya angka stunting dan kemiskinan di Kabupaten Kediri; 3. Ketergantungan pada beras sebagai komoditas pangan pokok masih cukup tinggi dan pemahaman masyarakat mengenai pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA)		1. Penguatan stabilitas harga dan peningkatan akses pangan masyarakat melalui pemantauan harga dan stok pangan di tingkat produsen, distributor/penggilingan dan konsumen, operasi pasar dan Gerakan Pangan Murah, koordinasi lintas sektor, pengembangan kelembagaan cadangan pangan (lumbung pangan masyarakat), pengembangan dan peningkatan kapasitas pengembangan Lembaga Usaha Pangan	

masih perlu ditingkatkan; 4. Kesadaran masyarakat terhadap penggunaan pestisida kimia pada pangan segar serta pemakaian bahan tambahan pangan yang sehat dan aman perlu ditingkatkan mengingat masih ditemukan pangan segar yang belum aman dari residu pestisida.		Masyarakat (LUPM) melalui Pasar Mitra Tani (PMT). 2. Pemberdayaan Masyarakat dalam pemanfaatan pekarangan melalui program IBU ASUH STUNTING yakni kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) secara berkelanjutan disertai monitoring dan evaluasi sebagai salah satu upaya pendukung pencegahan *stunting* serta solusi pemenuhan pangan di tingkat rumah tangga yang beraneka ragam serta bisa dikembangkan	

		menjadi sumber pendapatan di tingkat rumah tangga. 3. Sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan untuk mendorong masyarakat dalam konsumsi pangan berbahan baku lokal non beras serta pelaku usaha kecil dan menengah untuk memproduksi pangan olahan non beras. 4. Sosialisasi, pembinaan, pengawasan keamanan pangan segar asal tumbuhan (PSAT) bagi masyarakat dan pelaku usaha pangan serta peningkatan jaminan mutu	

		dan daya saing produk melalui fasilitasi rekomendasi ijin edar Pangan Segar Asal Tumbuhan Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK).	
i) Dalam mewujudkan misi revitalisasi pertanian untuk ketahanan dan swasembada pangan perlu adanya program kebijakan Bupati Kediri untuk memberi stimulus kepada anak-anak muda agar mau bertani didesanya masing masing dengan memberi bantuan pelatihan, modal, lahan, bibit, pupuk dan meneyediakan pasar pasca panen. Misalnya dengan membuat program satu desa satu		• DKPP mendorong terwujudnya ketahanan pangan di tingkat rumah tangga dengan melaksanakan kegiatan pemanfaatan lahan pekarangan yang kurang produktif melalui Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL). Kegiatan ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat mulai tingkat	

kelompok pemuda tani yang betul-betul dibina dan difasilitasi oleh pemerintah daerah; j) Dalam mewujudkan misi revitalisasi pertanian untuk ketahanan dan swasembada pangan perlu adanya program kebijakan Bupati Kediri untuk memberi stimulus kepada anak-anak muda agar mau bertani didesanya masing-masing dengan memberi bantuan pelatihan, modal, lahan, bibit, pupuk dan meneyediakan pasar pasca panen. Misalnya dengan membuat program satu desa satu kelompok pemuda tani yang betul-betul dibina dan difasilitasi oleh pemerintah daerah;		rumah tangga untuk menyediakan sumber pangan dan gizi di tingkat keluarga. Bentuk kegiatan berupa sosialisasi dan pelatihan serta pemberian bantuan bibit/benih tanaman sayur dan sarana produksi pertanian pekarangan serta bantuan ternak ayam dan sarana produksi peternakan kepada 740 orang kader PKK desa, ibu rumah tangga, kelompok tani dan kelompok wanita tani di 37 lokasi. Dengan pelaksanaan yang	

		berkelanjutan diharapkan pemanfaatan pekarangan dapat dapat menjadi sarana sumber pangan sekaligus sumber pendapatan keluarga. • Dalam rangka upaya pengembangan usaha peternakan, terus dilaksanakan kegiatan peningkatan kemampuan peternak dalam meningkatkan produksi peternakan secara berkelanjutan melalui pelatihan peningkatan produksi peternakan serta pelatihan pengembangan agribisnis peternakan	

		(pengolahan hasil peternakan) yang melibatkan kelompok muda sebagai peserta yang bertujuan mendorong motivasi peternak muda dalam mengembangkan usaha peternakan yang modern dan berteknologi. Pelatihan ini sekaligus juga memberikan gambaran analisis usaha peternakan sehingga menarik minat pemuda untuk memilih beternak sebagai sumber pendapatan yang menjanjikan.	

k) Sektor pertanian dan ketahanan pangan perlu diberikan peningkatan kuantitas maupun kualitas program. Agar kesejahteraan para petani maupun para pelaku usaha di sektor pertanian benar-benar diperhatikan, melalui peningkatan kualitas serta kuantitas program-program agar Pemerintah Kabupaten Kediri dapat menciptakan program program yang mendorong lahirnya para petani-petani muda di Kabupaten Kediri, sebagai generasi yang akan melanjutkan tongkat estafet pemanfaatan potensi pertanian di Kabupaten Kediri; l) Penyediaan sarana dan prasatana produksi sektor pertanian terutama penyediaan pupuk dan obat obatan yang memadai agar Petani tidak kesulitan mendapatkan disaat diperlukan.			

5) Pengelolaan Pasar Pemerintah Kabupaten Kediri dalam mengembangkan sektor perdagangan adalah dengan acuan peningkatan daya beli masyarakat. Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Kediri melalui Dinas Perdagangan telah menetapkan arah kebijakan terkait dengan meningkatnya sektor perdagangan dan meningkatnya pertumbuhan Industri Kecil Mikro (IKM) dengan pendekatan strategis yakni kestabilan harga dan jumlah komoditas bahan pokok dan barang penting dalam pasar ekonomi di Kabupaten Kediri. Adapun permasalahan yang yang dihadapi dan sering menjadi permasalahan dalam pengembangan Usaha Kecil Mikro di Kabupaten Kediri : 1. Perlunya peningkatan kualitas/standar produk usaha mikro agar berdaya saing dan berdaya jual; 2. Kurangnya diversifikasi terhadap usaha koperasi; 3. Kurangnya SDM koperasi yang terlatih dalam			

penggunaan teknologi dalam peningkatan kualitas dan kinerja koperasi; 4. Penurunan nilai ekspor dikarenakan turunnya permintaan pasar luar negeri; 5. Belum mampunya produk-produk daerah untuk menembus pasar luar negeri; 6. Pengetahuan Pelaku Usaha terkait Ekspor Impor masih rendah; 7. Munculnya barang-barang impor dengan harga murah dan meningkatnya supermarket dan minimarket modern; 8. Pemerintah Daerah meningkatkan sarana dan prasarana bangunan pasar tradisional untuk meningkatkan kenyamanan berbelanja dan perlindungan terhadap pedagang kecil; 9. Pemerintah Daerah terus memperbaiki manajemen pengelolaan pasar dalam rangka peningkatan retribusi daerah.			

6) Pengelolaan Perusahaan Daerah a) Reformasi tata kelola BUMD dalam rangka pengelolaan BUMD yang profesional dan berdaya saing dan peningkatan pelayanan publik serta berperan aktif untuk membantu menekan angka kemiskinan; b) Pemerintah Daerah mendorong pengelolaan BUMD yang professional dan berdaya saing, sehingga kondisi BUMD semakin sehat; c) Pemerintah Daerah mendorong BUMD untuk terus berinovasi agar dapat menciptakan atau memanfaatkan peluang ekonomi ke depan, seperti penyediaan bioethanol berbasis tetes tebu; d) Pemerintah Daerah mendorong kolaborasi BUMD dengan BUMDes untuk meningkatkan daya saing usaha masing masing entitas bisnis, dimana BUMD juga dapat berperan sebagai incubator dan	- BAGIAN PEREKONOMIAN - DPMPD	Sebagai contoh, BUMD Bank Daerah dapat mendorong dan membantu pembiayaan di BUMDes, terutama yang bergerak di sektor produktif. PDAM juga dapat menjalin kerja sama dengan BUMDes yang mengelola air bersih, baik dalam hal penyediaan air baku maupun pemasaran produk air bersih. Dengan adanya kolaborasi ini, diharapkan BUMD dan BUMDes dapat tumbuh dan berkembang bersama, memberikan kontribusi yang lebih besar bagi perekonomian daerah.	

katalisator bisnis bagi BUMDes; e) Evaluasi perlu dilakukan secara berkala dan menyeluruh yang kemudian dijadikan sebagai landasan agar pengelolaan terhadap Perusahaan-Perusahaan Daerah Kabupaten Kediri dapat lebih optimal dalam memperoleh laba; f) Dalam proses rekrutmen sumber daya manusia Perusahaan Umum Daerah ini dapat dilaksanakan secara transparan serta mengutamakan dari kalangan profesional yang memang memiliki kapasitas, sehingga dapat maksimal dalam menjalan amanah.			
7) Pengairan, Pertambangan dan Energi a) Pemerintah Daerah melakukan optimalisasi sIstem irigasi teknis dalam rangka mendukung peningkatan produktivitas usaha sektor pertanian di Kabupaten Kediri serta penanganan risiko banjir;	PUPR	Optimalisasi irigasi adalah upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem irigasi guna memaksimalkan pemanfaatan air bagi pertanian. Tujuan utama dari optimalisasi ini adalah memastikan bahwa air yang tersedia digunakan secara tepat, mengurangi	

b) Peningkatan pengawasan usaha galian C serta penegakan hukum terhadap penyelenggaraan usaha galian C yang tidak sesuai ketentuan dan berpotensi merusak lingkungan; c) Memfasilitasi produksi dan penggunaan sumber energi yang dapat dihasilkan dan dikelola dalam skala kecil sesuai potensi lokal di Kabupaten Kediri, seperti biogas, mikro hidro, tenaga angin dan panel surya.		pemborosan, guna meningkatkan produktivitas tanaman dan keberlanjutan sumber daya air. Optimalisasi irigasi yang sudah dilaksanakan oleh Dinas PUPR, antara lain: 1. Pemeliharaan Infrastruktur – Pemeliharaan jaringan irigasi bertujuan untuk menjaga dan memperbaiki saluran irigasi, pintu air, bendung, dan infrastruktur irigasi lainnya agar tetap berfungsi optimal. 2. Konservasi Air – Membangun embung untuk menambah imbuhan air tanah. 3. Partisipasi Petani dan Stakeholder – Selain memaksimalkan peran tenaga Operasi dan Pemeliharaan pada Dinas PUPR, Dilaksanakan juga peningkatan keterlibatan petani dalam pengelolaan irigasi melalui pembentukan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A/HIPPA/GHIP	

		PA) oleh Dinas PUPR. 4. Manajemen Operasional – Mengatur jadwal pemberian dan pembagian air berdasarkan kebutuhan tanaman dan ketersediaan air. 5. Efisiensi Distribusi Air – Dengan dibentuknya HIPPA dan GHIPPA diharapkan jaringan irigasi dapat lebih terjaga, dan manajemen operasional pembagian air irigasi dapat dilaksanakan secara merata dan tepat waktu ke lahan pertanian.	
8) Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah a) Pemerintah Daerah melakukan pendataan dan profiling terhadap Koperasi dan UMKM di Kabupaten Kediri sebagai basis data dalam implementasi program peningkatan kinerja koperasi dan pemberdayaan UMKM. Pendataan dan profiling yang terupdate juga	DINAS KOPUSMIK	a. Melakukan Kerjasama dengan Dinas-Dinas yang beririsan menangani UMKM antara lain Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Perdagangan, DPMTSP serta desa dan kecamatan untuk melakukan profiling dan pendataan UMKM di Kabupaten Kediri dengan menggunakan	

dibutuhkan dalam mengidentifikasi potensi dan produk unggulan UMKM pada setiap desa atau kecamatan; b) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan serta secara selektif memfasilitasi penguatan permodalan koperasi serta mendorong perluasan akses permodalan dengan tingkat bunga yang kompetitif bagi usaha mikro dalam rangka mengurangi praktek rente (pinjaman berbunga tinggi) yang selama ini menjerat banyak pelaku usaha mikro; c) Melakukan pendataan dan profiling terhadap Koperasi dan UMKM di Kabupaten Kediri sebagai basis data dalam implementasi program peningkatan kinerja koperasi dan pemberdayaan UMKM. Pendataan dan profiling yang terupdate juga dibutuhkan dalam mengidentifikasi		aplikasi sisdatum.kediri kab.go.id b. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro telah melakukan penilaian Kesehatan koperasi terhadap koperasi aktif di Kabupaten Kediri tetapi hal ini belum dapat di lakukan kepada seluruh koperasi aktif di Kabupaten Kediri setiap tahun di karenakan keterbatasan SDM yang mempunyai kompetensi dalam melakukan penilaian Kesehatan koperasi c. Kegiatan berupa bantuan untuk pelaku usaha mikro selama ini meggunakan mekanisme hibah serta adanya bantuan alat produksi untuk UMKM potensial serta bantuan promosi produk UMKM baik melalui pameran dalam daerah, luar daerah maupun aplikasi	

potensi dan produk unggulan UMKM pada setiap desa atau kecamatan; d) Perlu adanya peningkatan kuantitas maupun kualitas terhadap program-program yang mendorong kemajuan pelaku usaha UMKM khususnya dalam rangka program pemulihan ekonomi nasional; e) Bantuan-bantuan yang dapat diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Kediri terhadap para pelaku usaha UMKM dapat berupa bantuan alat produksi, peningkatan promosi, serta bantuan modal, serta secara rutin melakukan monitoring dan pendampingan terhadap pelaku usaha UMKM di Kabupaten Kediri; f) Program Pemulihan Ekonomi Nasional agar terus dipertahankan dan di tingkatkan agar pendapatan dan daya beli masyarakat bisa meningkat, program penguatan UMKM dan		umkm.kedirikab.go.id	

Koperasi agar terus ditingkatkan agar UMKM dan Koperasi bisa bersaing dalam dunia global.			
e. **Bidang Hukum dan Pemerintahan** a) Pelayanan Pemerintahan Pemerintah Daerah perlu terus mendorong penyelenggaraan sistem monitoring dan evaluasi kinerja pemerintahan di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa berbasis digital untuk mendorong birokrasi yang efektif dan efisien,	BAGIAN ORGANISASI	Perangkat Daerah telah dimintai dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Interim sesuai dengan draft yang disampaikan mengacu pada PermenPANRB nomor 53 Tahun 2014 sebagai laporan kinerja triwulanan dan sebagai dasar monitoring dan evaluasi kinerja triwulanan melalui; i. Surat Sekretaris Daerah tanggal 29 April 2024 nomor 000.8.6.3/140/418.07/2024 perihal Penyampaian Dokumen Laporan Kinerja	

		Interim Triwulan 1 Tahun 2024; i. Surat Sekretaris Daerah tanggal 10 Juli 2024 nomor 000.8.6/1491/418.07/2024 perihal Penyampaian Laporan Kinerja Interim dan Input Realisasi Kinerja Triwulan 2 dalam Aplikasi e-SAKIP Tahun 2024; i. Surat Kabupaten Kediri tanggal 8 Oktober 2024 nomor 000.8.6.3/215/418.07/2024 perihal Penyampaian Laporan Kinerja Interim dan Input Realisasi Kinerja Triwulan 3 dalam Aplikasi e-SAKIP Tahun 2024;	

		. Surat Sekretaris Daerah tanggal 7 Januari 2025 nomor 000.8.6.3/2/418 .07/2025 perihal Permintaan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024;	
b) Pelayanan Ketenagakerjaan 1. Pemerintah Daerah memfasilitasi tersedianya informasi lowongan kerja dan penyelenggaraan bursa kerja melalui media sosial dan website resmi yang dikelola pemerintah daerah; 2. Pemerintah Daerah memfasilitasi peningkatan keterampilan (skill) dan kemampuan para pencari kerja melalui pelatihan bekerjasama dengan swasta dan penyelenggaraan training centre; 3. Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan	DISNAKER	1. Dinas Tenaga Kerja telah melaksanakan kegiatan *Job Fair* / Bursa Kerja pada tanggal 26- 27 Juni 2024 di Convention Hall SLG. Terdapat 50 perusahaan yang ikut serta dan membuka lowongan kerja untuk lulusan SMA/SMK dan D3/S1 sebanyak 1.580 orang. Jumlah pelamar yang terdata sebanyak 1.195	

terhadap PJTKI dalam rangka perlindungan dan pemberdayaan tenaga kerja yang bekerja di luar negeri. Sinergi dengan stakeholder terkait dalam penyaluran TKI menjadi salah satu upaya strategis menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) serta menurunkan angka kemiskinan.		orang. Dalam kegiatan bursa kerja tersebut juga dilaksanakan kegiatan talkshow dan bimbingan karier bagi pencari kerja. Publikasi terkait lowongan kerja telah dilaksanakan secara intens melalui social *media* dan *website* Dinas Tenaga Kerja. Selain itu, implementasi penggunaan digitalisasi pelayanan ketenagakerjaan dengan mengintegrasikan teknologi ke dalam Pasar Kerja melalui platform e-kerjo (https://e-kerjo.kedirikab.go.id**)** juga terus digalakkan secara optimal.	

		2. Fasilitasi peningkatan skill dan kompetensi pencari kerja salah satunya dapat dilakukan melalui program pelatihan dan pendidikan vokasional. Selama 2024**,** telah dilaksanakan 107 pelatihan yang diikuti oleh 2.160 peserta serta 5 kegiatan magang perusahaan yang diikuti oleh 100 peserta dimana sebelumnya telah dilakukan filter melalui prosedur assessment, sehingga diharapkan kegiatan dan hasil yang diperoleh dapat efektif dan efisien serta	

		tepat sasaran. Terdapat 29 LPKS yang bermitra bermitra dalam pelaksanaan kegiatan pelatihan dan magang. 3. Walaupun secara kewenangan untuk kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap Pekerja Migran Indonesia ada pada Kementerian Pusat dan Pemprov, Dinas Tenaga Kerja tetap berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Menyediakan informasi, menjalin sinergi dan kemitraan dengan dengan *stakeholder* masih tetap bisa	

		dilakukan secara kontinu dan konsisten. Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja yaitu sosialisasi pencegahan tindak pidana perdagangan orang yang dilaksanakan di Kecamatan Papar tanggal 30 September 2024, bekerjasama dengan Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI (Tempat Pemeriksaan Imigrasi) Kediri.	

Sumber : OPD Kab.Kediri

BAB IV
CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

4.1. Urusan Pemerintahan yang Ditugas-Pembantuan

4.1.1. Identifikasi Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan yang diterima dari pemerintah tingkat atasnya dan Hambatan/Permasalahan dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Upaya Penyelesaian sebagai berikut:

A. Tugas Pembantuan dari Pemerintah Pusat

1. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Kediri

a. Dasar Penugasan :

Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 233 Tahun 2024 tentang Penetapan Pemerintah Daerah Penerima Program Pengembangan Kemasan Produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil melalui Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2024 Tahap II.

b. Program dan Kegiatan

1. Program Program Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah, dan Koperasi
2. Kegiatan Penguatan Rantai Pasok Usaha Mikro
3. Output Pengembangan Rumah Kemasan bagi Usaha Mikro
4. Rincian Kegiatan : Layanan Pengembangan Kemasan Produk Usaha Mikro sbb :
    a. Belanja Honor Operasional Satuan Kerja Rumah Kemasan : 2 bulan
    b. Belanja Bahan (ATK dan konsumsi)
    c. Belanja Honor Output Kegiatan Petugas Layanan Kemasan : 1 bulan
    d. Belanja Barang Penunjang Tugas Pembantuan Untuk Diserahkan Kepada Pemerintah Daerah (1 paket)
    e. Belanja Peralatan dan Mesin Tugas Pembantuan Untuk Diserahkan kepada Pemerintah Daerah (55 unit)

c. Jumlah Bantuan Dan Realisasi

1. Alokasi Anggaran : Rp. 1.634.150.000
2. Realisasi Anggaran : Rp. 1.531.657.200, 94%

d. Kegiatan

1. Target Kegiatan : 1 unit Layanan Rumah Kemasan Bagi Usaha Mikro
2. Realisasi Kegiatan : 1 unit Layanan Rumah Kemasan Bagi Usaha Mikro

e. Permasalahan dan Kendala

1. Permasalahan :

   Pengadaan di tahun 2024 di waktu yang terbatas (kurang lebih 2 bulan) sehingga anggaran yang ada belum bisa dimaksimalkan.

2. Kendala
   a. Belum adanya serah terima atas belanja barang penunjang dan belanja peralatan dan mesin tugas pembantuan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri sehingga, asset dan pengelolaan masih di bawah Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia.
   b. Sesuai Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Pengembangan Kemasan Produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil Melalui Dana Tugas Pembantuan dan Petunjuk Pelaksanaan Deputi Bidang Usaha Mikro Nomor 52 Tahun 2024 tentang Bantuan Pengembangan Kemasan Produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil Melalui Skema Tugas Pembantuan, bahwa pengelolaan rumah kemasan hanya terbatas pada KUMKM dan Koperasi.
   c. Honor Petugas Layanan Kemasan hanya dianggarkan pada Tahun Anggaran 2024 oleh Kementrian Koperasi dan UKM Republik Indonesia.

f. Saran dan Tindak Lanjut

1. Saran
   a. Diharapkan pelaksanaan serah terima hibah dari Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia ke Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri segera diproses.
   b. Mengajukan usulan perubahan juknis dan juklak agar pengelolaan rumah kemasan tidak hanya terbatas pada KUMKM dan Koperasi melainkan juga pihak lain misalnya BUMD dan swasta.
   c. Terkait Honor Petugas Layanan Kemasan dianggarkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia karena adanya UU ASN No. 20

Tahun 2023 bahwa pemerintah daerah hanya diperbolehkan untuk merekrut tenaga honorer jika telah diangkat 3 kategori kepegawaian, yaitu:

- Pegawai Negeri Sipil (PNS)
- Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)
- Pegawai outsourcing, yaitu yang direkrut melalui pihak ketiga untuk memenuhi kebutuhan tertentu di instansi pemerintah seperti Pengemudi, Satpam, Cleaning Service dan tenaga alih daya lainnya.

2. TindakLanjut

Diharapkan ada juknis terkait pengelolaan rumah kemasan yang lebih spesifik untuk tahun 2025.

B. Tugas Pembantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur

1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab. Kediri

- **Pelaksanaan Program Jatim Puspa Di Kabupaten Kediri Tahun 2024**

a. Dasar Penugasan

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 27 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam rangka Pemulihan Ekonomi di Provinsi Jawa Timur.

b. Tujuan

1. Mendorong motivasi berusaha dan kemampuan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.
2. Memberikan akses insteraksi dan pendampingan terhadap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui optimalisasi peran Pendamping Desa,
3. Membantu meningkatkan pendapatan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar KPM.
4. Mengupayakan konektifitas usaha Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan pelaku usaha ekonomi desa.
5. Meningkatkan taraf hidup Masyarakat.

c. Sasaran

Sasaran penerima program Jatim Puspa adalah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) yang sudah graduasi dan

memiliki anggota rumah tangga (ART) perempuan dan mempunyai usaha atau akan memulai usaha. Di Kabupaten Kediri mendapatkan Program Jatim Puspa sebanyak 4 (empat) Desa dengan jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebanyak 140 KPM, dengan rincian sebagai berikut :

1. Desa Punjul Kecamatan Plosoklaten : 30 KPM.
2. Desa Sumberagung Kecamatan Plosoklaten : 34 KPM.
3. Desa Joho Kecamatan Semen : 30 KPM.
4. Desa Kanyoran Kecamatan Semen : 46 KPM.

d. Jumlah Bantuan Dan Realisasi

1) Jumlah Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Pemerintah Desa yang digunakan untuk modal usaha bagi Anggota Rumah Tangga (ART) perempuan yang diwujudkan dalam bentuk barang dengan nilai masing-masing KPM Rp. 2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Biaya Operasional Pemerintah Desa, dengan rincian sebagai berikut :

NO	KECAMATAN	DESA	KPM	JUMLAH BKK + BIAYA OPERASIONAL (RP)
1	Plosoklaten	Punjul	30	88.750.000
2	Plosoklaten	Sumberagung	34	99.250.000
3	Semen	Joho	30	88.750.000
4	Semen	Kanyoran	46	133.250.000
Total				410.000.000

2) Realisasi

NO	KECAMATAN	DESA	KPM	JUMLAH BKK + BIAYA OPERASIONAL (RP)	JUMLAH REALISASI (RP)
1	Plosoklaten	Punjul	30	88.750.000	88.750.000
2	Plosoklaten	Sumberagung	34	99.250.000	99.250.000

3	Semen	Joho	30	88.750.000	88.750.000
4	Semen	Kanyoran	46	133.250.000	133.250.000
Total				410.000.000	410.000.000

e. Mekanisme

1. Musyawarah Sosialisasi Desa :

   Tim pelaksana program melakukan sosialisasi kepada KPM dan perangkat desa terkait tujuan, sasaran, dan mekanisme program.
2. Verifikasi Data KPM :

   Tim Koordinasi Desa bersama dengan Pendamping Desa Program Jatim Puspa melakukan verifikasi data KPM untuk memastikan ketepatan sasaran program.
3. Klarifikasi Data, Identifikasi Potensi dan Kebutuhan Usaha KPM :
   a. Klarifikasi data dilakukan melalui kunjungan langsung ke KPM sasaran hasil verifikasi data.
   b. Identifikasi Potensi dan Kebutuhan Usaha KPM dilaksanakan melalui rembug keluarga KPM.
4. Penyerahan Bantuan :

   Bantuan modal usaha diserahkan kepada KPM secara simbolis di masing-masing desa.
5. Pendampingan :

   Tim pelaksana program melakukan pendampingan kepada KPM monitoring usaha.
6. Monitoring dan Evaluasi :

   Tim pelaksana program melakukan monitoring dan evaluasi untuk mengukur efektivitas program.

f. Pelaksanaan

1) Menghadiri undangan Orientasi Program Jatim Puspa yang telah dilaksanakan di Favehotel Jl. Jenggolo No.15, Pucang, Kec. Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo pada Hari Minggu – Selasa, tanggal 21 – 23 April 2024, Peserta dari :
   a. DPMD Kabupaten/pejabat yang membidangi Program Jatim Puspa Tahun 2024 se-Jatim dan Kota Batu, masing-masing 1 (satu) orang;

b. Kepala Desa dan 2 (dua) orang Pendamping Desa lokasi Program Jatim Puspa Tahun 2024.



2) Menghadiri undangan Bimbingan Teknis Program Jatim Puspa yang telah dilaksanakan di Favehotel Jl. Jenggolo No.15, Pucang, Kec. Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo pada Hari Minggu – Selasa, tanggal 12 – 14 Mei 2024, Peserta dari :
   a) 1 (satu) orang pejabat / staf DPMD Kabupaten yang membidangi se-Jatim dan Kota Batu.
   b) Sekretaris Desa dan Bendahara Desa lokasi Program Jatim Puspa Tahun 2024.



3) Melaksanakan Fasilitasi pencairan Bantuan Keuangan Khusus dari Provinsi Jawa Timur Program Jatim Puspa Tahun 2024 kepada 4 (empat) Desa dengan jadwal sebagai berikut :

No	Kecamatan	Desa	Hari/Tanggal
1	Plosoklaten	Punjul	Rabu, 29 Mei 2024
2	Plosoklaten	Sumberagung	Rabu, 29 Mei 2024
3	Semen	Joho	Kamis, 30 Mei 2024
4	Semen	Kanyoran	Kamis, 30 Mei 2024





4) Menghadiri undangan Penyerahan barang bantuan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Jatim Puspa ke 4 (empat) Desa yang telah dilaksanakan pada :
   a) Desa Punjul dan Sumberagung Hari Kamis, tanggal 1 Agustus 2024.



b) Desa Kanyoran dan Joho Hari Senin, tanggal 19 Agustus 2024.



5) Melaksanakan Fasilitasi dalam rangka Penyusunan Laporan Program Jatim Puspa Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 yang telah dilaksanakan pada :

- Hari : Senin
- Tanggal : 4 November 2024.
- Tempat : Ruang rapat Dinas PMPD Kabupaten Kediri.
- Narasumber : Dinas PMD Provinsi Jawa Timur dan Dinas PMPD Kabupaten Kediri.
- Peserta : Ketua Tim Koordinasi Desa, Bendahara Desa dan Pendamping Desa dari Lokasi Desa penerima program Jatim Puspa Tahun 2024.



6) Melaksanakan monitoring pelaksanaan Program Jatim Puspa bersama dengan Dinas PMD Provinsi Jawa Timur telah dilaksanakan dengan jadwal sebagai berikut

NO	KECAMATAN	DESA	HARI/TANGGAL
1	Semen	Joho	Senin, 4 November 2024
2	Semen	Kanyoran	Senin, 4 November 2024
3	Plosoklaten	Punjul	Selasa, 5 November 2024
4	Plosoklaten	Sumberagung	Selasa, 5 November 2024



7) Menghadiri undangan Musyawarah Pertanggungjawaban Program Jatim Puspa telah dilaksanakan dengan jadwal sebagai berikut :

No	Kecamatan	Desa	Hari/Tanggal
1	Plosoklaten	Punjul	Senin, 11 November 2024
2	Plosoklaten	Sumberagung	Senin, 11 November 2024
3	Semen	Joho	Selasa, 12 November 2024
4	Semen	Kanyoran	Selasa, 12 November 2024





8) Menghadiri Rapat Koordinasi Evaluasi Progran Bidang PUED Tahun 2024 dan Rencana Program Tahun 2025 oleh Dinas PMD Provinsi Jawa Timur pada tanggal 7 – 8 November 2024 di The Aliante Hotel & Convention Center, Jl. Aries Munandar No. 41-45, Kota Malang, dengan peserta dari 2 (dua) orang Dinas PMD Kabupaten/Kota Batu se Provinsi Jawa Timur dan Bakorwil I Madiun, Bakorwil II Bojonegoro, Bakorwil III Malang, Bakorwil IV Pamekasan

dan Bakorwil V Jember masing-masing 1 (satu) orang.



g. Evaluasi

1. Dinas PMPD Kabupaten Kediri telah melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program Jatim Puspa Tahun 2024 secara berkala untuk mengetahui tingkat keberhasilan program.
2. Secara umum hasil monitoring dan evaluasi Dinas PMPD Kabupaten Kediri bahwa :
   a. Bantuan barang sudah diterima semuanya ke Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sasaran program;
   b. Bantuan barang sudah dimanfaatkan oleh KPM dan sebagian kecil ada KPM yang perkembanganya belum maksimal karena ada keterbatasan penjualan akibat banyaknya pesaing. Hasil evaluasi digunakan untuk perbaikan program di masa depan.

h. Permasalahan Dan Kendala

1. Sumber data awal dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur merupakan data Graduasi PKH Kabupaten Kediri Tahun 2023 dan Tahun 2024.
2. Dari data tersebut diatas dilakukan verifikasi oleh desa sehingga ditemukan banyak data yang sudah tidak layak menerima bantuan karena sudah meninggal dunia, pindah tempat tinggal, data tidak ditemukan dan tidak memiliki anggota ART perempuan.

i. Kesimpulan Dan Rekomendasi

Program Jatim Puspa di Kabupaten Kediri telah menunjukkan hasil yang positif dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) yang sudah graduasi. Program ini perlu dilanjutkan pada tahun mendatang agar lebih banyak KPM graduasi PKH bagi ART perempuan yang dapat merasakan manfaatnya.

j. Penutup

Dinas PMPD Kabupaten Kediri berharap program Jatim Puspa dapat terus diberikan ke Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kabupaten Kediri sehingga dapat memberikan manfaat bagi KPM yang sudah graduasi dari Program Keluarga Harapan (PKH) dan dapat meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan ekonomi desa di Kabupaten Kediri.

- **Pelaksanaan Program Desa Berdaya Di Kabupaten Kediri Tahun 2024**

a. Dasar Penugasan

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 27 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam rangka Pemulihan Ekonomi di Provinsi Jawa Timur.

b. Tujuan

Tujuan Program Desa Berdaya adalah Program yang dikhususkan untuk meningkatkan dan memperkuat jejaring perekonomian desa dengan Pengembangan Desa Tematik Melalui Ekonomi Kreatif, Inovatif dan Produktif Berbasis BUM Desa, dalam rangka mempertegas legalisasi status desa mandiri dengan mengoptimalkan potensi dan sumberdaya desa untuk mewujudkan desa berdaya.

c. Sasaran

Sasaran Program Desa Berdaya adalah Desa yang mempunyai status kemajuan dan kemandirian desa sebagai Desa Mandiri berdasarkan Keputusan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 2023 tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa Tahun 2023.

Dengan Lokasi Program Desa Berdaya di Kabupaten Kediri Tahun 2024, yaitu :

a. Desa Pelem Kecamatan Pare;
b. Desa Mangunrejo Kecamatan Ngadiluwih; dan
c. Desa Ringinrejo Kecamatan Ringinrejo.

d. Jumlah Bantuan Dan Realisasi

1. Masing-masing Desa mendapatkan dana sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang digunakan untuk kegiatan Operasional Program maksimal 10% (sepuluh persen) dan kegiatan Pengembangan Desa Tematik melalui Ekonomi Kreatif, Inovatif dan Produktif Berbasis BUM Desa minimal 90% (sembilan puluh persen).

2. 3 (tiga) Desa yang menjadi sasaran program dapat dilaporkan capaian realisasi sebesar 100%.

e. Mekanisme

1. Perencanaan Kegiatan
   a. Sosialisasi Desa

      Sosialisasi Desa adalah kegiatan yang bertujuan untuk memberikan pemahaman, penyamaan persepsi dan membangun komitmen bersama tentang pelaksanaan Program Desa Berdaya. Sosialisasi Desa dilaksanakan dalam forum musyawarah.

   b. Pemantapan kegiatan ekonomi dan sumber daya pendukung serta inovasi.

      Tim Kerja Desa melakukan pemantapan kegiatan Ekonomi dan Sumberdaya Pendukung, memunculkan inovasi dan menetapkan kegiatan pengembangan desa tematik berbasis potensi dan sumberdaya desa yang khas.

f. Pelaksanaan Kegiatan

1. Orientasi.

   Orientasi Program Desa Berdaya dilaksanakan oleh Dinas Pemberbadayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur yang bertujuan untuk memberikan gambaran teknis pelaksanaan program Desa Berdaya sekaligus desa mempresentasikan usulan kegiatan ikon desa, mematangkan proposal dan RAB kegiatan.
2. Bimbingan Teknis Pelaksanaan Program Desa Berdaya.

   Bimtek Program Desa Berdaya dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur dalam rangka memberikan keterampilan teknis tekait pelaksanaan program Desa Berdaya

3. Penyusunan Proposal, RAB dan Dokumen Pencairan BKK.

   Penyusunan Proposal, RAB dan Dokumen Pencairan BKK dilakukan oleh Pemerintah desa dibantu oleh tim kerja desa yang bertujuan memberikan gambaran kegiatan pelaksanaan Program Desa Berdaya secara utuh dan sistematis, memberikan gambaran Rencana Anggaran dan Biaya pelaksanaan Program Desa Berdaya serta penyusunan dokumen pencairan BKK.

4. Realisasi Produk.

   Tim Kerja Program Desa Berdaya melaksanakan penggunaan BKK Program Desa Berdaya berdasarkan rencana kegiatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah desa. Realisasi Produk hasil program Desa Berdaya adalah kegiatan merealisasikan produk sebagai ikon desa.

   a. Product Branding.

      Product Branding adalah aktivitas publikasi untuk mempopulerkan produk hasil Program Desa Berdaya sehingga mampu menjadi ikon desa.

   b. Launching produk hasil Program Desa Berdaya.

      Launching produk hasil Program Desa Berdaya adalah rangkaian kegiatan untuk mempopulerkan produk ikon hasil Program Desa Berdaya. Kegiatan ini bertujuan mengenalkan kegiatan desa tematik kepada masyarakat dengan memperluas informasi produk ikonik desa dan memperkuat jejaring ekonomi.

5. Menghadiri undangan Pra Sosialisasi Tingkat Desa Program Desa Berdaya Tahun 2024 yang telah dilaksanakan oleh Dinas PMD Provinsi Jawa Timur secara daring melalui aplikasi zoom dengan jadwal sebagai berikut :

   a. Pra Sosialisasi Desa (Khusus Perangkat Desa dan BPD) :

      Tanggal 8 Maret 2024, Peserta : DPMD Kab/Kota, Camat Lokasi Sasaran, Kepala Desa beserta perangkat, Ketua BPD.

   b. Pra Sosialisasi Desa :

      Tanggal 13 dan 14 Maret 2024 Peserta : DPMD Kab/Kota dan Tim Kerja Desa.

6. Menghadiri undangan Orientasi Program Desa Berdaya Tahun 2024 telah dilaksanakan oleh Dinas PMD Provinsi Jawa Timur pada Hari Senin – Rabu, tanggal 18 – 20 Maret 2024 bertempat di Hotel Selecta Batu Jln. Raya Selecta No.1, Tulungrejo, Kec. Bumiaji, Kota Batu dengan peserta terdiri dari Unsur pejabat Dinas PMD Kabupaten/Kota Batu serta Kepala Desa dan Koordinator Tim Kerja Desa (TKD) masing – masing 1 (satu) orang.



7. Menghadiri undangan Bimtek Pengelola Program Desa Berdaya Tahun 2024 yang telah dilaksanakan oleh Dinas PMD Provinsi Jawa Timur pada hari Minggu – Selasa, tanggal 24 – 26 Maret 2024 bertempat di Hotel Selecta Batu Jln. Raya Selecta No.1, Tulungrejo, Kec. Bumiaji, Kota Batu dengan peserta terdiri dari Unsur pejabat Dinas PMD Kabupaten/Kota Batu serta Sekretaris Desa dan Bendahara Desa masing – masing 1 (satu) orang.



8. Menghadiri undangan Fasilitasi Pra Sosialisasi Tingkat Desa Secara Luring Program Desa Berdaya Tahun 2024 yang telah dilaksanakan oleh Dinas PMD Provinsi Jawa Timur pada tanggal 2 Mei 2024 dengan peserta terdiri dari Dinas PMD Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa.



9. Menghadiri undangan Bimtek Konten Kreator Program Desa Berdaya Tahun 2024 yang telah dilaksanakan oleh Dinas PMD Provinsi Jawa Timur pada hari Senin – Rabu, tanggal 27 Mei – 29 Mei 2024 bertempat di Royal Orchid Garden Hotel & Condominium, Jl. Indragiri No 4, Pesanggrahan, Kec Batu, Kota Batu, dengan peserta terdiri dari Unsur pejabat Dinas PMD Kabupaten/Kota Batu serta Konten Kreator dan Pengelola BUM Desa masing – masing 1 (satu) orang.



10. Menghadiri undangan Rapat Koordinasi Pemantauan Perkembangan Pelaksanaan BKK Program Desa Berdaya Tahun 2024 yang telah diselenggarakan secara daring pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 dengan peserta dari Dinas PMD Kabupaten/Kota dan Tim Kerja Desa.
11. Melaksanakan monitoring pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Program Desa Berdaya Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 dengan jadwal sebagai berikut :

NO	KECAMATAN	DESA	HARI / TANGGAL	PUKUL
1	Ngadiluwih	Mangunrejo	Senin, 30 September 2024	09.00 WIB.
2	Ringinrejo	Ringinrejo	Senin, 30 September 2024	12.30 WIB.
3	Pare	Pelem	Selasa, 1 Oktober 2024	09.00 WIB.



12. Menghadiri undangan Launching Program Desa Berdaya bersama dengan Dinas PMD Provinsi Jawa Timur dan Tim Konsultan ke Desa :
    a. Mangunrejo Kecamatan Ngadiluwih dan Desa Ringinrejo Kecamatan Ringinrejo pada Hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024.



    b. Pelem Kecamatan Pare pada hari Minggu 3 November 2024.



13. Menghadiri undangan Desk Percepatan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban dan pengisian E-MKP BKK Program Desa Berdaya Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 bersama dengan Pemerintah Desa Lokasi program pada hari Kamis, 12 Desember 2024 ke Kantor Bakorwil I Madiun.



14. Mendampingi monitoring bersama dengan Dinas PMD Provinsi Jawa Timur pada hari Senin – Selasa, tanggal 23 – 24 Desember 2024 ke Desa :
    a. Ringinrejo Kecamatan Ringinrejo dan Mangunrejo Kecamatan Ngadiluwih pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2024.



    b. Pelem Kecamatan Pare pada hari Selasa, tanggal 24 Desember 2024.



g. Evaluasi

1. Dinas PMPD Kabupaten Kediri melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program.
2. Permasalahan kurangnya kemampuan Sumber Daya Manusia dalam mengelola kegiatan karena kegiatan ini merupakan suatu hal baru yang harus segera dilaksanakan.

h. Kesimpulan Dan Rekomendasi

1. Kesimpulan :

   Program Desa Berdaya di Kabupaten Kediri telah menunjukkan hasil yang positif dalam meningkatkan perekonomian desa. Program ini perlu dilanjutkan dan diperluas jangkauannya agar lebih banyak desa berstatus Mandiri yang dapat merasakan manfaatnya.
2. Rekomendasi **:**
   a. Meningkatkan anggaran program.
   b. Memperluas jangkauan program ke desa berstatus Mandiri di Kabupaten Kediri.
   c. Meningkatkan kualitas pendampingan dan fasilitasi.

d. Melakukan monitoring dan evaluasi program secara lebih komprehensif.
e. Mendorong desa untuk berinovasi dalam mengembangkan ikon desa.
f. Dinas PMPD Kabupaten Kediri berharap program Desa Berdaya dapat terus dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang memberikan manfaat bagi desa-desa di Kabupaten Kediri dan meningkatkan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat desa.

- **Laporan Pelaksanaan Program Bantuan Keuangan Khusus Pemberdayaan Bum Desa Di Kabupaten Kediri Tahun 2024**

a. Dasar Penugasan :

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 27 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam rangka Pemulihan Ekonomi di Provinsi Jawa Timur.

b. Tujuan

Bantuan Keuangan Khusus (BKK) untuk Pemberdayaan Bum Desa merupakan bantuan langsung dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada Pemerintah Desa. Tujuan BKK ini diharapkan dapat mengungkit Bum Desa sehingga mampu mendorong peningkatan perekonomian masyarakat Desa.

c. Sasaran

Sasaran Bum Desa penerima Program Pemberdayaan Bum Desa adalah Bum Desa yang sudah berbadan hukum dengan klasifikasi Bum Desa Maju dan Berkembang berdasarkan Data Desa Center (DDC) Provinsi Jawa Timur.

Dengan Lokasi Program Desa Berdaya di Kabupaten Kediri Tahun 2024, yaitu :

1) Desa Pelem Kecamatan Pare;
2) Desa Mangunrejo Kecamatan Ngadiluwih; dan
3) Desa Ringinrejo Kecamatan Ringinrejo.

BUM Desa penerima BKK untuk Pemberdayaan Bum Desa Tahun 2024 sebanyak 6 (enam) Desa, yaitu :

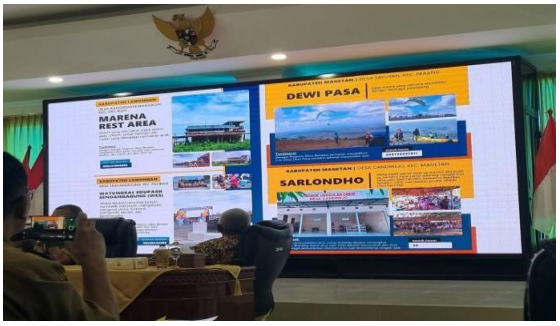
NO	KECAMATAN	DESA	BUM DESA
1	Grogol	Wonoasri	Tirta Asri Wonoasri
2	Kepung	Siman	Berkah Bhagawan
3	Kandangan	Karangtengah	Wijaya Makmur
4	Mojo	Blimbing	Bum Desa Sumber Rejeki Blimbing Sejahtera Blimbing
5	Ringinrejo	Purwodadi	Barokah Sejahtera Purwodadi
6	Puncu	Sidomulyo	Mulyo Sejati

d. Jumlah Bantuan Dan Realisasi

Masing-masing Desa mendapatkan dana sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang penggunaannya sebesar 96% untuk dana penyertaan modal kepada Bum Desa, sedangkan 4% untuk biaya Operasional Desa.

e. Pelaksanaan Program

1. Menghadiri undangan Sosialisasi Program Pemberdayaan Usaha Ekonomi Desa Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 yang telah dilaksanakan oleh Dinas PMD Provinsi Jawa Timur pada :
   - Hari : Senin
   - Tanggal : 26 Februari 2024
   - Tempat : Ruang Amarta Lantai 3 Dinas PMD Provinsi Jawa Timur Jl. A. Yani No.152 C, Gayungsari, Surabaya.
   - Peserta : Dinas PMD Kabupaten se Jawa Timur dan 20 OPD terkait se Jawa Timur.



2. Menghadiri undangan Pra Orientasi BKK Program Pemberdayaan BUM Desa Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 wilayah Bakorwil I Madiun yang telah dilaksanakan oleh Dinas PMD Provinsi Jawa Timur pada :

- Hari : Kamis
- Tanggal : 22 Februari 2024
- Tempat : Kayangan Cafe & Space, BUM Desa Duta Karya Desa Brubuh Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi.
- Peserta: 1 (satu) orang pejabat/staf dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten yang menangani BUM Desa, 1 (satu) orang Kepala Desa, dan 1 (satu) orang Direktur/Pengurus BUM Desa lokasi program.



3. Menghadiri undangan Orientasi Program Pemberdayaan BUM Desa Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Angkatan I yang telah dilaksanakan oleh oleh Dinas PMD Provinsi Jawa Timur pada :
   - Hari : Rabu - Jumat
   - Tanggal : 28 Februari – 1 Maret 2024
   - Tempat : Hotel Selecta, Jl. Raya Selecta, No. 1 Tulungrejo, Kec. Bumiaji, Kota Batu.
   - Peserta: 1 (satu) orang pejabat/staf dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten yang menangani BUM Desa, 1 (satu) orang Kepala Desa, dan 1 (satu) orang Direktur/Pengurus BUM Desa

Desa lokasi program.



4. Menghadiri Rapat Teknis secara virtual Percepatan Pencairan BKK Pemberdayaan BUM Desa yang telah dilaksanakan oleh Dinas PMD Provinsi Jawa Timur pada :
   - Hari : Selasa
   - Tanggal : 14 Mei 2024
   - Tempat : Tempat kerja masing-masing.
5. Melaksanakan Fasilitasi percepatan pencairan BKK Pemberdayaan BUM Desa secara daring pada :
   - Hari : Kamis
   - Tanggal : 16 Mei 2024
   - Tempat : Tempat kerja masing-masing.
   - Peserta : Direktur BUM Desa dan Pengurus BUM Desa penerima BKK Provinsi Jawa Timur.
6. Melaksanakan Fasilitasi Pencairan BKK Pemberdayaan BUM Desa Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 ke Desa lokasi penerima pada :

No	Kecamatan	Desa	Hari/Tanggal	Waktu
1	Puncu	Sidomulyo	Selasa, 4 Juni 2024	09.00 WIB
2	Kepung	Siman	Selasa, 4 Juni 2024	11.00 WIB
3	Kandangan	Karangtengah	Selasa, 4 Juni 2024	13.30 WIB

7. Pelaksanakan Rapat Koordinasi percepatan Pencairan BKK Pemberdayaan BUM Desa Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 pada :

No	Kecamatan	Desa	Hari / Tanggal	Waktu
1	Ringinrejo	Purwodadi	Kamis, 6 Juni 2024	09.00 WIB
2	Mojo	Blimbing	Kamis, 6 Juni 2024	11.00 WIB
3	Grogol	Wonoasri	Kamis, 6 Juni 2024	13.30 WIB

- Hari : Senin
- Tanggal :10 Juni 2024
- Pukul : 13.00 WIB.
- Tempat : Ruang rapat DPMPD Kabupaten Kediri
- Acara : Verifikasi berkas pencairan dan fasilitasi E-Pencairan pada Data Desa Center (DDC) Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
- Catatan: Peserta wajib membawa laptop dan kelengkapan semua dokumen pencairan.



8. Menghadiri Desk Percepatan Progres Pencairan BKK Desa untuk Pemberdayaan BUM Desa Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Wilayah Bakorwil I Madiun yang telah dilaksanakan oleh Dinas PMD Provinsi Jawa Timur pada :
   - Hari : Kamis
   - Tanggal : 20 Juni 2024
   - Pukul : 08.00 WIB - selesai
   - Tempat : Bakorwil I Madiun Provinsi Jawa Timur
   - Peserta : 1 (satu) orang pejabat/staf yang menangani BUM Desa dan 1 (satu) orang Direktur/Pengelola BUM Desa Lokasi BKK Desa untuk Pemberdayaan BUM Desa Provinsi Jawa Timur Tahun 2024
9. Monitoring Evaluasi Lokasi Pelaksanaan Program Pemberdayaan BUM Desa di Provinsi Jawa Timur oleh Tim Universitas Brawijaya Malang yang telah dilaksanakan pada tanggal 7 Agustus 2024 dengan jadwal sebagai berikut :

NO.	KECAMATAN	DESA	PUKUL
1.	Kayen Kidul	Mukuh	09.00 WIB
2.	Pare	Sumberbendo	11.00 WIB
3.	Kandangan	Kasreman	13.30 WIB

Catatan :

Masing-masing BUM Desa agar menyiapkan Dokumen : Perencanaan, Pencairan, Laporan Pelaksanaan BKK BUM Desa kepada Pemerintah Desa, Pertanggungjawaban serta Lokasi Kegiatan BUMDesa.



10. Menghadiri Rapat Teknis Pendampingan Realisasi BKK Desa untuk Pemberdayaan BUM Desa Tahun 2024 yang telah dilaksanakan secara Daring pada :
    - Hari : Senin
    - Tanggal : 19 Agustus 2024
    - Pukul : 08.00 WIB – selesai.
    - Peserta : Pejabat/staf yang membidangi Pemberdayaan BUM Desa dan mengikutsertakan direktur/pengurus BUM Desa lokasi BKK Desa untuk Pemberdayaan BUM Desa Provinsi Jawa Timur Tahun 2024.

11. Melaksanakan monitoring pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Pemberdayaan BUM Desa Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 yang telah dilaksanakan pada :

NO	KECAMATAN	DESA	HARI/TANGGAL	WAKTU
1	Ringinrejo	Purwodadi	Kamis, 12 September 2024	09.00 WIB
2	Mojo	Blimbing	Kamis, 12 September 2024	12.30 WIB
3	Grogol	Wonosari	Selasa, 17 September 2024	09.00 WIB
4	Puncu	Sidomulyo	Selasa, 17 September 2024	12.30 WIB
5	Kandangan	Karangtengah	Rabu, 17 September 2024	09.00 WIB
6	Kepung	Siman	Rabu, 18 September 2024	12.30 WIB

12. Melaksanakan Fasilitasi Pelaksanaandan Penyusunan Laporan Program BKK Permberdayaan BUMDesa Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024 yang telah dilaksanakan pada:
    - Hari : Kamis
    - Tanggal : 31 Oktober 2024
    - Tempat : Ruang Rapat DPMPD Kabupaten Kediri.
    - Peserta : Direktur BUMDesa, Bendahara BUMDesa dan 1 Orang Pengurus BUMDesa.



13. Mendampingi Dinas PMD Provinsi Jawa Timur Monitoring pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Program Pemberdayaan BUM Desa Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 yang telah dilaksanakan pada :

NO.	KECAMATAN	DESA	HARI / TANGGAL	PUKUL
1	Ringinrejo	Purwodadi	Jumat, 8 November 2024	09.00 WIB
2	Grogol	Wonoasri	Jumat, 8 November 2024	13.00 WIB

14. Menghadiri Desk Percepatan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban BKK Desa Pemberdayaan BUM Desa Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Wilayah Bakorwil I Madiun yang telah dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 bertempat di Bakorwil I Madiun Provinsi Jawa Timur pukul 08.00 WIB – selesai.
15. Peserta Desk dari Dinas PMD Kabupaten dan masing-masing Desa yaitu 1 (satu) orang Direktur / Pengelola BUM Desa Lokasi BKK Desa Pemberdayaan BUM Desa Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut :

NO	KECAMATAN	DESA	BUM DESA
1	Grogol	Wonoasri	1 Orang
2	Kepung	Siman	1 Orang
3	Kandangan	Karangtengah	1 Orang
4	Mojo	Blimbing	1 Orang
5	Ringinrejo	Purwodadi	1 Orang
6	Puncu	Sidomulyo	1 Orang



16. Menghadiri Musyawarah Desa Pertanggungjawaban BKK BUM Desa Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 dari Desa Lokasi penerima, dengan jadwal sebagai berikut :

NO	KECAMATAN	DESA	HARI/TANGGAL	WAKTU
1	Puncu	Sidomulyo	Senin, 18 November 2024	09.00 WIB
2	Grogol	Wonoasri	Senin, 18 November 2024	13.00 WIB
3	Mojo	Blimbing	Selasa, 19 November 2024	13.00 WIB
4	Kepung	Siman	Kamis, 21 November 2024	09.00 WIB
5	Kandangan	Karangtengah	Kamis, 21 November 2024	12.30 WIB
6	Ringinrejo	Purwodadi	Jum’at, 22 November 2024	09.00 WIB





f. Hasil

1. Desa telah menerima transfer sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) langsung masuk ke rekening kas Desa.
2. Sudah dilaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang ada, 4% atau Rp. 4.000.000,- untuk biaya operasional dan 96 % atau Rp. 96.000.000,- untuk penyertaan modal BUM Desa, dan dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan yang telah disepakati pada musyawarah insidental sebagaimana petunjuk pedoman yang ada program.

g. Evaluasi.

1. Kurang pemahaman Forum BUMDesa terkait proses serta prosedur BKK BUMDesa pada saat mendampingi program menyebabkan kurangnya pemahaman BUMDesa lokasi sasaran sehingga menyebabkan setiap proses mengalami kendala dan keterlambatan.
2. Kewajiban memenuhi laporan pertanggungjawaban berupa dokumen hardcopy serta E-SPJ melalui laman Data Desa Center kurang efektif, karena pihak desa maupun BUMDesa harus melakukan dua kali kegiatan yang memakan banyak waktu, seharusnya cukup dengan melaporkan melalui E-SPJ pada laman Data Desa Center.
3. Form pada Petunjuk Teknis Operasional, form pada DDC serta form yang diberikan Forum banyak ketidaksamaan hal ini menyebabkan kekeliruan dan kebingungan bagi pengguna.

h. Hasil dan Dampak Program

Program BKK untuk Pemberdayaan BUM Desa Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 telah menghasilkan beberapa hasil, antara lain :

1. Meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan masyarakat desa.
2. Meningkatnya kapasitas dan kelembagaan BUM Desa.
3. Meningkatnya jumlah dan kualitas produk unggulan desa.

Program BKK untuk Pemberdayaan BUM Desa Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 telah memberikan beberapa dampak positif, antara lain:

1) Meningkatnya taraf hidup masyarakat desa.
2) Meningkatnya jumlah lapangan pekerjaan.
3) Meningkatnya geliat ekonomi di desa.

i. Kesimpulan

Program BKK Pemberdayaan BUM Desa Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 telah berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan. Program ini telah memberikan dampak positif bagi peningkatan ekonomi desa dan kesejahteraan masyarakat desa namun perlu beberapa evaluasi dalam proses pendampingan agar hasil serta pertanggungjawaban dapat berjalan lebih efektif.

2. Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri

a. Dasar

Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 100.3.3.1/129/KPTS/013/2024 Tanggal 7 Maret 2024 tentang Penetapan Pagu Definitif Bantuan Keuangan Khusus Bidang Perhubungan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang Diverifikasi oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024.

b. Kegiatan

Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota

c. Keluaran

Jumlah Perlengkapan Jalan yang tersedia

d. Kegiatan

Pembangunan Pos Jaga Perlintasan Kereta Api dan Palang Pintu di 2 titik Perlintasan

e. Jumlah Bantuan Dan Realisasi

Anggaran penugasan sebesar Rp. 653.436.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 595.854.960,00 atau 91,19%

3. Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri

a. Dasar

SAJADAH (Santri Jatim Sehat dan Berkah) merupakan salah satu program Gubernur yang diinisiasi sejak tahun 2019. Sajadah) merupakan salah satu program pendampingan mewujudkan pesantren sehat.

b. Tujuan

- Meningkatkan kualitas dan kuantitas Pondok Pesantren di Kabupaten Kediri
- Menghasilkan kebijakan pondok pesantren berwawasan kesehatan di 3 pondok pesantren yang didampingi (PP Darul iksan Pusk Semen, PP Salman Al Farisi pusk Adan – Adan, PP Islahiyah Pusk Ngadi)
- Meningkatkan kepatuhan konsumsi Tabelt tambah darah (TTD) pada santriwati di 3 pondok pesantren yang didampingi (PP Darul iksan Pusk Semen, PP Salman Al Farisi pusk Adan – Adan, PP Islahiyah Pusk Ngadi)
- Melaksanakan inspeksi kesehatan lingkungan secara mandiri di 3 pondok pesantren yang didampingi (PP Darul iksan Pusk Semen, PP Salman Al Farisi pusk Adan – Adan, PP Islahiyah Pusk Ngadi)
- Melaksakanan skrining TBC dan kesehatan jiwa di 3 pondok pesantren yang didampingi (PP Darul iksan Pusk Semen, PP Salman Al Farisi pusk Adan – Adan, PP Islahiyah Pusk Ngadi)

c. Sasaran

Sasaran program meliputi santri, pengasuh pondok pesantren, pimpinan pondok pesantren, pengunjung dan masyarakat sekitar pondok pesantren di bawah binaan Puskesmas setempat di wilayah Kabupaten Kediri.

d. Waktu Pelaksanaan

Pelaksanaan Pendampingan Penyelenggaraan Poskestren sehat di laksanakan Mei sampai dengan Desember 2024.

e. Tempat Pelaksanaan

Kegiatan Pendampingan Penyelenggaraan Poskestren sehat Dinas kesehatan Kab Kediri , di 3 pondok pesantren yang didampingi PP Darul iksan Pusk Semen Kecamatan Semen , PP Salman Al Farisi pusk Adan – Adan Kecamatan Gurah , PP Islahiyah Pusk Ngadi Kecamatan Mojo.

f. Jumlah Bantuan Dan Realisasi

Kegiatan ini bersumber dari Bantuan Keuangan Bidang Kesehatan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 36.366.500,00, terealisasi sebesar Rp. 35.183.500,00 (97%).

g. Pelaksanaan

1) Orientasi Pendampingan Poskestren Bagi Pendamping Poskestren Dan Kader Santri Husada

Kegiatan Orientasi Pendampingan Poskestren dilaksanakan dinas Kesehatan Kabupaten Kediri Ruang Pertemuan Daha pada 15 Mei 2024 Kegiatan Orientasi Pendampingan Poskestren dilaksanakan Ruang Pertemuan Kahuripan Dinas Kesehtan Kab Kediri

Peserta di 3 pondok pesantren yang didampingi PP Darul iksan Pusk Semen Kecamatan Semen , PP Salman Al Farisi pusk Adan – Adan Kecamatan Gurah , PP Islahiyah Pusk Ngadi Kecamatan Mojo yang terdiri dari Pengasuh pondok pesantren , pengelola kesehatan Pondok Pesantren, pendamping poskestren, pengelola program promkes puskesmas , pengelola programpondok pesantren puskesmas. Bidan desa serta seksi KGM, Seksi kesling, seksi P2P, seksi PTM serta dari lintas sektor kemenag dan Bagian kesejateraan Rakyat Kabupaten Kediri.

Narasumber pada kegiatan ini terdiri dari Kementeterian Agama Kabubupaten , pengelola program dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri, Konsep dasar dan kebijakan Poskestren, MMPP dan PHBS di Ponsok pensatren, gizi bagi santri, menentukan status gizi. Peran Ormas dalam mewujudkan pondok pesantren bersih dan sehat,Kesehatan Lingkungan di Pondok Pesantren, Konsep dasar Poskestren, Peran Kementerian Agama

dalam mewujudkan pondok Pesantren bersih dan sehat, Strategi Pelaksanaan kegiatan Pendampingan Poskestren di kabupaten kediri, Tata laksana survey PHBS, SMD dan MM.

Kegiatan Orientasi Pendampingan Poskestren





2) Pengadaan Media Promosi Kesehatan

Pengadaan media Promosi Kesehatan berupa :

Roll Banner dengan tema ajakan PHBS di Pondok Pesantren







3) Pendampingan Poskestren Sehat Oleh Ormas Dan Atau Petugas Kesehatan

Dua pondok di 3 pondok pesantren yang didampingi PP Darul iksan Pusk Semen Kecamatan Semen , PP Salman Al Farisi pusk Adan – Adan Kecamatan Gurah , PP Islahiyah Pusk Ngadi Kecamatan Mojo yang ditetapkan melalui SK Kepala Dinas Kesehatan Kab Kediri dan melakukan pendampingan selama 8 (delapan) kali mulai bulan Juni sampai dengan Desember 2024 serta pembinaan dan pendampingan oleh pengelola puskesmas dan Dinas Kesehatan. Kegiatan pendampingan berupa kegiatan meliputi SMD (survey mawas diri) dan MMPP (musyawarah masyrakat pondok pesantreb) dan pendampingan minum Tabelt tambah darah pada santri putri.

Pendampingan Poskestren sehat oleh Ormasdan atau petugas kesehatan meliputi SMD (survey mawas diri) dan MMPP (musyawarah masyrakat pondok pesantreb) yang 1 dilakukan pada bulan Juni 2024 dan Pendampingan Poskestren sehat oleh Ormasdan atau petugas kesehatan meliputi SMD (survey mawas diri) dan MMPP (musyawarah masyrakat pondok pesantreb) yang ke 2 dilakukan pada bulan November 2024 serta pendampingan minum Tabelt tambah darah pada santri putri. Dan di Pondok Pesantren ada kegiatan JUMIBAR (jum'at minum TTD bareng) serta melakukan aksi bergizi yang dilakukan di bulan Agustus 2024.

Melakukan pertemuan peningkatan kapasitas pengetahuan santri husada, skrening TB, Jiwa.

Kegiatan pendampingan Poskestren

a) Kegiatan SMD dan MMPP






b) Kegiatan pendampingan














c) Pembinaan santri husada











Minum TTD Bersama





JADWAL MINUM TTD

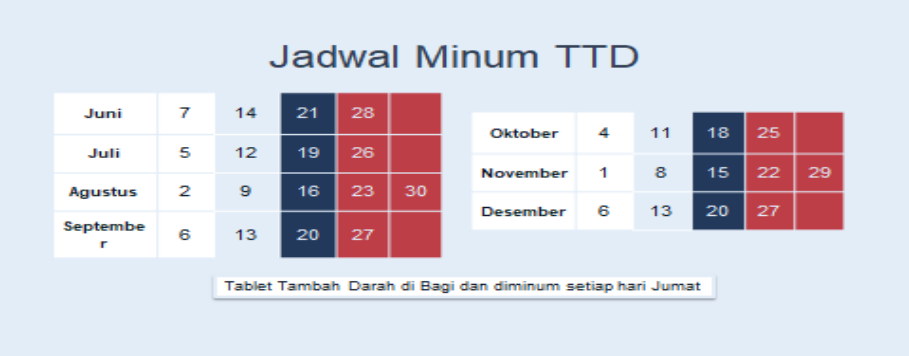




JADWAL KEGIATAN SABTU SORE

Bulan \ Pekan	1	2	3	4	5
Agustus	3 Konseling Bersama Per Sakan	10 Tahsin Usth. Fathimah	17 Khidmah / Musyrifah	24 Ustadzah Sakan Hafshah	31 Ustadzah Sakan Saudad
September	7 Konseling Bersama Per Sakan	14 Tahsin Usth. Fathimah	21 Khidmah / Musyrifah	28 Ustadzah Sakan Zainab	
Oktober	5 Konseling Bersama Per Sakan	12 Ustadzah Sakan Mariyah	19 Khidmah / Musyrifah	26 Ustadzah Sakan Khadijah	
November	2 Konseling Bersama Per Sakan	9 Tahsin Usth. Fathimah	16 Khidmah / Musyrifah	23 Ustadzah Sakan Aisyah	30 Ustadzah Sakan Romlah
Desember	7 Konseling Bersama Per Sakan	14 Tahsin Usth. Fathimah	21 Khidmah / Musyrifah	28	

Catatan :
- Kegiatan setiap Sabtu sore dilaksanakan pukul 15.30 wib (ba'da Asar / sesuai sikon)
- Setiap Sabtu pekan I dilakukan konseling bersama antara wali asrama dengan santriwati masing-masi asrama
- Setiap Sabtu pekan III kegiatan bisa diisi oleh ustadzah khidmah dan atau ustadzah musyrifah
- Bila ada keperluan isidental (yang tidak terjadwal) dan tidak mendesak, dapat langsung mengambil ja khidmah / musyrifah
- Bila ada keperluan isidental (yang tidak terjadwal) dan mendesak, dapat langsung mengambil jadwal di sabtu sore tersebut
- Saat jadwal ustadzah sakan, pengisi materi bisa berdua atau salah satu saja tergantung kesepakatan ustadzah sakan
- Apabila kedua ustadzah sakan tidak dapat mengisi saat jadwalnya, dapat bertukar dengan ustadzah sa yang terjadwal berikutnya



d) Upaya peningkatan kesehatan santri





e) Upaya Peningkatan kesehatan lingkungan




Kerja Bakti/ Roan


SK Pembentukan Poskestren


Kerja Bakti/ Roan

f) Tindak Lanjut Kegiatan SK Poskestren





g) Struktur Organisasi Poskestren

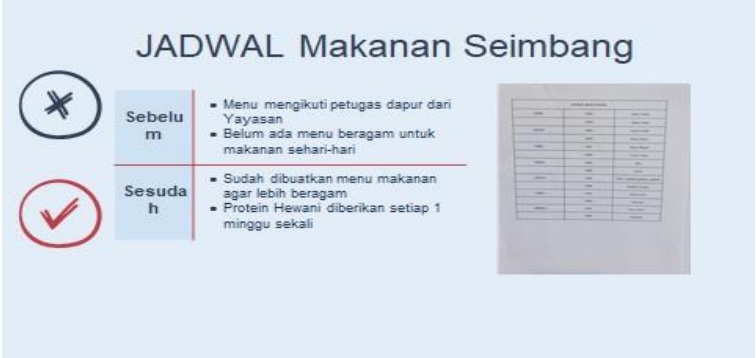






h) Upaya peningkatan kesehatan dengan media Mading





i) Upaya peningkatan kesehatan dengan hasil kegitan yang terduga dirujik ke puskesmas

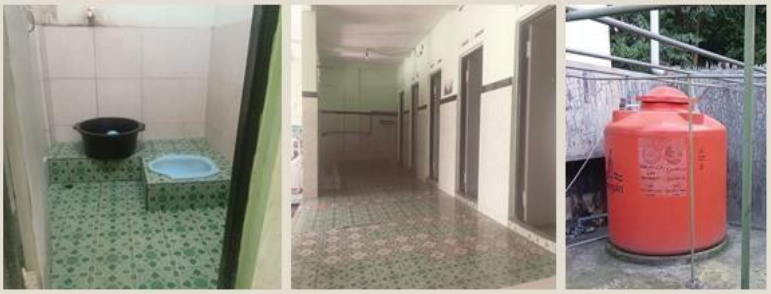


j) Upaya peningkatan kesehatan terbentunya ruang poskestren



Setelah penyelenggaraan pendampingan pondok pesantren sehat

Lingkungan Pondok Pesantren (Toilet/Kamar Mandi dan Tempat Wudhu)



Lingkungan Pondok Pesantren (Tempat Mencuci, Menjemur Pakaian dan Lingkungan Belakang Pondok)

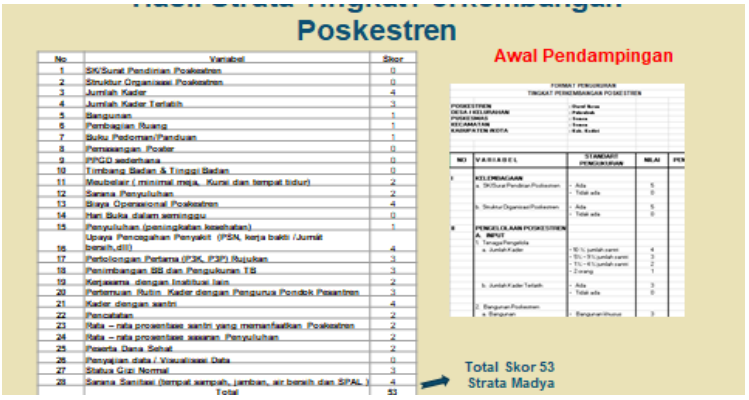



Lingkungan Pondok Pesantren (Kamar/Asrama Santri)

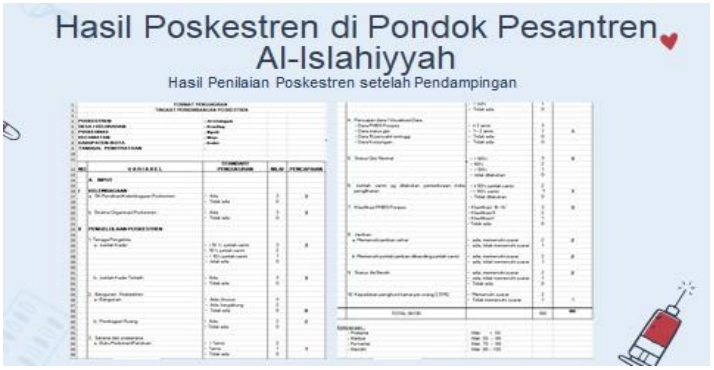

PONDOK PESANTREN TAHUN 2024
Halaman Pondok
Ruang Belajar Santri
Kamar Santri Putri
Pengelolaan Air Minum
Tempat Wudhu
Kamar Mandi & WC
Lemari Santri

Hasil strata dan Kasifikasi PHBS





No	Variabel	Skor
1	SK/Surat Pendirian Poskestren	0
2	Struktur Organisasi Poskestren	0
3	Jumlah Kader	4
4	Jumlah Kader Terlatih	3
5	Bangunan	1
6	Pembagian Ruang	1
7	Buku Pedoman/Panduan	1
8	Pemasangan Poster	0
9	PHGO sederhana	0
10	Timbang Badan & Tinggi Badan	0
11	Meubelair (minimal meja, Kursi dan tempat tidur)	2
12	Sarana Penyuluhan	2
13	Biaya Operasional Poskestren	4
14	Hari Buka dalam seminggu	0
15	Penyuluhan (peningkatan kesehatan)	1
16	Upaya Pencegahan Penyakit (PSN, kerja bakti / Jumat bersih, dll)	4
17	Pertolongan Pertama (P3K, P3P) Rujukan	3
18	Penimbangan BB dan Pengukuran TB	3
19	Kerjasama dengan Institusi lain	2
20	Pertemuan Rutin Kader dengan Pengurus Pondok Pesantren	3
21	Kader dengan santri	4
22	Pencatatan	2
23	Rata – rata prosentase santri yang memanfaatkan Poskestren	2
24	Rata – rata prosentase sasaran Penyuluhan	2
25	Peserta Dana Sehat	2
26	Penyajian data / Visualisasi Data	0
27	Status Gizi Normal	3
28	Sarana Sanitasi (tempat sampah, jamban, air bersih dan SPAL)	4
	Total	53



PHBS (Perilaku Hidup bersih dan Sehat di Pondok Pesantren Al-Islahiyyah

Hasil Penilaian PHBS sebelum Pendampingan



PHBS (Perilaku Hidup bersih dan Sehat di Pondok Pesantren Al-Islahiyyah

Hasil Penilaian PHBS setelah Pendampingan



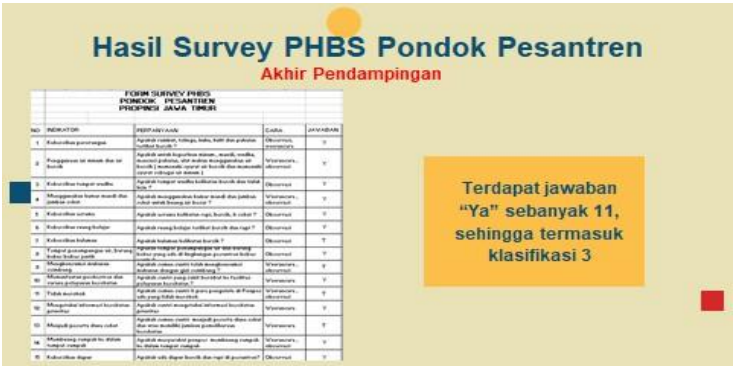
Poskestren

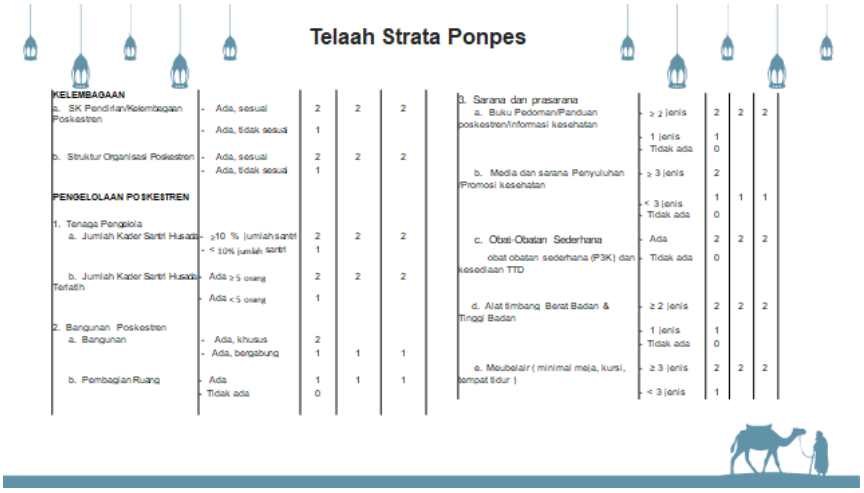
Akhir Pendampingan

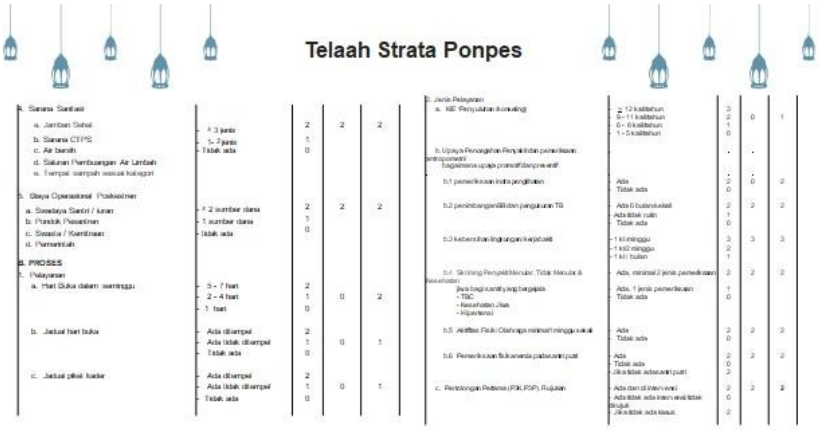
No	Variabel	Skor
1	SK/Surat Pendirian Poskestren	5
2	Struktur Organisasi Poskestren	5
3	Jumlah Kader	4
4	Jumlah Kader Terlatih	3
5	Bangunan	1
6	Pembagian Ruang	1
7	Buku Pedoman/Panduan	2
8	Pemasangan Poster	3
9	PPGD sederhana	2
10	Timbang Badan & Tinggi Badan	2
11	Meubelair (minimal meja, Kursi dan tempat tidur)	2
12	Sarana Penyuluhan	2
13	Biaya Operasional Poskestren	4
14	Hari Buka dalam seminggu	0
15	Penyuluhan (peningkatan kesehatan)	1
16	Upaya Pencegahan Penyakit (PSN, kerja bakti / Jumat bersih,dll)	4
17	Pertolongan Pertama (P3K, P3P) Rujukan	3
18	Penimbangan BB dan Pengukuran TB	3
19	Kerjasama dengan Institusi lain.	2
20	Pertemuan Rutin Kader dengan Pengurus Pondok Pesantren	3
21	Kader dengan santri	4
22	Pencatatan	2
23	Rata – rata prosentase santri yang memanfaatkan Poskestren	2
24	Rata – rata prosentase sasaran Penyuluhan	2
25	Peserta Dana Sehat	2
26	Penyajian data / Visualisasi Data	0
27	Status Gizi Normal	3
28	Sarana Sanitasi (tempat sampah, jamban, air bersih dan SPAL)	4
	Total	71



Total Skor 71
Strata Purnama


Hasil Survey PHBS Pondok Pesantren
Akhir Pendampingan
FORM SURVEY PHBS
PONDOK PESANTREN
PROPINSI JAWA TIMUR
Terdapat jawaban "Ya" sebanyak 11, sehingga termasuk klasifikasi 3


Telaah Strata Ponpes
KELEMBAGAAN
a. SK Pendirian/Kelembagaan Poskestren
- Ada, sesuai 2 2 2
- Ada, tidak sesuai 1
b. Struktur Organisasi Poskestren
- Ada, sesuai 2 2 2
- Ada, tidak sesuai 1
PENGELOLAAN POSKESTREN
1. Tenaga Pengelola
a. Jumlah Kader Santri Husada
- ≥10 % jumlah santri 2 2 2
- < 10% jumlah santri 1
b. Jumlah Kader Santri Husada Terlatih
- Ada ≥ 5 orang 2 2 2
- Ada < 5 orang 1
2. Bangunan Poskestren
a. Bangunan
- Ada, khusus 2
- Ada, bergabung 1 1 1
b. Pembagian Ruang
- Ada 1 1 1
- Tidak ada 0
3. Sarana dan prasarana
a. Buku Pedoman/Panduan poskestren/informasi kesehatan
- ≥ 2 jenis 2 2 2
- 1 jenis 1
- Tidak ada 0
b. Media dan sarana Penyuluhan Promosi kesehatan
- ≥ 3 jenis 2
- < 3 jenis 1 1 1
- Tidak ada 0
c. Obat-Obatan Sederhana
obat obatan sederhana (P3K) dan kesediaan TTD
- Ada 2 2 2
- Tidak ada 0
d. Alat timbang Berat Badan & Tinggi Badan
- ≥ 2 jenis 2 2 2
- 1 jenis 1
- Tidak ada 0
e. Meubelair (minimal meja, kursi, tempat tidur)
- ≥ 3 jenis 2 2 2
- < 3 jenis 1



Telaah Strata Ponpes

A. Sarana Sanitasi				
a. Jamban Sehat	> 3 jenis	2	2	2
b. Sarana CTPS	1- 2jenis	1		
c. Air bersih	Tidak ada	0		
d. Saluran Pembuangan Air Limbah				
e. Tempat sampah sesuai kategori				
B. Biaya Operasional Poskestren				
a. Swadaya Santri / kiyai	> 2 sumber dana	2	2	2
b. Pondok Pesantren	1 sumber dana	1		
c. Swasta / Kemitraan	tidak ada	0		
d. Pemerintah				
B. PROSES				
1. Pelayanan				
a. Hari Buka dalam seminggu	5 - 7 hari	2		
	2 - 4 hari	1	0	2
	1 hari	0		
b. Jadual hari buka	Ada dilempel	2		
	Ada tidak dilempel	1	0	1
	Tidak ada	0		
c. Jadual piket kader	Ada dilempel	2		
	Ada tidak dilempel	1	0	1
	Tidak ada	0		

2. Jenis Pelayanan				
a. KIE Penyuluhan Konseling	≥ 12 kali/tahun	3		
	5 - 11 kali/tahun	2	0	1
	0 - 4 kali/tahun	1		
	1 - 5 kali/tahun	0		
b. Upaya Pencegahan Penyakit dan pemeliharaan komponen		.	.	
bagaimana upaya promotif dan preventif		.	.	
b.1 pemeriksaan Hb/ pengkihatan	Ada	2	0	2
	Tidak ada	0		
b.2 penimbangan BB dan pengukuran TB	Ada 6 bulan sekali	2	2	2
	Ada tidak rutin	1		
	Tidak ada	0		
b.3 kebersihan lingkungan kejadusi	1 kl minggu	3	3	3
	1 kl/2 minggu	2		
	1 kl/ bulan	1		
b.4. Skrining Penyakit Menular, Tidak Menular & Kesehatan	Ada, minimal 2 jenis pemeriksaan	2	2	2
jika bagi santri yang bergejala - TBC - Kesehatan Jiwa - Kipertensi	Ada, 1 jenis pemeriksaan	1		
	Tidak ada	0		
b.5. Aktifitas Fisik Olahraga minimal minggu sekali	Ada	2	2	2
	Tidak ada	0		
b.6. Pemeriksaan fisik warna pada santi putri	Ada	2	2	2
	Tidak ada	0		
	Jika tidak adasantri putri	2		
c. Pemdongan Pasiena (PIK,PSP), Rujukan	Ada dan di intervensi	2	2	2
	Ada tidak ada intervensi tidak Rujuk	0		
	Jika tidak ada kasus	2		

INDIKATOR PHBS
PONDOK PESANTREN
PROPINSI JAWA TIMUR

Pesantren :

FORMULIR SURVEY PHBS PONDOK PESANTREN

PONDOK PESANTREN : **SALMAN AL FARIZI**
TANGGAL SURVEY : **27 MEI 2024**

NO	INDIKATOR	PERTANYAAN	CARA	JAWABAN (Y / T)
1	2	3	4	5
1	Meriksa Kebersihan perorangan	Apakah rambut, telinga, kuku, kulit dan pakaian terlihat bersih ?	Observasi, wawancara	Y
2	Menggunakan air bersih	Apakah untuk keperluan minum, mandi, wudhu, mencuci pakaian, alat makan menggunakan air bersih (memenuhi syarat air bersih dan memenuhi syarat sebagai air minum)	Wawancara , observasi	Y
3	Menggunakan kamar mandi dan jamban sehat	Apakah menggunakan kamar mandi dan jamban sehat untuk buang air besar ?	Wawancara , observasi	Y
4	Melakukan Aktivitas Fisik secara rutin	Apakah masyarakat pondok pesantren melakukan aktivitas fisik ?	Observasi	Y
5	Mencuci Tangan Pakai Sabun & air mengalir	Apakah masyarakat pondok pesantren membiasakan mencuci tangan pakai sabun?	Observasi	Y
6	Membersihkan Tempat penampungan air, barang bekas bebas jentik	Apakah tempat penampungan air dan barang bekas yang ada di lingkungan pesantren bebas jentik ?	Observasi	Y
7	Mengkonsumsi makanan seimbang	Apakah semua santri telah mengkonsumsi makanan dengan gizi seimbang ?	Wawancara , observasi	Y
8	Memanfaatan poskestren dan sarana pelayanan kesehatan	Apakah santri yang sakit berobat ke fasilitas pelayanan kesehatan ?	Wawancara	Y
9	Tidak merokok	Apakah semua santri & para pengelola di Ponpes ada yang tidak merokok	Wawancara , observasi	Y
10	Mengetahui informasi kesehatan prioritas	Apakah santri mengetahui informasi kesehatan prioritas	Wawancara	Y
11	Menjadi peserta dana sehat	Apakah semua santri menjadi peserta dana sehat dan atau memiliki jaminan pemeliharaan kesehatan	Wawancara	Y
12	Membuang sampah ke dalam tempat sampah	Apakah masyarakat ponpes membuang sampah ke dalam tempat sampah	Wawancara , observasi	Y
13	Menimbang Berat Badan dan Mengukur Tinggi Badan setiap 6 bulan	Apakah santri menimbang berat badan dan mengukur tinggi badan setiap 6 bulan?	Observasi	Y
				13

INDIKATOR HASIL
Terpenuhi 1 - 4 indikator : klasifikasi I
Terpenuhi 5 - 7 indikator : klasifikasi II
Terpenuhi 8 - 10 indikator : klasifikasi III
Terpenuhi 11 -13 indikator : klasifikasi IV

Pelaksana

Hasil survey masuk klasifikasi IV dengan total jawaban "ya" sejumlah 13.

4) Evaluasi kegiatan Pendampingan Poskestren sehat

Pelaksanaan Evaluasi Pendampingan Poskestren bagi pendamping poskestren dan kader santri husada Dilaksanakan pada tanggal 25 Nopember 2024 di ruang pertemuan Daha dinas kesehatan Kab Kediri.

Yang dihadiri kedua Pondok pesantren yang terdiri dari Pengasuh Ponpes, Pengelola kesehatan Pondok pesantren Kader Santri Husada, Pendamping Ormas, , Tenaga Kesehatan Desa /Kel, Puskesmas, Organisasi masyarakat

Materi : Evaluasi Pendampingan Poskestren bagi pendamping, paparan dari 2 (dua) pondok pesantren, setelah dilaksanakan pendampingan, Rencana tindak lanjut setelah Pendampingan Poskestren.

Kegiatan pendampingan penyelenggafaan poskestren sehat









a. Hasil Pelaksanaan Pendampingan

Kondisi Sebelum Dan Sesudah Pendampingan

Hasil kegiatan mewujudkan Peningkatan PHBS

NO	PUSKESMAS	NAMA PONPES	STRATA		KALASIFIKASI	
			SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH
1	Semen	Pondok Darul Ihsan	Madya	purnama	III	IV
2	Adan – Adan	Pondok Salman Al Farizi	Madya	purnama	III	IV
3	Ngadi	Pondok Al Islahiyah	Madya	purnama	III	IV

Hasil penilaian Pre dan Post Test

NO	PUSKESMAS	NAMA SANTRI PONPES	JUMLAH		NILAI
			LAKI	PEREM-PUAN	PRE
1	Semen	Pondok Darul Ihsan	39	35	66
2	Adan – Adan	Pondok Salman Al Farizi	0	92	86
3	Ngadi	Pondok Al Islahiyah	412	401	72

Hasil kegiatan IKL dan skrening TB

NO	PUSKESMAS	NAMA PONPES	IKL		Skrening TB		
			sesudah	sebelum	Jlm Santri yg diskrening	Jumlah santri yang terduga	Jlm santri yang positip
1	Semen	Pondok Darul Ihsan	MS	MS	92	0	0
2	Adan – Adan	Pondok Salman Al Farizi	MS	MS	43	0	0
3	Ngadi	Pondok Al Islahiyah	MS	MS	380	18	1

Hasil Skrening Jiwa

NO	PUSKESMAS	NAMA PONPES	JUMLAH SANTRI		Skrening kesehatan Jiwa	
			LAKI	PEREMPUAN	Jlm santri yang diskrining	Jlm santri yang berisiko
1	Semen	Pondok Darul Ihsan	39	35	43	0
2	Adan – Adan	Pondok Salman Al Farizi	0	92	30	0
3	Ngadi	Pondok Al Islahiyah	412	401	180	0

b. Permasalahan

Permasalahan yang terjadi pada ke tiga Pondok Pesantren antara lain:

1) Permaslahan yang ada :

No	Permasalahan	RTL
1	Dapur kurang bersih	Dilakukan pembersihan
2	Penghuni kamar terlalu padat	Sementara tidur di masjid
3	Sebagian besar santri tidak memiliki dana sehat JPKM	Masih dilakukan koordinasi dengan wali murid santri dikarenakan mayoritas santri berasal dari luar wilayah
4	Belum terdapat kader terlatih dan belum terdapat kegiatan rutin	Akan dilakukan pelatihan selama 2 hari bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri
5	Belum terdapat kegiatan rutin	Dilaksanakan jum'at bersih, senam dan olahraga. Penyuluhan setelah santri mendapatkan pelatihan

2) Intervensi Yang Sudah Dilakukan :

- Mengadakan Pelatihan kader/ santri husada dari masing masing pondok pesantren 30 (tiga puluh) orang
- Melakukan Screening gizi dengan melakukan pengukuran Tinggi Badan dan menimbang Berat badan dan pemberian KIE TB
- Melaksanakan aksi bergizi dengan melakukan Pemeriksaan kadar Hb dan minum Tabelt tambah darah nersama
- Pemeriksaan kesehatan indera, gigi, anthropometri, tekanan darah, kulit/scabies
- Pemeriksaan laborat sarana air bersih dengan hasil negatif
- Pelatihan PPGD / basic live support
- KIE Kesehatan prioritas (HIV-AIDS, TB, Scabies, Napza, PHBS, Kesehatan keluarga dan gizi, Kesehatan lingkungan)
- Pendampingan/monitoring konsumsi Tabelt Tambah Darah
- Melakukan Pelaporan dan pencatatan Poskestren

c. Hasil Akhir Pendampingan

Pondok Pesantren Nurul Azizah

1) Santri melakukan JUMIBAR (jumat minum TTD bareng)
2) Santri Husada melakukan Penyuluhan Kesehatan
3) Pemberantasan sarang nyamuk setiap minggu
4) Melaksanakan dan Pemantauan PHBS dan CTPS di lingkungan pondok Pesantren
5) Pemilahan sampah yang seminggu sekali di angkut oleh pihak swasta
6) Olah raga/ Aktifitas Fisik yang santri putra setiap hari jumat dan minggi dan yang santri putri setiap hari jumat
7) Kebersihan lingkungan/ kerja bakti setiap hari jumat
8) Untuk pemenuhan gizi dengan membuat jadwal .
9) Pencatatan dan pelaporan kegiatan Poskestren (Visualisasi data IMT, Penyakit terbanya, Kunjungan, dll)
10) Ada Peningkatan tingkat kemandirian Poskestren dari Madya menjadi Purnama
11) Ada Peningkatan klasifikasi PHBS dari III menjadi IV
12) Ada Peningkatan capaian konsumsi Tabelt tambah darah dari semula tidak rutin menjadi rutin dengan JUMIBAR (Jumat minum TTD Bareng) dan apabila santri putri pulang tetep diingatkan dan diberi TTD
13) Ada kebijakan terkait minum Tabelt tambah darah bagi santri putri
14) Ada kebijakan bagi yang merokok digundul dan akan dimandikan berramai ramai
15) Ada kebijakan bagi santri putri mengunakan softek buatan sendirit idak buatan pabrik
16) Pada waktu pendaftaran santri tidak boleh ada yang berpenyakit
17) Kebijakan pondok pesantren yang berwawasan dana sehat dengan sukarela setiap santri membayar Rp 2000 tiap bulan dan ada infak dari.Pengajian yang diadakan. Dana sehat digunakan untuk membeli penyediaan obat di ruang poskestren, biaya sakit yang ke puskesmas ataupun ke dokter swasta, apabila sakit sampai di rujuk ke rumah sakit atau nginap pihak pondok pesantren akan meanggil orang tua dari santri
18) Kebijakan pondok pesantren yang berwawasan kesehatan yang dihasilkan adanya piket di ruang poskestren, jaga kamar, kebersihan kamar, kebersihan kamar mandi, jemuran , kebersihan ruang makan, kerja bakti setiap minggu.
19) Terbentukya posyandu Remaja di lingkungan pondok pesantren

d. Kesimpulan

1) Bantuan keuangan khusus dari Propinsi Jawa Timur sangat bermanfaat untuk meningkatkan kualitas dari Pos Kesehatan pesantren dan Klasifikasi PHBS, Srata PHBS, capaian konsumsi TTD peningkatan IKL, skrining TB dan jiwa serta terbentuk kebijakan berwawasan Kesehatan di Pondok Pesantren Kabupaten Kediri
2) Dari ketiga Pondok Pesantren yang didampingi semuanya ada peningkatan tingkat kemandirian Pos Kesehatan dan klasifikasi PHBS serta ada peningkatan capaian konsumsi TTD bagi santri putrid an TTD diberikan disekolah formal
3) Terjalinnya Kerjasama yang baik dengan organisasi keagamaan (NU) dan LDII dalam pembinaan Poskestren sehat

e. Saran

Pelaksanaan Kegiatan Dana Bantuan Keuangan Khusus diharapkan bisa berjalan di awal Tahun untuk memaksimalkan kegiatan pendampingan Pos Kesehatan Pesantren dan diharapkan setelah pendampingan berakhir tetep ada kegiatan yang rutin tetep dilaksanakan dan ada inovasi

BAB V
P E N U T U P

Substansi pokok yang harus ada dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kediri adalah hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri selama satu tahun anggaran 2024.

Dari paparan pada bab-bab di atas dapat dipahami bahwa ada dua hal pokok yang sudah dijelaskan. *Pertama,* Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri telah memaparkan dan menjelaskan hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri. *Kedua,* Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri telah memaparkan dan menjelaskan hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan.

Tidak lupa kami sampaikan terima kasih kepada seluruh perangkat daerah Kabupaten Kediri yang sudah bekerja sama dalam penyusunan LKPJ Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri ini. Dan kepada DPRD Kabupaten Kediri mohon berkenan menerima Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Kediri Tahun 2024 ini.